



Katalog BPS : 1202027

LAPORAN

KEGIATAN BPS TAHUN 2004-2009
DAN
RENCANA KEGIATAN BPS TAHUN 2010



BADAN PUSAT STATISTIK

**LAPORAN
KEGIATAN BPS
TAHUN 2004-2009 DAN
RENCANA KEGIATAN
BPS TAHUN 2010**

AKTIVITAS BADAN PUSAT STATISTIK 2008

ISSN : 1907.8862
No. Publikasi : 02130.0903
Katalog BPS : 1202027
Ukuran Buku : 17.5 cm x 24 cm
Jumlah halaman : xxii + 293 halaman

Naskah : Biro Bina Program

Gambar Kulit : Biro Bina Program

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

Dicetak Oleh : Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

KATA PENGANTAR

Laporan Kegiatan BPS Tahun 2004-2009 dan Rencana Kegiatan BPS Tahun 2010 merupakan laporan yang merangkum semua kegiatan statistik dan aktivitas yang dilaksanakan BPS dari tahun 2004 sampai dengan 2009 serta rencana kegiatan BPS Tahun 2010. Laporan ini mencakup semua pelaksanaan program, kebijakan dan realisasi APBN 2004-2009 dan RAPBN 2010.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan hingga penerbitan laporan ini disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun laporan ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan publikasi ini sangat mungkin terjadi. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan laporan serupa di masa mendatang.

Jakarta, Agustus 2009
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Rusman Heriawan

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix

I. PELAKSANAAN PROGRAM, KEBIJAKAN DAN REALISASI APBN 2004 - 2009

A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	3
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Kedudukan, Tugas dan Wewenang	3
4. Program Pembangunan Statistik	5
5. Susunan Organisasi BPS	6
B. SEKRETARIAT	
1. SUMBER DAYA MANUSIA	
1.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia	17
1.2. Jabatan Fungsional	20
1.3. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	22
1.4. Pembinaan Teknis Administrasi dan Penyempurnaan Pemberkasan CPNS Tenaga Honorer th. 2007	22
1.5. Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya	22
1.6. Seminar dan Lokakarya	23
1.7. Kegiatan Olahraga, Pemeriksaan Kesehatan, Seni dan Keagamaan	23
2. SARANA DAN PRASARANA	
2.1. Sarana dan Prasarana Fisik BPS	29
2.2. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	30
2.3. Daya Serap	31
3. PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI	
3.1. Network Planning Perencanaan BPS 2009	27

3.2. Penyusunan Rencana Kerja BPS	37
3.3. Penyusunan Anggaran BPS	41
3.4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BPS	41
3.5. Penyusunan SBK, SHBJ dan HSPK	42
3.6. Penyusunan Laporan Aktivitas BPS	42
4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
4.1. Program Pendidikan	45
4.2. Diklat Fungsional	47
4.3. Diklat Statistik Dasar	49
4.4. Diklat Komputer dan Multimedia	51
4.5. Diklat Keuangan dan Kepegawaian	51
4.6. Diklat Kompetensi Kepala BPS Kabupaten/Kota	54
4.7. Diklat TOT KSK Pengolahan Data Statistik Dasar	54
4.8. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	55
5. KERJASAMA STATISTIK	
5.1 Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Statistik	59
5.2 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	59
5.3 Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Understanding)	61
5.4 Studi Banding ke Dalam Negeri dan Luar Negeri	63
5.5 Sosialisasi Kegiatan BPS Tahun 2008	64
C. BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK	
1. METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI	
1.1. Penyempurnaan Klasifikasi Komoditi dan Pembakuan	69
1.2. Studi Pembentukan Unit Sampling	69
1.3. Post Enumeration Survey (PES) Sensus Ekonomi	70
1.4. Pengelolaan MFD dan SIG-S MFD (Master File Desa)	70
1.5. Penyusunan SIG	71
1.6. Updating Direktori Perusahaan (Hasil SE 2006) dan Manual Aplikasi Program	71
1.7. Sampling Error	71
1.8. Penyempurnaan dan Pengembangan Kerangka Contoh Induk	72
1.9. Penyusunan dan Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi dan Ukuran Statistik	73
1.10. Pelatihan Small Area Statistics JICA Tahap I dan II	73
1.11. Pemetaan Wilayah Tahap I	74
1.12. Penyiapan Peta Dasar Wilayah Kerja Statistik	74
1.13. TOT Pemetaan	75

2. DISEMINASI STATISTIK

2.1. Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus	79
2.2. Peningkatan Pelayanan dan Standar Kualitas Publikasi	81
2.3. Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan, Standarisasi Pelayanan dan Sosialisasi Informasi Statistik	82
2.4. Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan BPS	83

3. SISTEM INFORMASI STATISTIK

3.1. Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem Pengolahan Data Terpadu	87
3.2. Pembahasan dan Evaluasi Migrasi Platform E-mail dari Lotus Notes ke Sistem E-mail Berbasis Open Source (QMail-LDAP)	87
3.3. Pembahasan dan Evaluasi Pengembangan Direktori Server Berbasis Open Source (OpenLDAP)	88
3.4. Pembahasan dan Evaluasi Pengembangan Sistem Firewall Berbasis Open Source	88
3.5. Pembahasan dan Evaluasi Pengembangan Sistem Update Security dan Anti Virus	88
3.6. Perawatan Perangkat Jaringan Komunikasi Data dan Perlengkapannya di Badan Pusat Statistik	88
3.7. Pembahasan dan Evaluasi Pengembangan Sistem Perawatan Perangkat Jaringan Komunikasi Data dan Perlengkapannya	89
3.8. Pembahasan dan Evaluasi Sistem Portal Komunikasi Intranet Badan Pusat Statistik	89
3.9. Pembahasan Penyusunan Program Jabatan Fungsional Komputer	89
3.10. Pembahasan Rencana Strategis Bidang Teknologi Informasi	90
3.11. Perawatan AC Ruang Server	90
3.12. Langganan Bandwith ke IpTekNet (512 KBps)	90
3.13. Langganan Bandwith ke Wasantara (64 dan 512 KBps)	91
3.14. Pembinaan Pengembangan Teknologi Informasi	91
3.15. Uji Coba Sistem Jaringan	91
3.16. Sosialisasi dan Supervisi	92
3.17. Pengembangan Basis Data	92
3.18. Pengadaan Peralatan dan Rekayasa Informatika	92
3.19. Pengembangan Layanan Jaringan Komunikasi Data dan Akses Online	93
3.20. Pengembangan Sistem Basis Data	95
3.21. Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem Aplikasi Berbasis Web ...	97

3.22. Pengembangan Sistem Informasi, Pengadaan Peralatan, Perawatan dan Rekayasa Informatika	98
3.23. Pelatihan Teknologi Informasi (TI)	98

D. BIDANG STATISTIK SOSIAL

1. STATISTIK KEPENDUDUKAN

1.1. Survei Upah	93
1.2. Survei Struktur Upah	93
1.3. Sakernas Tahunan	94
1.4. Sakernas Semesteran	94
1.5. Sakernas Triwulanan	95
1.6. Uji Coba SUPAS	96
1.7. Studi Statistik TKI dan TKA	96
1.8. Penyusunan Parameter Demografi Hasil SUPAS	97
1.9. Uji Coba Survei (Sakernas) Triwulanan	97
1.10. Proyeksi Penduduk Hasil SUPAS	97
1.11. Proyeksi Penduduk Menurut Wilayah	98
1.12. Persiapan Sensus Penduduk 2010	99
1.13. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)	99
1.14. Survei Upah Buruh (SUB)	99
1.15. Survei Struktur Upah (SSU)	100
1.16. Statistik Pengangguran	100
1.17. Penghitungan Penduduk dan Rumah Tangga untuk Penimbang Survei Kependudukan	101
1.18. Uji Coba Organisasi Lapangan Sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2010	101
1.19. Statistik Ketenagakerjaan Usia Muda dan Pekerja Anak	102
1.20. Sakernas Estimasi Kabupaten/Kota dan Provinsi	102
1.21. Penghitungan Jumlah Penduduk Pertengahan	103

2. STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.1. Survei Evaluasi Program Kemiskinan (SEPK)	107
2.2. Surveilans Terpadu HIV-Perilaku (STHP)	107
2.3. Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan	108
2.4. Statistik Perumahan dan Pemukiman	109
2.5. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	109
2.6. Susenas Modul Konsumsi dan Sakernas	110
2.7. Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP)	110
2.8. Analisis Deskriptif PMKS	111
2.9. Buklet PMKS	111

2.10. Susenas Estimasi Kabupaten/Kota dan Provinsi	112
2.11. Statistik Penduduk Lanjut Usia dan Statistik Pemuda	113
2.12. Profil Kesehatan Ibu dan Anak	113
2.13. Survei Pendidikan di NTT	113
3. STATISTIK KETAHANAN SOSIAL	
3.1. Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan	117
3.2. Penyusunan Indikator dan Indeks Kerawanan Sosial	117
3.3. Penyusunan Statistik Kriminal	118
3.4. Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP)	119
3.5. Studi Kerentanan terhadap Bencana Tsunami	119
3.6. Pembinaan Teknis Statistik Ketahanan Sosial	120
3.7. Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup	120
3.8. Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan	121
3.9. Penyusunan Laporan Daerah Hasil Survei Modal Sosial	121
3.10. <i>Streamlining Data Flows From Regions To The Center</i> <i>Under Decentralization Project (Grant-Tf-057574)</i>	122
3.11. Studi Perempuan sebagai Pelaku Kriminalitas	122
3.12. Pendataan Potensi Desa	122
3.13. Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS08)	123
E. BIDANG STATISTIK PRODUKSI	
1. STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
1.1. Studi Metode Rumpun Counting	129
1.2. Survei Konversi Gabah-Beras	129
1.3. Pengumpulan Data Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan/Ubinan .	130
1.4. Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi	130
1.5. Pengumpulan Data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH), Produktivitas dan Perusahaan Hortikultura	131
1.6. Survei Perusahaan Perkebunan dan Karet Remah	131
1.7. Kuesioner Pendataan Usaha Tani 2009 (PUT09)	133
1.8. Kuesioner Pendataan Lengkap Usaha Tani 2009 (PLUT09)	134
2. PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	
2.1. Statistik Peternakan	137
2.2. Statistik Perikanan	138
2.3. Statistik Kehutanan	142

3. STATISTIK INDUSTRI

3.1. Sensus Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Sektor Industri Pengolahan Besar dan Menengah di Indonesia	141
3.2. Updating Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang	141
3.3. Survei Penggalian	141
3.4. Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan	142
3.5. Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan	142
3.6. Survei Pertambangan	143
3.7. Survei Konstruksi Tahunan	144
3.8. Survei Konstruksi Triwulanan	145

F. BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA

1. STATISTIK DISTRIBUSI

1.1. Statistik Haji/Umroh	151
1.2. Kompilasi Data Statistik Ekspor	151
1.3. Kompilasi Data Statistik Impor	152
1.4. Kompilasi Data Statistik Perdagangan dan Jasa	152
1.5. Survei Transportasi	153
1.6. Survei Usaha Terintegrasi (SUSI)	154

2. STATISTIK HARGA

2.1. Survei Penggantian Tahun Dasar dan Inflasi Pedesaan	157
2.2. Survei Statistik Harga Konsumen, Tarif Kontrak, Upah Pembantu Rumah Tangga, Volume Penjualan Beras Eceran, Inflasi Inti, dan Survei Biaya Hidup	158
2.3. Diagram Timbang 2007	159
2.4. Statistik Harga Perdagangan Besar	160
2.5. Survei Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan	160
2.6. Survei Statistik Harga Konsumen dan Volume Penjualan Beras Eceran ..	162
2.7. Pelatihan Survei Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan ...	163
2.8. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008	163

3. STATISTIK KEUANGAN, TI DAN PARIWISATA

3.1. Pilot Studi Usaha Koperasi	167
3.2. Survei Statistik Lembaga Keuangan dan Monitoring Kurs Valuta Asing	167
3.3. Survei Statistik Keuangan Daerah, Keuangan BUMN dan BUMD	168
3.4. Pilot Studi Statistik Keuangan Daerah Tingkat Desa	169
3.5. Survei Tingkat Penghunian Kamar Hotel	169
3.6. Survei Statistik Kunjungan Tamu Asing	170
3.7. Survei Statistik Restoran dan Biro Perjalanan Wisata	170

3.8. Survei Angkutan Darat, Laut, Udara dan Komunikasi	171
--	-----

G. BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK

1. NERACA PRODUKSI

1.1. Destinasi Impor	177
1.2. PDB Triwulanan, Aplikasi SNA '93 dan Analisis Tabel I-O	177
1.3. Penyusunan Neraca Regional	178
1.4. SPPB 2008, Sisnerling dan Penyusutan Sektor Barang	179
1.5. Penyusunan Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ) 2008	180
1.6. Survei Penyusunan Indikator Khusus (PDB Triwulanan)/SPIK.....	181
1.7. Penyusunan PDB Sektoral Tahun Dasar Berjalan	181
1.8. Penyusunan Tabel Input-Output Indonesia 2005	181

2. NERACA PENGELUARAN

2.1. Sistem Neraca Lingkungan (Sisnerling) dan Survei Penyediaan dan Penggunaan Barang (SPPB).....	185
2.2. Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha Swasta	185
2.3. Penyusunan Neraca Arus Dana	186
2.4. Penyusunan PDB Triwulanan menurut Sektor dan Penggunaan	187
2.5. Penyusunan Konsolidasi Neraca Institusi (KNI) dan Penyusunan Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI)	187
2.6. Penyusunan Neraca Rumahtangga dan Lembaga Non Profit.....	188
2.7. Penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia	188
2.8. Studi Penyusunan Stok Kapital	189
2.9. Studi Rekonsiliasi Neraca Ekspor Impor Jasa Penunjang PDB	189

3. ANALISIS dan PENGEMBANGAN STATISTIK

3.1. Studi Penentuan Paket Komoditi Kebutuhan Dasar Non Makanan	193
3.2. Studi Menentukan Tingkat Konsistensi Data Konsumsi Rumah Tangga .	193
3.3. Statistik Indonesia	194
3.4. Analisis Indikator Pendahulu	194
3.5. Analisis Produktivitas Industri Padat Tenaga Kerja	194
3.6. Analisis Pengangguran Terdidik	195
3.7. Studi Konsistensi Data Podes	196
3.8. Adult Equivalent (Analisis Konsumsi Rumah Tangga)	196
3.9. Kajian Komoditas Unggulan dan Kaitannya dengan Sosial Ekonomi Masyarakat	197
3.10. Studi Konsistensi Data Ketenagakerjaan dan Kemiskinan	197
3.11. Indikator Ekonomi	198

3.12. Analisis SE06 Listing	198
3.13. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan	199
3.14. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) ...	200
3.15. Kajian Profil Komoditas Unggulan Indonesia dan Indikator Sosial Ekonomi	200
3.16. Indikator Kesejahteraan Rakyat	201
3.17. Penyempurnaan dan Pembinaan Penyusunan Laporan Statistik	202
3.18. Finalisasi Hasil Sensus Ekonomi	202
3.19. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006 - 2007	203
H. INSPEKTORAT	
1. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	207
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPS Tahun 2008	207
3. Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2008	208
4. Pemeriksaan dan Pembinaan Keuangan pada BPS Provinsi (PKPT)	208
5. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2008	209
6. Review Laporan Keuangan (LK) BPS Tahun Anggaran 2008	210
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Anggaran 2008	212
II. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN ANGGARAN 2010	
A. RENCANA KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH	215
B. PROGRAM DAN KEGIATAN	221
C. SASARAN	225
D. RENCANA ANGGARAN BELANJA TAHUN 2010	229
III. KESIMPULAN	233
IV. PENUTUP	239
LAMPIRAN-LAMPIRAN	243

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Formasi Pegawai Badan Pusat Statistik Menurut Kelompok CPNS Tahun 2004 - 2009	17
Tabel 2.2. Perkembangan Pegawai Badan Pusat Statistik Tahun 2004-2008 .	18
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai BPS menurut Eselon Per Desember 2008	19
Tabel 2.4. Jumlah Pejabat Fungsional di Badan Pusat Statistik Tahun 2004-2009	20
Tabel 2.5. Jumlah Penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya menurut Jenis Penghargaan, 2003-2008	23
Tabel 2.6. Laporan Daya Serap Anggaran BPS Tahun 2004-2009 Realisasi sampai dengan Desember 2004-2009	31
Tabel 2.7. Laporan Daya Serap Anggaran BPS Tahun 2004 Realisasi sampai dengan Desember 2004	32
Tabel 2.8. Tabel Indeks Kerusakan Gedung Kantor BPS Provinsi	38
Tabel 2.9. Jumlah Pegawai BPS yang Tugas Belajar menurut Sponsor dan Jenjang Pendidikan Tahun 2008	46
Tabel 4.1. Responden Survei Statistik Kependudukan Tahun 2004-2009	94
Tabel 4.2. Jumlah Alokasi Sampel Susenas Tahun 2004-2009	112
Tabel 4.3. Jumlah Sampel Survei Pendidikan di NTT Menurut Kabupaten Tahun 2008	114
Tabel 4.4. Lokasi Uji Coba PPLS08	124
Tabel 5.1. Jumlah Kecamatan, Blok Sensus dan Ubinan Statistik Tanaman Pangan (Padi dan Palawija) Tahun 2004-2009	130
Tabel 5.2. Banyaknya Perusahaan Hortikultura dan Perkebunan Menurut Provinsi Tahun 2004-2009	132
Tabel 5.3. Jumlah Responden Survei Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2004-2009	140
Tabel 5.4. Jumlah Responden Survei Pertambangan, Energi, dan Penggalian Tahun 2004-2009	143

Tabel 5.5.	Jumlah Responden Survei Industri dan Konstruksi Tahun 2004-2009	144
Tabel 6.1.	Jumlah Responden Survei Harga Konsumen dan Volume Penjualan Beras Eceran Tahun 2004-2009	158
Tabel 6.2.	Jumlah Responden Harga Perdagangan Besar Tahun 2004-2009	161
Tabel 6.3.	Jumlah Responden Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan Tahun 2004-2009	162
Tabel 6.4.	Jumlah Responden Survei Statistik Lembaga Keuangan Tahun 2004-2009	167
Tabel 6.5.	Jumlah Responden Survei Statistik Keuangan Daerah, BUMN/BUMD Tahun 2004-2009	168
Tabel 6.6.	Jumlah Responden Survei Statistik Jasa Pariwisata Tahun 2004-2009	170
Tabel 6.7.	Jumlah Responden Survei Transportasi Tahun 2004-2009	171
Tabel 7.1.	Jumlah Responden Survei Bidang Neraca Produksi Tahun 2004-2009	179
Tabel 7.2.	Jumlah Responden Survei Bidang Neraca Pengeluaran Tahun 2004-2009	186
Tabel 7.3.	Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam Ribuan) Tahun 2004-2009	194
Tabel 7.4.	Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumsi 1) Triwulan I-2006 s.d. Triwulan III-2008 dan Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumsi Triwulan IV-2008	201
Tabel 8.	Kegiatan Prioritas Nasional dan Kegiatan Dasar dan Penunjang di Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2010	222
Tabel 9.	Rencana Kebutuhan Anggaran (54) Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2010	230

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPS (Keputusan Presiden No. 173 Tahun 2000 dan Peraturan Kepala BPS No. 001 Tahun 2001	8
Gambar 1.2. Struktur Organisasi BPS (Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPS No. 007 Tahun 2008	9
Gambar 1.3. Struktur Organisasi BPS Provinsi	10
Gambar 1.4. Struktur Organisasi BPS Provinsi DKI Jakarta	11
Gambar 1.5. Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota	12
Gambar 2.1. Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008	19
Gambar 2.2. Gerak jalan santai yang diikuti oleh seluruh pegawai BPS dan mahasiswa STIS dalam rangka Hari Statistik	24
Gambar 2.3. Peletakan batu pertama pembangunan gedung BPS Provinsi DISTA Yogyakarta oleh Kepala BPS, Dr. Rusman Heriawan	29
Gambar 2.4. Gedung BPS Provinsi DISTA Yogyakarta yang baru dibangun	30
Gambar 2.5. Gedung BPS Provinsi Sulawesi Selatan dengan indeks kerusakan 90,80. Dibangun tahun 1980, terakhir direnovasi tahun 1987 ...	39
Gambar 2.6. Gedung BPS Provinsi Bali dengan indeks kerusakan 11,16. Dibangun tahun 1995 direnovasi total tahun 2007	39
Gambar 2.7. Suasana pelaksanaan tes STIS di Provinsi Lampung	45
Gambar 2.8. Pembekalan PKL mahasiswa STIS di Aula STIS	50
Gambar 2.9. Diklat TOT KSK Pengolahan Data Statistik Dasar di Pusdiklat	55
Gambar 2.10. Studi <i>Poverty Measurement</i> yang diikuti oleh peserta dari negara-negara Asia Pasifik	60
Gambar 2.11. Pejabat dari Australian Bureau of Statistics (ABS) berada di BPS untuk mediskusikan beberapa kegiatan yang mendapat bantuan dari ABS	61
Gambar 2.12. Pertukaran Naskah Kesepahaman antara Nur Hidayat (LAPAN) dengan Sihar Lumbantobing (BPS) di Gedung Pusat Data LAPAN, 7 Mei 2008	62
Gambar 2.13. Kesepahaman antara BPS dan KPAI dalam rangka pertukaran	

data statistik anak	62
Gambar 2.14. Tamu dari Maroko, studi banding mengenai program bantuan sosial di Indonesia (PKH)	63
Gambar 2.15. Kepala BPS, Dr. Rusman Heriawan menerima kunjungan tamu GSO (General Statistic Office) Vietnam di ruang kerjanya	64
Gambar 3.1. Kerjasama World Bank dengan BPS "Workshop Revitalisasi Pengelolaan Data Sektoral di Pusat dan Daerah" di Hotel Aston Jakarta, 8 Mei 2008	80
Gambar 3.2. Salah satu bentuk penyajian informasi statistik berupa web	82
Gambar 3.3. Pengguna perpustakaan semakin mudah mencari informasi dengan adanya database dokumentasi	83
Gambar 3.4. Perawatan hardware di Direktorat Sistem Informasi Statistik, BPS	95
Gambar 3.5. Pelatihan Teknologi Informasi yang diikuti oleh peserta dari BPS Kabupaten/Kota	98
Gambar 5.1. Pembahasan persiapan pelaksanaan SPN08 di Hotel Bintang, Jakarta Pusat, 2-4 Juni 2008 oleh BPS dan Departemen Pertanian	138
Gambar 5.2. Petugas BPS sedang melakukan wawancara dengan responden di tempat pelelangan ikan	139
Gambar 5.3. Salah satu responden dalam pengumpulan data tahunan perusahaan penangkapan ikan	141
Gambar 6.1. Kepala BPS, Dr. Rusman Heriawan membuka "Workshop Finalisasi dan Tabulasi Hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06)" di Hotel Ibis Mangga Dua, 6-9 Juli 2008	152
Gambar 7.1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 1996-2008	199

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2008.....	243
Lampiran 2. Barang Inventaris Negara BPS menurut Kelompok Barang Tahun 2008	245
Lampiran 3. Jumlah Kendaraan Operasional di Lingkungan BPS Tahun 2007 dan 2008	246
Lampiran 4. Daya Serap Anggaran 054 BPS dan Daerah Tahun Anggaran 2008	247
Lampiran 5. Kerjasama Dalam Negeri yang Sudah Dilakukan oleh BPS Tahun 2008	250
Lampiran 6. Kunjungan Kemitraan (Tamu Asing) Tahun 2008	254
Lampiran 7. Pegawai BPS yang Bertugas ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2008	255
Lampiran 8. Pegawai BPS yang Tugas Belajar ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2008	263
Lampiran 9. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2008.....	265
Lampiran 10. Realisasi Kegiatan Program PSPAN-BPS (Pembangunan Gedung dan Pengadaan Tanah) Tahun 2008	266

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AJR	: Angkutan Jalan Raya
ABS	: Australian Bureau of Statistics
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BMP	: Berhenti, Meninggal, dan Pensiun
BRS	: Berita Resmi Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Negara
BUS	: Badan Usaha Swasta
BS	: Blok Sensus
COICOP	: Classification of Individual Consumption According to Purpose
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
CPC	: Central Product Classification
DAU	: Dana Alokasi Umum
DIKLATPIM	: Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan
DIPA	: Daftar Isian Pengelola Anggaran
DIPERTA	: Dinas Pertanian
EPS	: Evaluasi Pasca Sensus
FISIM	: Financial Intermediation Services Indirectly Measured
GFS	: Government Finance Statistics
GKG	: Gabah Kering Giling
GPL	: General Public License
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HPHTI	: Hak Pengusahaan Tanaman Industri
HSPK	: Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
HSU	: Harga Satuan Umum
ID	: Ikatan Dinas
IHK	: Indeks Harga Konsumen
IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
ILOR	: Incremental Labor Output Ratio
Inkesra	: Indikator Kesejahteraan Rakyat
ITB	: Indeks Tendensi Bisnis
ITK	: Indeks Tendensi Konsumen
KBPHI	: Klasifikasi Baku Hasil Produk Indonesia
KCI	: Kerangka Contoh Induk
KFP	: Klasifikasi Fungsi Pemerintah
KPB&C	: Kantor Pelayanan Bea & Cukai
LAN	: Local Area Network
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LNPRRT	: Lembaga Non Profit Rumah Tangga
MFD	: Master File Desa
NAD	: Neraca Arus Dana
NELT	: Neraca Ekonomi Lingkungan Terpadu
NPJ	: Neraca Perdagangan dan Jasa
OTDA	: Otonomi Daerah
PC	: Personal Computer
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PES	: Post Enumeration Survey
PEB	: Pemberitahuan Ekspor Barang
PIB	: Pemberitahuan Impor barang
PIPKS	: Pengembangan Informasi dan Penyempurnaan Kelembagaan Statistik
PKL	: Praktek Kerja Lapangan
PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan
PMB	: Pembentukan Modal Bruto
PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PO	: Petunjuk Operasional
PPAS	: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Statistik
PPS	: Probability Propotional to Size
Prasik	: Prasarana Fisik
P2S	: Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik.
RPH	: Rumah Pemotongan Hewan
PUMC	: Pemegang Uang Muka Cabang
SAKERNAS	: Survei Angkatan Kerja Nasional
SBH	: Survei Biaya Hidup
SIMOPEL	: Sistem Informasi Manajemen Operasi Pelabuhan
SIMTOR	: Sistem Informasi Memotor
SKJ	: Senam Kesegaran Jasmani
SKJP	: Survei Khusus Jasa Pemerintah
SKSPJ	: Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa
SKPS	: Survei Khusus Perusahaan Swasta
SKLNP	: Survei Khusus Lembaga Non Profit
SNA	: System of National Account
SNSE	: Sistem Neraca Sosial Ekonomi
SNNI	: Sistem Neraca Nasional Indonesia
SNRI	: Statistik Neraca Regional Indonesia
SNLE	: Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi
SNAI	: System of National Account Indonesia

SUSI	: Survei Usaha Terintegrasi
SUPAS	: Survei Penduduk Antar Sensus
SP	: Sensus Penduduk
SE	: Sensus Ekonomi
ST	: Sensus Pertanian
STIS	: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TB	: Tugas Belajar
TI	: Teknologi Informasi
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKA	: Tenaga Kerja Asing
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
TPK	: Tingkat Penghunian Kamar Hotel
UN	: United Nations
WB	: World Bank
WFP	: Women Fund Programme
WUS	: Wanita Usia Subur

<http://www.bps.go.id>

PENDAHULUAN



<http://www.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengemban tugas dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan statistik dengan tujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas, BPS dilengkapi perangkat lunak kelembagaan antara lain: 1) Undang-Undang Statistik Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; dan 4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Dalam menyajikan statistik dasar, BPS menyelenggarakan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan iptek yang dapat dilakukan secara berkala, terus menerus, dan atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Sebagai perwujudan pelaksanaan kegiatan statistik tersebut di atas, maka diperlukan laporan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaannya.

2. Maksud dan Tujuan

Secara umum penyusunan buku ini merupakan gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS, baik kegiatan rutin maupun kegiatan rintisan baru yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2004-2009.

3. Kedudukan, Tugas dan Wewenang BPS

BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 pasal 2, BPS mempunyai tugas

Pendahuluan

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 Perpres Nomor 86 Tahun 2007, dalam melaksanakan tugas tersebut BPS mempunyai fungsi :

1. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
4. Penetapan Sistem Statistik Nasional;
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi, BPS mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
 - b. Penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Dalam rangka mendukung tugas-tugas dan fungsi BPS, maka BPS menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi

BPS penyedia statistik berkualitas.

Misi

Dalam menunjang pembangunan nasional, BPS mengemban misi:

1. Menyediakan informasi statistik yang berkualitas; lengkap, akurat, relevan, mutakhir dan berkesinambungan;

2. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi kegiatan statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.

4. Program Pembangunan Statistik

Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 pembangunan statistik dilaksanakan melalui 3 program utama yaitu: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN), Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan (P2K2), dan Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik (P2S).

Sedangkan mulai tahun 2007, sesuai Perpres Nomor 86 Tahun 2007 Pasal 38, kegiatan pembangunan BPS dilaksanakan melalui 4 program utama yaitu:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja, baik BPS maupun BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota secara bertahap untuk mendukung kelancaran administrasi serta operasional.

2. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik (PKyB)

Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan pemerintahan di bidang penyediaan data statistik antara lain pengelolaan gaji, honorarium, tunjangan, serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

3. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik (P2S)

Arah kebijakan program penyempurnaan dan pengembangan statistik adalah untuk:

- a. Menjamin kesinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu di bidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan dan lingkungan melalui berbagai sensus, survei, studi

- dan kompilasi produk administrasi untuk mendukung semua bidang pembangunan, baik nasional maupun regional;
- b. Mengembangkan sistem informasi statistik, sistem informasi geografis statistik, diseminasi statistik dan sistem informasi manajemen guna mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan data statistik bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam negeri maupun luar negeri.
4. Program Pendidikan Kedinasan (PK)

Pada Tahun 2008, BPS mendapat tambahan program baru yaitu program pendidikan kedinasan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia. Sasaran Program Pendidikan Kedinasan ini adalah: tersedianya sarana dan prasarana pendukung pendidikan kedinasan, sehingga diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional melalui Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).

5. Susunan Organisasi BPS

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPS mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Organisasi BPS berdasarkan Keppres di atas terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
4. Deputi Bidang Statistik Sosial
5. Deputi Bidang Statistik Ekonomi
6. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
8. Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2007, susunan organisasi BPS mengalami perubahan dengan bertambahnya 2 (dua) eselon I. Organisasi BPS berdasarkan Pasal 4 Perpres tersebut di atas terdiri dari:

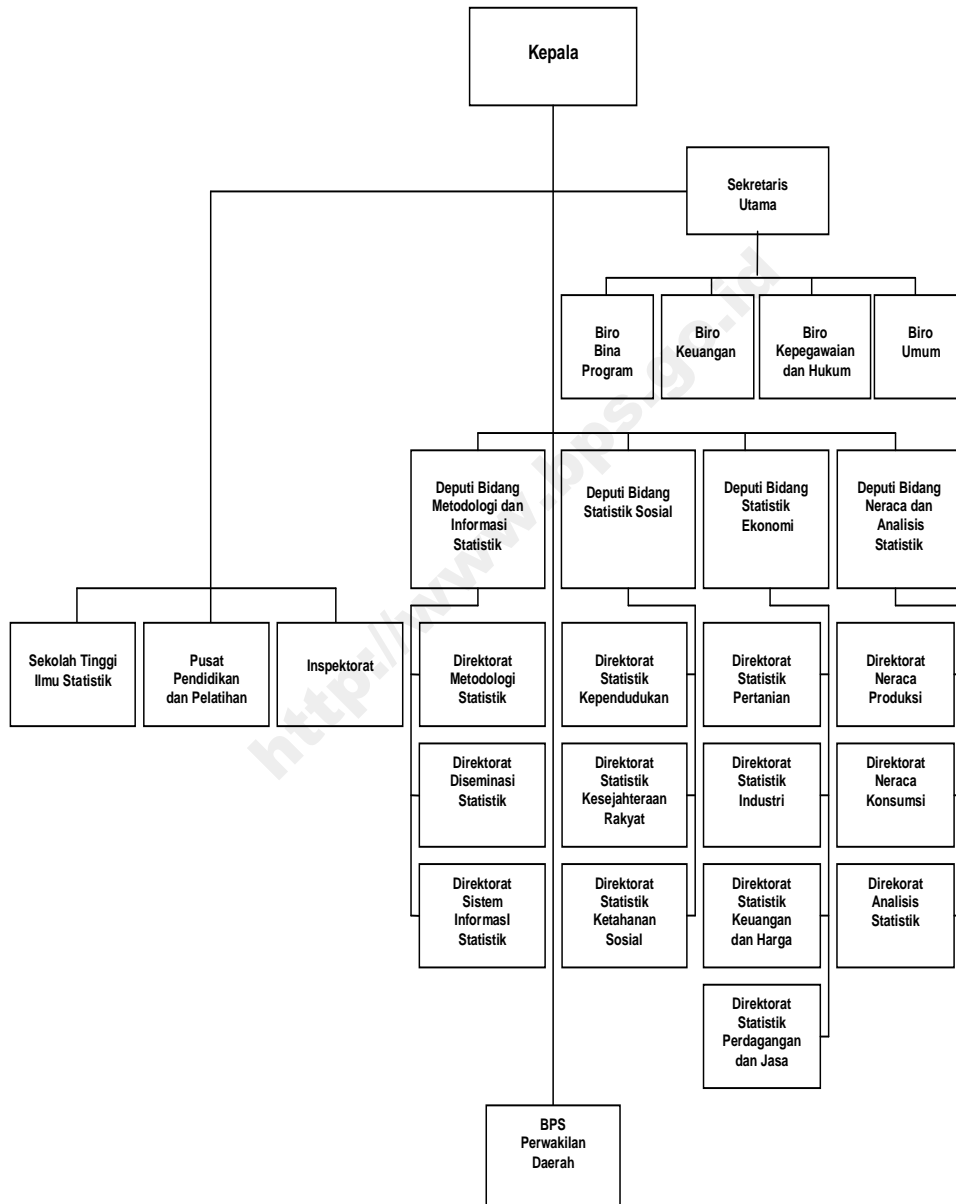
1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
4. Deputi Bidang Statistik Sosial;
5. Deputi Bidang Statistik Produksi;
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
8. Inspektorat Utama;
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
10. Instansi Vertikal.

Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada bagan di samping.

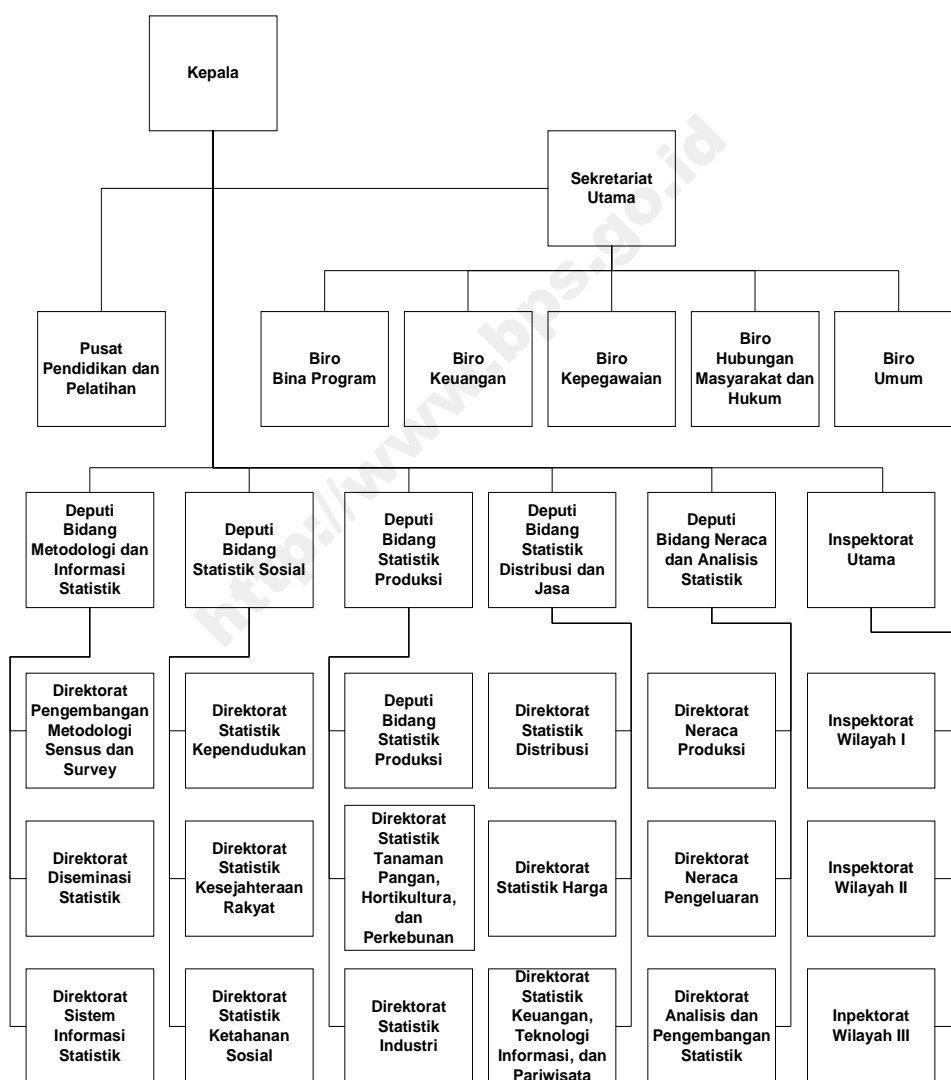
Pembiayaan Program/Kegiatan

Sesuai dengan Keppres Nomor 110 Tahun 2001 dan Perpres Nomor 86 Tahun 2007 Pasal 38, segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi pemerintah daerah, BPS di daerah dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, baik dari segi dukungan biaya maupun pelaksanaannya.

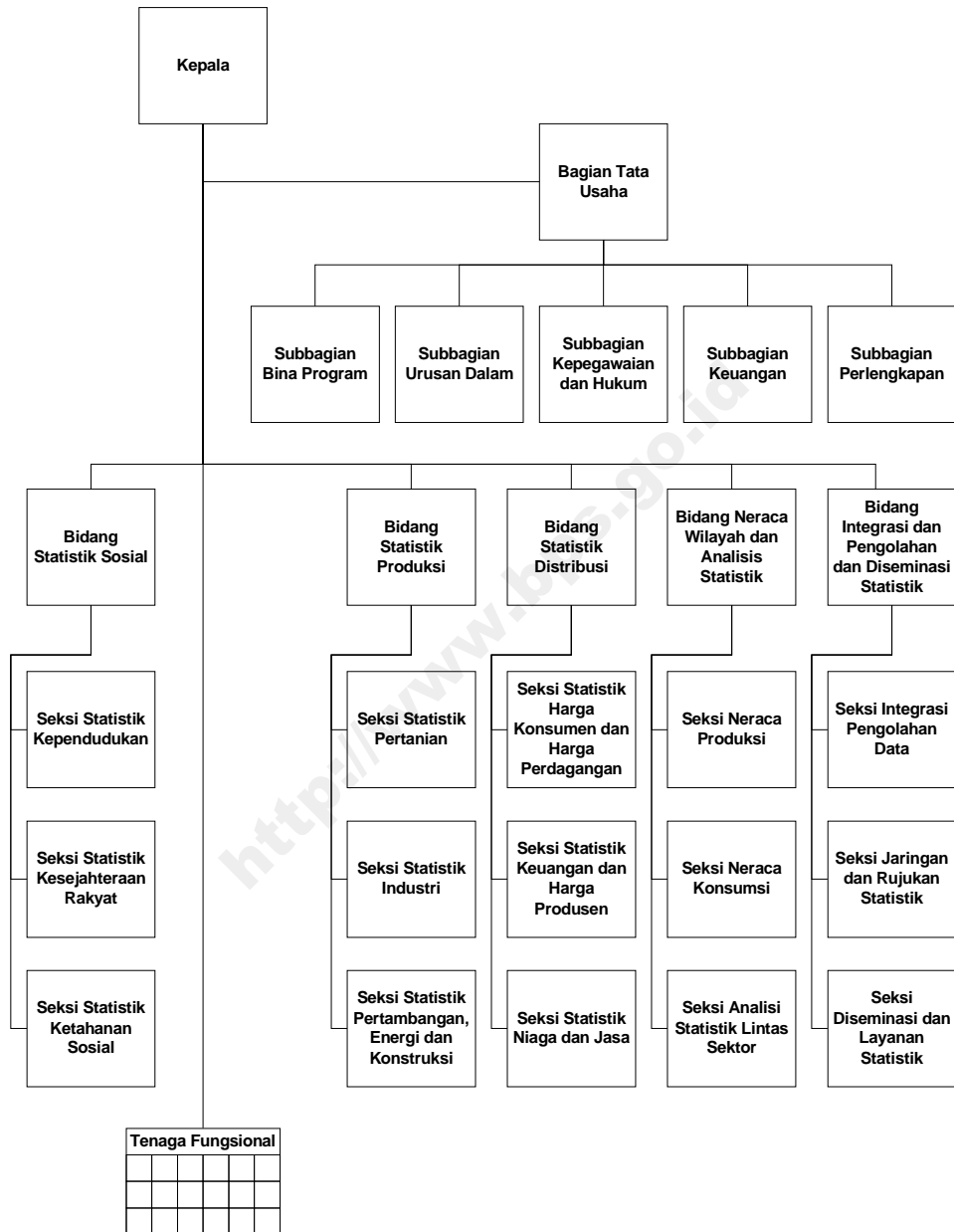
**GAMBAR 1.1. STRUKTUR ORGANISASI BPS
(KEPUTUSAN PRESIDEN NO.173 TAHUN 2000 dan
PERATURAN KEPALA BPS No. 001 TAHUN 2001)**



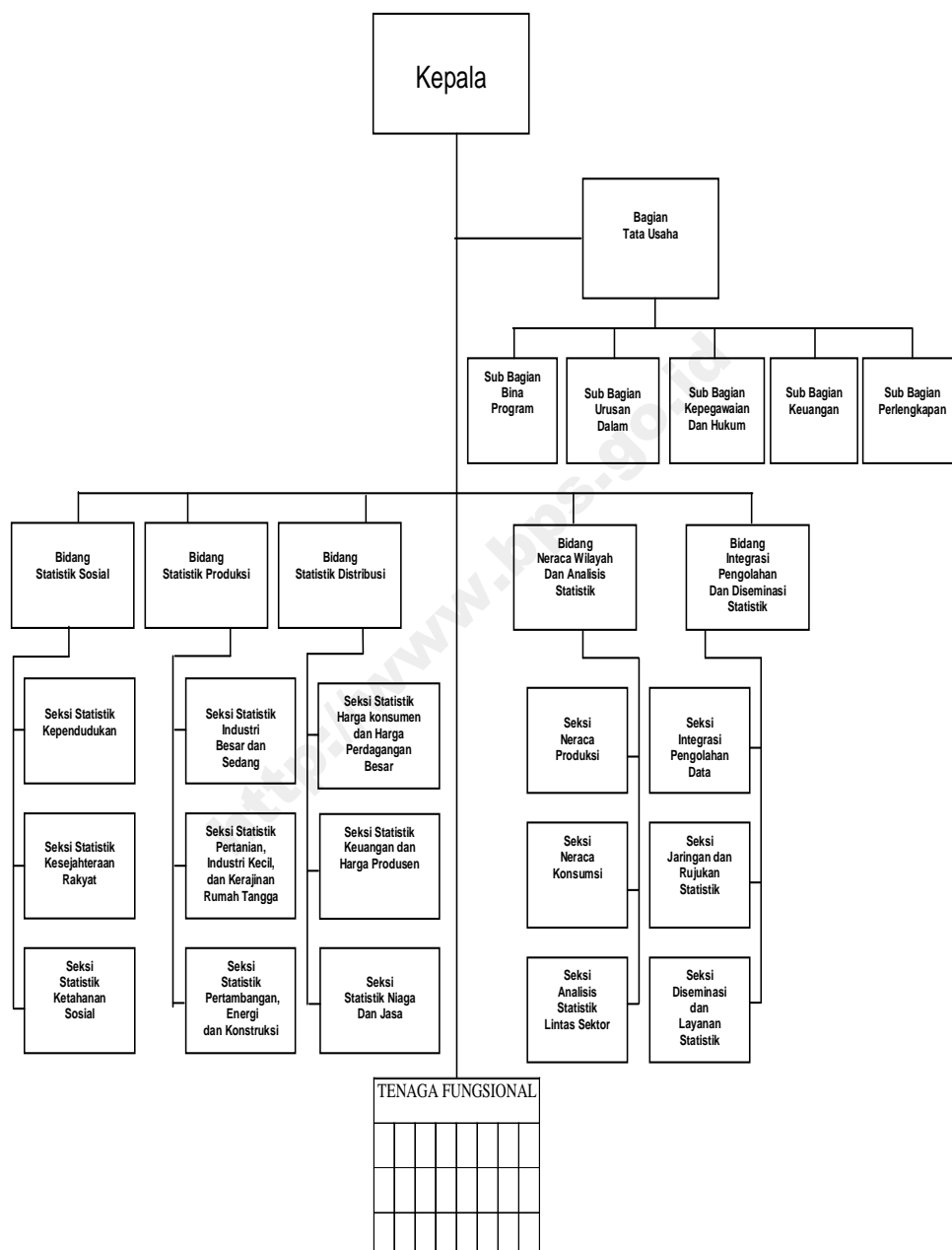
**GAMBAR 1.2. STRUKTUR ORGANISASI BPS
(PERATURAN PRESIDEN NO. 86 TAHUN 2007 dan
PERATURAN KEPALA BPS No. 7 TAHUN 2008)**



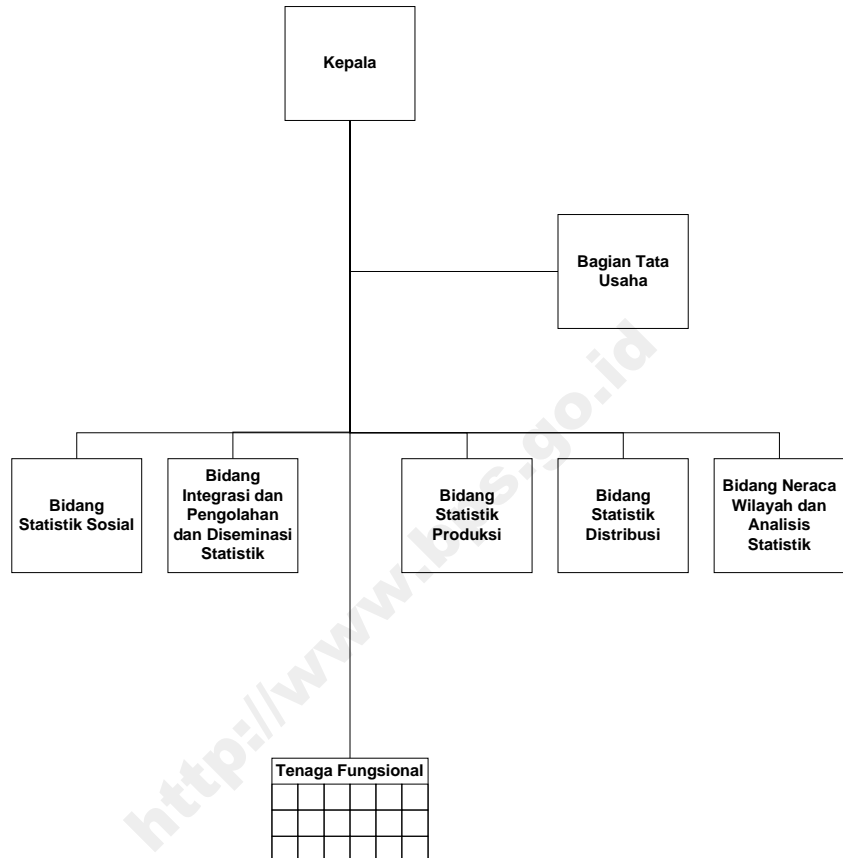
GAMBAR 1.3. STRUKTUR ORGANISASI BPS PROVINSI



**GAMBAR 1.4. STRUKTUR ORGANISASI BPS PROVINSI
DKI JAKARTA**



**GAMBAR 1.5. STRUKTUR ORGANISASI BPS
KABUPATEN/KOTA**



SEKRETARIAT

B

<http://www.bps.go.id>

**SUMBER DAYA
MANUSIA**

B.1



<http://www.bps.go.id>

SEKRETARIAT

1. SUMBER DAYA MANUSIA

1.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam jajaran BPS, dimaksudkan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Di samping menggunakan forum-forum resmi mereka juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dalam berbagai ketrampilan sesuai dengan minat dan bakat. Pada tahun 2008 BPS melaksanakan pembinaan pegawai melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan non formal ditempuh melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik (Pusdiklat) berupa kursus teknis statistik, komputer maupun administrasi. Sedangkan pendidikan formal ditempuh melalui tugas belajar ke Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri.

a. Pengadaan SDM

Pengadaan SDM di lingkungan BPS mulai tahun 1996 adalah berdasarkan formasi yang ditetapkan pemerintah, yang jumlahnya tidak sebanding dengan angka pengurangan pegawai karena berhenti, meninggal dan pensiun (BMP) setiap tahunnya. Oleh karena itu, tambahan formasi CPNS tahun 2008 dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) sebanyak 1.073 orang, masih belum dapat memenuhi kebutuhan pegawai. Berdasarkan perhitungan di tahun 2008, idealnya pegawai BPS adalah 27.290 orang, sedangkan yang tersedia baru 13.465 orang, jadi masih kekurangan sebanyak 13.825 orang. Kondisi ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan *zero growth* dan dilanjutkan dengan *minus growth*, khususnya dalam penataan formasi aparatur pemerintah secara keseluruhan.

Tabel 2.1. Formasi Pegawai BPS Menurut Kelompok CPNS Tahun 2004 – 2009

Kelompok CPNS	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lulusan STIS (ID)	133	129	195	252	282
Non STIS	364	690	-	261	412
Honorer/Mitra	-	500	653	131	379

b. Pembinaan SDM

Pembinaan SDM diarahkan untuk menciptakan insan-insan statistik yang tangguh, baik dari segi mental, fisik, maupun disiplinnya. Pembinaan tersebut diimplementasikan melalui pengiriman tugas belajar dalam negeri/luar negeri, prajabatan, diklat-diklat penjenjangan, pembinaan jabatan fungsional dan lain-lain. Di samping itu sejak tahun anggaran 2000/2001, BPS melakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pejabat struktural eselon I, II, III dan IV serta staf. Sedangkan untuk membentuk sikap mental yang berbudi luhur, BPS juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengisian dan pembinaan rohani yang diselenggarakan dua kali dalam tiap minggunya.

c. Potensi SDM

Secara keseluruhan SDM di BPS Tahun 2008 berjumlah 13.465 orang. Pengurangan pegawai berdasarkan BMP (berhenti, meninggal, dan pensiun) berjumlah 340 orang dan penambahan pegawai sebanyak 1.073 orang. Adapun perkembangan pegawai BPS dari tahun 2004 - 2008 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

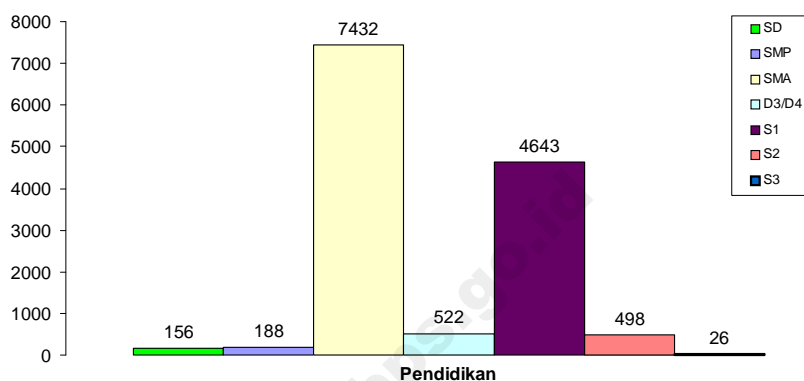
**Tabel 2.2. Perkembangan Pegawai BPS, 2004 - 2008
(Keadaan Desember 2008)**

Rincian Pegawai	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jumlah pegawai	11.424	11.684	12.641	12.970	13.465
2. Pengurangan (BMP)	240	362	519	149	340
3. Penambahan *)	500	1.319	848	644	1.073
4. Perubahan	260	957	329	495	733

*) Penambahan dilihat dari persetujuan formasi tahun bersangkutan, TMT CPNS-nya belum tentu tahun formasi tersebut.

Dari 13.465 orang pegawai tersebut, apabila dirinci menurut golongan adalah sebagai berikut: pegawai golongan I berjumlah 119 orang (0.88%), golongan II berjumlah 4.242 orang (31.5%), golongan III berjumlah 8.365 orang (62.12%), dan golongan IV berjumlah 739 orang (5.49%). Apabila

dirinci menurut tingkat pendidikan, maka yang berpendidikan SLTP ke bawah sebanyak 344 orang, SLTA sebanyak 7.432 orang, S0/DIV sebanyak 522 orang, S1 sebanyak 4.643 orang, S2 berjumlah 498 orang, dan S3 berjumlah 26 orang. Dari uraian di atas tampak bahwa lebih dari setengah jumlah pegawai BPS masih berpendidikan SLTA, karena sebagian besar dari mereka adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) yang ditempatkan di kecamatan.



Gambar 2.1. Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008

Adapun distribusi pegawai berdasarkan jabatan struktural dapat dilihat pada tabel 2.2. dan lebih detailnya disampaikan pada lampiran 14.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai BPS menurut Eselon per Desember 2008

Eselon	Pusat	Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I	8	-	8
II	24	33	57
III	80	631	711
IV	219	2.569	2.788
Jumlah	331	3.233	3.564

Sedangkan distribusi pegawai menurut kelompok umur, masing-masing adalah kelompok umur <25 tahun sebanyak 1.435 pegawai, kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 1.825 pegawai, kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 1.847 pegawai, kelompok umur 35-39 sebanyak 1.952 pegawai, kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 2.016 pegawai, kelompok umur 45-49 tahun sebanyak 2.373 pegawai, dan kelompok umur 50 tahun ke atas sebanyak 2.017 pegawai. Sehingga distribusi pegawai menurut kelompok umur terbesar terdapat pada kelompok umur 45-49 tahun.

d. Ujian Dinas

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 pasal 30 menyatakan bahwa, setiap PNS yang akan naik pangkat ke dalam golongan yang lebih tinggi, wajib menempuh dan lulus ujian dinas. Petunjuk teknis pelaksanaan Ujian Dinas telah diatur dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dan Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002. Pada tahun 2008 ujian dinas diikuti oleh 236 pegawai.

1.2. Jabatan Fungsional

Tabel 2.4. Jumlah Pejabat Fungsional di Badan Pusat Statistik Tahun 2004 – 2009

No.	Jabatan Fungsional	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Statistisi	2.795	2.908	2.516	2.508	2.374	2.227
2.	Pranata Komputer	28	32	51	46	41	39
3.	Widyaiswara	1	11	10	9	9	10
4.	Peneliti	8	6	3	5	3	5
5.	Auditor	21	25	19	17	12	14
6.	Dosen	16	16	17	19	23	23
7.	Analisis Kepegawaian	23	12	16	16	14	17
8.	Dokter	3	5	5	5	5	5
9.	Perencana	38	29	21	18	10	9
10.	Perawat	0	1	1	1	1	1
11.	Pranata Humas	0	14	12	12	12	11
Jumlah		2.933	3.059	2.671	2.656	2.504	2.361

Jabatan Fungsional yang ada di BPS meliputi Peneliti (3 orang), Pranata Komputer (41 orang), Statistisi (2374 orang), Widyaiswara (9 orang), Auditor (12 orang), Dosen (23 orang), Analis Kepegawaian (14 orang), Dokter (5 orang), Perencana (10 orang), Perawat (1 orang) dan Pranata Humas (12). Lebih detailnya disampaikan pada lampiran 14.

a. Pembinaan Jabatan Fungsional - Sosialisasi Pranata Komputer dan Statistisi di Instansi Luar BPS

BPS sebagai instansi pembina jabatan fungsional pranata komputer dan fungsional statistisi mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan tidak hanya yang terdapat di BPS, akan tetapi juga semua PNS yang menjadi Pejabat Fungsional Pranata Komputer dan Pejabat Fungsional Statistisi.

Adapun pembinaan yang telah dilakukan adalah meningkatkan kualitas pejabat fungsional melalui seminar, lokakarya, sarasehan, panel dan sejenisnya, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi bagi jabatan fungsional yang dibinanya serta memfasilitasi penyusunan kode etik profesi yang dilakukan oleh organisasi profesi untuk mengendalikan kualitas pribadi pejabat fungsional.

Di samping itu dalam melakukan pembinaan dan untuk menarik minat lebih banyak lagi, BPS juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional Statistisi di instansi luar BPS.

b. Penyempurnaan Peraturan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi

Standar materi penilaian angka kredit Pranata Komputer dan Statistisi telah ditetapkan dalam SK KBPS No. 286 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer serta SK Menpan Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya.

Perpanjangan batas usia pensiun Pranata Komputer dan Statistisi merupakan usaha pengembangan karir bagi kedua jabatan fungsional tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komputer dan statistik di Indonesia, memberikan kesempatan yang lebih lama kepada para pejabat dimaksud

dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang komputer dan statistik, memberikan penghargaan yang pantas dan seimbang sesuai dengan tanggung jawab moral dan tanggung jawab intelektual yang diemban serta memberikan motivasi kerja yang lebih tinggi.

1.3. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon I, II, III dan IV di lingkungan Badan Pusat Statistik, maka disusunlah Standar Kompetensi Jabatan.

Tujuan dari penyusunan tersebut adalah untuk melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi/satuan organisasi, serta untuk menciptakan optimalisasi kinerja organisasi/satuan organisasi.

Keluaran dari kegiatan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural adalah Standar Kompetensi Umum dan Standar Kompetensi Khusus jabatan struktural pada Badan Pusat Statistik, untuk jenjang jabatan eselon I, II, III dan IV BPS dan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.4. Pembinaan Teknis Administrasi dan Penyempurnaan Pemberkasan CPNS Tenaga Honorer Tahun 2007

Pengangkatan CPNS dari tenaga honorer sudah berlangsung secara bertahap dari tahun 2006 dan direncanakan selesai tahun 2009. Pada tahun 2008 diangkat CPNS sebanyak 653 orang, terdiri dari pemberkasan CPNS Honorer atau mitra di daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bagian mutasi pegawai BPS mengadakan pembinaan Teknis Administrasi dan Penyempurnaan Pemberkasan Pengadaan CPNS Tenaga Honorer Tahun 2007 antara lain dengan kunjungan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

1.5. Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

Satya Lencana Karya Satya merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada PNS atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas terhadap negara. Penerima Satya Lencana Karya Satya dari tahun 2003-2008 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Jumlah Penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya menurut Jenis Penghargaan Tahun 2003– 2008

Jenis Penghargaan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun	184	461	254	222	276	338
Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun	533	691	470	482	368	320
Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun	49	49	64	51	88	72
Jumlah	766	1201	788	755	732	730

1.6. Seminar dan Lokakarya

Pengembangan sumber daya manusia di BPS telah dilaksanakan melalui berbagai jalur, salah satunya adalah melalui seminar dan lokakarya. Kedua forum ini dinilai cukup membantu dalam pengembangan SDM, karena dalam waktu yang cukup singkat forum ini dapat mentransfer pengetahuan yang sarat dengan berbagai topik. Di samping itu biasanya dilakukan dialog secara interaktif antara peserta dengan nara sumber.

1.7. Kegiatan Olah Raga, Pemeriksaan Kesehatan, Seni dan Keagamaan

Kegiatan Olah Raga

Berbagai jenis kegiatan olah raga telah disiapkan BPS. Sebagai sarana hiburan dan pencapaian kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Olah raga sangat perlu untuk digalakkan, karena kualitas sumber daya manusia di BPS tidak hanya dibina dari segi kemampuan atau kecakapannya saja, tetapi juga dibina dari segi kesehatan mental dan kesehatan fisiknya. Salah satu kegiatan olahraga yang diikuti hampir semua pegawai BPS adalah Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) yang diadakan setiap Jumat pagi.



Gambar 2.2. Gerak jalan santai yang diikuti oleh seluruh pegawai BPS, BPS DKI Jakarta dan mahasiswa STIS dalam rangka Hari Statistik

Pelaksanaan kegiatan olah raga jalan santai yang sering diselenggarakan adalah bertepatan dengan perayaan Hari Statistik tanggal 26 September, hari ulang tahun KORPRI dan sebagainya. Meskipun sifatnya hanya insidental, tetapi olah raga ini ada dalam pembinaan atau pengawasan Badan Pembina Olah Raga (BAPOR) BPS.

Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan untuk pejabat struktural eselon I dan II dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk. Sedangkan pemeriksaan kesehatan bagi para pejabat eselon III dan IV serta pegawai-pegawai yang pekerjaannya mempunyai resiko tinggi bagi kesehatan, misalnya: pegawai percetakan, perpustakaan, pengelola gedung, sopir, teknisi, tukang sapu halaman dan tukang sampah dilaksanakan oleh BPS. Pada tahun 2008 pegawai yang mengikuti pemeriksaan kesehatan (chek up) sebanyak 500 orang, yang terdiri dari:

1. Pejabat eselon I : 8 orang
2. Pejabat eselon II : 25 orang
3. Pejabat eselon III dan fungsional : 87 orang
4. Pejabat eselon IV dan fungsional : 255 orang
5. Staf : 125 orang

Kegiatan Kesenian

Seperti halnya kegiatan olah raga, bidang kesenian juga telah disiapkan untuk pegawai di lingkungan BPS. Pengungkapan rasa estetika dan apresiasi terhadap seni bukan saja dimiliki oleh insan-insan yang berkecimpung dalam dunia seni saja, tetapi juga ditunjukkan oleh kemampuan SDM BPS dalam berolah seni. Sumber daya di BPS tidak hanya bergelut dengan angka-angka saja, tetapi juga mampu untuk mengekspresikan jiwanya melalui media kesenian. Kegiatan kesenian yang ada di BPS antara lain: kesenian tradisional (karawitan, seni degung, dan sebagainya) dan seni modern (grup band, drama, dan sebagainya).

Kegiatan Keagamaan

Untuk menjaga keseimbangan jiwa, di sela-sela waktu pelaksanaan tugasnya sebagai abdi masyarakat, SDM di lingkungan BPS mendapatkan ceramah-ceramah yang bersifat keagamaan. Ceramah keagamaan yang disampaikan secara periodik mingguan maupun ceramah yang berkaitan dengan perayaan hari-hari besar agama secara rutin selalu diselenggarakan untuk menyejukkan dan menyiram rohani SDM BPS. Harapan dari kegiatan di atas adalah terciptanya aparatur statistik yang berwawasan keagamaan, iman, dan takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Salah satu contoh kegiatan keagamaan adalah perayaan hari raya Idul Adha dengan penyembelihan hewan kurban di kantor BPS.

**SARANA DAN
PRASARANA**

B.2

<http://www.bps.go.id>



2. SARANA DAN PRASARANA

2.1. Sarana dan Prasarana Fisik BPS

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BPS, diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai baik untuk penyelenggaraan kegiatan perstatistikan di pusat maupun di daerah. Berkaitan dengan itu, BPS selalu berupaya melakukan pengembangan, renovasi dan rehabilitasi kantor sebagai tempat terselenggaranya aktivitas kerja.



Gambar 2.3. Peletakan batu pertama pembangunan gedung BPS Provinsi DISTA Yogyakarta oleh Kepala BPS, Dr. Rusman Heriawan

Pada tahun 2008, anggaran peningkatan sarana dan prasarana dibebankan pada 2 (dua) program kegiatan, yaitu:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN),
2. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik (PKyB).

Adapun pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan BPS pada tahun 2008 secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran 16.



Gambar 2.4. Gedung BPS Provinsi DISTA Yogyakarta yang baru dibangun.

2.2. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana

Biaya pengelolaan sarana dan prasarana fisik BPS di pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota) tersedia dalam anggaran belanja DIPA/POK masing-masing satuan kerja. Perawatan gedung di BPS meliputi kebersihan gedung, pemeliharaan taman dan perbaikan gedung. Untuk kebersihan gedung dan pemeliharaan taman dikelola secara swakelola. Sedangkan perbaikan gedung diserahkan pada pihak lain (rekanan) dengan mengacu pada Kepres no. 80.

Sarana transportasi berupa kendaraan bermotor roda 4 yang ada, akan dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena sarana tersebut sangat menunjang kelancaran tugas baik di BPS maupun di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Pada dasarnya sarana tersebut masih sangat terbatas dan usianya lebih dari 10 tahun. Mengingat keterbatasan anggaran yang ada, maka sarana tersebut masih digunakan dalam menunjang kelancaran tugas.

Guna memenuhi kelengkapan sarana rapat, pertemuan dan persidangan maka dalam tahun ini dilakukan peremajaan dan penambahan pengadaan *audio visual* maupun *sound system*. Sementara itu untuk menunjang pekerjaan teknis lapangan di Direktorat Statistik Keuangan dan Harga diperlukan tambahan sarana pengukuran kadar air pencatat harga produsen petani gabah, sehingga dilakukan pengadaan *moister tester*.

Selain itu, pada tahun ini dilakukan pengadaan pakaian untuk pegawai, juru mudi, satuan pengamanan, teknisi dan para medis. Hal ini berguna untuk keseragaman pakaian dari semua unit kerja serta sebagai identitas pegawai BPS sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Daya Serap

Tabel 2.6. Laporan Daya Serap Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun 2004 - 2009
Realisasi sampai dengan Desember 2004 - 2009

No.	Jenis/Anggaran/Program/Belanja	2004	2005	(%) 2006	2007	2008
(1)	(2)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
I	Anggaran 054					
1.	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik (PKyB)-P2K2*)					
	Pusat		107,04	76,60	73,00	76,83
	Daerah			94,20	84,10	91,75
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN)					
	Pusat		108,36	99,40	97,80	98,78
	Daerah			95,60	92,20	106,44
3.	Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik (P2S)					
	Pusat		86,01	97,70	88,40	92,06
	Daerah			94,70	96,50	98,91
4.	Program Pendidikan Kedinasan (PK)					
	Pusat	-	-	-	99,30	90,51
	Daerah					
	Total Anggaran 054			93,50	89,50	94,71
II	Anggaran 069					
	Pusat		99,38	99,02	99,30	99,33
	Daerah				99,10	90,13
	Total Anggaran 069				99,20	90,85
	Jumlah Pusat			99,02	84,20	90,74
	Jumlah Daerah				90,50	94,85
	Total Anggaran		96,68	94,39	89,50	93,93

*) Program PKyB ada mulai tahun 2008

Realisasi penggunaan anggaran tahun 2008 mencapai 93,93 persen, dengan rincian yaitu: Program P2S menyerap dana sebesar 95,49 persen, kemudian PKyB sebesar 84,29 persen, PSPAN sebesar 102,61 persen, dan Program PK menyerap anggaran sebesar 90,51 persen. Realisasi

penggunaan anggaran P2S di daerah selama tahun 2008 mencapai 98,91 persen. Adapun realisasi penggunaan anggaran di pusat maupun daerah selama tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2.6 di atas.

Daya Serap anggaran 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 mencapai 104,40 persen atau 488,09 milyar rupiah dari total dana sebesar 467,5 milyar rupiah. Anggaran Pembangunan/Proyek yang terserap mencapai 98,77 persen, sedangkan anggaran belanja rutin mencapai 110,51 persen. Untuk jelasnya rincian pembiayaan anggaran proyek dan rutin BPS Pusat dan BPS Daerah tahun anggaran 2004 dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7. Laporan Daya Serap Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun 2004 Realisasi sampai dengan Desember 2004

No.	Jenis/Anggaran/Program/Belanja	(%) 2004
(1)	(2)	(5)
A RUTIN		
1.	Belanja Pegawai	98,44%
2.	Belanja Non Pegawai	98,69%
B PEMBANGUNAN *) Program APBN		
1.	Program Pengembangan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	98,21%
2.	Program Penyempumaan dan Pengembangan Statistik (P2S)	98,07%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	95,32%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	99,11%
Jumlah Rutin		98,51%
Jumlah Pembangunan		98,21%
Total Anggaran		98,32%

1. Anggaran Pembangunan/Proyek

Dana anggaran proyek BPS Pusat dan BPS Propinsi sebesar 243,24 milyar rupiah dengan daya serap sampai bulan Desember 2004 sebesar 240,25 milyar rupiah atau 98,77 persen. Dengan rincian untuk BPS Pusat sebesar 79,91 milyar rupiah terserap 77,50 milyar rupiah atau 98,21 persen sedangkan BPS Propinsi sebesar 164,32 milyar rupiah terserap 162,74 milyar rupiah atau 99,04 persen.

2. Anggaran Rutin

Dana anggaran rutin dalam DIK BPS Pusat dan BPS Propinsi sebesar 224,26 milyar rupiah dengan daya serap sampai bulan Desember 2004 sebesar 247,84 milyar rupiah atau 110,51 persen dari yang direncanakan, dengan rincian untuk BPS Pusat sebesar 46,19 milyar rupiah yang terserap 45,50 milyar rupiah atau 98,51 persen sedangkan BPS Propinsi sebesar 178,07 milyar rupiah yang terserap 202,34 milyar rupiah atau 113,63 persen.

Realisasi penggunaan anggaran tahun 2006 mencapai 93,5 persen, dengan rincian yaitu. program P2S menyerap dana sebesar 95,2 persen, kemudian P2K2 sebesar 90,5 persen dan PSPAN sebesar 97,1 persen. Realisasi penggunaan anggaran P2S di daerah selama tahun 2006 mencapai 94,7 persen, lebih rendah dibanding penyerapan P2S di pusat yang mencapai 97,7 persen. sedangkan realisasi penggunaan anggaran PSPAN di pusat sebesar 99,4 persen juga lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran pada program yang sama di tingkat daerah, yaitu sebesar 95,6 persen. Sebaliknya, penyerapan anggaran P2K2 di pusat hanya mencapai 76,6 persen lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran P2K2 di daerah yang mencapai 94,2 persen.

Realisasi penggunaan anggaran tahun 2007 mencapai 89,5 persen, dengan rincian yaitu; Program P2S menyerap dana sebesar 94,6 persen, kemudian P2K2 sebesar 82,3 persen, PSPAN sebesar 93,5 persen serta Program PK menyerap anggaran sebesar 99,3 persen. Realisasi penggunaan anggaran P2S di daerah selama tahun 2007 mencapai 96,5 persen, lebih tinggi dibanding penyerapan P2S di pusat yang mencapai 88,4 persen. Sedangkan realisasi penggunaan anggaran PSPAN di pusat sebesar 97,8 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran pada program yang sama di tingkat daerah, yaitu sebesar 92,2 persen. Sebaliknya, penyerapan anggaran P2K2 di pusat hanya mencapai 73,0 persen lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran P2K2 di daerah yang mencapai 84,1 persen.

**PERENCANAAN,
MONITORING, DAN
EVALUASI**

B.3



<http://www.bps.go.id>

3. PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

3.1. Network Planning Perencanaan BPS

Network planning (rencana jejaring kerja) perencanaan dirancang untuk keperluan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan kegiatan yang berkaitan dengan sensus/survei baik yang bersifat administratif maupun teknis kegiatan statistik.

Sistem rencana jejaring kerja perencanaan yang disusun mempunyai beberapa keluaran seperti daftar kegiatan (*task sheet*) yang antara lain memuat seluruh tahapan kegiatan, lamanya kegiatan, mulainya kegiatan, selesainya kegiatan, kegiatan yang mendahului (kegiatan pendahulu) dan penanggung jawab kegiatan. Berdasarkan daftar kegiatan ini dapat pula disajikan keluaran yang lain yaitu grafik Gantt (*Gantt chart*) dan diagram jejaring kerja (*network diagram*) yang antara lain menggambarkan hubungan antar kegiatan, lama proyek diselesaikan, titik kritis, lintasan kritis dan *slack* setiap simpul.

3.2. Penyusunan Rencana Kerja BPS

a. Studi Penghitungan Indeks Kerusakan dan Revitalisasi Gedung Kantor BPS

Perencanaan revitalisasi gedung kantor secara obyektif dengan menggunakan suatu panduan standar, digambarkan melalui penyusunan indeks kerusakan bangunan pada masing-masing kantor BPS Kabupaten/Kota. Berdasarkan indeks tersebut, dapat disusun skala prioritas pembangunan maupun revitalisasi gedung kantor BPS.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam studi ini adalah menyusun panduan untuk menghitung indeks kerusakan gedung kantor BPS Kabupaten/Kota, melakukan inventarisasi kerusakan gedung kantor BPS Kabupaten/Kota, menyusun skala prioritas pembangunan dan revitalisasi gedung kantor BPS Kabupaten/Kota berdasarkan indeks kerusakan gedung kantor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja baik BPS maupun BPS Provinsi/Kabupaten/Kota secara bertahap.

Tabel 2.8. Indeks Kerusakan Gedung Kantor BPS Provinsi

Nb.	Nama Provinsi	Indeks Kerusakan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sulawesi Selatan	90,80	Dibangun tahun 1980, dan renovasi terakhir tahun 1987. Kondisi saat ini rusak, terutama atap dan dinding bangunan sudah banyak yang rusak dan plesterannya retak
2	Nusa Tenggara Timur 1	89,41	Gedung 1 dibangun tahun 1971, berada di lokasi pemda dan sudah tidak digunakan sebagai kantor (untuk gudang)
3	Kalimantan Timur 1	83,88	Gedung 1 dibangun tahun 1975, dan renovasi terakhir tahun 1996. Kondisi saat ini rusak cukup berat pd atap, plafond dan dinding bangunan
4	Jawa Tengah	80,24	Dibangun tahun 1971, dan renovasi terakhir tahun 1985
5	Riau 1	78,23	
6	Nusa Tenggara Timur 2	74,38	Gedung 2 dibangun tahun 1992, dan 2 kali direnovasi ringan. Kondisi rusak parah, terutama atap bangunan, plafond dan pagar
7	Kalimantan Barat 1	69,37	
8	Sumatera Barat	68,26	
9	Kalimantan Timur 2	64,05	
10	Riau 2	63,38	
11	Sulawesi Barat	61,84	Gedung kantor BPS Prov Sulbar masih sewa
12	Sumatera Utara	61,78	
13	Jawa Barat	60,30	
14	Sulawesi Tenggara 1	59,77	
15	Sulawesi Tenggara 2	55,02	
16	Sumatera Selatan 5	54,25	
17	Sumatera Selatan 3	54,12	
18	Dista Yogyakarta 1	53,42	
19	Kep. Bangka Belitung	41,14	
20	Kalimantan Selatan 1	31,39	
21	Kalimantan Tengah 2	16,12	Gedung 2 dibangun tahun 1974, dan renovasi terakhir tahun 2004
22	Bengkulu	13,02	Dibangun tahun 2003, dan tahun 2008 direnovasi ringan
23	Maluku	11,91	Gedung baru direnovasi tahun 2007
24	Kalimantan Timur 3	11,82	
25	Nusa Tenggara Barat 2	11,21	Gedung 2 dibangun tahun 1992, dan direnovasi beberapa kali
26	Bali 1	11,16	Gedung kantor 1 dibangun tahun 1995 dan tahun 2007 direnovasi total dengan biaya Rp 794,78 juta. Saat ini ada kerusakan kecil pada lantai bangunan



Gambar 2.5. Gedung BPS Provinsi Sulawesi Selatan dengan indeks kerusakan 90,80. Dibangun tahun 1980, terakhir direnovasi tahun 1987.



Gambar 2.6. Gedung BPS Provinsi Bali dengan indeks kerusakan 11,16. Dibangun tahun 1995 direnovasi total tahun 2007.

b. Updating Database Peta Sarana dan Prasarana Fisik BPS Kabupaten/Kota

Program peningkatan sarana dan prasarana kerja BPS, BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap setiap tahun. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai akan memberi suasana kerja yang nyaman sehingga akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong terciptanya kondisi yang dapat memacu prestasi kerja para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Tersedianya *database* sarana dan prasarana fisik yang dilengkapi dengan peta tematik dan disertai dengan informasi ketersediaan sarana dan prasarana fisik menurut peta wilayah administrasi bermanfaat untuk lebih memudahkan dan mempercepat proses penyusunan rencana kegiatan sarana dan prasarana fisik. Di samping itu juga akan sangat membantu bagi para pengambil keputusan dalam menentukan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas.

c. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) BPS dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) BPS tahun 2009 merupakan rangkuman penjabaran seluruh rencana kegiatan statistik yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009. Dalam menyusun rencana kegiatan statistik, BPS tetap memprioritaskan pada kegiatan lanjutan yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Sedangkan kegiatan pendukung lainnya merupakan prioritas selanjutnya dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

Gabungan dari seluruh Renja-KL instansi pemerintah tahun 2009 nantinya akan disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009. Penyusunan RKP tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dengan disusunnya Renja-KL BPS Tahun 2009 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi para penanggung jawab dan pelaksana kegiatan statistik baik di pusat maupun di daerah yang akan memberikan kejelasan arah dalam melaksanakan program pembangunan di bidang statistik. Dengan demikian diharapkan seluruh kegiatan statistik akan terlaksana secara efektif dan efisien melalui koordinasi kegiatan statistik yang berkesinambungan, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan statistik. statistik yang berkesinambungan, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan statistik.

3.3. Penyusunan Anggaran BPS

Penyusunan anggaran BPS adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh Biro Bina Program melalui Bagian Penyusunan Anggaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana pembiayaan BPS selama satu tahun anggaran baik di pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut melibatkan seluruh petugas penyusun anggaran baik yang ada di BPS maupun di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

Khusus untuk penyusunan anggaran daerah, pada tahap finalisasi anggaran, staf BPS di daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran dipanggil ke kantor BPS untuk melakukan penyusunan dan penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan penggunaan anggaran berbasis kinerja dapat terlaksana dengan baik.

Keluaran dari kegiatan penyusunan anggaran BPS adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) sebagai dasar penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran-Departemen Keuangan.

3.4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BPS

Monitoring dan evaluasi kegiatan BPS dimaksudkan untuk memantau dan mengevaluasi seluruh aktivitas BPS selama setahun dengan mengunjungi kantor perwakilan BPS di daerah maupun mengadakan pertemuan teknis yang dihadiri oleh pejabat BPS baik di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan ada perbaikan maupun koreksi terhadap kegiatan yang sedang dan sudah dilaksanakan. Di samping itu masukan dari perwakilan BPS di

daerah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang agar menjadi lebih baik.

Mengingat keterbatasan biaya yang disediakan, maka pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara sampel, yaitu mengunjungi provinsi terpilih maupun memanggil para pejabat tertentu yang terkait dengan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.

3.5. Penyusunan SBK, SHBJ dan HSPK

Standar Biaya Khusus, Satuan Harga atas Barang dan Jasa serta Harga Satuan Pokok Kegiatan, baik teknis maupun non teknis diperlukan sebagai bahan penyusunan kegiatan dan dasar perencanaan pembiayaan kegiatan BPS di pusat dan daerah.

Penyusunan SBK, HSPK dan SHBJ dilakukan dengan cara mengunjungi responden terpilih di wilayah DKI Jakarta, serta pengumpulan data dari seluruh satuan kerja daerah dan provinsi.

3.6. Penyusunan Laporan Aktivitas BPS

Laporan aktivitas BPS adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan statistik. Laporan ini dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan statistik selama satu tahun anggaran.

Penyusunan laporan ini memberikan gambaran tentang semua kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS, baik kegiatan rutin yang telah dilaksanakan maupun kegiatan rintisan yang baru dilaksanakan. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan statistik selama satu tahun anggaran, memberikan cerminan terhadap sejauh mana dan seberapa banyak kerja sama dan koordinasi yang telah dijalin oleh BPS dengan instansi lain, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas dalam satu tahun anggaran.

**PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN**

B.4

<http://www.bps.go.id>



4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.1. Program Pendidikan

a. Pendidikan Ahli Statistik setara S1

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) merupakan lembaga pendidikan statistik pertama di Indonesia yang berstatus kedinasan. Lulusan program D-IV ini memiliki gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST). Program ini dapat diikuti oleh pegawai di lingkungan BPS, baik yang berada di pusat dan daerah, pegawai dari instansi lain dikenal dengan nama karya siswa atau Tugas Belajar (TB). Selain itu program diploma ini juga dapat diikuti oleh masyarakat umum yang memiliki ijazah SMU atau SLTA IPA dengan status sebagai mahasiswa Ikatan Dinas (ID) dan berkewajiban kerja minimal 8 tahun di BPS setelah lulus dari pendidikan.



Gambar 2.7. Suasana pelaksanaan tes STIS di Provinsi Lampung.

Pada Tahun Akademik 2007/2008, STIS mendidik mahasiswa ID sebanyak 1.083 mahasiswa, mahasiswa TB BPS dan BPS daerah sebanyak 3 mahasiswa atau jumlah keseluruhan sebanyak 1.086 orang dengan komposisi laki-laki 418 orang dan perempuan 668 orang. Sedangkan yang lulus sebanyak 284 mahasiswa, yang terdiri dari 282 mahasiswa ikatan dinas dan 2 orang mahasiswa tugas belajar. Adapun komposisi lulusan adalah sebanyak 106 orang dari jurusan statistik kependudukan, 109 orang jurusan statistik ekonomi dan 75 orang dari jurusan komputasi statistik.

b. Pendidikan S1

Program pendidikan S1 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga statistik dan tenaga ahli dari bidang-bidang lainnya. Dalam hal ini BPS menempuh dua cara, yaitu melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi sarjana dari berbagai disiplin ilmu dan menyelenggarakan tugas belajar (TB) ke Universitas di dalam negeri. Pada tahun 2008 tidak ada pegawai BPS yang mengikuti program TB S1 ke STIA LAN (Lembaga Administrasi Negara).

c. Pendidikan S2 dan S3

Pelaksanaan program pendidikan doktor dan magister statistik dilakukan dengan mengirim staf BPS ke universitas di luar negeri maupun di dalam negeri. Program ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari berbagai lembaga internasional dan berbagai program bilateral lainnya.

Tabel 2.9. Jumlah Pegawai BPS yang Tugas Belajar Menurut Sponsor dan Jenjang Pendidikan Tahun 2008

No.	Sponsor	S2			S3		TOTAL
		Dalam Negeri	Double Degree	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ADS Australia	-	-	5	-	-	5
2.	APS Australia	-	-	8	-	-	8
3.	BAPPENAS	70	36	3	1	1	111
4.	Departemen Sosial (Depsos)	3	-	-	-	-	3
5.	KOICA (Korea International Cooperation Agency)	-	-	1	-	-	1
6.	Monas University	-	-	-	-	1	1
7.	UNSIAP	-	-	1	-	-	1
8.	APBN-BPS ITS	75	-	-	-	-	75
9.	APBN-BPS UI	50	-	-	-	-	50
10.	APBN-BPS IPB	25	-	-	-	-	25
11.	Depdiknas	3	-	-	-	-	3
12.	Pemda NAD	1	-	-	-	-	1
TOTAL		227	36	18	1	2	284

Pegawai BPS memperoleh kesempatan tugas belajar program S2 dan S3 di dalam negeri maupun luar negeri. Tugas belajar S2 mendapat

dukungan beasiswa dari berbagai lembaga internasional maupun sponsor dari dalam negeri seperti program beasiswa Bappenas sebanyak 109 orang dan anggaran APBN-BPS sebanyak 150 orang. Sedangkan tugas belajar S3 dengan sponsor dari Monash University sebanyak 1 orang dan dari program Bappenas sebanyak 2 orang. Sehingga total pegawai BPS yang tugas belajar sebanyak 284 orang, selengkapnya bisa dilihat dalam tabel 2.6.

d. Penyelenggaraan Program DI STIS

Program DI STIS diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas pengumpulan data di lapangan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

Kegiatan program Diploma I dilakukan dalam dua semester dan dilengkapi dengan praktek kerja lapangan sekitar 3 bulan dan penulisan karya tulis akhir. Setiap peserta yang memenuhi syarat akan diberi sertifikat Diploma I. Penyelenggaraan program ini menitikberatkan pembekalan para tenaga KSK agar lebih mengenal ilmu statistik pada tingkat dasar. Diharapkan setelah mengikuti pendidikan tersebut, mereka akan memiliki daya nalar yang lebih baik dalam mengumpulkan data di lapangan.

4.2. Diklat Fungsional

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan BPS adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Pusdiklat BPS pada tahun 2008 mengadakan berbagai macam diklat baik teknis maupun non teknis seperti: diklat bendaharawan, komputer maupun fungsional yang lain.

a. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli

Dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 003/KS/2003 No.25 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi, BPS telah selesai menyusun juklak/juknis tentang Jabatan Fungsional Statistisi. SK ini merupakan penyempurnaan dari SK serupa yang telah diterbitkan pada periode sebelumnya. BPS telah mensosialisasikan pedoman pelaksanaannya baik di kalangan BPS maupun instansi luar BPS.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistik (JFS), seseorang yang ingin menduduki JFS harus mengikuti diklat sesuai dengan tingkatannya untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Pusdiklat BPS, sesuai dengan tugas dan fungsinya, berkewajiban melaksanakan diklat fungsional tersebut. Kegiatan ini tidak hanya diperuntukkan bagi peserta BPS saja akan tetapi juga peserta dari instansi di luar BPS dan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan.

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat untuk menduduki JFS. Diklat dilaksanakan dengan metoda andragogi dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus, presentasi dan ujian komprehensif.

b. Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli

BPS selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (JFPKTA) berkewajiban memberikan pembinaan serta pelatihan diklat Fungsional Pranata Komputer. Pembinaan ini tidak saja untuk kalangan BPS, tetapi juga lintas departemen.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman pelaksanaan JFPKTA, seseorang yang ingin menduduki JFPKTA harus mengikuti diklat sesuai dengan tingkatannya untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Pusdiklat BPS, sesuai dengan tugas dan fungsinya, berkewajiban untuk mengadakan dan melaksanakan diklat komputer.

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat untuk menduduki JFPKTA. Diklat dilaksanakan dengan metoda andragogi dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus, presentasi dan ujian komprehensif.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 003/KS/2003 No.25 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi (JFS) dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (JFPKTA), apabila seseorang yang ingin menduduki JFS dan JFPKTA harus mengikuti diklat yang sesuai dengan tingkatannya untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

c. Diklat Pengembangan Kompetensi Profesi Widyaiswara BPS

Peran, tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS yaitu melakukan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah, baik untuk aparatur internal BPS maupun aparatur pemerintah lainnya. Kompetensi Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai institusi harus ditingkatkan dan diberdayakan.

Widyaiswara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kediklatan pada Lembaga Diklat Pemerintah dan mempunyai tugas pokok mendidik, mengajar dan atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada lembaga diklat instansi masing masing. Agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya maka Widyaiswara harus bisa menguasai materi kediklatan baik yang dikategorikan materi Diklat Pra Jabatan maupun Diklat Dalam Jabatan seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional.

Cara yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut yaitu: menambah jumlah Widyaiswara dengan merekrut Calon Widyaiswara dari "tenaga terpilih" dan mengirimkannya ke Diklat Calon Widyaiswara yang diselenggarakan oleh LAN atau Lembaga Diklat lainnya, meningkatkan kompetensi para Widyaiswara yang sudah ada dengan mengirimkannya ke Diklat TOT Kewidyaiswaraan Substansi dan Diklat TOT bidang Teknis atau fungsional lainnya, memberikan kesempatan pada widyaiswara untuk mengembangkan kompetensinya melalui penelitian dan kajian ilmiah di bidang kediklatan dan pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah atau seminar dan pengadaan buku literatur/*textbook* untuk berbagai disiplin keilmuan.

4.3. Diklat Statistik Dasar

a. Diklat Jarak Jauh Statistik Dasar

BPS sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang resmi ditunjuk Pemerintah dalam hal pengumpulan data, senantiasa berusaha untuk dapat mengumpulkan data yang akurat dan *up to date*. Kualitas data sangat bergantung pada pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) pengumpul data. Kenyataannya, banyak SDM BPS yang belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan statistik yang memadai,

khususnya para ujung tombak pengumpul data yaitu Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

Mengingat tersebarinya tempat tugas para Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) yaitu pada kecamatan di seluruh wilayah Indonesia, maka upaya BPS dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi KSK melalui Diklat Jarak Jauh Statistik Dasar (DJJSD).

Diklat ini dirasakan sangat efektif dan efisien, karena peserta belajar secara mandiri menggunakan modul yang telah disediakan. Untuk mempermudah peserta dalam memahami pembelajaran Diklat Jarak Jauh Statistik Dasar, disediakan juga modul diklat multimedia dengan teknik penyampaian dan penyajian yang lebih interaktif dan mudah dimengerti.

b. Belajar dan Bekerja di Bidang Statistik

Dalam rangka menjalani proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) selain proses belajar mengajar yang dilaksanakan di kelas perlu juga menjalani praktek kerja lapangan (belajar dan bekerja di bidang statistik) yang dilaksanakan di daerah tertentu. Kegiatan praktek kerja lapangan dimaksudkan agar mahasiswa STIS dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di kelas dalam bentuk penelitian di lapangan.



Gambar 2.8. Pembekalan PKL mahasiswa STIS di Aula STIS

4.4. Diklat Komputer dan Multimedia

a. Diklat Jaringan

Diklat jaringan diadakan dengan tujuan penguasaan materi administrasi dan sistem jaringan komputer. Pada diklat ini, peserta akan dilatih teknik instalasi jaringan komputer dan sistem administrasi pengelolaan jaringan komputer dengan harapan tiap unit kerja BPS mampu membangun jaringan komputer di area kantor masing-masing. Dengan demikian dapat dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar unit kerja BPS daerah, dan antar unit kerja BPS daerah dengan BPS, STIS dan Pusdiklat BPS serta dengan pengguna data secara luas.

b. Diklat Multimedia

Teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk memperkuat berbagai aktifitas BPS khususnya yang berkaitan dengan diseminasi data statistik kepada pengguna data. Penyajian data yang interaktif dan *user friendly* sangat diperlukan pengguna data. Salah satu teknik dalam penyajian data yang dikembangkan adalah membuat publikasi berbasis multimedia dengan menggunakan *software* macromedia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, BPS mengadakan Diklat Multimedia yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh unit kerja BPS tingkat Provinsi dan unit kerja BPS di Pusat, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan Pusdiklat BPS. Secara garis besar peserta diklat akan mendapatkan materi mengenai teknik membangun aplikasi publikasi berbasis multimedia dengan macromedia .

4.5. Diklat Keuangan dan Kepegawaian

a. Kursus Bendaharawan Pengeluaran

Tujuan kursus bendaharawan pengeluaran adalah untuk menghasilkan bendaharawan yang terampil dan mempunyai kemampuan yang memadai dalam mengelola uang negara. Di samping itu agar memiliki persepsi yang sama dalam pengurusan, pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas di bidang kebendaharawanan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kursus bendaharawan pengeluaran diikuti sebanyak 40 orang peserta dari BPS pusat maupun daerah, dilaksanakan selama 20 hari. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara BPS dengan Pusat Pelatihan Anggaran Departemen Keuangan.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan

Pada Tahun anggaran 2008, BPS telah mengikutkan 640 orang CPNS golongan II pada Diklat Pra Jabatan golongan II dan 258 orang CPNS golongan III pada Diklat Pra Jabatan golongan III yang dilaksanakan secara terpusat selama 1 (satu) bulan di Pusdiklat BPS. Materi Diklat Pra Jabatan untuk golongan II terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan peraturan bidang kepegawaian dan KORPRI, administrasi perkantoran, tugas pokok instansi dan pengetahuan lain yang dianggap perlu. Sedangkan untuk golongan III ditambah dengan materi mental, fisik dan disiplin (MFD). Jumlah peserta diklat prajabatan tahun 2003-2008 disajikan dalam lampiran 15.

**Tabel 2.10. Realisasi Pelaksanaan Diklat Prajabatan di BPS
menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2004 – 2009**

Tahun Anggaran	SMTA		DIII		D4/S1	
	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004	192	192	-	-	156	156
2005	289	289	75	75	133	133
2006	338	338	38	38	128	128
2007	138	138	9	9	130	130
2008	564	564	15	15	275	275
2009	36	36	-	-	277	277

Adapun penyelenggaraan Diklat Pra Jabatan bagi CPNS BPS di daerah hanya untuk golongan II. Diklat Pra Jabatan golongan III dilaksanakan secara terpusat dikoordinasikan oleh LAN bekerjasama dengan BKN. Hambatan pelaksanaan Diklat Pra Jabatan di daerah umumnya terjadi karena tidak setiap tahun ada instansi yang menyelenggarakan Diklat Pra Jabatan.

c. Pelatihan Manajemen Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai dan Penyuluhan Hukum

Semua aparatur di lingkungan BPS harus professional tidak hanya di bidang teknis, tetapi juga di bidang manajemen penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai dan menguasai peraturan yang terkait tugas-tugas BPS. Berkaitan dengan itu BPS melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan agar mampu menjalankan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pada tanggal 2008, BPS mengadakan pembinaan yang diikuti oleh 202 orang yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian BPS Provinsi (7 orang), Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPS Kabupaten/Kota (169 orang), Kepala BPS Kabupaten/Kota (2 orang), staf (23 orang) dan kasubag perlengkapan (1 orang). Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan para pejabat yang menangani administrasi kepegawaian, khususnya manajemen penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai di BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

d. Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2.11. Jumlah Pegawai BPS yang telah Mengikuti Diklat Struktural menurut Jenis Diklat Tahun 2004 – 2009

Jenis Diklat	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)
1. DIKLATPIM IV	171	120	215	250	223	139
2. DIKLATPIM III	37	57	122	102	86	36
3. DIKLATPIM II	-	5	1	7	8	-
4. DIKLATPIM I	-	-	-	-	-	-
5. LEMHANAS *)	-	-	-	-	2	-

Catatan : *) kegiatan tersebut baru diadakan tahun 2008

Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (DIKLATPIM) Tahun Anggaran 2008, sebagai salah satu upaya meningkatkan pengetahuan ketrampilan serta kemampuan dan sikap aparatur statistik. Pegawai yang mengikuti DIKLATPIM II berjumlah

8 orang, DIKLATPIM III 86 orang dan DIKLATPIM IV berjumlah 223 orang, data selengkapnya disajikan pada lampiran 15.

Tujuan dari Diklat ini adalah agar para peserta yang merupakan pejabat struktural eselon II, III dan IV memiliki keseragaman dalam pola pikir dan kesamaan bahasa di kalangan pejabat eselon II, III dan IV, sehingga dapat dicapai kesatuan gerak dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang administrasi.

4.6. Diklat Kompetensi Kepala BPS Kabupaten/Kota

Diklat kompetensi Kepala BPS Kabupaten/Kota tahun 2008 diselenggarakan oleh Pusdiklat dalam 2 gelombang dengan peserta sebanyak 60 orang. Diklat ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas khususnya bagi para pejabat struktural Eselon III, karena kualitas SDM tersebut tidak hanya dilihat dari latar belakang pendidikan formal tetapi yang lebih penting adalah penguasaan berbagai kegiatan statistik mulai dari perencanaan, persiapan, metodologi yang digunakan, pelaksanaan lapangan dan analisisnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kinerja para peserta didik dan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan statistik di BPS Kabupaten/Kota.

4.7. Diklat TOT KSK Pengolahan Data Statistik Dasar

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) adalah salah satu unsur SDM BPS yang bertugas mengumpulkan data statistik. Dengan visinya yang baru yaitu "BPS penyedia statistik berkualitas" tentunya memerlukan tenaga KSK yang handal dalam mengumpulkan data dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, BPS mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada para KSK. Mereka dibekali metode pengumpulan data, pengolahan data dasar dan analisis sederhana. Kegiatan tersebut diikuti oleh 33 KSK berprestasi.



Gambar 2.9. Diklat TOT KSK Pengolahan Data Statistik Dasar di Pusdiklat

4.8. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

a. Rintisan Pendidikan Gelar

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli statistik dan ahli di bidang lainnya, maka pegawai BPS dan BPS daerah diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di beberapa perguruan tinggi dan kepada pegawai yang tugas belajar tersebut diberi biaya bantuan belajar. Tujuan dari kegiatan ini adalah menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu melaksanakan kegiatan statistik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hingga tahap analisis data. Keluaran dari kegiatan ini adalah terciptanya tenaga-tenaga sarjana yang handal.

b. Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien diharapkan dapat mendukung untuk mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan dan kelemahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada tahun-tahun sebelumnya perlu terus menerus dievaluasi utamanya mengenai kurikulum serta materi pendidikan dan pelatihan. Hasil evaluasi selanjutnya akan digunakan untuk menyusun kurikulum dalam rangka perbaikan sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di masa mendatang.

Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi dan analisis kurikulum dan silabus penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang telah berjalan selama ini untuk penyempurnaan penyelenggaraan diklat dimasa mendatang. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya bahan ajar pendidikan dan pelatihan.

<http://www.bps.go.id>

**KERJASAMA
STATISTIK**

B.5



<http://www.bps.go.id>

5. KERJASAMA STATISTIK

Luasnya kegiatan di bidang statistik yang harus dicakup, misalnya saja di bidang ekonomi meliputi semua sektor maka untuk dapat menghasilkan data yang cepat, tepat dan akurat diperlukan kerjasama dengan instansi terkait. Kerjasama dilakukan secara bertahap, diutamakan untuk data statistik yang bersifat makro dan digunakan oleh berbagai pihak. Sedangkan kerjasama untuk data statistik yang bersifat mikro tetap bisa dilakukan, untuk kepentingan khusus instansi, lembaga/departemen.

Berbagai kerjasama telah dilaksanakan oleh BPS baik dengan instansi, lembaga yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerjasama tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan statistik, pembinaan pegawai, bantuan konsultan terhadap BPS dan bantuan konsultan tenaga ahli BPS ke instansi/lembaga lain.

5.1. Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Statistik

Kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan statistik yaitu kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian/diseminasi, analisis dan pertukaran statistik. Kerjasama berupa integrasi kegiatan statistik yang merupakan program BPS dengan program instansi/lembaga yang bersangkutan, baik integrasi secara menyeluruh atau hanya bagian dari kegiatan statistik seperti integrasi sampel terpilih maupun analisis dari hasil survei BPS. Kerjasama tersebut mempunyai dampak positif sehingga terjadi keterpaduan metode, konsep dan definisi serta klasifikasi terhadap kemungkinan terjadi duplikasi pengumpulan data. Berbagai kerjasama telah berlanjut sehingga menjadi kegiatan berkala baik bulanan, triwulanan maupun tahunan.

Berbagai kerjasama yang telah dijalankan oleh BPS dengan instansi/lembaga lain sepanjang tahun 2008 dapat dilihat pada lampiran.

5.2. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan berbagai pihak telah dilaksanakan secara luas baik dengan lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri yaitu kerjasama dengan hampir seluruh lembaga non departemen, departemen sektoral dan instansi pemerintah lainnya, serta beberapa universitas negeri dan lembaga internasional. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan diantaranya berupa pemberian

kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun melanjutkan sekolah (tugas belajar).

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari program pembinaan pegawai, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan potensi sumber daya manusia di BPS. Pengadaan pelatihan terus menerus dilaksanakan baik untuk pegawai BPS sendiri maupun instansi lain dan masyarakat luas. Demikian pula dengan penawaran dan pengiriman tugas belajar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, setiap tahun selalu dilakukan. Untuk itu secara rutin telah dijalin kerjasama dengan beberapa universitas di dalam negeri dan beberapa lembaga penyelenggara beasiswa yang menawarkan berbagai program studi di luar negeri.



Gambar 2.10. Studi *Poverty Measurement* yang diikuti oleh peserta dari negara-negara Asia Pasifik

Pada tahun 2008, tercatat sebanyak 128 kegiatan kerjasama pendidikan dan pelatihan di luar negeri yang diterima oleh pegawai BPS, baik dalam bentuk program beasiswa tugas belajar, seminar maupun berbagai pelatihan/training lainnya. Data lengkap dapat dilihat pada tabel dalam lampiran 22 dan 23.



Gambar 2.11. Pejabat dari Australian Bureau of Statistics (ABS) berada di BPS untuk mediskusikan beberapa kegiatan yang mendapat bantuan dari ABS.

5.3. Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Understanding/ MoU)

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh BPS dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan terhadap kebutuhan data dan informasi secara lengkap, cepat dan akurat. BPS dipandang sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang bertugas menyediakan data statistik sebagai dasar berbagai perencanaan dan evaluasi program kegiatan di instansi/lembaga pemerintah maupun swasta.

Sepanjang Tahun 2008, tercatat sebanyak 34 jenis perjanjian kerjasama/MoU yang telah dilaksanakan oleh BPS dengan beberapa instansi/lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 20.



Gambar 2.12. Pertukaran Naskah Kesepahaman antara Nur Hidayat (LAPAN) dengan Sihar Lumbantobing (BPS) di Gedung Pusat Data LAPAN.

Pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPS dan LAPAN, Deputy Bidang Penginderaan Jarak Jauh Nur Hidayat mengatakan "Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi LAPAN dan BPS, karena dengan Naskah Kesepahaman ini akan terjadi perkawinan antara data spasial dengan data tabular." Tindak lanjut dalam waktu dekat dari MoU ini adalah pembuatan Peta Blok Sensus SP2010 dengan menggunakan foto yang diambil dari satelit.



Gambar 2.13. Kesepahaman antara BPS dan KPAI dalam rangka pertukaran data statistik anak.

5.4. Studi Banding ke Dalam Negeri dan Luar Negeri

Perencanaan kegiatan di BPS haruslah dapat mengakomodir kebutuhan yang sedang berkembang, disertai dengan diseminasi hasil kegiatan kepada masyarakat luas secara efektif dan efisien. Untuk itu, peningkatan kapasitas kehumasan dan perencanaan menjadi semakin diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai BPS di bidang kehumasan dan perencanaan.



Gambar 2.14. Tamu dari Maroko, studi banding mengenai program bantuan sosial di Indonesia (PKH)

Kunjungan studi banding tentang sistem kehumasan dan perencanaan ke negara lain yang dipandang lebih maju dalam kedua bidang tersebut serta kunjungan ke beberapa instansi lain di dalam negeri, sungguh diperlukan. Salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dari sistem yang telah diterapkan di lembaga tersebut dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dalam rangka peningkatan kompetensi kehumasan dan perencanaan di BPS. Kunjungan kemitraan (tamu asing) tahun 2008 selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 21.



Gambar 2.15. Kepala BPS, Dr. Rusman Heriawan menerima kunjungan tamu GSO (General Statistic Office) Vietnam di ruang kerjanya

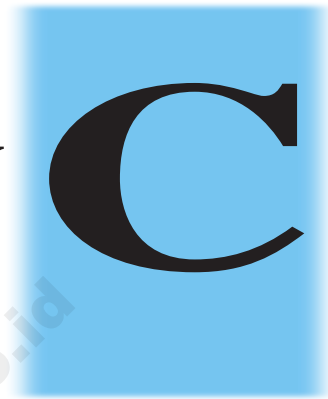
5.5. Sosialisasi Kegiatan BPS

Tujuan sosialisasi kegiatan statistik adalah meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan data statistik yang dihasilkan BPS kepada semua kalangan dan dapat mewujudkan masyarakat yang sadar statistik. Melalui penanganan sosialisasi kegiatan statistik yang profesional diharapkan sasaran tersebut dapat terwujud.

Sosialisasi kegiatan statistik di BPS dilaksanakan melalui *press release*, *workshop*, seminar dan dialog interaktif. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui penerbitan majalah Varia Statistik dan dokumentasi lainnya serta peliputan seluruh kegiatan statistik di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan sosialisasi pada tahun 2008 meliputi penerangan sensus dan survei, *press release* melalui berbagai media, layanan perpustakaan, kursus dan *workshop* tentang statistik untuk wartawan serta membangun "corporate image" yang baik.

**METODOLOGI DAN
INFORMASI
STATISTIK**



<http://www.bps.go.id>

**METODOLOGI
SENSUS DAN
SURVEI**

C.1

<http://www.bps.go.id>



BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK

1. METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI

1.1. Penyempurnaan Klasifikasi Komoditi dan Pembakuan

Kegiatan penetapan klasifikasi desa perkotaan-pedesaan dilakukan dengan melakukan skoring atau mengolah beberapa variabel data Podes yang dipilih sebagai indikator pembeda antara perkotaan dan pedesaan. Setelah dilakukan skoring kemudian dilakukan pengecekan kelapangan untuk desa-desa yang mempunyai skor di antara skor batas (total skor=10) guna memastikan sebagai desa perkotaan atau desa pedesaan. Sedangkan kegiatan penyusunan konsep definisi baku operasional statistik menurut kegiatan ekonomi dilakukan dengan studi literatur dan masukan dari daerah-daerah.

Penetapan klasifikasi desa perkotaan-pedesaan dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan satu set klasifikasi desa yang terbaru sebagai dasar perencanaan kegiatan BPS dan juga analisis data. Sedangkan sasaran akhir dari penetapan klasifikasi perkotaan-pedesaan adalah digunakannya klasifikasi desa yang terbaru dalam kegiatan BPS.

1.2. Studi Pembentukan Unit Sampling

Salah satu tujuan dari pada Sensus Penduduk adalah menyiapkan data dasar untuk pembentukan master frame untuk kegiatan berbagai sensus/survei di masa yang akan datang, utamanya survei yang dilakukan dengan pendekatan rumah tangga. Survei yang dilakukan dengan pendekatan rumah tangga tidak mungkin menerapkan metode penarikan sampel satu tahap karena sangat rumit memelihara master sampling frame yang berupa daftar nama kepala rumahtangga.

Oleh karena itu yang perlu diupayakan master sampling frame yang satuannya adalah area atau wilayah. Secara formal satuan wilayah administrasi pemerintahan terkecil adalah desa/kelurahan. Untuk memperlancar pemerintahan di bawah desa/kelurahan dibentuk satuan lingkungan setempat (SLS) yang sifatnya khas (nama dan tingkatan/level) dan berbeda antar daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota).

Hasil dan Keluaran:

- 1). Daftar dan gambar seketsa peta unit sampling dengan berbagai indentitas kewilayahannya yang mudah dikenali baik oleh *survei*yor maupun masyarakat awam.
- 2). Rekomendasi pembentukan unit sampling dalam rangka persiapan Sensus Penduduk.

1.3. Post Enumeration Survey (PES) Sensus Ekonomi

Permasalahan di lapangan tidak terlepas dari kesalahan yang disebut dengan nonsampling error. Kesalahan ini merupakan bias yang disebabkan antara lain oleh kesalahan petugas lapangan dan kesalahan responden. Kesalahan petugas lapangan dapat berupa salah cakup (coverage error), dan salah isi (content error), Sedangkan kesalahan responden dapat berupa salah jawab (responden error) yang juga merupakan bagian dari content error.

Untuk mengukur tingkat ketelitian dari hasil kegiatan SE06, perlu dilakukan kegiatan Post Enumeration Survey-Sensus Ekonomi 2006 (PES-SE06). Kegiatan PES-SE06 bertujuan untuk mendapatkan tingkat ketelitian cakupan (coverage) dan tingkat ketelitian dari isian variabel (variabel content) dari perusahaan/usaha yang dicatat.

1.4. Pengelolaan MFD dan SIG-S MFD (Master File Desa)

Master File Desa (MFD) dalam hal ini adalah daftar nama dan kode wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota/kotamadya, kecamatan, dan desa/kelurahan) beserta peta (peta *hardcopy* dan peta spasial) sangat diperlukan dalam setiap kegiatan sensus/survei.

Dalam rangka kegiatan sensus dilakukan updating wilayah administrasi dilakukan karena banyak terjadi perubahan (pemecahan dan penggabungan) sejak dilakukan updating pada kegiatan sensus sebelumnya.

Updating blok sensus dilakukan dengan membentuk sub blok sensus yang 25 % s/d 80 % muatannya merupakan kegiatan usaha. Inti dari kegiatan ini adalah melakukan updating MFD, updating peta digital dan menyusun publikasi peta indeks.

1.5. Penyusunan SIG

SIG-S adalah suatu system yang dibuat untuk menyimpan, mengolah/ memanipulasi, menganalisa dan menyajikan data, baik data spasial (berupa wilayah atau peta) maupun data atribut (data statistik). Dalam kegiatan ini akan disusun SIG-S data hasil Sensus Pertanian dalam bentuk softcopy dan publikasi data hasil sensus pertanian dalam bentuk peta tematik.

Inti dari kegiatan ini adalah pengelolaan data, baik data spasial (peta) maupun data atribut dan diintegrasikan dengan cara membuat link antara data spasial dan data atributnya, serta pembuatan peta tematik dalam bentuk buku aplikasi.

1.6. Up Dating Direktori Perusahaan (Hasil SE 2006) dan Manual Aplikasi Program

Direktori perusahaan yang ada saat ini diantaranya merupakan direktori perusahaan hasil pendataan SE 2006. Keberadaan direktori perusahaan pada era globalisasi dan perkembangan sektor usaha ekonomi pada saat ini dirasa sangat penting, karena akan memberikan input atau masukan kepada pemerintah lokal khususnya dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor usaha ekonomi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah; 1) memperoleh informasi jumlah perusahaan yang terbaru, 2) memperoleh daftar direktori perusahaan beserta alamat sesuai lapangan, 3) mengevaluasi keberadaan suatu unit perusahaan, apakah masih beroperasi, tidak ditemukan, atau sudah tutup, dan 4) memberikan masukan dan informasi kepada pengguna data tentang tata cara serta proses penyempurnaan direktori.

Keluaran dari kegiatan ini adalah Daftar Direktori Perusahaan/Usaha terbaru sesuai lapangan dan telah dilakukan evaluasi tentang keberadaannya di lapangan (masih beroperasi, sudah tutup, dll).

1.7. Sampling Error

A. Survei Penduduk Antar Sensus

Dalam pengumpulan data, khususnya melalui survei atau sensus sampel, data yang dihasilkan mengandung kesalahan (*error*) berupa

sampling error dan *nonsampling error* yang dapat memengaruhi tingkat presisi pendugaan hasil suatu survei. Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) merupakan salah satu survei yang sangat penting untuk memperoleh data mengenai berbagai karakteristik kependudukan dengan presisi yang tinggi. Dengan demikian informasi mengenai besarnya kesalahan *sampling* bagi statistik yang disajikan sangat diperlukan agar pengguna data Supas dapat menginterpretasikan data secara lebih tepat.

Metodologi yang digunakan adalah dengan 1) penghitungan *sampling error* Supas meliputi 33 provinsi di Indonesia yang dibedakan daerah perkotaan dan pedesaan, 2) sumber datanya adalah *raw data* hasil pencacahan Supas untuk beberapa variabel penting, dan 3) penghitungan nilai estimasi kesalahan *sampling* dilakukan dengan menggunakan paket program stata versi 8.

Keluaran dari kegiatan ini adalah Publikasi yang memuat estimasi nilai total/rata-rata per provinsi untuk setiap karakteristik yang diteliti dirinci menurut perkotaan dan pedesaan, *standard error*, *relative standard error*, dan *design effect*.

B. Sampling Error Susenas

Mengingat pentingnya data Susenas, maka keakuratan datanya sangat diharapkan, khususnya modul kesehatan dan perumahan. Untuk mengetahui tingkat keakuratan dari data Susenas tersebut diperlukan informasi mengenai besarnya kesalahan *sampling* bagi statistik yang disajikan. Dengan diketahuinya angka perkiraan kesalahan *sampling* ini, pengguna data susenas dapat menginterpretasikan data secara lebih tepat.

Penghitungan kesalahan *sampling* susenas untuk mendapatkan nilai dugaan *sampling error* disajikan dalam bentuk: *standard error*, *relative standard error*, dan *confidence interval*.

1.8. Penyempurnaan dan Pengembangan Kerangka Contoh Induk (KCI)

Pemutakhiran Kerangka Contoh Induk (KCI) dalam bentuk Master File Desa (MFD), dilakukan secara berkala mengikuti perubahan yang terjadi di daerah. MFD digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan statistik di bidang pertanian, ekonomi, sosial dan kependudukan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyeragamkan MFD mutakhir yang ada di BPS dengan yang ada di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Di samping itu pemutakhiran terus dilakukan dengan menambahkan muatan dari hasil listing sensus maupun survei. Selanjutnya MFD tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan survei dan sensus di bidang ekonomi maupun sosial di masa yang akan datang, baik yang dilakukan dengan pendekatan rumah tangga maupun usaha. Sehingga pengumpulan data yang dilakukan melalui sensus dan survei menjadi lebih efektif dan efisien.

1.9. Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi dan Ukuran Statistik

Penyempurnaan klasifikasi, konsep definisi dan ukuran statistik diperlukan agar hasil data tidak saja akurat, komparatif dan berkualitas, tetapi juga data dapat dikelompokkan dan diklasifikasikan lebih rinci menurut kegiatan ekonomi maupun komoditi. Pada saat ini dilakukan penyusunan konsep definisi baku operasional statistik untuk bidang pertambangan, energi dan konstruksi serta statistik industri pengolahan. Penyusunan dan penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan satu set konsep dan definisi yang baku untuk digunakan dalam kegiatan sensus dan survei.

Sementara itu Komisi Statistik PBB telah memutuskan bahwa *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)* Revisi 4 telah diterbitkan pada tahun 2007. Sehingga untuk menjaga keterbandingan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan ISIC dilakukan persiapan revisi KBLI berdasarkan ISIC Revisi 4.

1.10. Pelatihan *Small Area Statistics* JICA Tahap I dan II

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar peserta mampu menyajikan informasi sampai wilayah kecil dan membuat tampilan dalam bentuk peta. Pelatihan dilakukan di kelas dengan fasilitas komputer lengkap untuk seluruh peserta dan penyaji. Penguasaan materi dilakukan dengan diskusi dan latihan di kelas untuk membuktikan kemampuan penguasaan materi. Peserta yang telah mengikuti pelatihan *Small Area Statistics* JICA sebanyak 80 orang.

Seminar bertujuan untuk mensosialisasikan kegunaan Statistik Wilayah Kecil sebagai basis data dalam perencanaan pembangunan, strategi

pengentasan kemiskinan, pencegah epidemi, pengendali banjir dan lain-lain. Setelah mengikuti seminar ini diharapkan para peserta dapat mengaplikasikan data tersebut dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing.

1.11. Pemetaan Wilayah Tahap I

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 perlu dilakukan kegiatan pemetaan desa/kelurahan dan blok sensus. Peta desa/kelurahan digambarkan secara lengkap antara lain batas segmen, batas satuan wilayah setempat (SLS) terkecil dan muatannya yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembentukan blok sensus. Kegiatan ini melibatkan aparat desa/kelurahan seluruh Indonesia untuk menggambarkan peta desa/kelurahan.

Hasil dari kegiatan ini adalah:

- (1) Daftar nama wilayah administrasi sampai dengan desa/kelurahan (MFD)
- (2) Daftar nama blok sensus (MFBS)
- (3) Sketsa peta desa/kelurahan yang memuat batas sls dan muatannya beserta batas blok sensus.
- (4) Sketsa peta RW yang memuat batas RT dan muatannya (khusus DKI Jakarta) beserta batas blok sensus.

1.12. Penyiapan Peta Dasar Wilayah Kerja Statistik

Pemetaan Sensus Penduduk 2010 merupakan rangkaian kegiatan SP2010 yang dimulai dengan survei potensi desa, khususnya penyiapan peta dasar yaitu desa/kelurahan dan RW (khusus DKI Jakarta) untuk pembentukan peta SLS dan peta Blok Sensus. Peta merupakan alat pendukung kegiatan perstatistikan seperti yang disimpulkan dalam *Principle and Recommendation for Population Census*.

Ketersediaan peta yang memiliki tingkat akurasi tinggi dapat meningkatkan mutu perencanaan, dan kualitas data statistik yang dihasilkan bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan (*No Map, No Plan, No Quality Statistics*).

Dalam kegiatan statistik di Indonesia, peta statistik merupakan salah satu instrumen terpenting dalam kegiatan survei dan sensus BPS, karena

kegiatan-kegiatan survei dan sensus BPS menggunakan pendekatan wilayah.

Ibarat rumah, peta merupakan fondasi dari rumah, yang apabila fondasi tidak kuat, maka rumah akan mudah roboh. Dengan adanya peta yang baik, maka:

- a. pendataan rumah tangga untuk sensus penduduk 2010 menjadi tidak lewat cacah atau ganda cacah;
- b. listing dan estimasi langsung survei-survei BPS menjadi akurat;
- c. Kualitas diseminasi statistik melalui sistem informasi geografis seperti dalam membuat *poverty mapping* menjadi akurat.

Selama ini BPS menggunakan sketsa peta yang berdasarkan kepada ketersediaan peta dasar di desa yang belum *bergeoreference*, sehingga belum memenuhi kriteria tepat posisi dan bentuk. Pada kegiatan pemetaan SP 2010, BPS menganut paradigma baru yaitu pemetaan dengan berbasis teknologi tinggi penginderaan jauh.

Dengan adanya peta berbasis satelit ini, posisi dan bentuk peta menjadi tepat dan updating peta di kemudian hari menjadi jauh lebih efisien, karena sifat updating peta tidak perlu menyeluruh. Berkaitan dengan penyiapan peta dasar berbasis citra satelit BPS mengadakan pemberdayaan kemampuan olah citra satelit yang selanjutnya disebut TOT Pemetaan.

1.13. TOT Pemetaan

TOT Pemetaan dilakukan untuk melatih SDM BPS agar mampu melakukan olah citra satelit yang selanjutnya melatih rekan-rekan di seluruh BPS provinsi di Indonesia. Peserta TOT berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dari BPS Provinsi dan 25 (dua puluh lima) orang dari BPS dilatih selama 12 (dua belas) hari. Sebagai salah satu pelaksana kegiatan pemetaan untuk Sensus Penduduk 2010 ini peserta diharapkan menjadi *agent of change* kegiatan yang berbasis teknologi citra satelit di BPS termasuk *agent of communication* untuk kegiatan sensus penduduk itu sendiri.

Kegiatan pemetaan merupakan salah satu kegiatan prioritas BPS. Sehingga pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien perlu diperhatikan untuk menjamin semua kegiatan BPS dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Peserta provinsi selain sebagai pelatih juga sebagai penghimpun peta dasar dari BPS Kabupaten/Kota harus melaporkan *progress* kerja setiap dua minggu sekali ke BPS Provinsi. Selanjutnya *progress* kerja tersebut dilaporkan kepada BPS.

Kegiatan pemberdayaan kemampuan olah citra ini hanya bisa terlaksana berkat bantuan teknis dari LAPAN, atas upaya peningkatan kapasitas SDM BPS dalam pengelolaan data citra satelit.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan untuk kepentingan Sensus Penduduk 2010, sumber data secara bertahap dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketersediaan peta yang ada di wilayah kabupaten/kota. Secara bertahap data citra resolusi tinggi dari LAPAN atau instansi terkait lainnya dapat digunakan.

<http://www.bps.go.id>

**DISEMINASI
STATISTIK**

C.2



<http://www.bps.go.id>

2 DISEMINASI STATISTIK

2.1. Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus

Tujuan terpenting penyempurnaan sistem aplikasi pelayanan metadata adalah untuk meningkatkan kinerja, menyempurnakan formulir yang digunakan agar mudah diisi, mempersiapkan integrasi dengan metadata lainnya dan menyempurnakan sistem diseminasi metadata. Peningkatan kualitas *database* merupakan faktor yang terkait dengan sistem aplikasi.

Sistem aplikasi sangat menentukan keberhasilan suatu informasi dan salah satu kendala yang dihadapi di waktu lalu adalah tidak mempunyai sistem aplikasi yang mendukung penanganan informasi rujukan statistik, khususnya pada *text format data type*. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan pelayanan metadata, BPS telah menyiapkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa) dalam sistem tersebut dapat diakses metadata statistik dasar, sektoral dan khusus. Metadata statistik sektoral dan khusus diperoleh dengan cara melakukan kunjungan ke instansi penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan khusus. Dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengumpulan di instansi vertikal dan di instansi otonom. Penyelenggara di instansi vertikal dikumpulkan oleh Direktorat Diseminasi dan *Liaison Officer*, sedangkan di instansi otonom dipilih 13 provinsi.

Ketiga belas provinsi terpilih, 6 (enam) provinsi di antaranya yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Jambi, Riau dan Banten melakukan rapat koordinasi antara BPS dan instansi otonom sebelum melakukan pendataan statistik sektoral dan khusus. Sedangkan 7 (tujuh) provinsi lainnya, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah langsung melakukan evaluasi pendataan statistik sektoral dan khusus ke instansi otonom, karena rapat koordinasi sudah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Sosialisasi Koordinasi Kegiatan Statistik

Koordinasi Kegiatan Statistik di Pusat

Koordinasi kegiatan statistik digunakan untuk mendorong pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan statistik antar instansi pemerintah di tingkat pusat. Koordinasi ini perlu dilakukan secara menyeluruh

dan berkesinambungan agar penyelenggara kegiatan statistik dapat saling memberi manfaat dalam peningkatan mutu kegiatan statistik.



Gambar 3.1. Kerjasama World Bank dengan BPS “Workshop Revitalisasi Pengelolaan Data Sektoral di Pusat dan Daerah” di Hotel Aston Jakarta, 8 Mei 2008.

World Bank bekerja sama dengan BPS melalui kegiatan *Trust Fund Statistical Capacity Building* (TFSCB) menyelenggarakan “Workshop Revitalisasi Pengelolaan Data Sektoral di Pusat dan Daerah” di Hotel Aston, Jakarta Pusat, 8 Mei 2008. Peserta workshop merupakan para perwakilan dari enam provinsi (Jatim, Jateng, Bali, Kalbar, Sumsel, dan Kepri) yang menjadi tempat *pilot project*. Mereka adalah Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten/Kota, Bappeda, dan utusan instansi sektoral di daerah. Hadir pula pejabat Bappenas dan para perwakilan bank dunia.

Penyusunan Panduan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Penyusunan panduan rekomendasi kegiatan statistik dimaksudkan agar terbentuk kesamaan pemahaman dalam pemberian rekomendasi. Pemberian rekomendasi statistik tidak hanya dilakukan di BPS Pusat, tetapi juga di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu panduan rekomendasi tersebut sangat diperlukan dalam rangka mendukung terciptanya Sistem Statistik Nasional.

Survei Kebutuhan Data

Survei ini bertujuan untuk meneliti dan mengevaluasi kebutuhan konsumen atas data statistik yang telah disajikan oleh BPS, baik bagi mereka yang langsung mengunjungi BPS (melalui layanan perpustakaan, Subdit Layanan Statistik, Bidang IPDS, maupun subdit/bidang subject matter), ataupun mereka yang berkomunikasi dengan BPS melalui media telepon maupun internet.

Survei kebutuhan data, mencakup 6 (enam) wilayah, meliputi BPS dan 5 (lima) BPS Provinsi sampel, yaitu Bangka Belitung, Lampung, Yogyakarta, Bali dan Jawa Barat. Responden yang menjadi target dalam penelitian ini meliputi konsumen data yang memungkinkan untuk dijangkau, yaitu konsumen yang berkunjung langsung ke BPS untuk memperoleh data, serta konsumen yang berkomunikasi dengan BPS melalui media lain untuk memperoleh data statistik yang dibutuhkan.

Kuesioner yang digunakan pada survei kebutuhan data terdiri atas:

1. SKD08-P, yaitu responden yang mengunjungi BPS (baik perpustakaan, Subdit Layanan ataupun ke subdit/bidang/bagian). Seluruh sampel diperkirakan sebanyak 1.650 orang.
2. SKD08-D, yaitu responden biro/bidang perencanaan, kepala pusat data, ataupun karo bina program/di instansi/lembaga pemerintah. Jumlah sampel yang diambil adalah:
 - sampel dinas yaitu 5 (lima) sampel untuk di pusat dan masing-masing daerah.
 - sampel instansi swasta yaitu 10 (sepuluh) asosiasi/universitas di pusat dan masing-masing 5 (lima) asosiasi/universitas di daerah.

2.2. Peningkatan Pelayanan dan Standar Kualitas Publikasi

Kegiatan pemutakhiran pedoman pembuatan publikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas publikasi yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan selera konsumen. Beberapa penyempurnaan yang dilakukan adalah format, corak dan ragam publikasi dengan tetap menonjolkan *product image* untuk publikasi BPS.

Daerah Dalam Angka (DDA) dan Berita Resmi Statistik (BRS) formatnya sudah distandarkan, sehingga pengguna dapat dengan mudah membandingkan data antar daerah melalui DDA, dan menganalisis kondisi

sosial ekonomi dari BRS yang disajikan secara berkesinambungan setiap bulan. Begitu juga dengan penomoran katalog publikasi, yang dirancang untuk memudahkan pengelompokan jenis publikasi dengan kriteria tertentu. Sedangkan pemberian nomor ISSN/ISBN dilakukan dengan cara meregistrasi setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS ke Perpustakaan Nasional (untuk ISBN) dan ke LIPI (untuk ISSN). Registrasi ini diharapkan dapat menyebarkan publikasi BPS kepada konsumen data dari manca negara.

2.3. Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik, Standarisasi Pelayanan dan Sosialisasi Informasi Statistik

Produk akhir dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS adalah informasi statistik. Salah satu bentuk penyajian informasi statistik adalah publikasi. Publikasi yang diterbitkan oleh BPS tidak saja meningkat dalam ragamnya, tetapi juga kuantitasnya. Untuk itu, menuntut BPS agar mampu menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dengan beragam format penyajian statistik.



Gambar 3.2. Salah satu bentuk penyajian informasi statistik berupa web

Dengan memanfaatkan teknologi informasi termasuk piranti lunak dan tenaga teknis yang telah tersedia di BPS dan BPS daerah, memungkinkan dibuat kemasan statistik dalam bentuk elektronik. Kemasan statistik tersebut dikemas dalam media komputer (CD, disket) dan media internet

(*website*). Agar dapat melayani pengguna data secara baik dibutuhkan standarisasi pelayanan, di antaranya: layanan data mikro, layanan dalam bentuk elektronik, dan layanan berupa kompilasi/ringkasan produk BPS.

Penyajian informasi statistik melalui media CD, disket, dan internet dimaksudkan untuk memperluas jangkauan dan kualitas layanan statistik kepada pengguna data BPS. Melalui media elektronik, informasi dapat disebarluaskan secara mudah, murah, dan cepat.

2.4. Pembuatan Database Dokumentasi dan Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan BPS

Dalam rangka peningkatan pengelolaan perpustakaan, BPS telah membina seluruh BPS Provinsi dalam pengelolaan perpustakaan. Kegiatan ini bertujuan agar dapat terwujud database dokumentasi statistik terpadu dan keseragaman sistem pengelolaan perpustakaan.



Gambar 3.3. Pengguna perpustakaan semakin mudah mencari informasi dengan adanya database dokumentasi

Keluaran dari kegiatan ini adalah; 1) Buku Panduan Inventarisasi Bahan Pustaka dan Pengelolaan Perpustakaan BPS, 2) Buku Revisi Panduan Pengoperasian Paket Program WINISIS versi 1.5, 3) Database dokumentasi, 4) Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan yang andal, dan memiliki

visi mengembangkan perpustakaan, 5) Sistem inventarisasi pustaka yang baik guna menunjang kegiatan perpustakaan, 6) Laporan Pelaksanaan Pembinaan Pengelola Perpustakaan BPS Provinsi dan 7) Dokumentasi Elektronik.

<http://www.bps.go.id>

SISTEM INFORMASI STATISTIK

C.3

<http://www.bps.go.id>



3 SISTEM INFORMASI STATISTIK

3.1. Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem Pengolahan Data Terpadu

Pengolahan data merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam rangkaian pelaksanaan suatu sensus, survei, ataupun studi kasus. Sudah sejak lama pengolahan data di BPS menggunakan komputer. Akan tetapi, apabila dahulu pengolahan data dilakukan secara terpusat di unit kerja khusus pengolahan data dengan menggunakan komputer *main frame*, kini pengolahan data dilakukan secara terdistribusi, baik dilakukan oleh unit khusus pengolahan data, yaitu oleh Sub Direktorat Integrasi Pengolahan, oleh para pemilik *subject matter* (unit kerja teknis di BPS) maupun oleh perwakilan BPS di daerah.

Pengolahan terdistribusi ini dimungkinkan karena baik pemilik *subject matter* maupun daerah telah memiliki komputer yang memadai untuk melakukan pengolahan data. Komputer itu ada yang masih bersifat *stand alone* dan ada yang telah dihubungkan dalam suatu jaringan.

Keluaran dari kegiatan ini ; 1) Buku Pedoman Sistem Imputasi Data Modul Statistik Sosial dan Produksi; 2) Buku Pedoman Sistem Penggunaan Data Warehouse Hasil Sensus Pertanian.

3.2. Pembahasan dan Evaluasi Migrasi Platform Email dari Lotus Notes ke Sistem Email Berbasis Open Source (QMAIL-LDAP)

Server email yang beroperasi selama ini (*Lotus Notes*) sudah berakhir lisensinya, dan diputuskan untuk menggantinya dengan server email yang berbasis opensource. Untuk itu perlu dilakukan pengalihan migrasi (*migration*) sistem termasuk isi email dari server lama ke yang baru.

Keluaran kegiatan ini berupa beroperasinya server email yang baru dan berbasis open source (zimbra), menggantikan server email yang lama (*lotus notes*), serta tersusunnya dokumentasi zimbra (sistem dan penggunaannya).

3.3. Pembahasan dan Evaluasi Pengembangan Direktori Server Berbasis Open Source (OpenLDAP)

Layanan direktori (*directory service*) antara lain menyediakan dan mengatur akses ke sekumpulan sumber daya komputer seperti file dan folder. Selama ini layanan ini didukung oleh Novel Netware yang sudah *discontinue*. Untuk penggantinya perlu dilakukan pengkajian terhadap alternatif yang bersifat open source (OpenLDAP). Keluaran dari kegiatan ini berupa Sistem layanan LDAP dan dokumentasinya.

3.4. Pembahasan dan Evaluasi Pengembangan Sistem Firewall Berbasis Open Source

Di lingkungan jaringan BPS *firewall* berfungsi menyaring (*filter*) permintaan koneksi ke layanan jaringan BPS agar seluruh server BPS terlindung dari penyalahgunaan. Alternatif tersedia dalam bentuk open source, ataupun proprietary produk seperti *Watch Guard*. Untuk itu perlu kajian tentang kesesuaian alternatif tersebut untuk diterapkan di BPS.

Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumentasi argumentasi dan implementasi penggunaan firewall yang cocok untuk BPS.

3.5. Pembahasan dan Evaluasi Pengembangan Sistem Update Security dan Anti Virus.

Software termasuk anti virus memerlukan update berkelanjutan. Update sendiri-sendiri langsung ke internet dari semua PC di lingkungan BPS akan menyita bandwidth koneksi internet BPS. Pemanfaatan layanan Software update Service (SUS) dapat meringankan beban koneksi tersebut. Untuk itu perlu kajian dan evaluasi tentang teknologi layanan SUS yang digunakan di BPS selama ini.

Keluaran kegiatan ini adalah Sistem Software Update Service dan dokumentasi tata cara penggunaannya.

3.6. Perawatan Perangkat Jaringan Komunikasi Data dan Perlengkapannya di BPS Pusat.

Perawatan perangkat jaringan BPS termasuk server dan peralatan komunikasi data adalah kegiatan rutin tahunan yang pekerjaannya

dilelangkan ke penyedia jasa perawatan yang berkualifikasi. Sebagian dari perangkat tersebut harus dirawat dengan tingkat pemeliharaan yang tinggi karena menyangkut layanan yang kritikal dan tidak boleh terputus seperti email dan web.

Keluaran dari kegiatan ini adalah perangkat jaringan komunikasi data berfungsi baik secara berkesinambungan.

3.7. Pembahasan dan Evaluasi Pengembangan Sistem Perawatan Perangkat Jaringan Komunikasi Data dan Perlengkapannya.

Perawatan perangkat jaringan BPS termasuk server dan peralatan komunikasi data adalah kegiatan rutin tahunan untuk memastikan keberlangsungan layanan jaringan komunikasi data BPS. Penyedia jasa perawatan dan staf jaringan komunikasi data perlu secara bersama menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Untuk kelancaran dan efisiensi kegiatan tersebut, perlu selalu disempurnakan mekanisme dan prosedur (sistem) perawatan jaringan, dan didokumentasikan ke dalam *Standard Operating System (SOP)*.

Keluaran berupa Dokumentasi SOP untuk semua perangkat jaringan dan server.

3.8. Pembahasan dan Evaluasi Sistem Portal Komunikasi Intranet Badan Pusat Statistik

Web portal untuk komunitas pegawai BPS diperlukan sebagai media komunikasi antar sesama pegawai BPS. *Web* portal dilengkapi dengan informasi satuan kerja, nama pegawai, nomor telepon ekstensi, berita kegiatan internal BPS atau berita lain yang terkait dengan pegawai BPS.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya Sistem web portal untuk pengguna BPS (<http://community.bps.go.id>).

3.9. Pembahasan Penyusunan Program Jabatan Fungsional Komputer

Sebagai instansi pembina jabatan fungsional pranata komputer, BPS perlu mengembangkan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pejabat pranata komputer, tim penilai, sekretariat pranata komputer, dan

masyarakat umum yang relevan. Untuk itu disusun sistem informasi pranata komputer berbasis web sebagai media komunikasi antar pranata, penilai, dan sekretariat. Di samping itu juga disiapkan aplikasi pendukung sekretariat pranata komputer.

Keluaran dari kegiatan ini adalah 1) Situs dan aplikasi berbasis web jabatan fungsional pranata komputer (<http://prakom.bps.go.id>), 2) Database dan aplikasi pengelolaan data jabatan fungsional pranata komputer.

3.10. Pembahasan Rencana Strategis Bidang Teknologi Informasi

Rencana Strategis Teknologi Informasi diperlukan oleh BPS untuk menjaga kesinambungan dan menentukan arah pengembangan teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan.

Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumentasi arah kebijakan pengembangan teknologi informasi BPS.

3.11. Perawatan AC Ruang Server

Pendinginan ruang server sangat mempengaruhi kesinambungan kerja server. Pendingin harus mampu beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena server BPS harus tetap beroperasi dalam waktu yang sama.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya perangkat AC yang beroperasi dengan baik dan berkesinambungan.

3.12. Langganan Bandwidth ke IPTEKNET (512 Kbps)

Komunikasi data melalui IPTEKNET adalah jalur utama ke Internet yang digunakan untuk diseminasi data melalui situs web BPS dan pengiriman/penerimaan email. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk; 1) Menyediakan jalur internet bagi situs web dan email BPS, 2) Melanjutkan kontrak seperti tahun sebelumnya.

Keluaran dari kegiatan ini adalah komunikasi data untuk situs web dan email melalui internet dapat terlaksana dengan lancar.

3.13. Langganan Bandwidth ke Wasantara (64 dan 512 Kbps)

Komunikasi data melalui Wasantara adalah jalur alternatif ke internet yang digunakan akses situs web luar untuk pencarian informasi dan untuk pengiriman data dari BPS Daerah ke BPS Pusat.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk; 1) Menyediakan jalur internet bagi pengguna BPS untuk mengakses situs di luar BPS dan jalur bagi BPS daerah untuk mengirim data ke BPS Pusat, 2) Melanjutkan kontrak seperti tahun sebelumnya.

Keluaran dari kegiatan ini adalah komunikasi data untuk pengumpulan informasi melalui internet dapat terlaksana dengan lancar.

3.14. Pembinaan Pengembangan Teknologi Informasi

Peningkatan kapasitas SDM Teknologi sangat mendukung proses pengembangan teknologi informasi di BPS. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk; 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia teknologi informasi, 2) Melaksanakan pelatihan teknis untuk SDM TI di BPS dengan mendatangkan pakar TI dari luar BPS.

Keluaran dari kegiatan ini adalah SDM TI BPS yang meningkat kapasitasnya.

3.15. Uji Coba Sistem Jaringan

Kondisi infrastruktur jaringan di daerah harus dipantau dan permasalahan yang ditemukan segera diatasi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk; 1) Menjaga kondisi infrastruktur jaringan di daerah tetap berfungsi dengan baik, 2) Melaksanakan perjalanan ke lokasi, tes fisik jaringan dan *troubleshooting*.

Keluaran dari kegiatan ini adalah perangkat jaringan komunikasi data di BPS daerah dapat berfungsi baik secara berkesinambungan.

3.16. Sosialisasi dan Supervisi

Pada tahun 2007 *Virtual Private Network* (VPN) sudah dibangun untuk 9 titik di BPS termasuk BPS daerah. Sosialisasi penggunaan VPN diperlukan untuk optimalisasi pemanfaatan VPN.

Keluaran dari kegiatan ini adalah jaringan komunikasi data melalui VPN di BPS daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

3.17. Pengembangan Sistem Basis Data

Adanya perubahan sistem pengkodean komoditi barang (kode Harmonize System) yang digunakan pada dokumen ekspor dan impor berimbas terhadap sistem aplikasi yang ada. Sistem aplikasi yang baik selalu mempunyai dua arah kebutuhan, ke dalam: bagi *subject matter* (pemilik data), yaitu mampu mengolah dan menganalisis data sesuai dengan kebutuhan, dan ke luar: bagi pengguna data, memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Perubahan peraturan dalam administrasi keuangan negara berimbas pada sistem informasi manajemen keuangan yang selama ini merupakan fasilitas pengelola basis data keuangan di lingkungan BPS. Pengawasan dan pemberdayaan pegawai memerlukan informasi kepegawaian yang lengkap dan baik secara cepat dan akurat.

Tujuan pembuatan dan pengembangan sistem basis data untuk Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut: 1) Menyediakan fasilitas untuk pelaporan data ekspor-impor berdasarkan sistem klasifikasi komoditi barang HS 10 digit, 2) Meningkatkan fasilitas untuk pengelolaan informasi manajemen keuangan sesuai dengan peningkatan kebutuhan, dan 3) Meningkatkan fasilitas untuk pengelolaan informasi manajemen kepegawaian.

3.18. Pengadaan Peralatan dan Rekayasa Informatika

Dunia teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat cepat. Berbagai macam keunggulan yang dihasilkan oleh teknologi informasi mengalir terus seolah tiada henti. Keunggulan yang ditawarkan tersebut telah mempengaruhi segala kegiatan dan bahkan tanpa disadari hampir di semua lini pekerjaan sangat bergantung pada peran serta teknologi

informasi. Untuk itu agar tidak tertinggal di bidang ini, maka BPS haruslah mengikuti perkembangan teknologi informasi (TI).

Sarana dan prasarana TI yang sudah ada juga harus dikelola dengan baik, oleh sebab itu dibutuhkan perawatan perangkat keras yang seksama yang akan membantu kelancaran dalam penyelesaian pekerjaan dan dapat meningkatkan produktifitas. Faktor yang lain adalah pengadaan majalah dan buku-buku TI yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

3.19. Pengembangan Layanan Jaringan Komunikasi Data dan Akses Online

Keberhasilan implementasi jaringan komputer dan komunikasi membawa dampak positif berupa peningkatan kinerja BPS secara keseluruhan. Berbagai bentuk aplikasi sistem informasi statistik dan manajemen telah dapat direalisasikan berkat adanya infrastruktur pendukung tersebut. Dengan semakin banyaknya pihak-pihak yang dapat merasakan manfaat dari fasilitas ini, maka beban kerja yang harus ditanggung oleh jaringan komputer dan komunikasi juga semakin meningkat.

Dari sisi diseminasi data, makin banyak pengguna data BPS yang mengakses data statistik melalui internet. Ini dibuktikan dengan makin populernya *Web BPS*. Peningkatan jumlah pengguna serta kebutuhan akan data statistik yang semakin beragam dan besar, dibutuhkan bentuk hubungan internet baru yang mampu menampung penambahan tersebut. Kebutuhan ini telah dipenuhi dengan penambahan kapasitas jaringan melalui WasantaraNet sehingga BPS mampu memanfaatkan hal tersebut dengan penambahan kapasitas yang lebih besar.

Dari sisi jaringan intranet, komunikasi data antara BPS dan BPS daerah perlu ditingkatkan secara menyeluruh. Hal ini terkait dengan pemasokan data dari BPS ke BPS daerah. Tanpa peningkatan ini, BPS tidak akan mampu menanggapi kebutuhan pengguna data yang makin meningkat. Dari sini pula muncul kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan jaringan BPS Daerah dalam melayani pemrosesan data terdistribusi di kantor masing-masing. Di sisi teknis kebutuhan ini direalisasikan dengan penambahan jalur baru *Virtual Private Network* (VPN) dan peningkatan *bandwidth* VPN yang sudah ada. Jalur VPN yang bersifat privat ini menggantikan jalur internet yang bersifat publik karena VPN jauh lebih handal.

Internet Primer

Jasa koneksi internet diperoleh BPS dengan menyewa sejumlah *bandwidth* kepada *Internet Service Provider* (ISP). Koneksi yang disewa memiliki *Service Level Agreement* yang menunjukkan seberapa handal (*reliable*) layanan koneksi tersebut. Koneksi dihantarkan melalui media komunikasi, biasanya berupa *fiber optics*. Selain itu, *IP address* diperlukan untuk menentukan alamat internet sehingga bisa diakses maupun mengakses. Jika *IP address* ingin dimiliki secara permanen, koneksi harus disertai dengan *AS number*. Sehingga siapapun ISP yang memenangkan pengadaan internet, *IP address* tidak perlu diubah.

Internet Sekunder

Jasa koneksi internet sekunder juga diperoleh melalui ISP. Metode koneksi adalah *hot redundancy*, yaitu internet primer dan sekunder bisa berjalan bersama-sama. Jika salah satu koneksi putus, koneksi yang lain akan menggantikan secara otomatis tanpa memutus koneksi secara keseluruhan.

Virtual Private Network

Jasa koneksi VPN diperoleh dengan menyewa sejumlah *bandwidth* dari VPN *provider*. Seperti internet, layanan VPN juga memiliki SLA dan melalui media komunikasi (misalnya *fiber optics*) yang melalui *router*. Berbeda dengan internet, VPN adalah layanan untuk intranet, yakni koneksi yang berada di dalam sebuah organisasi. Konsekwensinya koneksi yang disewa tidak hanya satu, tetapi sejumlah kantor yang ingin dihubungkan melalui VPN. Sewa VPN tahap 1 adalah sewa untuk koneksi yang sudah eksis sejak tahun 2007 sedangkan tahap 2 adalah sewa koneksi VPN yang baru di tahun 2008.

Pengadaan perangkat VPN

Biasanya VPN *provider* hanya bertanggung jawab terhadap koneksi sampai peralatan modem VPN. Sehingga untuk menambah jumlah koneksi VPN, di tiap titik koneksi diperlukan *router*. *Router* disetup sedemikian rupa sehingga mengenali titik koneksi lainnya yang tergabung dalam satu *network* VPN di BPS.

Perawatan Jaringan dan Server

Metodologi perawatan jaringan dan server adalah *all risk maintenance*. Jaringan dan server dirawat oleh penyedia layanan perawatan secara penuh. Penyedia layanan menanggung semua ongkos komponen maupun peralatan jika terjadi kerusakan. Metode

ini mutlak diperlukan untuk menjaga agar layanan jaringan dan server tetap tersedia untuk memenuhi keperluan orang banyak. Jika jaringan dan *server down*, maka banyak pihak yang dirugikan.



Gambar 3.4. Perawatan hardware di Direktorat Sistem Informasi Statistik, BPS

Software untuk Virtualisasi Server

Server yang dimiliki BPS dapat diakses oleh *user* secara transparan maupun tidak. *Server* untuk internet biasanya mudah divirtualisasi sehingga layanannya mudah diakses. Di sisi lain *server* untuk pengolahan data, misalnya *High Performance Computing (HPC) server*, sangat sulit untuk divirtualisasi. Virtualisasi *HPC server* mutlak diperlukan untuk meningkatkan utilitasnya. Metode yang diambil adalah pengadaan *software* virtualisasi yang mempermudah *user* untuk mengakses *HPC server*. Tidak terbatas pada pengadaannya saja, *software* virtualisasi ini harus dapat dikuasai oleh para *user (programmer)* di BPS. Pelatihan teknis dalam pemrograman mutlak diperlukan untuk membiasakan *user* berinteraksi dengan *software* virtualisasi.

3.20. Pengembangan Sistem Basis Data

Pengembangan basis data meliputi 3 jenis basis data, yaitu: basis data manajemen, basis data ekonomi dan basis data sosial.

Basis Data Manajemen

Basis data yang dikembangkan pada data manajemen antara lain data keuangan dan kepegawaian. Pengembangan sistem untuk pengelolaan data keuangan disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU), sedangkan terhadap data kepegawaian disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Sistem ini secara rutin setiap tahun ada perbaikan dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan.

Salah satu modul dari SIMKEU yaitu aplikasi sistem gaji yang telah disempurnakan, dengan tujuan memadukan sistem gaji hasil pengembangan Departemen Keuangan dengan sistem gaji yang dikembangkan BPS.

Basis Data Ekonomi

Tindak lanjut dari hasil pengolahan Survei Biaya Hidup (SBH) 2007 adalah penyusunan data nilai konsumsi dasar atau yang disebut dengan diagram timbang dengan tahun dasar 2007 untuk mengganti data tahun dasar 2002. Data tersebut bukan hanya menjadi bahan bagi perhitungan indeks harga konsumen dan perhitungan inflasi, tetapi juga akan menjadi tolok ukur bagi neraca ekonomi nasional.

Dengan adanya diagram timbang baru hasil SBH 2007, maka sistem basis data perhitungan IHK dan Inflasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap data-data pendukungnya yang berhubungan dengan jenis komoditi, jumlah komoditi, nilai konsumsi dasar dan lain-lain. Sehingga perlu dilakukan restruktur basis data dan penyempurnaan sistem. Sistem baru hasil penyesuaian tersebut, pada bulan Juli 2008 telah dipakai untuk penghitungan angka IHK dan Inflasi dengan tahun dasar 2007.

Data statistik ekspor dan impor juga merupakan data andalan BPS dalam kiprahnya sebagai penyedia data statistik yang berkualitas. Oleh karena itu untuk selalu menjaga berjalannya sistem dengan baik, maka selalu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara rutin setiap tahunnya. Selain itu yang juga menjadi perhatian adalah masalah keamanan data dari adanya kerusakan, baik kerusakan perangkat keras maupun lunak sehingga secara periodik selalu dilakukan proses backup. Pada tahun 2008 ini khusus untuk data impor, data yang disimpan di dalam basis data ditambah dengan data impor dari kawasan berikut.

Basis Data Sosial

Pada pertengahan tahun 2008 mulai menyiapkan data yang akan dicetak oleh PT POS untuk pembayaran BLT 2008. Data yang disiapkan adalah data hasil Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05).

Sekitar bulan September 2008, BPS melakukan pendataan di seluruh propinsi yang disebut dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS08). Untuk mendukung pendataan tersebut maka disiapkan suatu sistem pengolahan dengan menggunakan basis data yang didistribusikan ke seluruh propinsi. Seluruh proses pengolahan data dilakukan di daerah (di BPS Propinsi atau BPS Kabupaten/Kota). Selanjutnya dilakukan proses kompilasi di BPS untuk mendapatkan jumlah dan direktori rumah tangga sasaran dari seluruh propinsi.

Penggunaan DBMS

Data yang dikelola dalam suatu basis data harus didukung oleh perangkat keras dan perangkat lunak DBMS (Database Management Systems). Dari berbagai macam DBMS yang ada, pemilihan DBMS dapat tergantung dari berbagai hal. Misalnya kemampuan mengelola data besar, tidak rumit, stabil, *open source database*, bebas untuk didistribusikan dan lain-lain. Khusus untuk DBMS *open source* yang sering digunakan adalah *PostgreSQL*. Biasanya DBMS ini digunakan untuk *database backup* atau digunakan untuk aplikasi yang didistribusikan ke daerah.

3.21. Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem Aplikasi Berbasis Web

Pengolahan data merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam rangkaian pelaksanaan suatu sensus, survei, ataupun studi kasus. Pengolahan data dilakukan secara terdistribusi, baik dilakukan oleh unit khusus pengolahan data, yaitu oleh Sub Direktorat Integrasi Pengolahan, para pemilik *subject matter* (unit kerja teknis di BPS) maupun perwakilan BPS di daerah. Pengolahan terdistribusi ini dimungkinkan karena baik pemilik *subject matter* maupun daerah telah memiliki komputer yang memadai untuk melakukan pengolahan data.

Tujuan pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasi berbasis web secara umum adalah mengembangkan dan menyempurnakan sistem pengolahan data terpadu yang akan meningkatkan keahlian, keterpaduan, kemudahan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengolahan data beserta sistem *updating* berikutnya.

3.22. Pengembangan Sistem Informasi, Pengadaan Peralatan, Perawatan dan Rekayasa Informatika

Sarana dan prasarana TI yang sudah ada juga harus dikelola dengan baik, oleh sebab itu dibutuhkan perawatan *hardware* yang seksama yang akan membantu kelancaran dalam penyelesaian pekerjaan dan dapat meningkatkan produktifitas. Faktor yang lain adalah pengadaan bahan bacaan dan buku-buku TI yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah SDM yang berkualitas, *software* yang sesuai kebutuhan dan *user friendly*, layanan yang prima terutama dalam perawatan komputer dan program entry data yang *user friendly* dan canggih.

3.23. Pelatihan Teknologi Informasi (TI)

Hasil pendataan yang baik tidak terlepas dari pengolahan data itu sendiri. BPS telah mulai mendesentralisasikan pengolahan ke daerah. Untuk itu diperlukan sumber daya yang handal baik dari segi kemampuan sumber daya manusia maupun dari segi fasilitas teknologi informasi yang dipergunakan.



Gambar 3.5. Pelatihan Teknologi Informasi yang diikuti oleh peserta dari BPS Kabupaten/Kota

Tujuan pelatihan teknologi informasi pada tahun ini adalah meningkatkan kemampuan tenaga SDM di bidang teknologi informasi pada umumnya, meningkatkan pengetahuan mengenai pemakaian/perawatan.

STATISTIK SOSIAL

D

<http://www.bps.go.id>

**STATISTIK
KEPENDUDUKAN**

D.1



<http://www.bps.go.id>

BIDANG STATISTIK SOSIAL

1 STATISTIK KEPENDUDUKAN

1.1. Survei Upah

Survei Upah dilaksanakan untuk memantau dengan cepat perubahan upah yang terjadi dari triwulan ke triwulan dan untuk mendapatkan informasi/data statistik upah berkesinambungan secermat dan sedini mungkin yang juga berguna untuk penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan, pengendalian dan analisis upah pekerja/karyawan.

Kegiatan pencacahan ini dilakukan secara triwulanan dengan jumlah sampel 2.401 yang terdiri dari 1.009 perusahaan di sektor industri pengolahan, pertambangan 35 perusahaan, perhotelan 265 perusahaan, restoran 130 perusahaan, konstruksi 340 perusahaan, perdagangan 349 perusahaan dan pertanian 273 perusahaan.

Publikasi yang diterbitkan yaitu: (1) Upah Buruh menurut Jenis Pekerjaan; (2) Distribusi Buruh menurut Upah; (3) Tabel-tabel Hasil Survei Upah Buruh; (4) Statistik Upah Triwulanan; (5) Statistik Upah Tahunan.

1.2. Survei Struktur Upah

Tujuan utama diselenggarakan Survei Struktur Upah adalah untuk mendapatkan data struktur dan sistem pengupahan di beberapa perusahaan berskala besar maupun sedang untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Jenis pekerjaan yang dimaksud adalah yang memerlukan keahlian dan profesionalisme seperti manajer, sekretaris, akuntan, *engineer*, dan tingkat jabatan (level) mandor serta beberapa level di atas mandor. Pada akhirnya melalui kegiatan survei akan dapat diperoleh gambaran mengenai struktur upah sektoral, regional, dan klasifikasi jabatan.

Tujuan utama diselenggarakan survei struktur upah adalah untuk mendapatkan informasi/data statistik upah yang lebih rinci seperti upah per jenis jabatan dan jenis kelamin untuk pekerja non produksi dan pekerja produksi baik yang di bawah mandor maupun pekerja produksi di tingkat mandor ke atas. Melalui survei ini dapat pula dipantau keadaan pengupahan regional dan nasional menurut klasifikasi jabatan.

Contoh sampel pencacahan yang dilakukan secara triwulanan dengan jumlah sampel 2.401 terdiri dari 1.009 perusahaan di sektor industri pengolahan, pertambangan 35 perusahaan, perhotelan 265 perusahaan, restoran 130 perusahaan, konstruksi 340 perusahaan, perdagangan 349 perusahaan dan pertanian 273 perusahaan. Jumlah sampel survei statistik kependudukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Responden Survei Statistik Kependudukan Tahun 2004 – 2009

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Survei Upah	9.604	9.604	9.608	9.604	14.700	14.700
2.	Survei Struktur Upah	2.401	2.401	2.402	2.401	3.675	3.675
3.	Sakernas (Blok Sensus)	4.192	4.338	4.300	4.300	4.300	4.363
4.	Sakernas (Rumah Tangga)	67.072	68.816	68.800	69.808	69.808	69.808

1.3. Sakernas Tahunan

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bertujuan untuk memperoleh gambaran keadaan ketenagakerjaan di Indonesia baik untuk tingkat nasional maupun regional.

Publikasi yang diterbitkan yaitu:

- (1) Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia;
- (2) Publikasi Keadaan Pekerja/Karyawan di Indonesia;
- (3) Publikasi Indikator Tingkat Hidup Pekerja yang diterbitkan 2 tahun sekali.

1.4. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran

Tujuan dilaksanakan Sakernas Semesteran adalah untuk memperoleh data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap Semester (bulan Februari semester I dan bulan Agustus Semester II). Terutama untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja, pengangguran, pernah berhenti/pindah pekerjaan serta perkembangannya di tingkat nasional maupun tingkat provinsi.

Sasaran kegiatan Sakernas Semesteran adalah untuk mendapatkan data keadaan ketenagakerjaan melalui survei yang dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 68.800 rumah tangga per semester tersebar di seluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Rumah tangga korp diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus dan rumah tangga khusus yang tinggal di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Secara khusus, hasil yang hendak dicapai dalam kegiatan ini dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang dimaksudkan dalam kerjasama Menteri Tenaga Kerja dengan Kepala Badan Pusat Statistik untuk penanganan terpadu data statistik ketenagakerjaan.

Sakernas Semesteran dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus. Publikasi yang diterbitkan adalah:

- a. Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia;
- b. Publikasi Keadaan Pekerja/Buruh/Karyawan di Indonesia; dan
- c. Publikasi Pengangguran dan Setengah Pengangguran di Indonesia.

1.5. Sakernas Triwulanan

Sakernas bertujuan untuk memperoleh gambaran keadaan ketenagakerjaan di Indonesia dan untuk mengetahui perubahannya secara musiman/triwulanan. Sasaran kegiatan Sakernas adalah mendapatkan data ketenagakerjaan dengan cara sampel.

Sakernas Triwulanan dilaksanakan di seluruh Indonesia kecuali Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, secara triwulanan yaitu Triwulan I pada bulan Februari (tahun 2003 tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan lapangan yang tidak memungkinkan). Melalui sakernas triwulanan akan dikumpulkan indikator pokok ketenagakerjaan.

Publikasi yang diterbitkan yaitu:

- (1). Publikasi "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Triwulanan";
- (2). Publikasi "Keadaan Pekerja/Buruh/Karyawan di Indonesia";
- (3). Publikasi "Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran di Indonesia";
- (4). Publikasi "Indikator Tingkat Hidup Pekerja".

1.6. Uji Coba SUPAS

Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) diperlukan untuk menjembatani ketersediaan data kependudukan diantara 2 sensus. Supas selalu dilakukan di pertengahan periode antara 2 sensus. Data hasil Supas akan dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan pemerintah, baik sebagai dasar perencanaan pembangunan serta evaluasi berbagai program kependudukan di Indonesia.

Keterangan yang dikumpulkan dalam Uji Coba Supas meliputi bidang demografi seperti migrasi, fertilitas, dan mortalitas; bidang ketenagakerjaan seperti angkatan kerja, jam kerja, lapangan usaha, jenis pekerja, dan status pekerjaan; dan bidang sosial budaya antara lain partisipasi sekolah dan tingkat pendidikan.

Tujuan Uji Coba Supas adalah : (1) Mengkaji tingkat kesulitan pengisian kuesioner; (2) Meneliti kesesuaian alur pertanyaan; (3) Menentukan organisasi lapangan yang efektif; (4) Menentukan metodologi pencacahan yang tepat.

1.7. Studi Statistik TKI dan TKA

Tujuan studi ini yaitu untuk: (1) Menyediakan data/informasi tentang tenaga kerja indonesia (TKI) legal yang berada/bekerja di luar negeri dan tenaga kerja asing (TKA) legal yang berada di Indonesia, (2) Mengetahui latar belakang keadaan sosial ekonomi TKI atau profil TKI secara kualitatif, (3) Memperkirakan besarnya devisa yang berasal dari TKI, dan (4) Mengetahui sistem pendataan TKI dan TKA yang telah ada melalui instansi terkait.

Laporan hasil pelaksanaan, yang berisi selain data primer maupun sekunder tentang TKI/TKA, juga informasi tentang sistem pengumpulan data pencatatan administrasi yang telah berjalan selama ini yang dilakukan Depnakertrans maupun Bank Indonesia.

1.8. Penyusunan Parameter Demografi Hasil SUPAS

Tujuan dilaksanakan survei ini yaitu:

- a. Menghasilkan angka parameter demografi hasil SUPAS
- b. Membuat tren parameter demografi hasil dari sensus dan survei

- c. Membuat asumsi parameter demografi untuk keperluan proyeksi penduduk.

Persiapan kegiatan yang meliputi pengumpulan dan evaluasi data dasar, yang dilanjutkan dengan penyusunan parameter demografi dan penghitungan parameter demografi. Melakukan pertemuan interdep dan perbaikan hasil penghitungan, melakukan penulisan naskah publikasi, mengadakan seminar hasil penghitungan parameter demografi, dan finalisasi publikasi parameter demografi serta melakukan pencetakan publikasi.

1.9. Uji Coba Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Triwulanan

Kegiatan uji coba Sakernas Triwulanan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan metodologi dan daftar pertanyaan yang tepat serta metode penyampaian hasil dari BPS daerah ke BPS pusat dengan cepat.

Dalam kegiatan ini, blok sensus yang digunakan adalah blok sensus Sakernas Triwulan I. Dari setiap blok sensus akan dicacah 5 (lima) rumah tangga. Keluaran yang dihasilkan adalah: Laporan uji coba Sakernas Triwulanan .

1.10. Proyeksi Penduduk Hasil Supas

Tujuan dilaksanakan Proyeksi Penduduk adalah untuk memperoleh data jumlah penduduk dan persebarannya, serta jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Selain data jumlah penduduk disajikan pula berbagai parameter demografi nasional maupun provinsi.

Keluaran dari kegiatan ini adalah; 1) proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, 2) estimasi parameter demografi , 3) penduduk perkotaan menurut provinsi, dan 4) piramida penduduk.

1.11. Proyeksi Penduduk menurut Wilayah

Tujuan dilaksanakan Proyeksi Penduduk adalah untuk memperoleh data jumlah penduduk yang utamanya dipakai sebagai salah satu komponen dasar penghitungan angka DAU.

Penghitungan proyeksi penduduk kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan metode geometrik, yaitu memproyeksikan penduduk berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk kabupaten/kota.

Setelah otonomi daerah terjadi pemekaran wilayah. Jumlah kabupaten/kota pada tahun 1990 hanya 297 kabupaten/kota, pada tahun 2000 bertambah menjadi 341 kabupaten/kota, selanjutnya kondisi ini berkembang menjadi 416 kabupaten/kota pada tahun 2003, dan pada tahun 2008 menjadi 493 kabupaten/kota. Oleh sebab itu, data penduduk pada kabupaten/kota yang mekar dan kabupaten/kota yang baru terbentuk disesuaikan kembali berdasarkan cakupan wilayah yang baru.

Output penghitungan proyeksi penduduk adalah jumlah penduduk per kabupaten/kota sesuai kondisi wilayah administrasi terbaru.

1.12. Persiapan Sensus Penduduk 2010

Tujuan dilaksanakannya kegiatan perencanaan SPP2010 adalah BPS siap secara totalitas menyelenggarakan setiap tahapan kegiatan sensus penduduk dan perumahan. Output kegiatan ini dapat dirinci menjadi; 1) terumuskan secara jelas rancangan garis besar penyelenggaraan SPP2010 yang mencakup : tujuan, visi, misi, tema sentral dan strategi global; 2) tersusun setiap ruang lingkup kegiatan SPP2010 yang mengakomodir seoptimal mungkin rekomendasi PBB, kebutuhan pengguna data, dan kebutuhan BPS sendiri; 3) terumuskan rencana operasional rancangan metodologi pengumpulan data, kegiatan lapangan untuk pencacahan penduduk, pencacahan rumah/bangunan, pencacahan potensi desa, pemetaan wilayah administratif, pemetaan wilayah unit pencacahan, dan sebagainya; 4) terumuskan rencana operasional kegiatan persiapan (penyusunan, instrumen, rekrutment dan pelatihan petugas) pada masing-masing lingkup kegiatan; 5) terbentuk tim-tim kerja sesuai lingkup kegiatan maupun lingkup pendataan di tingkat pusat; dan 6) tersusun rancangan organisasi SP2010 dan perangkat hukum/peraturan yang terkait.

Output/keluaran kegiatan persiapan SP2010 meliputi : 1) Rencana Induk Sensus Penduduk dan Perumahan Indonesia Tahun 2010 (*Blue Book* SP2010). 2) Keputusan Kepala BPS tentang Tim kerja. dan 3) Himpunan laporan dan dokumentasi pembahasan rencana SP2010.

1.13. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) adalah survei berskala nasional yang dirancang khusus untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku fertilitas, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, kematian ibu dan anak, pengetahuan tentang HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual. Daftar pertanyaan survei tersebut menggunakan kuesioner *Demographic Health Survey* (DHS) yang dirancang sesuai dengan standar internasional. SDKI juga memuat variabel yang spesifik Indonesia (*specific country*) dan isu-isu strategis yang menjadi prioritas program.

SDKI dilakukan di semua provinsi dengan jumlah sampel sekitar 42 350 rumah tangga, dengan prevalensi setiap rumah tangga mempunyai rata-rata 0,8 wanita pernah kawin, dan setiap rumah tangga mempunyai 0,8 remaja usia 15-24 tahun. Diharapkan akan ada 33.880 wanita yang pernah kawin, 33.880 remaja, dan 12.197 pria berstatus kawin yang memenuhi syarat untuk diwawancarai. Responden yang diwawancarai didapat dari hasil identifikasi dalam Daftar Rumah Tangga SDKI.

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias (Sumatera Utara) dilakukan penambahan sampel (*over sampling*) untuk mendapatkan estimasi hasil sampai dengan tingkat kabupaten/kota, sehingga total sampel SDKI untuk Provinsi NAD adalah : 12 800 wanita, 12 800 remaja, 4 096 pria, sedangkan untuk Kabupaten Nias masing-masing 1 475 wanita, 1 475 remaja, dan 472 pria. Untuk mendapatkan estimasi pada tingkat kabupaten/kota maka masing-masing di 15 kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga dilakukan tambahan sampel wanita di 15 kabupaten tersebut masing-masing sebanyak 400 rumah tangga, sehingga total tambahan sampel untuk 15 kabupaten tersebut menjadi 6000 rumah tangga.

Keluaran dari kegiatan ini adalah clean data SDKI dan publikasi SDKI.

1.14. Survei Upah Buruh (SUB)

Kegiatan ini pada dasarnya adalah untuk mengumpulkan data upah untuk usaha tambang non migas, industri, hotel dan angkutan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau dengan cepat perubahan upah dari triwulan ke triwulan.

Metodologi dari kegiatan ini adalah Sektor industri dengan *sampling fractio* yang berbeda setiap Sub Sektor. Keluaran dari kegiatan ini adalah: 1) Statistik Upah Triwulanan. 2) Statistik Upah Tahunan. dan 3) Tabel-tabel hasil SUB.

1.15. Survei Struktur Upah (SSU)

Survei ini adalah sebagai dasar dalam memperluas cakupan SUB yang telah dilaksanakan secara tahunan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data struktur dan sistem pengupahan untuk jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian dan profesionalisme.

Metodologi dari kegiatan ini adalah sektor industri dengan *sampling fractio* yang berbeda setiap sub sektor. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah Publikasi Tahunan Statistik Struktur Upah.

1.16. Statistik Pengangguran

Tujuan dari kegiatan ini secara umum adalah untuk menganalisis data pengangguran, yang memberikan arah pelaksanaan program pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial, dan khususnya pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu ditetapkan beberapa tujuan khusus yaitu; memberikan gambaran umum tentang keadaan pengangguran di Indonesia, menyajikan kondisi pengangguran pada tingkat wilayah provinsi dan nasional, dan menyediakan indikator pengangguran yang sangat diperlukan dalam pemantauan dan evaluasi program pembangunan dan pengembangan ketenagakerjaan.

Keluaran dari kegiatan ini adalah publikasi Statistik Pengangguran.

1.17. Penghitungan Penduduk dan Rumah Tangga Untuk Penimbang Survei Kependudukan

Kegiatan survei bidang statistik kependudukan yang dilakukan BPS antara lain adalah Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Urbanisasi dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Berbagai survei kependudukan ini dilakukan dengan jumlah sampel yang telah ditentukan dan tergantung level penyajiannya.

Dalam pengolahan dan penyajiannya, jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga diestimasi untuk mendapatkan jumlah penduduk dan rumah tangga secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu, diperlukan data jumlah penduduk dan rumah tangga sampai wilayah administrasi kabupaten/kota yang akan dipakai sebagai angka penimbang.

Kegiatan penghitungan penduduk dan rumah tangga untuk keperluan penimbang ini sebelumnya hanya dilakukan *'ad-hock'*, namun dengan kondisi berkembangnya survei kependudukan yang dirancang BPS, akhirnya penghitungan tersebut dilakukan secara rutin.

Angka penimbang penduduk digunakan untuk menyajikan berbagai tabulasi karakteristik penduduk dan angka penimbang rumah tangga dipakai untuk menyajikan berbagai data yang berhubungan dengan karakteristik rumah tangga, seperti data-data perumahan, pelaporan kejadian vital, rumah tangga yang mendapat kartu kesehatan, dan lain-lain.

1.18. Uji Coba Organisasi Lapangan Sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2010

BPS akan menyelenggarakan sensus penduduk dan perumahan pada tahun 2010 yang akan datang. Rangkaian kegiatan di bawah payung Sensus Penduduk dan Perumahan tahun 2010 (SP 2010) meliputi proses perencanaan, persiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang menggambarkan kondisi demografi, sosial-ekonomi dan infrastruktur pada berbagai tingkat wilayah.

Sebelum dilaksanakan sensus penduduk biasanya didahului oleh kegiatan pilot atau uji coba lapangan. Selama tahun 2008 telah dilakukan dua kali uji coba lapangan SP2010. Uji Coba I dilaksanakan pada bulan Juli 2008 di tiga provinsi/Kabupaten/Kota yaitu: Provinsi Kepulauan Riau dengan wilayah uji coba di Kabupaten Bintan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta, dan Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala. Ada lima tujuan pokok yang ingin dicapai dari Uji Coba I, yaitu:

- 1) Melihat cakupan hasil pencacahan,
- 2) Menguji tingkat kecermatan isian kuesioner, khususnya untuk variabel kelahiran dan kematian serta Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), umur, bidang usaha/pekerjaan utama (KBLI), dan jenis pekerjaan dari pekerjaan utama (KBJI),

- 3) Mendapatkan tata cara rekrutmen dan pelatihan petugas,
- 4) Mendapatkan metode manajemen dokumen yang efektif dilihat dari segi waktu, tenaga, biaya dan operasional di lapangan,
- 5) Mendapatkan metode pengawasan lapangan yang paling tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan SP2010 mendatang.

Kegiatan Uji Coba II dilaksanakan pada bulan November–Desember 2008 di tiga provinsi/ kabupaten/kota yaitu: Provinsi Jambi dengan wilayah uji coba di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi DKI Jakarta di Kota Jakarta Selatan dan Jawa Tengah di Kota Salatiga. Tujuan diselenggarakannya Uji Coba II, yaitu:

- 1) Memperkirakan *coverage rate* sensus penduduk secara keseluruhan,
- 2) Meneliti seberapa lengkap *completeness* isian kuesioner SP2010-L (*listing*) dengan kuesioner SP2010-C (individu),
- 3) Mempelajari kelayakan sketsa peta blok sensus,
- 4) Memeriksa fisibilitas beberapa pertanyaan dalam SP2010-C,
- 5) Mempelajari kesiapan kuesioner *Optical Mark Reader* (OMR) dan *Intelephant Character Reader* (ICR),
- 6) Menyiapkan bahan gladi bersih pada tahun 2009.

1.19. Statistik Ketenagakerjaan Usia Muda dan Pekerja Anak

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran keadaan ketenagakerjaan di Indonesia khususnya pada kelompok umur 15-24 tahun antara lain menyediakan informasi tentang pekerja anak, mengetahui latar belakang keadaan sosial ekonomi pekerja anak dan uji coba instrumen untuk mendapatkan data pekerja anak.

Metodologi yang dipakai antara lain analisis statistik deskriptif dengan sumber data utama dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan sumber data pendukung dari instansi terkait seperti Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta *International Labour Organization* (ILO), dan wawancara langsung kepada responden.

1.20. Sakernas Estimasi Kabupaten/Kota dan Provinsi

Sakernas estimasi kabupaten/kota dilaksanakan pada bulan Agustus 2008 sedangkan Sakernas estimasi provinsi diselenggarakan pada bulan Februari 2008. Sakernas pada bulan Februari dan Agustus 2008 menghasilkan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap

semester. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja, pengangguran, pernah berhenti atau pindah pekerjaan.

Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data ketenagakerjaan melalui survei yang dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 69.856 rumah tangga dari 4.300 BS updating dan 66 BS listing pada semester I (Februari). Sedangkan semester II (Agustus) jumlah sampel 288.865 rumah tangga yang tersebar diseluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Rumah tangga korp diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus dan rumah tangga khusus yang tinggal di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel. Jumlah sampel blok sensus dan petugas lapangan disajikan pada lampiran 26.

Publikasi yang dihasilkan dari hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) memuat keadaan angkatan kerja, keadaan pekerja, keadaan pengangguran dan setengah pengangguran dan indikator tingkat hidup pekerja di Indonesia.

1.21. Penghitungan Jumlah Penduduk Pertengahan

Jumlah penduduk merupakan salah satu variabel penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Data penduduk yang dibutuhkan adalah jumlah penduduk per kabupaten/kota kondisi pertengahan tahun. Sejauh ini, proyeksi penduduk yang dihitung BPS hanya tersedia secara nasional dan tingkat provinsi. Oleh sebab itu, sejak tahun 2003 BPS mulai melakukan penghitungan proyeksi/estimasi penduduk per kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan data dasar penduduk untuk keperluan penghitungan DAU.

Berbeda dengan proyeksi penduduk nasional dan per provinsi yang dihitung dengan metode komponen, maka data penduduk per kabupaten/kota ini dihitung dengan metode geometrik. Pada saat hasil Sensus Penduduk maupun Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang terakhir tersedia, maka hasil tersebut dipakai sebagai data dasar penduduk untuk memproyeksikan penduduk per kabupaten/kota tahun-tahun berikutnya. Mulai tahun 2007, jumlah penduduk kabupaten/kota dikontrol dengan jumlah penduduk provinsi hasil proyeksi dengan metode komponen. Sebagai

informasi bahwa penduduk Indonesia pertengahan tahun 2008 adalah sebesar 228.523.300 jiwa.

<http://www.bps.go.id>

**STATISTIK
KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

D.2

<http://www.bps.go.id>



2 STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.1. Survei Evaluasi Program Kemiskinan (SEPK)

Pada tahun 2005 BPS mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk melaksanakan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE '05), implementasi sebenarnya adalah pendataan keluarga miskin. Data hasil PSE '05 telah digunakan oleh pemerintah dalam menyalurkan dana kompensasi BBM atau disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Subsidi Langsung Tunai (SLT).

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSE '05 di lapangan serta pemantauan pelaksanaan pencairan SLT tahap I dan II merupakan hal penting untuk dilaksanakan. Untuk tujuan tersebut SEPK dilaksanakan dengan diintegrasikan dengan pelaksanaan Susenas modul konsumsi panel.

Pengumpulan data SEPK mencakup seluruh provinsi di Indonesia, dengan sampel sebesar 10.640 rumah tangga sama dengan sampel panel modul konsumsi/ pengeluaran.

SEPK dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pendataan PSE'05 di rumah tangga serta peristiwa yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan dari pelaksanaan pencairan SLT Tahap I dan Tahap II. Selain itu, SEPK juga dilaksanakan untuk memperoleh informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pencairan SLT Tahap I dan Tahap II.

2.2. Surveilans Terpadu HIV-Perilaku (STHP)

Adanya indikasi tingginya perkiraan prevalensi HIV di Tanah Papua, tingkan epidemi dan faktor yang mempengaruhinya berbeda dengan daerah lain. Pentingnya data untuk mengetahui gambaran yang lebih detail sebagai bahan perencanaan dan evaluasi program. Departemen Kesehatan (Depkes) bekerja sama BPS, dengan dukungan dana dari Bank Dunia dan FHI / ASA bersepakat melaksanakan surveilans terpadu HIV dengan survei perilaku pada masyarakat umum.

Secara umum STHP bertujuan untuk informasi mengenai i) tingkat pengetahuan masyarakat tentang HIV/ AIDS, ii) Perilaku masyarakat Papua berkaitan dengan penyebaran HIV, iii) Tingkat prevalensi HIV masyarakat Papua.

Secara khusus survei ini akan menghasilkan parameter parameter berikut:

- a. Prevalensi HIV berdasar spesimen darah dari ujung jari
- b. Indikator perilaku sosial, termasuk perilaku seksual, penggunaan kondom, penyalahgunaan narkotika menggunakan jarum suntik dan faktor-faktor budaya yang berpengaruh, persepsi terhadap resiko HIV, tingkah laku, kepercayaan dan pengetahuan dan cakupan intervensi.

STHP dilaksanakan di beberapa kabupaten/ kota di Tanah Papua. Topografis wilayah dalam survei ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Kabupaten/Kota Pegunungan, Kabupaten/Kota Pesisir Mudah dan Kabupaten/Kota Pesisir Sulit. Topografis wilayah ini selanjutnya di gunakan sebagai strata dalam pemilihan sampel.

2.3. Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pengolahan Susenas, serta dalam usaha melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman maka disusunlah publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan. Sumber data utama publikasi ini adalah hasil Susenas, sehingga metodologi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data sepenuhnya mengikuti metodologi Susenas. Sementara itu, juga digunakan data yang bersumber dari instansi lain hasil pencatatan laporan yang dilakukan oleh instansi tersebut.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran secara rinci keadaan rumah tangga menurut status kepemilikan perumahan, kualitas bangunan rumah/tempat tinggal, keadaan sosial ekonomi rumah tangga, lokasi rumah, dan kesehatan lingkungan tempat tinggalnya.

2.4. Statistik Perumahan dan Pemukiman

Data perumahan dan pemukiman merupakan data yang penting bagi para pengambil kebijakan di bidang terkait mengingat perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Oleh karena itu disusunlah publikasi Statistik Perumahan dan Pemukiman yang menggunakan data Modul Perumahan dan Pemukiman dari Susenas.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna data tentang situasi dan kondisi perumahan dan pemukiman di Indonesia.

Sumber data utama publikasi ini adalah hasil Susenas, sehingga metodologi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data sepenuhnya mengikuti metodologi Susenas. Data yang bersumber dari instansi lain berupa pencatatan laporan yang dilakukan oleh instansi tersebut juga digunakan.

2.5. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat)

Dalam GBHN ditegaskan bahwa pembangunan nasional harus didasarkan pada prioritas yang mendesak dan diutamakan yang menyangkut kebutuhan hidup dan keadaan kehidupan masyarakat. Karenanya untuk menentukan prioritas pembangunan secara nasional, perlu ditunjang oleh berbagai data mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk. Untuk mengetahui pertumbuhan tingkat hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan segala kondisinya sebagai hasil pembangunan, maka perlu dikaji secara kontinyu melalui berbagai indikator yang ada dalam bentuk data yang menggambarkan keadaan sosial ekonomi penduduk, sehingga perubahan kesejahteraan dalam kaitannya dengan usaha pembangunan, dapat dipantau secara berkala dan berkesinambungan.

Susenat merupakan survei rumah tangga dengan lingkup nasional dengan sampel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Kekuatan estimasi hasil Susenas dari data kor dapat mewakili keadaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sedangkan dari data modul hanya untuk tingkat nasional dan provinsi. Untuk estimasi tingkat nasional dan provinsi, datanya dapat dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota datanya tidak dapat dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

Kerangka sampel Susenas terdiri dari 3 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus dalam blok sensus (khusus untuk blok sensus yang mempunyai muatan rumah tangga lebih besar dari 150 rumah tangga atau blok sensus yang telah dibuat sub blok sensus pada saat *up-dating* sketsa peta blok sensus dalam rangka kegiatan Sensus Pertanian), dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus/sub blok sensus terpilih. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan perdesaan dilakukan secara terpisah.

2.6. Susenas Modul Konsumsi dan Sakernas

Angka kemiskinan yang selama ini digunakan oleh pemerintah dan banyak pihak untuk perencanaan dan evaluasi program pengentasan kemiskinan serta pelbagai kajian kemiskinan didasarkan pada hasil SUSENAS, khususnya dari modul konsumsi yang diselenggarakan setiap tiga tahun. Informasi tersebut dibutuhkan pemerintah setiap tahun, sehingga modul konsumsi dikumpulkan setiap tahun, namun jumlah sampelnya tidak sebanyak modul konsumsi yang diselenggarakan tiga tahunan, karena informasi yang diperlukan hanya pada tingkat nasional saja. Dengan sampel sekitar 10.000 rumah tangga maka setiap tahun dapat dilihat (dihitung) perkembangan jumlah penduduk miskin pada tingkat nasional.

Kegiatan pokok ini difokuskan pada pengumpulan data yang tercakup dalam lingkup indikator kemiskinan dengan menitikberatkan kepada sasaran rumah tangga yaitu: 1) Data kor, mencakup keterangan demografi dan keterangan pokok tentang pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, fertilitas, dan perumahan, dan 2) Data modul mencakup data rinci mengenai konsumsi/pengeluaran rumah tangga.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada Susenas modul konsumsi 2007 berbeda dengan Susenas sebelumnya, yaitu model tim. Satu tim terdiri dari 2 orang pencacah dan 1 orang koordinator. Setiap tim diharuskan menyelesaikan pencacahan di satu blok sensus terlebih dahulu, kemudian pindah ke blok sensus berikutnya. Satu tim rata-rata bekerja pada 6 blok sensus.

2.7. Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP)

Angka prevalensi HIV pada beberapa kelompok populasi berisiko tinggi telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 1990-an. Untuk mendapatkan gambaran epidemi yang terjadi pada kelompok populasi paling berisiko dalam terjadinya epidemi HIV di Indonesia, maka perlu dilaksanakan Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku. Keberhasilan upaya pencegahan infeksi *Human Immuno-deficiency Virus* (HIV) bergantung pada perubahan perilaku berisiko, dari risiko tinggi ke risiko yang lebih rendah. Untuk itu diperlukan informasi tentang perubahan perilaku yang dapat

dijadikan dasar dalam memandu keberhasilan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program intervensi.

STBP dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia yang konsentrasi populasi berisiko tingginya cukup berarti (besar). Tujuan utama STBP adalah: 1) Menentukan tingkat prevalensi *Neisseria Gonorrhoeae*, *Chlamydia Trachomatis*, *Treponema Pallidum* dan HIV di antara Populasi Paling Berisiko, dan 2) Menentukan kecenderungan perilaku berisiko di antara Populasi Paling Berisiko.

Seperti pada Survei Surveilans Perilaku (SSP) sebelumnya, STBP juga ditujukan pada kelompok populasi yang berisiko tertular HIV/AIDS, yaitu pada kelompok WPS, pria yang potensial menjadi pelanggan WPS, pria yang berhubungan seks dengan pria (gay), Waria, dan Penasun.

2.8. Analisis Deskriptif PMKS

Analisis deskriptif PMKS merupakan publikasi yang disusun dari hasil Susenas 2006, sebagai upaya untuk memberikan gambaran mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia. PMKS yang dicakup meliputi: Balita Terlantar, Anak Terlantar, Penduduk Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Cacat dan Rumah Tidak Layak Huni. Publikasi ini dilengkapi dengan gambar grafik dan peta PMKS per provinsi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran keadaan PMKS secara nasional menurut jenis PMKS-nya.

2.9. Buklet PMKS

Buklet PMKS juga disusun dari hasil Susenas yang memberikan gambaran mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS yang dicakup meliputi: Balita Terlantar, Anak Terlantar, Penduduk Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Cacat dan Rumah Tidak Layak Huni.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran keadaan PMKS secara nasional menurut jenis PMKS-nya.

2.10. Susenas Estimasi Kabupaten/Kota dan Provinsi

Susenas merupakan survei rumah tangga dengan lingkup nasional dan dilakukan secara sampel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kekuatan estimasi hasil Susenas ini dapat mewakili keadaan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2008, diselenggarakan Susenas modul konsumsi dengan sampel sebanyak 285.904 rumah tangga. Tahun ini, susenas modul konsumsi baru pertama kalinya ditujukan untuk mendapatkan estimasi hingga tingkat kabupaten/kota. Jumlah sampel blok sensus dan rumah tangga disajikan tabel berikut.

Data yang dihasilkan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu data kor dan data modul. Data kor, mencakup keterangan demografi dan keterangan pokok tentang pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, fertilitas, dan perumahan. Data modul mencakup data rinci mengenai konsumsi/pengeluaran rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang.

Tabel 4.2. Jumlah Alokasi Sampel Susenas Tahun 2004 – 2009

No.	Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Blok Sensus							
1.	Kor	15.586	13.129	13.146	13.199	17.869	18.249
2.	Modul	4.192	4.268	4.327	4.300	17.869	18.249
3.	Panel	657	665	668	662	4.300	4.300
B. Rumah Tangga							
1.	Kor	249.376	210.064	210.336	211.184	285.904	291.984
2.	Modul	67.072	68.288	69.232	68.800	285.904	291.984
3.	Panel	10.512	10.640	10.688	10.640	68.800	68.800

Dalam rangka mendapatkan informasi kemiskinan yang berkesinambungan setiap tahun, maka tahun 2008 diselenggarakan Susenas Panel 2008 yang akan berlanjut pada tahun 2009 dan 2010. Kegiatan ini difokuskan pada pengumpulan data yang tercakup dalam lingkup

indikator kemiskinan dengan menitikberatkan kepada sasaran rumah tangga.

2.11. Statistik Penduduk Lanjut Usia dan Statistik Pemuda

Data makro penduduk lanjut usia dan pemuda dikumpulkan oleh BPS secara rutin setiap tahun melalui Susenas. Tujuan utama dari kompilasi statistik penduduk lanjut usia dan statistik pemuda Indonesia adalah memberikan gambaran mengenai kuantitas, kualitas dan tingkat kesejahteraan sosial penduduk lanjut usia dan pemuda baik pada tingkat nasional maupun provinsi.

Seluruh kegiatan penyusunan publikasi menggunakan data Susenas. Hasil akhir kegiatan ini adalah terciptanya publikasi "Statistik Penduduk Lanjut Usia" dan "Statistik Pemuda Indonesia".

2.12. Profil Kesehatan Ibu dan Anak

Profil Kesehatan Ibu dan Anak menyajikan statistik yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Statistik yang disajikan antara lain berupa indikator untuk memonitor perkembangan kesehatan ibu dan anak di Indonesia selama beberapa tahun dan statistik yang menggambarkan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak baik dari individu, rumah tangga, maupun lingkungannya.

Sumber data publikasi ini antara lain berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), data sekunder dari Departemen Kesehatan dan data-data yang berasal dari publikasi BPS. Statistik dalam publikasi ini sebagian besar disajikan secara nasional dan untuk masing-masing provinsi berdasarkan daerah tempat tinggal. Beberapa indikator disajikan secara berkala, namun perlu diperhatikan bahwa indikator yang bersumber dari Susenas Tahun 2005 tidak termasuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga konsumen data yang ingin melakukan analisa deret waktu perlu memperhatikan hal tersebut.

2.4. Survei Pendidikan di NTT

Pada bulan Juni-Juli Tahun 2008 Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mencakup 3 (tiga) wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai,

Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur. Survei dilaksanakan atas permintaan pimpinan DPR-RI, dilandasi dugaan relatif tingginya tingkat putus sekolah di tiga kabupaten tersebut.

Pendataan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendataan secara sampel (survei) terhadap rumah tangga dan pendataan secara lengkap (sensus) terhadap institusi/lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Pendataan pada lembaga pendidikan formal mencakup jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat dan SMA/MA/ sederajat. Sedangkan pendataan pada lembaga pendidikan nonformal mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C), pendidikan keaksaraan fungsional, serta lembaga kursus dan lembaga pendidikan non formal lainnya (seminari dan pesantren). Jumlah sampel survei pendidikan menurut kabupaten dapat dilihat dalam tabel 4.3.

**Tabel 4.3. Jumlah Sampel Survei Pendidikan di NTT
Menurut Kabupaten Tahun 2008**

Kabupaten	Jumlah Sampel	
	Blok Sensus	Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)
Manggarai	267	4.272
Manggarai Barat	209	3.344
Manggarai Timur	238	3.808
Jumlah	714	11.424

Hasil Survei Pendidikan ini disusun dalam 2 (dua) buku laporan, masing-masing dengan judul Hasil Survei Pendidikan di NTT Tahun 2008 (pendekatan rumah tangga) dan Hasil Survei Pendidikan di NTT Tahun 2008 (pendekatan institusi/lembaga pendidikan formal dan non formal).

**STATISTIK
KETAHANAN
SOSIAL**

D.3



<http://www.bps.go.id>

3 STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

3.1. Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia & Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Dalam program pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan bijaksana dan lestari merupakan aspek yang penting untuk dapat menilai kondisi lingkungan hidup dan potensi sumber daya alam secara benar, penyusun kebijakan memerlukan data lingkungan hidup yang akurat dan andal.

Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia ini dapat dikatakan satu-satunya sumber data lingkungan hidup yang komprehensif yang sudah dikumpulkan secara rutin sejak 1982 serta dibutuhkan oleh banyak pihak. Cakupan informasinya yang meliputi berbagai informasi dari sektor-sektor terkait menjadikan publikasi ini kaya akan informasi yang meliputi komponen lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial.

Di samping itu, untuk meningkatnya penggunaan sumber daya alam yang terus menerus, serta adanya kecenderungan menurunnya kualitas (*degradasi*) lingkungan menjadikan akan pentingnya arti pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui publikasi lingkungan hidup ini perlu dibuat indikator pembangunan berkelanjutan. Seperti diketahui, indikator ini akan memuat hal-hal yang akan membantu kita untuk melihat keadaan pembangunan pada masa sekarang dan bagaimana keadaannya pada masa yang akan datang.

Indikator pembangunan berkelanjutan juga dapat memberikan informasi tentang bagaimana pembangunan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal bagi kemakmuran rakyat.

3.2. Penyusunan Indikator dan Indeks Kerawanan Sosial

Ketahanan sosial dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa/masyarakat berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kelangsungan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ketahanan sosial pada dasarnya memang sangat luas cakupannya, dimulai dari ketahanan

keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan lingkungan dan selanjutnya ketahanan wilayah.

Ketahanan suatu wilayah akan tergantung dari dinamika faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor geografis, sumber daya alam, manusia, lingkungan, politik, ekonomi, sosial-budaya serta faktor keamanan. Tingkat ketahanan masyarakat menghadapi masalah-masalah perubahan sosial yang timbul perlu diketahui dan diukur. Oleh karena itu diperlukan suatu petunjuk yang dapat memberikan gambaran secara kuantitatif tingkat ketahanan/kerawanan suatu wilayah yaitu berupa indeks komposit.

Proposal Penyusunan Indikator dan Indeks Kerawanan Sosial dimaksudkan untuk mengukur tingkat kerawanan sosial di suatu daerah. Dengan demikian penghitungan ini harus menggunakan variabel-variabel yang dapat berhubungan dengan indikator kerawanan sosial. Secara khusus studi ini dapat menentukan : (1) Perumusan variabel-variabel indikator kerawanan sosial. (2) Perumusan penghitungan Indeks Kerawanan Sosial. (3) Penyusunan dan Indeks Kerawanan Sosial di daerah-daerah rawan konflik misalnya, Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan serta beberapa daerah pembanding yang tidak rawan.

3.3. Penyusunan Statistik Kriminal

Tindak kriminal mempunyai pengaruh (negatif) terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk langkah antisipatif diperlukan alat untuk mengidentifikasi tingkat, sifat, dan pola tindak kriminal. Dalam rangka memenuhi antisipatif tersebut maka diperlukan adanya data statistik kriminal. Penyusunan statistik kriminal ini merupakan potret perkembangan situasi keamanan dan perilaku tindak pidana dua tahun terakhir sehingga bisa menyajikan perkembangan situasi keamanan selama dua tahun terakhir.

Laporan Statistik Kriminal disusun dengan tujuan untuk mengetahui: wilayah yang pernah mengalami konflik, jenis dan perkembangan kejadian kriminal dan upaya penanggulangan, tingkat kerawanan tindak kriminal, kerugian ekonomi akibat tindak kriminal, dan karakteristik pelaku kriminal.

3.4. Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan

Dalam upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi maka salah satu program yang diluncurkan pemerintah Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk menentukan rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria PKH, maka pemerintah menugaskan BPS untuk melakukan pendataan RTSM.

Tujuan umum program ini adalah untuk menyiapkan secara dini sumber daya manusia dengan cara meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan dasar. Untuk jangka pendek, program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Untuk jangka panjang, melalui persyaratan yang ditentukan diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku yang mengarah pada perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil, serta perbaikan tingkat pendidikan anak-anak RTSM, sehingga secara berangsur-angsur rantai kemiskinan dapat diputus.

Pendataan dilakukan secara bertahap melalui survei dengan nama Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP). SPDKP dilakukan dalam dua putaran, yaitu putaran 1 untuk mendapatkan sekitar 500.000 RTSM calon penerima PKH tahun 2007 dan putaran 2 untuk mendapatkan sekitar 700.000 RTSM calon penerima PKH 2008. Putaran 1 dilakukan di 7 Provinsi yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, sedangkan Putaran 2 dilakukan di 15 Provinsi yaitu Naggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat.

Keluaran dari kegiatan ini adalah ;1. Data base Rumah Tangga Sangat Miskin, 2. Calon Penerima Bantuan Tunai Bersyarat, dan 3. Data base Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan.

3.5. Studi Kerentanan Terhadap Bencana Tsunami

Untuk mengetahui perilaku sosial masyarakat pesisir terhadap ancaman bencana, maka diperlukan studi kerentanan masyarakat

menyangkut perilaku sosial masyarakat pesisir menghadapi bencana yang timbul akibat tsunami.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana tsunami, kondisi sosial dan rumah tangga masyarakat pesisir.

Cakupan kegiatan meliputi 4 Provinsi dari 5 Kabupaten/Kota pesisir yaitu : Padang, Padang Pariaman, Cilacap, Bandung dan Ciamis mencakup masing-masing 3 Kecamatan. Studi ini mengumpulkan 2400 rumah tangga terpilih di 150 blok sensus, 56 blok sensus merupakan blok sensus Susenas 2007 dan 94 blok sensus dipilih secara independen. Petugas survei ini adalah tim Susenas-Sakernas kabupaten.

3.6. Pembinaan Teknis Statistik Ketahanan Sosial

Setelah lima tahun terbentuknya Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Dithansos), fungsi Dithansos dirasa belum optimum karena baru berjalan di tingkat BPS Pusat. Sementara di tingkat BPS Provinsi, fungsi seksi ketahanan sosial secara operasional belum berjalan. Karena itu dipandang perlu untuk melakukan pembinaan teknis kepada kepala seksi ketahanan statistik sosial BPS Provinsi.

Kegiatan ini bertujuan untuk 1. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang statistik ketahanan sosial, 2. Memberikan wawasan kepada peserta agar mampu menyusun statistik ketahanan sosial, dan 3. Membangkitkan kreativitas peserta untuk berinisiatif mengembangkan statistik ketahanan sosial di daerah.

Kegiatan ini dilakukan dengan metode workshop dengan fasilitator/ narasumber dari internal dan eksternal.

3.7. Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup

Seiring dengan adanya kesadaran untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan, kegiatan eksplorasi dan eskploitasi sumber daya laut dan pesisir (SDLP) perlu juga mendapat perhatian. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut tersebut, sangat memerlukan data dan informasi pesisir dan laut yang sangat beragam sehingga perencanaan program

pembangunan dapat disusun lebih terarah. Sayangnya kendala masih dihadapi, yaitu keberadaan data yang masih kurang dari lapangan.

Kegiatan penyusunan statistik lingkungan hidup bertujuan menyediakan informasi yang menggambarkan keadaan lingkungan dan usaha-usaha penanggulangan kerusakan terhadap alam secara berkesinambungan yang digunakan untuk mengevaluasi ketersediaan dan potensi sumber daya alam, menganalisisnya dengan lebih mendalam, dan menyediakan informasi yang komprehensif, baik informasi mengenai tekanan-tekanan, dampak dan respon terhadap kegiatan sosial ekonomi pada lingkungan hidup. Publikasi yang telah dihasilkan antara lain: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI), Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB), Statistik SDLP dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

3.8. Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan

Statistik politik dan keamanan yang terbit sejak 2002 hanya memuat perkembangan statistik politik yang sifatnya "*current issue*" sehingga tidak bisa membandingkan antar waktu namun demikian hasil studi yang diperoleh merupakan rangkaian studi dalam rangka penyusunan statistik politik dan keamanan yang lebih representatif.

Mulai tahun 2008 statistik politik dan keamanan memuat jenis statistik yang tetap, sehingga dapat dilakukan keterbandingan antar waktu. Dengan demikian, statistik politik dan keamanan dapat digunakan untuk memantau perkembangan bidang politik dan keamanan.

3.9. Penyusunan Laporan Daerah Hasil Survei Modal Sosial

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan sosial terhadap ketahanan sosial, diperlukan data-data yang dapat memperlihatkan hal tersebut. Melalui Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan Tahun 2006, BPS telah mengumpulkan beberapa variabel modal sosial. Variabel yang dicakup adalah kepercayaan, resiprositas, dan eksternalitas.

Berkaitan dengan kegiatan penyusunan modal sosial, BPS telah mengundang ahli modal sosial yaitu Prof. Robert M.Z. Lawang dari Universitas Indonesia untuk memaparkan pengertian tentang "Stok Kapital Sosial di Indonesia: Pemikiran Awal", yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008. Dalam paparannya Prof. Robert Lawang menjelaskan

tentang pemikiran awal apabila akan dilakukan suatu penghitungan mengenai stok kapital sosial di Indonesia mengingat begitu beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Karena persoalan kajian modal sosial ini masih relatif baru, maka untuk menyusun laporan di tingkat daerah perlu dilakukan studi atau survei modal sosial secara nasional.

3.10. Streamlining Data Flows From Regions To The Center Under Decentralization Project (Grant-Tf-057574)

Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999/2004 (transfer tanggung jawab dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota) menyebabkan distorsi ketersediaan data baik di kabupaten/kota, di pemerintahan provinsi maupun di pemerintahan pusat. Dampak negatif dari situasi tersebut, pemerintahan provinsi (dinas dan instansi di tingkat provinsi) tidak memiliki data dari masing-masing dinas/instansi yang ada di kabupaten/kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan penyediaan ragam data statistik sektoral yang ada di dinas/instansi tingkat pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Dengan tersedianya data dimaksud akan memudahkan para perencana pembangunan di semua level dalam menyusun perencanaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di suatu wilayah.

3.11. Studi Perempuan sebagai Pelaku Kriminalitas

Masalah perempuan sebagai pelaku kriminalitas masih belum banyak dibicarakan. Tulisan dan kajian yang mengulas tentang hal tersebut belum banyak ditemukan, walaupun banyak kasus kriminalitas yang pelakunya perempuan.

Kegiatan ini bertujuan merumuskan metodologi yang tepat dalam pengumpulan data perempuan pelaku kriminalitas, menyajikan data kejahatan yang banyak dilakukan oleh perempuan, dan memberikan gambaran profil perempuan sebagai pelaku kriminalitas.

3.12. Pendataan Potensi Desa

Data Podes merupakan suatu data yang menggambarkan potensi suatu wilayah di tingkat desa. Podes merupakan gambaran potensi yang dimiliki

suatu wilayah pemerintahan yang paling rendah serta memiliki peran dan fungsi secara optimal dalam mengisi muatan perencanaan pembangunan secara makro maupun yang berskala mikro.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, data Podes digunakan untuk mengidentifikasi desa-desa yang diduga sebagai wilayah yang berpotensi dihuni oleh sebagian besar penduduk miskin dan mendeteksi desa-desa yang terkena bencana alam.

Pelaksanaan pendataan Podes bertujuan untuk menyediakan data tentang potensi wilayah yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan investor dalam pengembangan wilayah dan usaha. Adapun data yang dihasilkan akan dapat digunakan, antara lain: untuk

menggambarkan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum di desa, penyusunan statistik wilayah kecil (*small area statistics*), menyediakan data bagi penentuan desa tertinggal, penentuan daerah perkotaan/perdesaan (*urban/rural*), dan perkembangan wilayah yang berkesinambungan.

3.13. Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)

Pada tahun 2008 pemerintah telah membuat kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai akibat dari harga minyak mentah di pasar internasional. Dampak kenaikan harga BBM ini adalah kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari yang berpengaruh besar kepada daya beli masyarakat, khususnya penduduk miskin. Untuk menjaga daya beli rumah tangga pada tingkat yang sama sebelum kenaikan harga BBM, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) pada rumah tangga sasaran (RTS) melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008.

Pelaksanaan program bantuan dan perlindungan sosial mensyaratkan tersedianya database rumah tangga sasaran yang berisi informasi tentang rumah tangga beserta informasi pokok tentang anggota rumah tangga. Pada tahun ini BPS akan melakukan pemutakhiran (*updating*) data base RTS BLT. Pemutakhiran data tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendataan program perlindungan sosial yang selanjutnya disingkat PPLS.

Sebelum pelaksanaan PPLS di seluruh Indonesia, terlebih dahulu dilakukan uji coba pendataan PPLS di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Lokasi uji coba PPLS di Kabupaten Subang dapat dilihat dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4. Lokasi Uji Coba PPLS08

No.	Kecamatan	Desa	SLS
1	Cibogo	Cibogo	RW 1 RT 4
			RW 2 RT 6
			RW 3 RT 12
			RW 5 RT 16
	Pada Asih	RW 3 RT 6	
		RW 4 RT 9	
		RW 5 RT 11	
		RW 6 RT 13	
2	Pusaka Nanggara Patimban	RW 1 RT 2	
		RW 2 RT 4	
		RW 3 RT 6	
		RW 3 RT 8	
	Kalentambo	RW 2 RT 1	
		RW 2 RT 3	
		RW 2 RT 5	
		RW 2 RT 7	

PPLS dilaksanakan secara serentak di Indonesia pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2008. Sasaran PPLS adalah seluruh penerima BLT dan hasil PSE05 serta rumah tangga sasaran baru. Data yang dikumpulkan meliputi keterangan rumah tangga dan keterangan anggota rumah tangga.

STATISTIK PRODUKSI



<http://www.bps.go.id>

**STATISTIK
TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN**

E.1

<http://www.bps.go.id>



BIDANG STATISTIK PRODUKSI

1. STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

1.1. Studi Metode Rumpun Counting

Selain data luas panen, data hasil per hektar atau produktivitas merupakan salah satu variabel penentu dalam memperkirakan jumlah produksi padi dan palawija. Oleh karena itu keakuratan metoda estimasi dalam memperkirakan produktivitas tanaman padi dan palawija adalah sangat penting untuk mendapatkan perkiraan produksi yang akurat.

Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa data produktivitas tanaman padi sawah yang diperoleh dengan menggunakan metode ubinan tidak berbeda signifikan secara statistik dibandingkan dengan metode *rumpun counting* (JICA-ASTIT). Namun demikian karena pada 2 (dua) kali studi tahun 2000 dan 2001 tersebut hanya dilakukan di 3 (tiga) provinsi di Jawa dan hanya mencakup padi sawah, maka untuk lebih meyakinkan bahwa penggunaan metode rumpun counting dapat diterapkan secara nasional, diperlukan studi lebih lanjut di beberapa provinsi di luar Jawa (padi sawah dan palawija) dan provinsi di Jawa (palawija).

1.2. Survei Konversi Gabah-Beras

Hasil Survei Konversi Gabah-Beras yang digunakan sebelumnya adalah hasil survei tahun 1995/1996. Survei yang sama dilakukan kembali pada tahun 2007, karena diduga telah ada perubahan angka konversi serta besaran susut panen dan pasca panen akibat kemajuan teknologi pertanian. Sehingga hasil survei konversi gabah-beras yang digunakan hingga saat ini adalah hasil survei tahun 2007.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan angka konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) dan dari Gabah Kering Giling (GKG) ke beras, serta besaran susut panen dan pasca panen.

Keluaran dari kegiatan ini adalah Publikasi : Survei Konversi Gabah – Beras.

1.3. Pengumpulan Data Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan/Ubinan

Tujuan pengumpulan data statistik pertanian (SP) tanaman pangan/ ubinan adalah tersedianya data luas tanaman padi dan palawija di lahan sawah maupun lahan bukan sawah, penggunaan lahan, alat-alat pertanian dan kelembagaan pertanian, perbenihan, serta tersedianya data rata-rata hasil per hektar (produktivitas) tanaman padi dan palawija dari hasil survei ubinan. Alokasi jumlah kecamatan, blok sensus dan ubinan statistik dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 5.1. Jumlah Kecamatan, Blok Sensus dan Ubinan Statistik Tanaman Pangan (padi, palawija) Tahun 2004 – 2009

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kecamatan	4.938	5.109	5.357	5.641	5.894	6.283
2.	Blok Sensus	10.990	10.990	12.042	12.041	12.041	12.114
3.	Ubinan	45.000	45.000	60.117	60.116	60.116	60.431

Pengumpulan data SP dilakukan secara lengkap (sensus) di seluruh wilayah kecamatan di Indonesia oleh Mantri Tani (Mantan/KCD) dengan cara melakukan pengamatan lapangan. Sedangkan survei ubinan dilakukan secara sampel. Pengumpulan data produktivitas melalui survei ubinan dilakukan oleh KSK dan Mantan/KCD dengan melakukan pengukuran di lapangan. Survei ubinan dilakukan dengan menggunakan pendekatan rumah tangga, sementara untuk statistik pertanian tanaman pangan (SP) menggunakan pendekatan area (kecamatan).

1.4. Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi

Survei struktur ongkos usaha tanaman padi dilakukan secara sampel di 15 (lima belas) provinsi potensi tanaman padi yang diharapkan telah dapat mewakili seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau staf Badan Pusat Statistik (BPS) daerah, dengan cara melakukan wawancara terhadap kegiatan usaha tanaman padi yang dilakukan oleh petani sampel (terpilih).

Adapun data yang dikumpulkan dalam survei tersebut antara lain penggunaan benih, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja, jasa pertanian dan biaya lain yang dibutuhkan dalam usaha tanaman padi sawah.

1.5. Pengumpulan Data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH), Produktivitas dan Perusahaan Hortikultura

Pengumpulan data statistik pertanian hortikultura (SPH) meliputi tanaman sayuran tahunan dan semusim, tanaman buah-buahan tahunan dan semusim, tanaman biofarmaka serta tanaman hias yang dilakukan secara lengkap (sensus) di seluruh wilayah kecamatan di Indonesia oleh mantri tani (Mantan/KCD). Informasi yang diperoleh terdiri dari luas panen/ jumlah tanaman yang menghasilkan, luas/jumlah tanaman rusak, luas/ jumlah tanaman baru, produksi, harga, luas/jumlah benih penangkaran, jumlah pedagang benih serta alat mesin pertanian.

Dalam rangka untuk meningkatkan akurasi data dilakukan studi produktivitas untuk memperkirakan banyaknya produksi persatuan luas atau persatuan pohon. Uji coba dilaksanakan mulai tahun 2007 di beberapa provinsi dan untuk beberapa komoditas terpilih.

Untuk memperoleh data perusahaan hortikultura yang tinggi akurasinya, maka BPS telah menyusun direktori perusahaan hortikultura. Direktori perusahaan tersebut diupdate setiap tahun, sehingga datanya selalu mencerminkan kondisi terkini. Metode yang dipakai dalam updating melalui pengutipan direktori dari instansi terkait, kemudian pengecekan lapangan dan pencacahan terhadap perusahaan yang aktif. Informasi yang dapat diperoleh dari direktori ini adalah nama dan alamat perusahaan, kontak person serta kegiatan utama yang dilakukan perusahaan.

1.6. Survei Perusahaan Perkebunan Besar dan Karet Remah

Survei perusahaan perkebunan besar bulanan merupakan pengumpulan data pokok perusahaan perkebunan yang dikumpulkan secara bulanan dan variabel yang dicakup hanya terbatas untuk luas tanaman, produksi dan persediaan (stock). Komoditi yang dicakup baru terbatas 8 jenis tanaman perkebunan yaitu karet, kakao, kelapa sawit, kopi, kina, tebu, teh dan tembakau. Pemilihan 8 komoditi ini didasarkan pada pentingnya peranan komoditi tersebut terhadap PDB sub sektor perkebunan maupun sebagai sumber penghasil devisa negara.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komoditi dan pengumpulan datanya dilakukan dengan *mailing system*. Hasil pengolahan data bulanan perusahaan perkebunan selama ini dipublikasikan dalam indikator ekonomi yang tingkat penyajiannya merupakan angka nasional. Di samping itu untuk komoditi kelapa sawit, karet, dan teh juga disajikan pada publikasi tahunan dengan tingkat penyajian provinsi.

Survei perusahaan perkebunan besar tahunan (struktur ongkos perusahaan perkebunan) dilaksanakan setahun sekali dengan pendekatan administrasi perkebunan dan dilakukan dengan pencacahan secara langsung oleh petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Data yang dikumpulkan lebih rinci meliputi penguasaan dan penggunaan lahan, luas dan mutasi tanaman, produksi, tenaga kerja serta struktur ongkos. Tujuan survei tersebut di antaranya adalah untuk mendapatkan struktur ongkos salah satu komoditi utama yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

Pengumpulan data industri karet remah dilakukan secara bulanan, tetapi hasil pengolahan data dipublikasikan setahun sekali. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan gambaran yang lengkap mengenai perkembangan komoditi karet olahan. Data yang dikumpulkan juga sangat diperlukan oleh ANRPC (*Assosiation of Natural Rubber Producing Countries*). Jumlah responden perkebunan besar dan karet remah disajikan pada tabel 5.2. berikut.

Tabel 5.2. Jumlah Responden Survei Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2004 - 2009

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Hortikultura	482	514	554	251	578	579
2.	Perkebunan Besar Bulanan (Revisit)	7.276	6.108	1.875	1.867	1.890	1.890
3.	Perkebunan Besar SOPPB Tahunan	1.819	1.865	1.865	1.842	1.819	1.904
4.	Karet Remah (Bulanan)	2.280	2.280	2.256	2.292	4.056	4.056

Dalam upaya meningkatkan kualitas data perkebunan khususnya data produksi perkebunan rakyat, maka diperlukan suatu indikator yang dapat

digunakan untuk melihat kewajaran suatu data tersebut. Salah satu indikator tersebut yaitu produktivitas dari suatu komoditas tanaman perkebunan. Produktivitas yang dimaksud yakni banyaknya produksi per satuan pohon ataupun per satuan luas, untuk setiap komoditas tanaman perkebunan tentunya memiliki produktivitas yang berbeda-beda. Untuk komoditas tanaman perkebunan yang sama juga dapat memiliki produktivitas yang berbeda tergantung pada umur tanaman, keadaan wilayah (iklim, kondisi tanah dan sebagainya), maupun jenis varietas yang digunakan. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui indikator produktivitas dari suatu komoditas tanaman perkebunan rakyat diperlukan suatu studi produktivitas. Pada studi ini dipilih 6 (enam) komoditas unggulan yaitu karet, kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa dan lada.

1.7. Pendataan Usaha Tani 2009 (PUT09)

Dalam rangka penyusunan program kebijakan pertanian, maka diperlukan *data base* usaha tani khususnya rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi, jagung, kedelai dan tebu (PJKT). Sebagai dasar penyusunan *data base* adalah hasil pendaftaran rumah tangga Sensus Pertanian 2003 (ST2003) yang sudah mempunyai muatan nama kepala rumah tangga dan jenis serta luas lahan yang dikuasai rumah tangga untuk tanaman PJKT.

Namun demikian hasil ST03 diperkirakan sudah tidak sesuai dengan kondisi rumah tangga pertanian saat ini, untuk itu perlu dilakukan pemutakhiran data ST03. Kegiatan pemutakhiran data tersebut dinamakan dengan Pendataan Usaha Tani Tahun 2009 (PUT09) yang dilaksanakan di 32 provinsi kecuali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tujuan dari Pendataan Usaha Tani 2009 (PUT09) adalah menyediakan database rumah tangga usaha tani padi, jagung, kedelai dan tebu (RTUT-PJKT) yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Dengan tersedianya database RTUT-PJKT, diharapkan formulasi kebijakan pemerintah di bidang pangan menjadi lebih tepat sasaran.

Cakupan wilayah pelaksanaan pendataan RTUT-PJKT dilakukan di semua blok sensus yang tercakup dalam ST03 serta blok sensus biasa dan blok sensus persiapa yang tidak tercakup dalam ST03. Cakupan wilayah pelaksanaan PUT09 dilakukan di 32 provinsi dan 448 kabupaten/kota dan

jumlah blok sensus ST03 PJKT sebanyak 367.078 dan blok sensus ST03 Non PJKT sebanyak 209.632.

1.8. Pendataan Lengkap Usaha Tani 2009 (PLUT09)

Penyusunan *data base* usaha tani PJKT di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan melalui pendataan lengkap usaha tani 2009 (PLUT09). Hal tersebut dilakukan karena data ST03 belum tersedia, mengingat kondisi sosial politik pada saat itu menyebabkan tidak dilaksanakannya ST03. Sedangkan fokus pendataan tetap pada rumah tangga usaha tani padi, jagung, kedelai dan tebu.

Tujuan pelaksanaan Pendataan Lengkap Usaha Tani 2009 (PLUT09) adalah untuk menyediakan database rumah tangga usaha tani padi, jagung, kedelai dan tebu (RTUT-PJKT) yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Dengan tersedianya database RTUT-PJKT, diharapkan formulasi kebijakan pemerintah di bidang pangan menjadi lebih tepat sasaran. Serta mendapatkan data-base rumah tangga usaha tani selain padi, jagung, kedelai, dan tebu.

Pendataan Lengkap Usaha Tani 2009 (PLUT09) di Provinsi NAD dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota. Wilayah yang dicakup adalah yang telah terbentuk sampai dengan Juni 2008 yaitu sebanyak 23 kabupaten/kota, 276 kecamatan, dan 7.130 desa/kelurahan/gampong/kampung (termasuk mukim) serta blok sensus khusus sebanyak 58 dan blok sensus persiapan sebanyak 3900. Komoditi yang dicakup pada PLUT09 meliputi seluruh komoditi pertanian yang dikuasai/diusahakan rumah tangga.

**PETERNAKAN,
PERIKANAN DAN
KEHUTANAN**

E.2



<http://www.bps.go.id>

2 PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2.1. Statistik Peternakan

2.1.1. Survei Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan (RPH)

Untuk memenuhi kebutuhan data populasi, produksi dan struktur ongkos usaha peternakan secara rutin, BPS melakukan pengumpulan data dengan pendekatan perusahaan peternakan setiap tahun. Sedangkan untuk memperoleh data produksi daging, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Keurmaster yang dilakukan setiap triwulan. Pengumpulan data dengan pendekatan perusahaan dan RPH/Keurmaster berdasarkan pertimbangan jumlahnya relatif lebih sedikit, tempatnya tetap dan mempunyai catatan lengkap, sehingga dapat diperoleh gambaran perkembangan populasi, produksi dan struktur usaha peternakan dari tahun ke tahun berdasarkan laporan perusahaan peternakan dan RPH/Keurmaster.

Perusahaan peternakan yang dicakup adalah semua perusahaan pembibitan dan budidaya ternak (sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging) yang dijalankan secara teratur dan terus menerus, dengan tujuan komersial (memperoleh keuntungan) serta memiliki badan hukum usaha (PT/PN, CV, firma, koperasi dan yayasan). RPH yang dicakup adalah semua RPH yang ada di wilayah Indonesia milik pemerintah/swasta, dengan responden petugas RPH atau Keurmaster yang bertugas di RPH. Jumlah responden survei perusahaan peternakan dan RPH/Keurmaster disajikan pada tabel di bawah ini.

2.1.2. Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan

Data populasi dan produksi peternakan yang diusahakan oleh rumah tangga dikumpulkan melalui Sensus Pertanian (ST) setiap sepuluh tahun sekali atau melalui survei yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan dan ketersediaan dana. Sensus pertanian yang terakhir dilaksanakan adalah Sensus Pertanian Tahun 2003 (ST03) dengan tujuan untuk memperoleh jumlah rumah tangga peternakan, populasi ternak di rumah tangga dan struktur ongkos usaha peternakan. Sedangkan survei Survei Rumah tangga Peternakan (SPN) adalah survei yang dilakukan sejak

tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 bekerja sama dengan Ditjen Peternakan Departemen Pertanian.

Tujuan SPN adalah untuk memperoleh dinamika/perubahan populasi ternak yang terjadi di rumah tangga yang tergambar melalui angka parameter kelahiran, kematian, pemotongan dan penambahan/pengurangan lainnya, sebagai dasar penghitungan estimasi populasi dan produksi peternakan yang dikuasai rumah tangga.



Gambar 5.1. Pembahasan persiapan pelaksanaan SPN08 di Hotel Bintang, Jakarta Pusat, 2-4 Juni 2008 oleh BPS dan Departemen Pertanian.

2.2. Statistik Perikanan

Sebagai negara agraris dan maritim, sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan penyedia sumber protein hewani. Informasi mengenai ketersediaan produk perikanan baik perikanan hasil penangkapan maupun budidaya secara kontinyu sangat dibutuhkan karena kebutuhan produk perikanan yang meningkat.

Secara rinci kegiatan rutin yang dilakukan (data primer) adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data triwulanan tempat pelelangan ikan (TPI)
- b. Pengumpulan data tahunan perusahaan penangkapan ikan

- c. Pengumpulan data tahunan perusahaan budidaya ikan
- d. Pengumpulan data perikanan dengan pendekatan rumah tangga yang mencakup penangkapan ikan dan budidaya ikan dikumpulkan setiap 10 tahun sekali yaitu pada pelaksanaan sensus pertanian.

2.2.1. Pengumpulan Data Triwulanan TPI

Tujuan pengumpulan data triwulanan TPI adalah untuk memperoleh data mengenai produksi dan nilai produksi yang dijual melalui TPI. Adapun pengumpulan datanya dilakukan secara lengkap terhadap TPI di seluruh provinsi, sedangkan produksi perikanan laut yang tidak dijual di TPI belum dicakup.

Data produksi perikanan laut yang dijual di TPI dikumpulkan melalui laporan triwulanan dari hasil pencatatan transaksi penjualan ikan oleh petugas TPI. Daftar yang digunakan adalah Daftar TPI. Sebagai petugas pencacah adalah KSK atau staf BPS Kabupaten/Kota.



Gambar 5.2. Petugas BPS sedang melakukan wawancara dengan responden di tempat pelelangan ikan

Data yang disajikan dari hasil laporan triwulanan TPI adalah publikasi produksi perikanan laut yang dijual di TPI. Publikasi tersebut memuat informasi mengenai besarnya produksi dan nilai produksi ikan menurut provinsi dan menurut jenis ikan. Jumlah responden survei perikanan dan TPI disajikan pada tabel 5.3. di bawah ini.

Tabel 5.3. Jumlah Responden Survei Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2004 - 2009

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peternakan & RPH	14.010	12.907	14.087	15.068	6.257	6.675
2.	Perikanan & TPI	2.896	3.139	3.549	3.522	1.990	1.787
3.	Kehutanan	1.319	1.319	816	760	769	757

2.2.2. Pengumpulan Data Tahunan TPI

Tujuan pengumpulan data tahunan TPI adalah untuk memperoleh data mengenai kegiatan yang dilakukan oleh TPI yang mencakup produksi ikan yang dilelang, banyaknya tenaga kerja, struktur ongkos dan sebagainya. Adapun pengumpulan datanya dilakukan di seluruh provinsi yang terdapat TPI.

Pengumpulan data dilakukan dengan sistem laporan dari semua TPI setiap tahun oleh KSK atau staf BPS Kabupaten/Kota. Daftar yang digunakan adalah daftar laporan tahunan tempat pelelangan ikan (LTPI).

Data yang disajikan dari hasil laporan tahunan TPI adalah publikasi Statistik Tempat Pelelangan Ikan, yang memuat informasi mengenai besarnya produksi, nilai produksi ikan, jumlah pekerja dan pengeluaran usaha menurut provinsi.

2.2.3. Pengumpulan Data Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan

Tujuan pengumpulan data tahunan perusahaan penangkapan ikan adalah untuk memperoleh informasi mengenai produksi, nilai produksi, tenaga kerja, struktur ongkos dan sarana produksi. Pengumpulan data dilakukan pada seluruh perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan setiap tahun yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan penangkapan ikan. Daftar yang digunakan adalah

daftar laporan tahunan perusahaan penangkapan ikan (daftar LPT). Sebagai petugas pencacah adalah KSK atau staf BPS Kabupaten/Kota.



Gambar 5.3. Salah satu responden dalam pengumpulan data tahunan perusahaan penangkapan ikan

Data yang disajikan dari hasil laporan tahunan perusahaan penangkapan ikan adalah publikasi statistik perusahaan perikanan. Publikasi tersebut memuat informasi mengenai produksi, nilai produksi, tenaga kerja, struktur ongkos dan sarana produksi.

2.2.4. Pengumpulan Data Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan

Tujuan pengumpulan data tahunan perusahaan budidaya ikan bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai produksi, nilai produksi, tenaga kerja, struktur ongkos dan sarana produksi. Pengumpulan data dilakukan pada seluruh perusahaan budidaya ikan yang berbadan hukum di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan setiap tahun yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan budidaya ikan. Daftar yang digunakan adalah daftar laporan tahunan perusahaan budidaya ikan (daftar LTB). Sebagai petugas pencacah adalah KSK atau staf BPS Kabupaten/Kota.

Data yang disajikan dari hasil laporan tahunan perusahaan budidaya ikan adalah publikasi statistik perusahaan perikanan. Publikasi tersebut memuat informasi mengenai produksi, nilai produksi, tenaga kerja, struktur ongkos dan sarana produksi.

2.3. Statistik Kehutanan

2.3.1. Survei Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Kebutuhan kayu log sebagai bahan baku industri baik domestik maupun internasional yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, mendorong setiap perusahaan HPH untuk terus meningkatkan produksinya di samping



harus melestarikan hutan. Kegiatan tersebut perlu terus dipantau secara berkesinambungan. Berkaitan dengan itu dibutuhkan data statistik HPH yang akurat dan tepat waktu. Data tersebut sangat berarti bagi pemerintah atau pengusaha di dalam mengevaluasi penyusunan suatu perencanaan yang akan datang.

Ruang lingkup pengumpulan data statistik perusahaan HPH mencakup seluruh perusahaan HPH di Indonesia yang melakukan kegiatan usahanya secara aktif. Metode yang dipakai untuk pengumpulan data statistik perusahaan HPH adalah metode pencacahan lengkap dengan kuesioner VT07-HPH1 dan VT07-HPH2. Kuesioner VT07-HPH1 dipakai untuk

mendapatkan keterangan yang rinci di lokasi hutan (*base camp*). Kuesioner VT07-HPH2 digunakan untuk memperoleh keterangan yang rinci di kantor pusat. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau staf BPS Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada bulan Januari-Juni.

2.3.2. Survei Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan

Dalam rangka meningkatkan produksi kayu bulat sebagai bahan baku industri pengolahan tanpa melupakan usaha melestarikan hutan, kegiatan budidaya tanaman kehutanan perlu terus dikembangkan dan dipantau secara berkesinambungan. Sejak Sensus Pertanian 1993, setiap tahun BPS melakukan pencacahan terhadap perusahaan yang membudidayakan tanaman kehutanan, yang meliputi: Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), Perum Perhutani dan Perusahaan Lainnya (selain HTI dan Perum Perhutani).

Ruang lingkup dan cakupan pengumpulan data statistik perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan meliputi seluruh perusahaan HTI, Perum Perhutani dan perusahaan lainnya yang membudidayakan tanaman kehutanan di Indonesia yang melakukan kegiatan usahanya secara aktif.

Metode dalam pengumpulan data statistik perusahaan HTI, Perum Perhutani dan perusahaan lainnya adalah metode pencacahan lengkap (sensus lengkap) dengan menggunakan kuesioner VT07 HPHT. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan oleh koordinator statistik kecamatan (KSK).

2.3.3. Survei Perusahaan Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar (STL)

Ruang lingkup dan cakupan pengumpulan data perusahaan penangkaran satwa/tumbuhan liar meliputi seluruh perusahaan penangkaran satwa/tumbuhan liar yang berada di Indonesia yang melakukan kegiatan usahanya secara aktif.

Metode dalam pengumpulan data statistik Perusahaan Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar adalah metode pencacahan lengkap (sensus lengkap) yang menggunakan kuesioner VT07-STL. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan oleh koordinator statistik kecamatan (KSK).

<http://www.bps.go.id>

**STATISTIK
INDUSTRI**

E.3

<http://www.bps.go.id>



3 STATISTIK INDUSTRI

3.1. Sensus Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Sektor Industri Pengolahan Besar dan Menengah di Indonesia

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan sektor produksi dalam mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Pendayagunaan Iptek tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan dan bersaing pada pasar domestik dan ekspor. Sedangkan kemampuan mendayagunakan Iptek dipengaruhi kemampuan industri dalam mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Kekuatan atau kemampuan industri dalam melakukan kegiatan litbang menghasilkan suatu pengembangan teknologi baru atau kombinasinya serta produk atau proses inovasi yang memperkuat daya saing industri.

Untuk itu perlu diketahui data atau informasi mengenai kegiatan litbang dan inovasi pada masing-masing perusahaan. Data dan informasi tersebut diperoleh melalui suatu sensus pada sektor Industri Manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Indonesia.

Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya data yang komprehensif dan mampu memberikan gambaran riil tentang potensi, kemampuan dan dampak Iptek sektor industri dalam pembangunan nasional.

3.2. Updating Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang

Untuk dapat melaksanakan sensus industri pengolahan berskala besar dan sedang, diperlukan direktori yang lengkap. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh daftar nama, alamat, produksi utama dan *contact person* dari perusahaan industri besar dan sedang.

Pencacahan dilakukan secara sensus dengan kriteria jumlah perusahaan industri besar dan sedang dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 19 orang di seluruh Indonesia. Keluaran dari kegiatan ini berupa Publikasi Direktori Industri Besar dan Sedang.

3.3. Survei Penggalan

Survei Penggalan dilakukan dalam rangka mengumpulkan data berkala sub sektor penggalan. Karakteristik yang dikumpulkan untuk survei ini meliputi antara lain data mengenai jenis dan nilai output yang dihasilkan

struktur biaya produksi, nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan perubahan barang modal. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dari perusahaan adalah dengan wawancara dan metode mailing system.

Tujuan kegiatan dari survei ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) struktural yang akurat, rinci, dan mutakhir dari sektor-sektor pertambangan & penggalian, listrik, gas, air bersih dan konstruksi secara berkala, sehingga dapat memberikan informasi perkembangan yang dicapai serta kekurangan-kekurangannya.

Survei sektor energi yang meliputi listrik PLN, gas PGN, dan Air bersih juga dilaksanakan secara cacah lengkap. Keluaran dari kegiatan ini adalah Updating Direktori.

3.4. Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan

Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) Bulanan yaitu survei yang dilakukan secara sampel terhadap perusahaan industri sedang (memiliki tenaga kerja 20-99 orang) dan perusahaan industri besar (memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih). Dari Survei IBS Bulanan diperoleh angka indeks produksi, indeks harga dan indeks pekerja yang berguna untuk membantu menghitung produk domestik bruto triwulanan khususnya sektor industri, dan untuk melihat laju pertumbuhan sektor IBS secara bulanan, triwulanan maupun tahunan. Adapun metode yang digunakan untuk menghitung angka indeks adalah metode diskrit divisia.

Angka indeks tersebut di atas dipublikasikan pada: Indikator Ekonomi Bulanan, Statistik Indonesia, *Website BPS*, *Website SDDS IMF (Special Data Dissemination Standard-International Monetary Fund)* dan dipublikasikan pada buku Perkembangan Indeks Produksi. Jumlah responden survei industri besar dan sedang bulanan mengalami peningkatan dari 6.338 tahun 2004 menjadi 7.152 tahun 2009.

3.5. Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan

Pengumpulan data pada survei ini dilakukan secara lengkap (*complete enumeration*) terhadap seluruh perusahaan industri tenaga kerja lebih dari 20 orang di seluruh Indonesia. Sistem pengumpulan datanya dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota ke setiap perusahaan industri yang terdapat di kota masing-masing.

Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan bertujuan mengumpulkan data berbagai karakteristik perusahaan, antara lain banyaknya perusahaan, tenaga kerja, output, input, nilai tambah dan data lainnya. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan di sektor industri pada khususnya dan ekonomi pada umumnya. Di samping itu dapat digunakan sebagai dasar/acuan dalam menyusun indikator perkembangan sektor industri. Jumlah responden survei industri besar dan sedang tahunan 2004 sampai dengan tahun 2009, berturut-turut adalah 25.000; 21.146; 20.890; 25.302; 30.104; dan 30.127.

3.6. Survei Pertambangan dan Energi

Survei pertambangan dan energi dilakukan untuk mengumpulkan data berkala sektor pertambangan migas, pertambangan non migas, pertambangan penggalian, listrik PLN, gas kota dan air bersih. Karakteristik yang dikumpulkan antara lain nilai output yang dihasilkan, struktur biaya produksi, nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan perubahan barang modal. Periode pelaksanaan survei adalah tahunan sedangkan metode pengumpulan data adalah cacah lengkap sedangkan survei perusahaan pertambangan bahan galian industri dan konstruksi dilakukan secara sampel.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dari perusahaan adalah dengan wawancara, kecuali untuk perusahaan-perusahaan pertambangan besar di DKI Jakarta, PLN dan PGN dilakukan dengan metode *mailing system* dan petugasnya dari BPS. Jumlah responden survei pertambangan dan energi tahun 2008 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.4. Jumlah Responden Survei Pertambangan, Energi, dan Penggalian Tahun 2004 – 2009

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pertambangan Besar	593	1.186	1.146	635	1.260	1.328
2.	Energi	688	1.360	1.265	739	1.506	1.476
3.	Penggalian	2.800	2.800	2.765	2.834	5.664	5.656

Tujuan dari survei-survei ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) struktural yang akurat, rinci dan mutakhir secara berkala.

3.7. Survei Konstruksi Tahunan

Survei konstruksi tahunan dilakukan dalam rangka mengumpulkan data berkala sektor konstruksi. Karakteristik yang dikumpulkan untuk survei ini meliputi data mengenai jenis dan nilai output yang dihasilkan, struktur biaya produksi, nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan perubahan barang modal.

Tujuan kegiatan dari survei konstruksi ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) struktural yang akurat, rinci dan mutakhir dari sektor konstruksi secara berkala, sehingga dapat memberikan informasi perkembangan yang dicapai serta kekurangan-kekurangannya.

Survei konstruksi tahunan, dilaksanakan melalui pengambilan sampel yang dilakukan oleh BPS. Besarnya sampel perusahaan konstruksi adalah sebanyak 12.199 perusahaan dari sekitar 80.000 perusahaan yang aktif. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi *cut-off point* dan *stratified PPS sampling*, metode yang digunakan untuk memperoleh data dari perusahaan adalah wawancara.

Tabel 5.5. Jumlah Responden Survei Industri dan Konstruksi Tahun 2004 – 2009

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Industri Besar/Sedang Bulanan	6.338	7.200	7.200	7.200	7.200	7.152
2.	Industri Besar/ Sedang Tahunan	25.000	21.146	20.890	25.302	30.104	30.127
3.	Konstruksi Tahunan	8.168	8.168	7.441	7.441	24.398	23.268
4.	Konstruksi Triwulanan	5.080	5.080	5.076	5.076	20.928	19.560

Untuk survei tahunan perusahaan konstruksi, estimasi atas populasi untuk setiap karakter menggunakan kualifikasi perusahaan sebagai dasar faktor pengali. Kualifikasi perusahaan adalah kemampuan perusahaan

dalam menangani proyek konstruksi menurut nilai kontrak. Secara berurutan kualifikasi perusahaan adalah B untuk perusahaan-perusahaan besar, M1 dan M2 untuk perusahaan-perusahaan menengah dan K1, K2 dan K3 untuk perusahaan-perusahaan kecil. Jumlah responden survei perusahaan konstruksi tahunan 2004 sampai dengan tahun 2009, berturut-turut dapat dilihat pada tabel.

3.5. Survei Konstruksi Triwulanan

Survei konstruksi triwulanan dilakukan dalam rangka mengumpulkan data berskala sektor konstruksi. Karakteristik yang dikumpulkan antara lain data mengenai jenis dan nilai konstruksi yang telah diselesaikan dan penyerapan tenaga kerja serta persepsi bisnis.

Tujuan kegiatan dari survei konstruksi triwulanan ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) struktural yang akurat, rinci, dan mutakhir dari sektor konstruksi secara berkala (triwulanan), sehingga dapat memberikan informasi perkembangan yang dicapai serta kekurangan-kekurangannya.

Survei konstruksi triwulanan dilaksanakan secara sampel, dengan metode panel survei, yaitu perusahaan yang tersampel akan terus menerus diobservasi selama masih aktif. Sampel merupakan subsampel dari survei konstruksi tahunan. Pencacahan dilakukan dengan wawancara langsung dengan jumlah sampel sebanyak 2.616 perusahaan.

Survei konstruksi triwulanan ini menggunakan indeks berantai triwulanan, sebagai gambaran dari kegiatan perusahaan konstruksi triwulanan (indikator triwulanan). Selain itu juga disajikan indeks persepsi bisnis sektor konstruksi yang menggunakan *diffusion index*. Jumlah responden survei perusahaan konstruksi tahunan dan triwulanan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, berturut-turut adalah sebagai berikut: tahun 2004 menggunakan 5.080; 5.080; 5.076; 5.076; 20.928; dan 19.560.

**STATISTIK
DISTRIBUSI
DAN JASA**



F

<http://www.bps.go.id>

**STATISTIK
DISTRIBUSI**

F.1



<http://www.bps.go.id>

BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA

1 STATISTIK DISTRIBUSI

1.1. Studi Statistik Haji/Umroh

Perjalanan haji dan umroh berpengaruh terhadap persoalan ekonomi. Semua pengeluaran peserta haji dan umroh baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk ongkos perjalanannya akan mempengaruhi pola pengeluaran konsumsi masyarakat dan jumlah devisa yang digunakan. Ini akan pula mempengaruhi perhitungan-perhitungan dalam neraca pembayaran (balance of payments). Memang belum ada angka resmi berapa sebenarnya jumlah devisa yang tersedot dari kegiatan haji dan umroh ini.

Untuk itu, maka suatu penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh perlu dilakukan untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah mereka dan berapa besarnya pengeluaran yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Sasaran penelitian adalah pihak penyelenggara sendiri maupun dari pihak jemaah haji dan umroh agar dapat diperoleh data/informasi yang lengkap dan terkini sebagai masukan dalam penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada masa berikutnya.

1.2. Kompilasi Data Statistik Ekspor

Kegiatan Kompilasi Statistik Ekspor menghasilkan data ekspor setiap bulan yang dirinci menurut komoditi, negara tujuan dan pelabuhan muat, baik volume maupun nilai. Menghasilkan angka ekspor bulanan yang dilaporkan dalam Sidang Menko Perekonomian dan Sidang Kabinet, serta laporan perkembangan dan analisa statistik ekspor.

Sumber data yang digunakan pada kegiatan kompilasi data statistik ekspor adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterima BPS dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC). Statistik ekspor mengklasifikasikan komoditi berdasarkan kode *Harmonized System* dan *Standard International Trade Classification*, negara asal dan pelabuhan muat serta ekspor barang pertanian, pertambangan dan industri.

1.3. Kompilasi Data Statistik Impor

Sumber data yang digunakan pada kegiatan kompilasi data statistik impor adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterima BPS dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC). Statistik impor mengklasifikasikan komoditi berdasarkan kode *Harmonized System* dan *Standard International Trade Classification*, negara asal dan pelabuhan bongkar serta penggunaannya sebagai barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal (Klasifikasi *Broad Economic Categories*).

Informasi statistik impor sangat penting sebagai bahan perencanaan pembangunan serta strategi dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri yang menggunakan bahan baku/penolong dan barang modal yang berasal dari impor.

1.4. Kompilasi Data Statistik Perdagangan dan Jasa



Gambar 6.1. Kepala BPS, Dr. Rusman Heriawan membuka "Workshop Finalisasi dan Tabulasi Hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06)" di Hotel Ibis Mangga Dua, 6-9 Juli 2008.

Pasca Sensus Ekonomi tahun 2006 Sensus Sampel (SE06-SS) dibutuhkan suatu sajian data statistik dari sektor perdagangan dan jasa yang lebih rinci dan berkelanjutan. Untuk itu perlu disajikan informasi

tersebut sebagai pelengkap dari publikasi SE06-SS yang disajikan secara terpisah. Sumber data yang digunakan pada kegiatan kompilasi data statistik perdagangan dan jasa adalah hasil SE06-SS yang merupakan Tahap II dari kegiatan SE06.

Kompilasi data statistik perdagangan dan jasa menghasilkan publikasi tentang profil perusahaan/usaha perdagangan dan jasa dengan menyajikan tabel-tabel yang dirinci menurut skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar secara terpisah dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang lebih luas dari KBLI yang disajikan dalam publikasi SE06-SS.

Dari Publikasi hasil kompilasi data statistik perdagangan dan jasa dapat diperoleh gambaran data ekonomi secara rinci tentang ciri dan kegiatan perusahaan/usaha perdagangan dan jasa. Oleh karena itu informasi tersebut sangat penting bagi pemerintah sebagai bahan perencanaan pembangunan dan strategi dalam membuat kebijaksanaan maupun bagi para pengguna lain dalam membuat kajian di sektor perdagangan dan jasa.

1.5. Survei Transportasi

Selama ini BPS mengumpulkan data angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara dan komunikasi dari instansi terkait. Data tersebut meliputi jumlah kendaraan bermotor dan panjang jalan, bongkar muat barang, kunjungan kapal dan penumpang di pelabuhan, lalu-lintas pesawat, penumpang dan barang angkutan udara di bandara, serta data pos dan telekomunikasi. Masing-masing data dikumpulkan menggunakan kuesioner spesifik dengan pengumpulan data yang berbeda. Untuk data angkutan darat dan produksi telepon internasional dengan periode pengumpulan data tahunan sedangkan untuk data lainnya periode pengumpulan data bulanan.

Data angkutan udara dikumpulkan menggunakan kuesioner model III/1 (untuk lalu lintas angkutan udara di bandara) dan model III/2 (untuk produksi perusahaan penerbangan berjadwal). Sementara itu, data pos dan komunikasi seperti produksi pos, produksi telepon dalam negeri dan produksi telepon internasional diperoleh dari perusahaan/instansi teknis terkait. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan sistem statistik perhubungan yang terpadu secara nasional.

Informasi yang dapat diakses dari pengumpulan data perhubungan (angkutan darat, laut, udara dan komunikasi) adalah data angkutan darat, laut, udara dan komunikasi secara periodik dan berkesinambungan, yang berbentuk publikasi statistik perhubungan dan publikasi statistik Indonesia (*hardcopy* dan *softcopy*).

1.6. Survei Usaha Teintegrasi (SUSI)

Trend data bidang ekonomi (diluar sektor pertanian) mengenai usaha berskala mikro dan kecil yang mencerminkan keadaan ekonomi sektoral, regional, dan nasional sangat diperlukan untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Pasca Sensus Ekonomi 1996 (SE96), sejak tahun 1998 BPS telah melaksanakan Survei Usaha Terintegrasi (SUSI). Tahun anggaran 2006 dan 2007 kegiatan lapangan sudah dicakup dalam SE06.

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam Survei Usaha Terintegrasi adalah metode sampling dua tahap. Tahap pertama dari kerangka sampel blok sensus pada level nasional dipilih sejumlah blok sensus secara *Poisson Sampling Systematic* dengan menggunakan probabilitas di setiap blok sensus. Tahap kedua, dari setiap blok sensus terpilih dipilih sejumlah perusahaan/usaha tidak berbadan hukum secara *systematic sampling* pada masing-masing sektor.

Keluaran dari kegiatan ini berupa ; 1) Profil Usaha Tidak Berbadan Hukum, 2) Profil Usaha Perdagangan Tidak Berbadan Hukum, dan 3) Profil Usaha Jasa Tidak Berbadan Hukum.

STATISTIK HARGA

F.2

<http://www.bps.go.id>



2 STATISTIK HARGA

2.1. Penggantian Tahun Dasar dan Inflasi Pedesaan

Tahun Dasar Nilai Tukar Petani (NTP) yang digunakan selama ini adalah tahun 1993. Seiring perjalanan waktu selama 10 tahun, tentulah terjadi pergeseran pola produksi pertanian dan konsumsi masyarakat petani yang sangat signifikan. Mempertimbangkan hal ini, maka sudah seharusnya diagram timbangan NTP disesuaikan, karena pola produksi dan konsumsi tahun 1993 tidak relevan lagi.

Pembentukan tahun dasar baru untuk indikator NTP, diperlukan data pendukung utama yaitu data hasil Sensus Pertanian, data Susenas dan tabel I-O Namun demikian, mengandalkan dukungan ketiga jenis sumber data tersebut di atas ternyata tidak cukup untuk membentuk diagram timbangan baru melainkan masih memerlukan data Marketed Surplus (MS) dari seluruh komoditas yang dihasilkan petani. Data MS dapat diperoleh dengan suatu survei atau studi sehingga diagram timbang yang baru dapat disempurnakan.

Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan besaran dan proporsi penimbang serta paket komoditas untuk penghitungan tahun dasar indeks Nilai Tukar Petani (tahun dasar baru 2007=100) sebagai pengganti tahun dasar lama 1993=100.

Pengumpulan data dilakukan di 4 Provinsi, namun hanya sampel di beberapa kabupaten yang terpilih 4 sub sektor pertanian. Metode yang digunakan adalah dengan teknik sampling skor Z sampling quota dan sampling bersyarat.

Selama ini, NTP baru dihitung pada dua subsektor pertanian, yaitu Tanaman Bahan Makanan (TBM) dan Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR). Oleh karena itu, bersamaan dengan perubahan tahun dasar baru, NTP akan dikembangkan hingga mencakup subsektor peternakan dan perikanan.

2.2. Survei Statistik Harga Konsumen, Tarif Kontrak, Upah Pembantu Rumah Tangga, Volume Penjualan Beras Eceran, Inflasi Inti, dan Survei Biaya Hidup.

Statistik harga konsumen adalah salah satu data statistik ekonomi makro yang sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai bahan dari berbagai analisa lainnya. Salah satu kegunaannya yang sangat populer, data SHK sebagai data dasar penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang selanjutnya dipakai untuk mengukur inflasi/deflasi.

Beras mempunyai bobot terbesar dalam indeks harga konsumen. Sehingga naik turunnya harga beras sangat mempengaruhi IHK. Oleh karena itu data harga beras harus diamati secara lebih teliti. Varietas/kualitas beras di Indonesia sangat banyak, sehingga untuk mendapatkan perkembangan data harganya, diperlukan data harga beras rata-rata tertimbang. Untuk memperoleh penimbang beras per varietas/kualitas diperlukan pendataan Volume Penjualan Eceran Beras secara periodik. Tabel jumlah responden survei harga konsumen dan volume penjualan beras eceran tahun 2004-2009 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1. Jumlah Responden Survei Harga Konsumen dan Volume Penjualan Beras Eceran Tahun 2004 - 2009

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Survei Harga Konsumen							
1.	Jumlah Pasar Tradisional	113	139	113	114	144	149
2.	HK 1.1 – Mingguan	29.380	29.120	30.510	30.780	37.840	31.460
3.	HK 1.2 – Mingguan	14.690	14.560	14.690	14.820	19.640	16.328
4.	HK 2.1 – Bulanan	8.475	8.475	8.475	8.586	10.720	8.906
5.	HK 2.2 – Bulanan	8.475	8.400	6.780	6.888	9.320	7.742
B. Survei Volume Penjualan Beras Eceran							
1.	Jumlah Pasar	113	139	146	146	202	228
2.	Responden	11.300	13.900	13.080	13.080	16.860	16.920

Tarif kontrak rumah dan sewa pembantu adalah salah satu komponen harga konsumen yang memerlukan penelitian lebih mendalam karena

perilaku variabelnya. Selain digunakan untuk melihat upah riil pekerja operasional rumah tangga.

Inflasi dihitung secara khusus karena diperlukan untuk *inflation targeting* oleh Bank Indonesia. Selain itu, inflasi inti adalah bagian dari inflasi yang tahan terhadap gejolak harga sesaat sehingga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan jangka panjang.

Survei biaya hidup dilakukan lima tahun sekali, untuk mengupdate diagram timbang periode sebelumnya dan memperoleh pola konsumsi masyarakat terkini, sehingga penghitungan inflasi menjadi lebih akurat.

Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan data statistik harga konsumen, menyusun IHK, laju inflasi/deflasi baik di tingkat ibukota provinsi, 15 ibukota kabupaten/kota maupun nasional. Secara rinci tujuan dan sasaran survei ini adalah untuk mengetahui harga dan nilai konsumsi komoditas yang menjadi bahan dasar penghitungan indeks harga konsumen, mengetahui peranan masing-masing pasar dalam pembentukan harga beras di suatu kota, penyusunan inflasi inti sebagai *inflation targeting*, sebagai dasar berbagai analisis pasar, menghitung berbagai indikator turunan, dan memperoleh diagram timbang dan paket komoditas terkini melalui survei biaya hidup lima tahunan.

Indeks Harga Konsumen (IHK) diolah dari data statistik harga konsumen, yang dikumpulkan dari 45 kota (30 ibukota provinsi dan 15 kota lainnya) yang mencakup 283-397 komoditas dengan 2-4 kualitas/merk untuk setiap komoditas. Data harga dikumpulkan dari pasar tradisional, pasar swalayan, dan toko-toko di luar pasar, toko/gerai di departemen store, rumah tangga, instansi, perusahaan, dan sebagainya. Waktu observasi harga terdiri dari harian, mingguan, dan bulanan.

Keluaran dari kegiatan ini adalah: 1) IHK Gabungan 30 Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota terpilih menurut kelompok pengeluaran, 2) Laju inflasi Gabungan 45 ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota di Indonesia menurut tahun kalender dan tahun anggaran, 3) Laju inflasi 45 ibukota provinsi dan ibukota kabupaten di Indonesia menurut tahun kalender dan tahun anggaran, 4) Berbagai perkembangan harga di beberapa kota, 5) Volume penjualan eceran beras selama seminggu menurut pasar dan jenis beras, 6) Persentase volume penjualan eceran beras selama seminggu menurut jenis dan pasar, 7) Daftar jenis beras diurutkan menurut volume

dan penjualan terbanyak untuk penghitungan harga eceran beras umum di 45 kota, 8) Harga beras tertimbang di 30 ibukota provinsi dan 15 ibukota kabupaten/kota, 9) Dekomposisi inflasi menurut perubahan harga (inti, dapat dikendalikan pemerintah, dan komponen bergejolak), dan 10) Paket komoditas penimbang kota, tabel sosial ekonomi rumah tangga.

2.3. Diagram Timbang 2007

Melalui SBH 2007 telah diperoleh data pengeluaran rumah tangga dari 66 kota di seluruh Indonesia dan pola konsumsi masyarakatnya. Selanjutnya data tersebut akan digunakan sebagai bobot/penimbang (*weight*) setiap barang dan jasa terhadap total pengeluaran rumah tangga. Diagram timbang tersebut kemudian dipakai untuk menghitung IHK masing-masing komoditas, kota dan IHK gabungan 66 kota untuk menentukan tingkat inflasi nasional.

Bobot/penimbang yang biasa dikenal dengan diagram timbang, biasa digunakan untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) masing-masing komoditas dan IHK gabungan 66 kota untuk menentukan tingkat inflasi.

Adapun proses penghitungan inflasi diawali dengan memantau secara berkala pada pasar tradisional dan modern/swalayan serta outlet-outlet pada *departement store* melalui pencacahan harga konsumen. Dari data tersebut dilakukan penghitungan IHK masing-masing komoditas untuk menentukan tingkat inflasi baik regional maupun nasional. Jumlah responden survei harga konsumen (pasar tradisional) tahun 2008 disajikan pada lampiran 39.

2.4. Statistik Harga Perdagangan Besar

Data harga yang dicakup dalam Survei Harga Perdagangan Besar (HPB) adalah harga-harga di tingkat Produsen dan Perdagangan Besar yang dibagi dalam 5 kelompok, yaitu sektor pertanian, pertambangan & penggalian, industri, impor dan ekspor. Data tersebut dikumpulkan melalui Survei Harga Perdagangan Besar di kabupaten/kota terpilih dari 33 provinsi di Indonesia dan pencacahan dilakukan secara rutin (bulanan), dengan jumlah sampel per bulan adalah 63.480 responden.

Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan data harga perdagangan besar yang lengkap, akurat dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan indeks

harga dan indikator harga lainnya, guna memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Survei HPB ini telah menghasilkan data bulanan dalam indikator ekonomi dan publikasi seri tahunan untuk indeks harga perdagangan besar. Jumlah responden survei harga perdagangan besar tahun 2004-2009 disajikan pada tabel 6.2.

**Tabel 6.2. Jumlah Responden Harga Perdagangan Besar
Tahun 2004 - 2009**

No.	Jenis Sur	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Harga Perdagangan Besar							
1.	HPBS (bulanan)	56.700	54.300	55.800	60.780	63.480	63.480
2.	HPBK (triwulanan)	16.400	17.360	18.600	18.880	19.560	75.740

2.5. Survei Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan

Data harga yang dicakup adalah harga-harga di pedesaan, yang dikumpulkan melalui survei monitoring harga produsen gabah, survei harga produsen sektor pertanian dan survei harga konsumen pedesaan. Pencacahan data harga dilakukan secara rutin (bulanan) di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali di DKI Jakarta. Responden adalah petani sebagai produsen hasil pertanian dan pedagang eceran yang menjual barang/jasa konsumsi rumah tangga di pasar pedesaan baik kelompok makanan maupun non makanan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan data harga produsen sektor pertanian dan konsumen pedesaan yang lengkap, akurat dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan indeks harga dan indikator harga lainnya. Survei harga-harga ini telah menghasilkan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam Berita Resmi Statistik, Indikator Ekonomi, Ringkasan Eksekutif Statistik Ekonomi Makro Indonesia, bahan laporan rapat kabinet bulanan dan upah riil pekerja pertanian sebagai indikator kemiskinan serta publikasi seri tahunan baik untuk indeks harga maupun data harganya.

Pada tahun 2007 juga dilakukan kegiatan Survei Penggantian Tahun Dasar, yang bertujuan untuk menyusun Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2007, yang terdiri dari diagram timbang untuk perhitungan indeks harga yang diterima petani (It) dan diagram timbang untuk perhitungan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Diagram timbang It dan Ib Tahun 2007 mempunyai cakupan komoditi yang lebih lengkap dan sub sektor yang diperluas dari hanya dua sub sektor menjadi lima sub sektor, yaitu sub sektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan, sehingga digunakan sebagai dasar perhitungan NTP per sub sektor. Jumlah responden survei harga produsen dan konsumen pedesaan disajikan pada tabel 6.2.

**Tabel 6.3. Jumlah Responden Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan
Tahun 2004 - 2009**

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Harga Produsen & Konsumen Pedesaan							
1.	Harga Produsen Gabah	19.494	19.494	19.590	21.033	21.075	18.795
2.	Harga Produsen Sektor Pertanian (bulanan)	18.084	18.084	18.420	18.948	18.948	40.476
3.	Harga Produsen Makanan, non Makanan	12.888	12.888	12.840	12.936	13.296	16.092

2.6. Survei Statistik Harga Konsumen dan Volume Penjualan Beras Eceran

Data statistik harga konsumen (SHK) digunakan sebagai data dasar penghitungan indeks harga konsumen (IHK), yang selanjutnya dipakai untuk mengukur inflasi maupun deflasi. Komoditas beras menyerap sebagian besar pendapatan rumah tangga, sehingga naik turunnya harga beras sangat mempengaruhi IHK. Varietas/kualitas beras di Indonesia sangat banyak, sehingga untuk mendapatkan perkembangan data harganya, diperlukan data harga beras rata-rata tertimbang. Untuk memperoleh penimbang beras per varietas/kualitas dilakukan pendataan Volume Penjualan Eceran Beras secara periodik.

2.7 Pelatihan Survei Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan

Survei statistik harga produsen dan konsumen pedesaan merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPS yang mengcover harga-harga pedesaan melalui survei monitoring harga produsen gabah, survei monitoring harga produsen sektor pertanian dan survei harga produsen pedesaan. Kegiatan tersebut menghasilkan berbagai pendekatan seperti harga gabah dan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dan upah riil buruh yang dimuat baik dalam Berita Resmi Statistik maupun Indikator Perekonomian Indonesia.

Mengingat pentingnya data-data tersebut, maka sebelum pelaksanaan lapangan, para petugas selalu dilatih untuk menyamakan persepsi, konsep dan definisi serta metodologi yang digunakan. Di samping itu pelatihan ini dilakukan karena terjadi berbagai macam perubahan seperti pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten dan kecamatan, berdampak pada perubahan sampel SHPKP) perubahan perhitungan NTP dengan tahun dasar baru dan penggantian/mutasi petugas. Kegiatan pelatihan meliputi seluruh daerah sampel SHPKP di seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta.

2.8. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lain. Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal atau temporal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga Konsumen (IHK), kedua indeks harga tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu wilayah pada periode waktu tertentu terhadap harga periode tahun dasar.

Sejak tahun 2005, IKK disajikan dengan memperhitungkan pula perkembangan harga periode tertentu terhadap harga periode dasar (Februari 2004, harga yang digunakan dalam penghitungan IKK 2004).

IKK tahun 2008 dihitung dalam dua versi, yaitu IKK 450 kabupaten/kota dengan cakupan kabupaten/kota yang sama dengan tahun 2007 dan IKK 451 kabupaten/kota dengan menambah 1 (satu) kabupaten pemekaran di Papua yaitu Memberamo, adapun untuk IKK provinsi dihitung di 33 Provinsi.

Pengumpulan data harga dilakukan secara triwulanan menggunakan daftar HPB-K. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari 60 jenis barang yang mencakup sekitar 145 kualitas barang serta harga sewa 4 macam alat berat. Untuk keperluan penghitungan IKK 2008, selain survei HPB-K, dilakukan pula survei serentak khusus untuk barang-barang konstruksi yang menjadi paket komoditas IKK. Survei serentak tersebut dilakukan pada bulan Mei 2008 di 451 kabupaten/kota.

Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2008 terdiri dari 17 jenis barang dan 4 sewa alat berat, yaitu: pasir pasang, batu kali, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang, sewa alat berat *excavator*, *bulldozer*, *three wheel roller* (mesin gilas), dan *dump truck*.

**STATISTIK
KEUANGAN, TI
DAN PARIWISATA**

F.3



<http://www.bps.go.id>

3 STATISTIK KEUANGAN, TI DAN PARIWISATA

3.1. Pilot Studi Usaha Koperasi

Usaha koperasi merupakan salah satu sendi perekonomian Indonesia, sehingga perlu adanya informasi dan data yang akurat mengenai usaha koperasi ini. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan agar dapat menyediakan data mengenai kinerja dan manajemen pada semua jenis koperasi di Indonesia.

Pilot Studi dilaksanakan di 4 provinsi dan 8 daerah kabupaten/kota dengan jenis koperasi yang dicakup meliputi : Koperasi simpan pinjam, konsumen, produsen, pemasaran dan jasa. Pencacahan dilakukan secara sampel yaitu sebanyak 10 usaha koperasi untuk masing-masing kabupaten/kota.

3.2. Survei Statistik Lembaga Keuangan dan Monitoring Kurs Valuta Asing

Survei ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan seluruh perusahaan di sektor lembaga keuangan kecuali untuk perusahaan pegadaian sebagai unit pencacahannya adalah kantor cabang.

Tabel 6.4. Jumlah Responden Survei Statistik Lembaga Keuangan Tahun 2004 - 2009

No. Jenis Survei		2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lembaga Keuangan	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
2.	Monitoring Kurs Valuta Asing	3.380	3.380	3.536	3.588	3.588	3.588

Tujuan dan sasaran pada kegiatan ini mendapatkan struktur dan kegiatan usaha lembaga keuangan berdasarkan jenis perusahaan, mendapatkan data mengenai transaksi finansial yang dilakukan oleh sub sektor lembaga keuangan, memperoleh data tentang produktivitas dan biaya-biaya yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan lembaga keuangan dan memperoleh data secara bulanan mengenai kurs beli maupun kurs jual beberapa valuta asing di 33 provinsi di Indonesia. Hasil yang didapat adalah data keuangan perusahaan

lembaga keuangan yang berupa neraca dan laporan rugi/laba setiap kegiatan dan data karakteristik setiap usaha di sektor lembaga keuangan. Jumlah responden survei statistik lembaga keuangan dan monitoring valas tahun 2008 disajikan pada tabel 6.4.

3.3. Survei Statistik Keuangan Daerah, Keuangan BUMN dan BUMD

Kegiatan Survei Statistik Keuangan adalah mengumpulkan data mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, menyediakan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirinci menurut sektor pembangunan yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyusun direktori perusahaan BUMN dan BUMD, menyediakan data statistik keuangan BUMN dan BUMD, menyajikan gambaran tingkat efektifitas dan efisiensi perusahaan negara dan perusahaan daerah dalam mengelola sumber yang ada dan menyajikan agregasi indikator perusahaan. Jumlah responden survei statistik keuangan daerah BUMN/BUMD tahun 2004-2009 dapat dilihat pada tabel 6.5.

Tabel 6.5. Jumlah Responden Survei Statistik Keuangan Daerah, BUMN/BUMD Tahun 2004 - 2009

No. Jenis Survei		2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Keuangan Desa	7.061	7.073	7.217	7.334	7.422	7.652
2.	Keuangan Prov/Kab/Kota	446	470	472	473	489	498
3.	APBD Prov/Kab/Kota	892	940	944	946	489	498
4.	Keuangan BUMN/BUMD	610	610	650	647	669	668

Hasil pada kegiatan ini adalah tersedianya data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta realisasi penerimaan dan pengeluaran untuk tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan per tahun anggaran, serta data keuangan

perusahaan BUMN dan BUMD yang terdiri dari aktiva, pasiva, penjualan, biaya dan laba bersih per sektor/jenis usaha selama satu tahun kalender dan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di mana data Realisasi Belanja Daerah dirinci menurut sektor dan sub sektor pembangunan, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jumlah responden survei statistik keuangan daerah, BUMN dan BUMD tahun 2008 disajikan pada tabel.

3.4. Pilot Studi Statistik Keuangan Daerah Tingkat Desa

Pengumpulan data pilot studi statistik keuangan pemerintah desa (desa/kelurahan) diambil dari desa terpilih baik urban maupun rural minimal 10 persen dari seluruh desa yang ada di setiap kabupaten/kota sehingga didapat sebanyak 7.250 desa/kelurahan dengan mengumpulkan APB Desa. Pilot studi pada tahun 2008 dibatasi hanya pada 7 Provinsi dan 14 kabupaten/kota di Indonesia.

Keluaran dari studi keuangan daerah tingkat desa adalah perbaikan kuesioner dan sistem pencatatan statistik keuangan desa. Sehingga nantinya akan diperoleh statistik keuangan daerah tingkat desa yang dapat dibandingkan antar wilayah di Indonesia.

3.5. Survei Tingkat Penghunian Kamar Hotel

Melalui Survei Tingkat Penghunian Kamar Hotel akan diperoleh indikator-indikator yang menunjukkan perkembangan usaha jasa perhotelan dan bermanfaat untuk berbagai analisis yang berkaitan dengan perencanaan/pembinaan/pengembangan sarana akomodasi yang akan berdampak kepada meningkatnya kunjungan tamu.

Pengumpulan data dilakukan dengan sistem wawancara langsung ke hotel yang terpilih. Untuk hotel bintang dicacah secara sensus, sedangkan hotel non bintang dicacah secara sampel. Sampel dipilih secara random (acak), proporsional dengan banyaknya hotel yang ada di setiap kabupaten/kota.

Keluaran dari kegiatan ini adalah publikasi tingkat penghunian kamar hotel dan BRS Bulanan tingkat penghunian kamar hotel (10 provinsi). Jumlah responden survei bidang jasa dan pariwisata tahun 2004-2009 disajikan pada tabel 6.6.

**Tabel 6.6. Jumlah Responden Survei Statistik Jasa Pariwisata
Tahun 2004 - 2009**

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	VHTS Bulanan	43.836	45.996	51.420	56.016	51.276	55.284
2.	VHTL Tahunan	14.150	13.460	13.914	13.945	13.109	14.645
3.	Kunjungan Tamu Asing	984	984	984	972	1.008	1.236

3.6. Survei Statistik Kunjungan Tamu Asing

Kegiatan survei *inbound-outbound tourism* (VIOT) adalah adalah mengumpulkan data berbagai analisis kepariwisataan seperti analisis pasar bagi promosi pariwisata, penghitungan perolehan devisa dari wisatawan mancanegara dan lain-lain.

Tujuan pengumpulan data statistik kunjungan tamu asing adalah untuk mengumpulkan data banyaknya penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri, banyaknya penduduk pelintas batas, banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, banyaknya warga negara asing yang tinggal di Indonesia.

Sasaran utama data ini adalah untuk memperoleh data jumlah wisman yang datang ke Indonesia yang pergi ke luar negeri di 86 pintu masuk yang telah ditetapkan oleh Ditjen Imigrasi. Penyajian data dilakukan secara tahunan dan dirinci menurut berbagai karakteristik, seperti kebangsaan dan jenis visa. Keluaran dari kegiatan ini adalah publikasi kunjungan tamu asing dan BRS bulanan kunjungan tamu asing (wisatawan mancanegara).

3.7. Survei Statistik Restoran dan Biro Perjalanan Wisata

Kegiatan survei restoran/rumah makan bermanfaat untuk berbagai kepentingan analisis yang berkaitan dengan perencanaan/pembinaan/pengembangan usaha restoran yang pada gilirannya akan berpengaruh kepada meningkatnya kunjungan tamu.

Kegiatan survei usaha biro perjalanan wisata, akan diperoleh data untuk berbagai analisa kepariwisataan seperti analisis pasar bagi promosi pariwisata dan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di berbagai tempat di Indonesia.

Tujuan survei restoran/rumah makan adalah untuk mengumpulkan data pertumbuhan jumlah usaha restoran/rumah makan, jumlah tenaga kerja usaha restoran/rumah makan, banyaknya tamu yang datang.

Tujuan survei statistik biro perjalanan wisata adalah untuk mengumpulkan data banyaknya paket wisata yang terjual, banyaknya tiket yang terjual, banyaknya armada yang dikuasai perusahaan, pertumbuhan jumlah usaha biro perjalanan wisata. Keluaran dari kegiatan ini adalah publikasi statistik restoran/rumah makan (tahunan) dan publikasi statistik usaha biro perjalanan wisata (tahunan).

3.8. Statistik Angkutan Darat, Laut, Udara dan Komunikasi

Survei statistik angkutan darat dan angkutan laut mengumpulkan data tentang statistik angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara, baik pemerintah maupun swasta, serta sebagai data pendukung bagi perencanaan kebijakan transportasi darat, laut, udara dan komunikasi khususnya dan perumusan kebijakan sistem transportasi nasional (Sistranas) pada umumnya. Tabel jumlah responden survei transportasi tahun 2004-2009 dapat dilihat pada tabel 6.7.

Tabel 6.7. Jumlah Responden Survei Transportasi Tahun 2004 – 2009

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Angkutan Laut	7.980	8.017	4.031	8.904	26.604	25.884
2.	Angkutan Udara	4.000	4.031	3.472	2.628	6.732	6.672
3.	Angkutan Darat	2.274	2.284	8.586	3.520	5.412	5.580

Metodologi dari kegiatan ini adalah kompilasi data sekunder dari berbagai instansi dan asosiasi yang terkait, baik di pusat maupun di daerah.

Hasil dari kegiatan ini berupa data statistik angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara. Informasi data statistik angkutan darat yang disajikan meliputi statistik angkutan kereta api, panjang jalan, kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) pada tingkat provinsi dan nasional, data statistik angkutan laut yang disajikan meliputi statistik bongkar muat barang, kunjungan kapal dan penumpang di pelabuhan dan data statistik angkutan udara yang disajikan meliputi produksi perusahaan penerbangan dan lalu lintas angkutan udara (pesawat penumpang dan barang) di pelabuhan udara serta statistik pos dan telekomunikasi.

<http://www.bps.go.id>

**NERACA DAN
ANALISIS
STATISTIK**



<http://www.bps.go.id>

NERACA PRODUKSI

G.1

<http://www.bps.go.id>



BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK

1 NERACA PRODUKSI

1.1. Destinasi Impor

Seiring dengan kemajuan sektor industri kebutuhan barang/produk impor dirasakan cukup tinggi pula, mengingat sebagian bahan baku sektor industri di Indonesia berasal dari impor. Untuk mengetahui produk apa saja yang diimpor, berapa volumenya yang digunakan pada suatu industri, serta dari mana saja produk-produk tersebut berasal, maka perlu dibangun dan disusun suatu master yang dapat mengkonversikan kode HS (*Harmonized System*) baik ke dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) maupun ke dalam kode I-O (input - output) dan atau PDB (Produk Domestik Bruto) yang selanjutnya dapat digunakan untuk membentuk suatu matriks destinasi impor.

Guna mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penyusunan master destinasi tersebut, maka perlu dilakukan *rechecking* (pengecekan kembali) pemakaian barang impor pada industri-industri tersebut.

Kegiatan akan dilakukan terbatas pada provinsi-provinsi yang banyak terdapat industri besar, sedang di wilayah Indonesia. Adapun provinsi-provinsi yang menjadi daerah penelitian adalah provinsi Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

1.2. PDB Triwulanan, Aplikasi SNA'93 dan Analisis Tabel I-O

Penyusunan Neraca Nasional meliputi beberapa bidang dan aspek yang dirinci ke dalam sub-sub neraca, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Tabel Input-Output (I-O) dan neraca lainnya. Angka PDB biasanya disajikan secara berkala setiap tahun, sedangkan Tabel I-O disajikan setiap 5 tahun sekali. Namun demikian, karena perkembangan di berbagai bidang yang relatif cukup cepat, sehingga menuntut tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu. Untuk itu, informasi di bidang ekonomi, seperti PDB triwulanan dan tahunan merupakan perangkat yang memainkan peranan cukup penting untuk melihat berbagai perubahan yang terjadi di berbagai sektor ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan PDB baik tahunan maupun triwulanan adalah sulitnya mendapatkan data yang akurat dan tersedia secara tahunan dan triwulanan, karena data yang dibutuhkan meliputi seluruh sektor, mulai dari sektor Pertanian, Pertambangan, Industri sampai dengan Jasa-jasa. Data tersebut seyogyanya lengkap, akurat, konsisten dan tepat waktu. Untuk itu, perlu dilakukan survei yang berkaitan dengan penyusunan indikator khusus secara triwulanan yang diharapkan dapat menunjang penyusunan PDB triwulanan dan tahunan. Sedangkan untuk melihat keterkaitan antar sektor ekonomi dibutuhkan data yang diturunkan dari Tabel I-O. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan Tabel I-O, maka pada tahap awal perlu diupayakan penyusunan klasifikasi sektor ekonomi. Tahap ini dianggap penting karena penentuan klasifikasi merupakan basis dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi perhatian utama dalam tabel I-O. Seiring data yang dikumpulkan, perbaikan metode, konsep dan definisi juga perlu dilakukan untuk dapat memanfaatkan data tersebut sebaik mungkin.

1.3. Penyusunan Neraca Regional

Kegiatan penyusunan neraca regional adalah menyajikan data PDRB secara konsisten antara PDRB kabupaten/kota dengan PDRB provinsi serta dengan PDB. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengkompilasi data-data tersebut kemudian dilakukan rekonsiliasi, selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis data PDRB menurut lapangan usaha yang data dasarnya dari hasil kompilasi data PDRB provinsi dan kabupaten/kota secara berkala. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan statistik pendapatan regional dari survei khusus sektoral di setiap provinsi.

Penyusunan neraca regional bertujuan untuk menyempurnakan dan menyeragamkan konsep dan metodologi dari data yang digunakan untuk penyusunan PDRB menurut lapangan usaha dan penggunaan, meningkatkan mutu data PDRB provinsi menurut lapangan usaha dengan hasil studi perbandingan antar sektor dalam kabupaten dan atau dalam provinsi, antar kabupaten/kota di tiap provinsi dan antar provinsi se-Indonesia dengan nasional, meningkatkan konsistensi data nilai tambah sektor lapangan usaha antara PDRB dengan PDB, memperkecil tingkat perbedaan komponen penggunaan antara PDRB dan PDB, menyusun dan menyajikan PDRB provinsi-provinsi di Indonesia menurut lapangan usaha, menyusun dan menyajikan PDRB provinsi-provinsi di Indonesia menurut

penggunaan, menyajikan PDRB menurut kabupaten/kota di Indonesia, serta membandingkan dan menganalisa Tabel I-O daerah dengan Tabel I-O nasional.

Penyajian PDRB kabupaten/kota tersebut merupakan salah satu variabel dalam rangka kebijakan dana perimbangan. Jumlah responden survei-survei di neraca produksi disajikan pada tabel 7.1. berikut.

Tabel 7.1. Jumlah Responden Survei Bidang Neraca Produksi Tahun 2004 - 2009

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
-(1)	-(2)	-(3)	-(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Neraca Regional	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
2.	Survei Khusus Perdagangan dan Jasa	50*)	1.000	1.370	2.000	2.000	2.200
3.	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha	-	-	-	-	2.150	1.000
4.	SKIO/SPPB dan Penyusutan Barang	1.500	1.300	1.500	140*)	1.040	1.140
5.	Survei Penyusunan Indikator Khusus (PDB)	500	500	600	1.000	1.000	2.000
6.	Penyusunan PDB Sektoral Tahun Dasar Berjalan	-	-	180	400	250	1.000

*) *Indepth Study*

1.4. SPPB, Sisnerling dan Penyusutan Sektor Barang

Survei Penyediaan Penggunaan Barang (SPPB) diselenggarakan untuk memperoleh informasi berupa output, susunan input, jumlah tenaga kerja, distribusi produk dan beberapa variabel penting lainnya seperti pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan lain-lain.

Inventarisasi data dasar yang akurat dan tepat waktu guna mencapai pembangunan berkelanjutan melalui sistem neraca lingkungan dan ekonomi terpadu (Sisnerling) adalah untuk memperoleh potret pertumbuhan ekonomi lebih akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,

Tujuan dan sasaran dari kegiatan ini adalah ;

(1) SPPB

Tujuan secara umum dalam survei ini adalah untuk memperoleh data yang rinci yang diperlukan dalam penyusunan SUT (*supply and use table*) atau biasa disebut matrik penyediaan dan penggunaan. Sedangkan secara spesifik tujuannya adalah: memperoleh struktur input/biaya, mengetahui alokasi atau distribusi barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi, mendapatkan informasi mengenai struktur tenaga kerja, memperoleh indikator produksi atau harga dan memperoleh informasi penunjang lainnya.

(2) Sisnerling

Tujuan umum kegiatan ini adalah mendapatkan gambaran mengenai tingkat deplesi sumber daya alam yang tersedia, mendapatkan gambaran mengenai tingkat degradasi lingkungan, mengukur pengaruh deplesi sumber daya alam terhadap penciptaan PDB dan pertumbuhan ekonomi, mendapatkan bahan analisis tentang lingkungan dan mendapatkan gambaran potensi sumber daya alam untuk seluruh komoditi di Indonesia.

1.5. Penyusunan Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ)

Pengumpulan data dalam SKSPJ dititikberatkan pada survei kegiatan perdagangan, pengangkutan dan jasa-jasa swasta (seperti hotel, pengangkutan darat dan jasa swasta lainnya). Metode survei yang diterapkan dalam SKSPJ adalah dengan mendatangi unit usaha/perusahaan sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan bukan hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan melihat kantong-kantong usaha pada provinsi terpilih.

Kegiatan baru yang telah dilaksanakan adalah studi penyusunan matriks *supply and use table* (SUT) dalam rangka penyempurnaan PDB sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta; evaluasi dan pembahasan penyusunan PDB dengan departemen/ instansi terkait (interdepartemen seperti Bank Indonesia, Departemen Perhubungan dan sebagainya) dalam rangka memperkuat data penunjang (sekunder) yang di keluarkan oleh instansi/departemen yang bersangkutan.

1.6. Survei Penyusunan Indikator Khusus (PDB Triwulanan)/SPIK

Penyusunan neraca nasional meliputi beberapa bidang, salah satunya adalah produk domestik bruto (PDB) menurut sektoral atau lapangan usaha. Angka PDB biasanya disajikan secara berkala setiap tahun. Namun demikian, karena perkembangan di berbagai bidang yang relatif cukup cepat, sehingga menuntut tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu maka dihitung juga PDB secara triwulan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan PDB baik tahunan maupun triwulanan adalah sulitnya mendapatkan data yang akurat dan tersedia secara tahunan dan triwulanan, karena data yang dibutuhkan meliputi seluruh sektor, mulai dari sektor pertanian, pertambangan, industri sampai dengan jasa-jasa.

1.7. Penyusunan PDB Sektoral Tahun Dasar Berjalan

Penyusunan neraca nasional meliputi beberapa bidang dan aspek yang dirinci ke dalam sub-sub neraca, seperti produk domestik bruto (PDB), tabel *input-output* (I-O) dan neraca lainnya. Angka PDB biasanya disajikan secara berkala setiap tahun, sedangkan Tabel I-O disajikan setiap 5 tahun sekali. Namun demikian, karena perkembangan di berbagai bidang yang relatif cukup cepat, sehingga menuntut tersedianya informasi yang lebih cepat dan akurat.

Hasil dan keluaran dari kegiatan ini adalah pemutakhiran data PDB dengan menerapkan tahun dasar berjalan sebagai tahun dasar baru, termasuk data pelengkap, indikator produksi, indikator harga, struktur input dan indikator non ekonomi. Pemahaman konsep definisi dan metode penghitungan PDB tahun dasar berjalan dan inventarisasi data baik dari hasil survei yang dilakukan BPS maupun dari instansi di luar BPS dapat dijadikan bahan penghitungan PDB dengan tahun dasar berjalan.

1.8. Penyusunan Tabel *Input-Output* Indonesia

Tabel *input-output* (I-O) digunakan untuk melihat keterkaitan antar sektor ekonomi. Tabel I-O biasanya dihitung dan disajikan setiap 5 tahun sekali. Kegiatan pada tahun 2008 ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, yaitu lebih menekankan pada sisi analisisnya.

Tujuan penyusunan tabel I-O adalah menganalisis hasil Tabel I-O, menyusun sektor tenaga kerja menurut 66 sektor klasifikasi Tabel I-O, mempublikasi hasil analisis Tabel I-O dan mempublikasi tabel-tabel dasar menurut 175 sektor ekonomi.

Metodologi kegiatan ini melalui penyusunan kegiatan tabel I-O yang meliputi penyusunan sektor tenaga kerja, di mana datanya diperoleh dari *subject matter* dan instansi terkait. Di samping itu dilakukan analisis data I-O yang mencakup analisis deskriptif dan analisis dampak.

<http://www.bps.go.id>

**NERACA
PENGELUARAN**

G.2



<http://www.bps.go.id>

2 NERACA PENGELUARAN

2.1. Sistem Neraca Lingkungan (Sisnerling) & Survei Penyediaan dan Penggunaan Barang (SPPB)

Sisnerling tahun ini merupakan kelanjutan dari Sisnerling tahun sebelumnya yaitu dengan cakupan dan sebaran sampel yang berbeda guna memperoleh data PDB Hijau yang diturunkan dari data provinsi. Pengumpulan data yang dituangkan dalam Sisnerling juga merupakan pengumpulan data yang lebih terkini mengingat adanya update data guna membuat publikasi Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia.

Tujuannya adalah: 1) Mendapatkan gambaran mengenai tingkat deplesi sumber daya alam yang tersedia; 2) Mendapatkan gambaran mengenai tingkat degradasi lingkungan; 3) Mengukur pengaruh deplesi sumber daya alam terhadap penciptaan PDB dan pertumbuhan ekonomi; 4) Mendapatkan bahan analisis tentang lingkungan; 5) Mendapatkan gambaran potensi sumber daya alam untuk seluruh komoditi di Indonesia.

2.2. Penyusunan Neraca Pemerintah & Badan Usaha

Penyusunan neraca pemerintah dan badan usaha bertujuan untuk melihat peranan pelaku-pelaku ekonomi di sektor pemerintah dan badan usaha, yang mencakup kegiatan produksi, konsumsi dan investasi dalam perekonomian nasional. Pelaku-pelaku ekonomi tersebut adalah pemerintah, perusahaan pemerintah seperti badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta badan usaha swasta (BUS). Oleh karena itu dalam rangka menyusun neraca pemerintah dan badan usaha ini diperlukan neraca pemerintah, neraca BUMN dan BUMD serta neraca BUS.

Hasil penyusunan dan penghitungan masing-masing neraca tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan produk domestik bruto (PDB)/produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dan penggunaan, tabel *input-output* (I-O), sistem neraca sosial ekonomi (SNSE) serta penyusunan neraca arus dana (NAD), serta untuk menyusun neraca institusi/sektor pemerintah dan badan usaha/korporasi non finansial dalam sistem neraca nasional Indonesia (SNNI) menurut konsep SNA.

2.3. Penyusunan Neraca Arus Dana

Tujuan penyusunan neraca arus dana (NAD) adalah untuk memperoleh informasi mengenai transaksi finansial antar institusi yang erat kaitannya dengan keputusan dan perilaku institusi, khususnya dalam mengalokasikan dananya untuk investasi finansial dan non finansial. Dana tersebut berasal dari tabungan maupun berupa kewajiban dalam bentuk berbagai jenis instrumen finansial.

Dalam penyusunan neraca arus dana diperlukan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai institusi. Data tersebut mencakup transaksi finansial dan non finansial yang dilakukan oleh seluruh sektor. Data primer diperoleh melalui Survei Khusus Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan (SKDPP), sedangkan data sekunder diperoleh melalui kunjungan ke instansi-instansi terkait. Jumlah sampel yang digunakan pada pengumpulan data melalui kegiatan survei sebanyak 300 responden dan hanya dilakukan di DKI Jakarta. Responden survei-survei di neraca pengeluaran tahun 2004-2009 disajikan pada tabel 7.2 berikut.

**Tabel 7.2. Jumlah Responden Survei Bidang
Neraca Pengeluaran Tahun 2004 - 2009**

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Neraca Rumah Tangga dan Lembaga Non Profit							
1.	Survei Khusus Lembaga Non Profit	2.660	2.910	2.910	5.160	3.660	4.150
2.	Survei Khusus Tabungan dan Investasi	3.880	4.280	4.280	7.880	5.480	6.600
3.	Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga	1.440	1.600	1.600	3.040	2.000	2.560
B. Neraca Pemerintah dan Badan Usaha Swasta							
1.	Survei Khusus Perusahaan Swasta	1.050	1.295	1.340	1.730	1.650	1.500
2.	Survei Khusus Jasa Pemerintah	280	360	280	520	600	600

2.4. Penyusunan PDB Triwulanan menurut Sektor dan Penggunaan

Statistik PDB triwulanan, selain digunakan untuk melihat perkembangan yang terjadi di berbagai sektor dalam jangka pendek, dapat pula dimanfaatkan sebagai peringatan dini bagi pemerintah mengenai kondisi perekonomian secara triwulanan. Kondisi perekonomian pasca krisis yang sangat tidak menentu, juga mengisyaratkan agar BPS mampu menyajikan data statistik yang lebih akurat dalam waktu yang relatif lebih cepat.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan PDB triwulanan diperlukan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai institusi, mencakup investasi data yang dibutuhkan untuk kebutuhan estimasi, serta melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi indikator-indikator khusus yang akan digunakan. Jumlah sampel yang digunakan pada pengumpulan data PDB triwulanan di daerah sebanyak 1.000 responden dan hanya dilakukan di 10 provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Khusus untuk DKI Jakarta pengumpulan data dilakukan di pusat.

Dari seluruh kegiatan seperti yang diuraikan di atas akan menghasilkan model ekonometrika PDB triwulanan. Data PDB triwulanan dan perkiraan PDB triwulanan, disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

2.5. Penyusunan Konsolidasi Neraca Institusi (KNI) dan Penyusunan Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI)

Sistem neraca nasional Indonesia (SNNI) digunakan sebagai perangkat induk (*central framework*) dan sebagai rujukan bagi penyusunan berbagai produk neraca seperti data produk domestik bruto (PDB), sistem neraca sosial ekonomi (SNSE), matriks kapital/akumulasi, neraca arus dana maupun indikator-indikator ekonomi lainnya. Secara prinsip SNNI ini disusun dari berbagai neraca institusi yang penggolongan besarnya terdiri dari institusi pemerintah, swasta, rumah tangga dan luar negeri.

Sedangkan berbagai data yang akan digunakan dalam penyusunan SNNI maupun perangkat neraca lain yang relevan melalui proses kompilasi berbagai transaksi ekonomi menjadi satu bentuk neraca yang komprehensif sehingga dapat dipelajari keterkaitan antar institusi ekonomi dan

(konsolidasi) data PDB maupun PDRB, khususnya dari sisi penggunaan atau permintaan akhir.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya perangkat SNNI yang terdiri dari neraca produksi, neraca penerimaan dan pengeluaran, neraca modal, konsolidasi PDB penggunaan Indonesia menurut komponen tahunan dan triwulanan, serta PDRB Indonesia menurut provinsi triwulanan dan tahunan, matriks SNSE (matriks induk dan data agregat), matriks stok kapital Indonesia, berbagai jenis kegiatan penelitian observasi dengan topik-topik pilihan (Survei Khusus Konsolidasi Neraca Institusi/SKKNI), baik yang berupa penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, penggandaan laporan akhir PDB, PDRB, SNSE dan stok kapital Indonesia serta diseminasinya, menjalin kerjasama teknis dengan lembaga/instansi terkait dalam upaya memperbaiki dan melengkapi sistem data yang ada dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik di lingkungan BPS maupun BPS daerah, termasuk juga pihak-pihak lain terkait yang mempunyai kontribusi dalam penyusunan PDB/PDRB, SNSE dan neraca institusi.

2.6. Penyusunan Neraca Rumah tangga dan Lembaga Non Profit

Data mengenai sektor institusi rumah tangga dan lembaga non profit yang melayani rumah tanggaa (LNPRRT) sangat diperlukan untuk menyusun neraca rumah tangga dan lembaga non profit dalam rangka penyusunan angka produk domestik bruto (PDB), neraca terintegrasi nasional, *System of National Account* Indonesia (SNAI), konsolidasi neraca arus dana, sistem neraca sosial ekonomi (SNSE) dan komponen penggunaan PDB.

Tujuan penyusunan neraca rumah tangga dan lembaga non profit untuk memperbaiki dan menyempurnakan parameter dan komponen neraca rumah tangga dan lembaga non profit, mengkoordinir data yang diperoleh dari sumber data sekunder bagi penyusunan neraca rumah tangga dan lembaga non profit, evaluasi pemanfaatan hasil survei neraca rumah tangga dan lembaga non profit serta perbaikan dan penyempurnaan metode penelitian serta menyusun dan menyajikan neraca rumah tangga dan lembaga non profit secara reguler.

2.7. Penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia

SNSE merupakan suatu kerangka data yang disusun dalam bentuk matrik yang merangkum berbagai variabel ekonomi dan sosial secara

kompak dan terintegrasi sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai perekonomian suatu negara dan keterkaitan antar variabel-variabel ekonomi dan sosial pada suatu waktu tertentu. Kerangka SNSE disusun dan disajikan dengan memberikan rincian berbagai klasifikasi faktor, aktor dan sektor ekonomi. Dengan demikian kerangka SNSE, selain dapat memberikan gambaran mengenai keadaan ekonomi dan sosial masyarakat pada suatu tahun tertentu, dapat juga dijadikan sebagai kerangka analisa keterkaitan antar variabel-variabel ekonomi-sosial masyarakat.

Hasil dan keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya matriks SNSE Indonesia beserta neraca satelit, tabel-tabel analisis yang diturunkan dari matriks SNSE (matriks induk dan data agregat) serta yang bersumber dari neraca satelit, laporan publikasi matriks SNSE, neraca satelit serta tabel-tabel analisis dan uraian deskriptifnya.

2.8. Studi Penyusunan Stok Kapital

Bergeraknya perekonomian suatu wilayah/negara pada dasarnya ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yaitu kapital (*capital*) dan tenaga kerja (*labor*). Kedua faktor tersebut merupakan penggerak utama suatu perekonomian yang mengubah input menjadi output yaitu berupa barang dan jasa.

Dengan diketahuinya stok kapital maka arah kebijakan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat dapat lebih terarah selaras dengan target pembangunan yang ingin dicapai. Data tentang stok kapital dapat juga digunakan sebagai peringatan dini terhadap implementasi investasi dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang mengarah kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Keluaran/*output* dari penelitian tentang studi penghitungan stok kapital ini adalah berupa laporan hasil studi penghitungan penambahan stok kapital menurut jenis barang Indonesia.

2.9. Studi Rekonsiliasi Neraca Ekspor Impor Jasa Penunjang PDB

Studi mengenai rekonsiliasi neraca ekspor impor jasa penunjang PDB dimaksudkan untuk menunjang penyusunan neraca jasa internasional yang lebih rinci khususnya dalam komponen PDB penggunaan. Dengan

Neraca Pengeluaran

tersedianya data transaksi jasa internasional tersebut, dapat diperoleh: neraca jasa internasional yang akurat dalam menunjang penyusunan PDB penggunaan, informasi nilai dan struktur transaksi jasa, informasi kinerja kegiatan transaksi jasa Indonesia yang lebih mendalam dan rinci menurut masing-masing jenis jasa dari dan ke luar negeri.

Penyusunan neraca jasa dapat dilakukan melalui pendekatan dari sektoral maupun institusional. Pendekatan sektoral digunakan untuk melihat karakteristik jasa yang ditransaksikan sehingga kategori transaksi jasa dapat disajikan lebih rinci. Sedangkan melalui pendekatan institusional (residen dan non-residen secara institusi berupa perusahaan, pemerintahan dan penduduk/rumah tangga) merupakan gambaran transaksi yang dilakukan antara residen dengan non-residen atau sebaliknya untuk mendeteksi kegiatan transaksi jasa.

<http://www.bps.go.id>

**ANALISIS
PENGEMBANGAN
STATISTIK**

G.3

<http://www.bps.go.id>



3 ANALISIS PENGEMBANGAN STATISTIK

3.1. Studi Penentuan Paket Komoditi Kebutuhan Dasar Non Makanan

Informasi mengenai paket komoditi kebutuhan dasar non makanan yang dipakai untuk penentuan garis kemiskinan non makanan pada saat ini didasarkan pada hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar, mengingat pola konsumsi masyarakat yang telah berubah dalam kurun waktu 1995-2003, terutama semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, maka informasi mengenai paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diduga sudah berubah dan perlu diperbarui. Untuk itu perlu dilakukan Survei mengenai Paket Komoditi Dasar setiap provinsi. Sehingga dalam penghitungan kemiskinan selanjutnya sudah mendapatkan paket komoditi yang lebih akurat.

3.2. Studi Menentukan Tingkat Konsistensi Data Konsumsi Rumah Tangga

Dalam penghitungannya, setiap tahunnya hampir 70 persen Produk Domestik Bruto menurut penggunaan merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sumber data utamanya adalah dari data Susenas Modul Konsumsi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga selama setahun diperoleh dari pengeluaran perkapita setahun dikalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun-tahun di mana Susenas Modul Konsumsi dilaksanakan.

Karena kontribusinya yang cukup besar dalam PDB, maka data pengeluaran konsumsi adalah sangat penting, dan harus diperhatikan tingkat konsistensinya antara data konsumsi rumah tangga dengan data PDB (pengeluaran konsumsi rumah tangga).

Selama ini ada kecenderungan ketidakkonsistenan antara pengeluaran konsumsi PDB terhadap data konsumsi pengeluaran hasil Susenas Modul Konsumsi. Pola-pola seperti itu masih perlu dikaji lebih mendalam untuk memastikan apakah kecenderungan tersebut sesuai dengan kenyataan atau adanya faktor lain. Untuk itu diperlukan verifikasi ke wilayah-wilayah yang ditengarai adanya ketidakkonsistenan antara data pengeluaran konsumsi pada PDRB dengan data Susenas Modul Konsumsi.

3.3. Statistik Indonesia

Statistik Indonesia adalah publikasi tahunan BPS yang komprehensif. Publikasi ini menyajikan beraneka ragam jenis data dalam berbagai bidang serta dilengkapi dengan ulasan deskriptif dan penjelasan teknis dari bidang-bidang yang bersangkutan. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim di Indonesia dan keadaan sosial ekonomi penduduk serta kondisi sosial dan perekonomian Indonesia.

3.4. Analisis Indikator Pendahulu

Periode penelitian Analisis Indikator Pendahulu mencakup data-data makro, baik pada sektor riil, sektor moneter, dan sektor lainnya. Data-data sektor riil meliputi data ekspor, import, produksi, indeks produksi, dan lain-lain. Data-data sektor moneter meliputi nilai tukar rupiah terhadap US dollar, pergerakan saham, uang yang beredar dan lain-lain. Data lainnya meliputi data inflansi, indeks harga konsumen, tingkat hunian hotel, indeks bursa efek Jakarta, jumlah penanaman modal asing (PMA) yang disetujui jumlah penjualan kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sebagian besar datanya merupakan data sekunder, baik yang berasal dari BPS maupun institusi lainnya, seperti CEIC dan BI.

Keluaran dari kegiatan ini adalah: Pola Daur Bisnis di Indonesia, variabel-variabel yang termasuk ke dalam indikator pendahulu, indikator seiring dan indikator pengikut dan indikator komposit pendahulu, seiring dan pengikut.

3.5. Analisis Produktivitas Industri Padat Tenaga Kerja

Sektor industri pengolahan mempunyai peranan yang dominan dalam perekonomian nasional. Dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), sumbangan sektor industri mencapai 28 persen. Dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menampung 11,95 juta orang atau sekitar 12,7 persen dari total penduduk yang bekerja. Namun, selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan sektor industri ternyata tidak sepesat yang diharapkan. Sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, sektor industri mampu tumbuh dua digit dan pertumbuhannya selalu berada diatas pertumbuhan PDB. Sesudah krisis, pertumbuhan sektor industri melambat dan selalu kurang dari 5 persen per tahun.

Tujuan dari kegiatan ini: menghitung dan membandingkan tingkat efisiensi dari industri padat tenaga kerja menurut kelompok industri (KLUI

3 digit), menghitung dan membandingkan pertumbuhan produktivitas dari industri-industri pada tenaga kerja menurut kelompok industri (KLUI 3 digit), dan mencari faktor-faktor yang berpengaruh (determinan) terhadap tingkat efisiensi dan produktivitas industri pada tenaga kerja.

3.6. Analisis Pengangguran Terdidik

Di tengah upaya pemerintah mencapai target angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,1 persen, realita menunjukkan trend TPT cenderung meningkat. Dengan angka pertumbuhan ekonomi 3,45 persen hingga 5,6 persen per tahun pada periode 2001-2005, trend TPT bergerak pada kisaran 8,1 persen hingga 11,2 persen. Dalam kurun waktu yang sama jumlah penganggur berpendidikan menengah (SMU/Sederajat) rata-rata bertambah 10,6 persen per tahun sedangkan penganggur berpendidikan tinggi (>SMU/Sederajat) juga bertambah sekitar 6,7 persen per tahun. Pada November 2005 tercatat 4,4 juta jiwa penganggur berpendidikan menengah dan 700 ribu penganggur berpendidikan tinggi. Seperti yang terlihat pada tabel 7.3. berikut ini.

**Tabel 7.3. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
(dalam ribuan) Tahun 2004 - 2009**

No.	Jenis Survei	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tidak/belum pernah sekolah	336	264,5	170,7	94,3	103,2	60,3
2.	Belum/tidak tamat SD	668,3	673,5	611,3	438,5	443,8	415,9
3.	SD	2.275,3	2.729,9	2.589,7	2.179,8	2.099,9	2.143,7
4.	SLTP	2.690,9	3.151,2	2.730,0	2.264,2	1.973,9	2.054,7
5.	SLTA Umum	2.441,2	3.069,3	2.851,5	2.532,2	2.403,4	2.133,6
6.	SLTA Kejuruan	1.254,3	2.037,6	1.305,2	1.538,3	1.409,1	1.337,6
7.	Diploma I,II,III/Akademi	237,3	308,5	278,1	397,2	362,7	486,4
8.	Universitas	348,1	395,5	395,6	566,6	598,3	626,6
Jumlah		10.251,4	11.899,3	10.932,0	10.011,1	9.394,5	9.258,9

Sejalan dengan upaya penurunan angka TPT, penanganan masalah pengangguran terdidik menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Aspirasi mereka untuk bekerja perlu secepatnya dipertimbangkan mengingat mereka merupakan sumber daya potensial yang selayaknya terakomodasi untuk memacu laju pembangunan.

Tujuan dari kegiatan ini: memberikan gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan di Indonesia, memberikan gambaran tentang karakteristik pengangguran terdidik di Indonesia, mencari variabel penciri yang dapat membedakan status ketenagakerjaan terdidik, dan memperkirakan arah perkembangan pengangguran terdidik di masa depan.

3.7. Studi Konsistensi Data Podes

Data potensi desa dikumpulkan setiap 3 tahun berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi. Data Podes yang menghimpun berbagai informasi untuk mengungkapkan potensi desa/kelurahan banyak digunakan baik oleh pemerintah maupun praktisi. Untuk keperluan targetting program pengentasan kemiskinan, data Podes digunakan untuk mengidentifikasi desa-desa yang diduga sebagai wilayah yang banyak dihuni oleh penduduk miskin – dikenal sebagai desa tertinggal. Selain itu, data Podes juga digunakan untuk updating klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan reliabilitas data agar kajian yang menggunakan data tersebut dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pada kenyataannya masih terdapat beberapa variabel dalam data Podes yang diduga tidak konsisten, sehingga akan menyulitkan pengguna data tersebut, terutama jika kajian berkala dilakukan antar waktu. Selain itu informasi mengenai infrastruktur, sosial dan ekonomi perlu dikaji dan dibandingkan dengan informasi sejenis yang dikeluarkan oleh pihak lain seperti sekolah oleh Departemen Pendidikan Nasional dan jumlah fasilitas kesehatan oleh Departemen Kesehatan.

Untuk itu, studi ini akan mencoba mengkaji tingkat konsistensi data Podes baik terhadap variabel-variabel di dalam data set itu sendiri maupun terhadap data lainnya, baik yang bersumber dari BPS maupun luar BPS yang berkaitan dengan data-data kemiskinan, fasilitas umum dan infrastruktur.

3.8. *Adult Equivalent* (Analisis Konsumsi Rumah Tangga)

Penghitungan penduduk miskin di Indonesia selama ini didasarkan pada rata-rata pengeluaran per kapita, tanpa memperhatikan komposisi rumah tangga. Padahal kebutuhan konsumsi seorang anak maupun balita diperkirakan berbeda dengan kebutuhan konsumsi seorang dewasa. Penerapan *adult equivalent* perlu dipertimbangkan guna menghasilkan angka kemiskinan yang lebih proporsional.

3.9. Kajian Komoditas Unggulan dan Kaitannya dengan Sosial Ekonomi Masyarakat

Jenis komoditas pertanian yang dimiliki sangat beragam dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan. Selain itu dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi penduduk, juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Di samping komoditas pertanian juga mengkaji berbagai isu sosial ekonomi masyarakat yang mencakup ILOR, Ekspor, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Target MDGs, dan Kemiskinan Berbasis Gender.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan informasi tentang situasi terkini yang meliputi keberadaan dan perkembangannya. Lebih jauh informasi tentang masalah, kendala serta prospeknya. Selain itu juga mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai bagian keseluruhan kajian. Data yang digunakan untuk kajian komoditas unggulan dari berbagai sumber dengan analisis yang digunakan adalah deskriptif dan modeling berikut grafik, diagram batang, *piechart*.

Hasil dan Keluaran dari kegiatan ini berupa publikasi kajian komoditas unggulan dan kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat.

3.10. Studi Konsistensi Data Ketenagakerjaan dan Kemiskinan

Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia antara lain meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan sarana untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tercermin dengan menurunnya angka kemiskinan. Kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak berakibat positif terhadap turunnya angka pengangguran walaupun angka kemiskinan menurun. Dengan kata lain, terjadi hubungan yang tidak searah antara angka kemiskinan dengan angka pengangguran. Sebagai contoh, angka pengangguran tahun 2004 meningkat menjadi 9,86 persen dari 9,57 persen pada tahun 2003. Padahal angka kemiskinan tahun 2004 turun menjadi 16,66 persen dari 17,42 persen pada tahun 2003.

Pada dasarnya hasil studi ini digunakan untuk menjelaskan penyebab terjadinya hubungan yang tidak searah antara angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu, dengan mengacu kepada proses pencapaian hasil studi, kegiatan ini bertujuan untuk: 1) memperoleh angka kemiskinan dan pengangguran yang dirinci menurut beberapa aspek sosial dan ekonomi,

antara lain kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, lapangan usaha, kelompok pengeluaran, wilayah, dan provinsi; 2) melihat keterkaitan antara angka kemiskinan dan pengangguran di masing-masing klasifikasi pada butir (1); 3) sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan dan kemiskinan.

3.11. Indikator Ekonomi

Perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional khusus di bidang ekonomi memerlukan data-data penunjang berupa data statistik. Oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data statistik ekonomi secara bulanan dilakukan untuk berbagai keperluan pengguna data khususnya untuk pengamatan dan analisis ekonomi.

Metodologi dari kegiatan ini berupa; 1) Melakukan pengumpulan data baik yang bersumber dari BPS maupun non-BPS melalui unit kerja di BPS yang menangani data-data tersebut, 2) Melakukan pemeriksaan data, 3) Membuat ulasan singkat, dan 4) Penyajian/Publikasi.

3.12. Analisis SE06 Listing

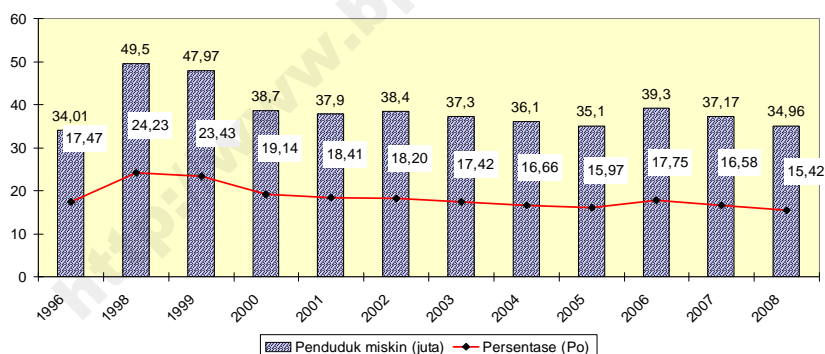
Gambaran secara komprehensif tentang hasil pendaftaran perusahaan/ usaha dari Sensus Ekonomi 2006 tahap Listing sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Bagi para pembuat kebijakan, informasi ini berguna untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan serta untuk perencanaan pembangunan selanjutnya. Sementara bagi kalangan usaha, dapat menjadi dasar perencanaan untuk pengembangan usaha, pangsa pasar dan potensi pasar.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk; 1) Memberikan gambaran tentang distribusi perusahaan/ usaha dan tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha, lokasi tempat usaha, skala usaha, bentuk badan hukum/ usaha, klasifikasi tenaga kerja dan jaringan usaha, 2) Memberikan gambaran tentang distribusi perusahaan/ usaha dan tenaga kerja menurut provinsi, dan 3) Memberikan gambaran tentang struktur perusahaan/ usaha dan tenaga kerja menurut kedalaman KBLI (2 atau 3 digit).

3.13. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah, Maret 2008 disajikan pada lampiran 48. Sedangkan perkembangannya Tahun 1996-2008 dapat dilihat pada gambar 7.1.

Gambar 7.1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 1996-2008



Tujuan kegiatan analisis ini adalah untuk menghitung dan menganalisis beberapa indikator kemiskinan pada tingkat nasional dan provinsi tahun 2008 antara lain mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin (P0), garis kemiskinan (GK), indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2) dan distribusi pendapatan (pengeluaran) menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Indikator lain yang tidak kalah penting adalah profil kemiskinan tahun 2008 yang diwakili oleh karakteristik kepala rumah tangganya. Analisis profil kemiskinan difokuskan kepada beberapa aspek yang diduga sebagai akar permasalahan yang dihadapi oleh rumah tangga

miskin antara lain karakteristik sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan dan tempat tinggal (perumahan).

Kegiatan yang sama juga menghasilkan data dan informasi kemiskinan yang disajikan dalam bentuk publikasi buku 1: provinsi dan buku 2: kabupaten/kota yang didasarkan pada data Susenas tahun 2007. Selain mencakup indikator kemiskinan yang utama seperti disebutkan di atas, kedua publikasi tersebut juga dilengkapi dengan indikator-indikator pendukung yang menggambarkan keberadaan orang miskin ditinjau dari aspek pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan fasilitas perumahan. Publikasi data dan informasi kemiskinan juga menyajikan ulasan singkat untuk menggambarkan kondisi karakteristik tertentu dan keterbandingannya antar provinsi atau antar kabupaten/kota.

3.14. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

Informasi dini, seperti persepsi pelaku bisnis dan pelaku konsumsi terhadap situasi perekonomian, merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi semua pihak. Informasi dini tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah, dunia usaha dan konsumen, karena mampu memberikan sinyal awal mengenai perubahan kondisi perekonomian beberapa bulan mendatang. ITB dan ITK merupakan bagian dari sistem pemantauan indikator dini yang dikembangkan BPS sejak tahun 1980-an yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian di Indonesia dalam jangka pendek (triwulanan) baik dari sisi pelaku bisnis (produsen) maupun pelaku konsumsi (konsumen).

Penyajian hasil ITB dan ITK dilakukan secara triwulanan dalam bentuk Berita Resmi Statistik (BRS) bersamaan dengan *press release* BRS tentang Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulanan. Di samping BRS yang dipublikasikan secara triwulanan, penyajian juga dipublikasikan secara tahunan dengan menjelaskan secara rinci dan lengkap metodologi penghitungan indeks dan analisis kondisi perekonomian dari hasil ITB dan ITK selama setahun terakhir.

3.15. Kajian Profil Komoditas Unggulan Indonesia

Penelitian ini dimaksudkan untuk memetakan berbagai potensi setiap komoditas untuk pengembangan lebih lanjut dalam rangka peningkatan

produksi menuju kemandirian. Sehingga ketergantungan pada negara lain untuk komoditas tertentu dapat dikurangi, ketahanan pangan akan lebih terjamin serta terhindar dari ancaman krisis pangan.

**Tabel 7.4. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen¹⁾
Triwulan I-2006 s.d. Triwulan III-2008
dan Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV-2008**

Indeks	2006				2007				2008			
	T-I	T-II	T-III	T-IV	T-I	T-II	T-III	T-IV	T-I	T-II	T-III	T-IV ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ITB	95,12	108,50	108,72	107,43	100,19	110,96	112,58	112,25	104,41	111,72	111,12	111,06
ITK	96,01	109,77	109,16	106,96	106,93	105,78	109,48	106,10	95,01	93,84	102,78	101,25

Keterangan:

1) ITK dan ITB berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:

- a. Nilai ITK dan ITB < 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
- b. Nilai ITK dan ITB = 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
- c. Nilai ITK dan ITB > 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya.

2) Perkiraan Triwulan IV-2008

Komoditas yang dikaji mencakup komoditas subsektor pertanian, meliputi beras, kedelai, daging sapi, ayam pedaging dan petelur, perikanan laut, kelapa sawit dan minyak goreng sawit. Sedangkan empat komoditas non pertanian meliputi minyak tanah, tepung terigu, pulp dan kertas serta semen.

Analisis dilakukan dengan dua cara yaitu secara deskriptif dan menggunakan model statistik yang dilengkapi dengan data dari berbagai departemen seperti Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan dan departemen/instansi terkait lainnya.

3.16. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat bertujuan untuk mengetahui taraf dan perkembangan kesejahteraan rakyat (kesra) melihat perbedaannya antar daerah dan karakteristik/keompok penduduk lainnya. Di samping itu, laporan ini juga memberikan gambaran besarnya/tingkat permasalahan kesra yang dihadapi, mendeteksi sektor/bidang kesra yang

memerlukan perhatian khusus dan mengetahui perkembangan pencapaian indikator-indikator MDGs.

Output kegiatan ini adalah publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat yang menyajikan kondisi dan perkembangan kesejahteraan rakyat pada tahun berjalan.

3.17. Penyempurnaan dan Pembinaan Penyusunan Laporan Statistik

Penyempurnaan dan pengembangan penyusunan laporan statistik dilakukan dengan mempertajam daya analisis dan evaluasi laporan, memperluas cakupan isi terutama tentang isu yang bersifat aktual dan didukung dengan data yang *up to date*.

Publikasi yang dihasilkan antara lain Laporan Perekonomian Indonesia, Laporan Sosial, Statistik Indonesia, buku saku Statistik Indonesia dan Tinjauan Kinerja Perekonomian Indonesia Triwulanan disajikan dalam bentuk publikasi yang berisikan uraian analisis singkat serta grafik/gambar. Sedangkan cakupan penyajian dikelompokkan menurut sektor/bidang menurut agregat nasional, beberapa tabel disajikan menurut provinsi.

3.18. Finalisasi Hasil Sensus Ekonomi

Pengumpulan data melalui Sensus Ekonomi 2006 (SE06) dilakukan dua tahap. Tahap pertama pada tahun 2006 dilakukan pendaftaran perusahaan/usaha (listing) untuk semua kegiatan ekonomi kecuali sektor pertanian. Tahap kedua pada tahun 2007 dilakukan pencacahan perusahaan/usaha secara lebih rinci. Perusahaan/usaha yang berskala mikro dan kecil (UMK) dicacah secara sampel, sedangkan perusahaan/usaha yang berskala menengah dan besar (UMB) dicacah secara lengkap (sensus). Pada tahun 2008 telah dilakukan kegiatan lanjutan seperti penyusunan tabulasi sebagai bahan publikasi, kegiatan analisis dan pencetakan, sebagai kegiatan akhir dari pelaksanaan SE06.

Tujuan dan sasaran kegiatan finalisasi ini adalah mendapatkan jumlah usaha dan pekerja seluruh kategori lapangan usaha, menurut provinsi dan klasifikasi lapangan usaha, mendapatkan gambaran struktur pendapatan dan pengeluaran, struktur permodalan, serta berbagai karakteristik usaha lainnya dari perusahaan/usaha seluruh kategori

lapangan usaha, menurut provinsi dan klasifikasi lapangan usaha dan menyediakan data ekonomi secara rinci tentang ciri dan kegiatan perusahaan/usaha seluruh kategori lapangan usaha, menurut provinsi dan klasifikasi lapangan usaha, baik untuk kepentingan praktisi, dunia usaha maupun untuk penyusunan indikator ekonomi makro.

3.19. Indeks Pembangunan Manusia

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar daerah atau antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI).

Indeks ini dibentuk dari empat indikator angka yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan analisa IPM serta menganalisis perkembangan masing-masing komponen IPM.

INSPEKTORAT



<http://www.bps.go.id>

INSPEKTORAT

1. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Hasil pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebanyak 30 obyek pemeriksaan (obrik) disusun untuk keperluan pelaporan baik kepada pimpinan, auditor maupun ke instansi terkait. Penyusunan LHP ini memerlukan biaya yang cukup sesuai jumlah obrik yang ada. Perlu diketahui bahwa selama ini biaya penyusunan LHP tidak tersedia sehingga untuk kebutuhan penyusunannya diambil/dicarikan dari mata anggaran lain. Hal ini jelas akan mengurangi efektivitas kegiatan lain yang terimbas dari kebutuhan biaya penyusunan LHP tersebut. Dengan adanya biaya untuk penyusunan LHP ini akan mempercepat penyelesaiannya dan informasi hasil pemeriksaan cepat terselesaikan. Untuk keperluan pelaporan LHP akan digandakan sebanyak 10 kali.

Tujuan dari kegiatan ini adalah 1) Untuk kelancaran proses penyusunan LHP, dan 2) Mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diselesaikan di tempat saat pemeriksaan.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan LHP ini dilakukan bertahap, mulai dari penyusunan draf, pemeriksaan, penyusunan akhir/final dan penggandaan. Setiap tahapan kegiatan dilakukan dengan pertemuan dan pengarahan dari inspektur.

Pelaksanaan penyusunan LHP ini dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Sementara keluaran atau hasil kegiatan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 172 buah yang digandakan 10 (sepuluh) kali untuk keperluan pelaporan.

2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPS

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPS dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dari seluruh

perwakilan BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota dan seluruh unit eselon I dan II di BPS, sehingga diperlukan suatu tim dalam penyusunannya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengintegrasikan/mengkonsolidasikan LAKIP BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota serta Eselon I & II di BPS untuk menghasilkan LAKIP BPS. LAKIP BPS disampaikan kepada Menteri PAN.

Sasarannya adalah menjadikan BPS yang akuntabel sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan, serta terwujudnya transparansi BPS.

3. Penyusunan Penetapan Kinerja

Diawali dengan penyusunan penetapan kinerja sebagai langkah awal dalam penyusunan LAKIP BPS. Penyusunan penetapan kinerja BPS diperlukan untuk mengkonsolidasikan seluruh unit organisasi di BPS yang mencakup 25 unit eselon II dan 8 unit eselon I.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan penetapan kinerja BPS yang berfungsi sebagai alat kontrol penyusunan laporan kinerja BPS, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja BPS sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik (*good public governance*) .

4. Pemeriksaan dan Pembinaan Keuangan pada BPS Provinsi (PKPT/Program Kerja Pengawasan Tahunan)

Kegiatan pengawasan tahunan pada BPS Provinsi dilakukan di 27 provinsi sebagai obyek pemeriksaan (obrik) yang mencakup 133 satuan kerja. Kegiatan ini dilakukan secara tim yang diketuai oleh seorang ketua tim dan beranggotakan para auditor Inspektorat Utama. Hasil evaluasi akan dituangkan dalam bentuk buku Evaluasi Hasil Pemeriksaan PKPT. Buku dimaksud diharapkan dapat berkesinambungan setiap tahun, karena selama ini dokumentasi rekapitulasi dalam bentuk laporan evaluasi hasil pemeriksaan PKPT belum pernah ada.

Hasil pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebanyak 133 satuan kerja disusun dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) untuk keperluan pelaporan, baik kepada pimpinan maupun instansi terkait.

Tujuan dari kegiatan penyusunan LHP adalah untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan yang belum diselesaikan oleh satuan kerja pada saat berlangsungnya pemeriksaan dan digandakan sebanyak 5 (lima) kali untuk keperluan pelaporan.

5. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2008

Untuk menjadi auditor, seorang pegawai harus mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Pada tahun 2008, BPS bekerjasama dengan BPKP melaksanakan Diklat JFA di BPS selama 20 hari kerja dari tanggal 28 April s.d 28 Mei 2008 yang diikuti oleh 23 orang peserta. Peserta yang dinyatakan lulus untuk seluruh materi diklat, dapat diusulkan menjadi Pejabat Fungsional Auditor.

Pelaksanaan jabatan fungsional auditor di BPS sudah berjalan sejak tahun 1997. Dengan demikian sebagai pejabat fungsional, auditor harus mengikuti dan mentaati ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional auditor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKP No. KEP-13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Ketentuan yang harus dipenuhi sebagai fungsional auditor untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi di antaranya harus membuat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang dilengkapi dengan:

- 1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan,
- 2) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi,
- 3) Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang auditor.

Untuk kelancaran administrasi proses penilaian terhadap DUPAK, perlu dibentuk tim penilai dan sekretariat tim penilai Jabatan Fungsional Auditor. Jumlah anggota tim penilai sesuai ketentuan di atas sekurang-kurangnya 7 orang dengan dibantu sekretariat tim penilai yang beranggotakan 5 orang.

Keluaran dari kegiatan ini berupa penetapan angka kredit yang menjadi masukan bagi Biro Kepegawaian dalam menetapkan:

- 1) Keputusan tentang pengangkatan pertama/pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional auditor ahli/auditor trampil,
- 2) Keputusan tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional auditor karena belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal,

- 3) Keputusan tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional auditor karena sebab-sebab lain,
- 4) Nota peringatan,
- 5) Nota pemberitahuan,
- 6) Surat keputusan tentang penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit auditor trampil dan auditor ahli.

6. Review Laporan Keuangan (LK) BPS

A. Dasar hukum *Review* LK

Dasar hukum *Review* LK adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER – 44/PB/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan *Review* Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang pada pasal 2 berbunyi:

- (1) Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga wajib melaksanakan *review* atas laporan keuangan.
- (2) *Review* atas laporan keuangan dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

B. Ruang Lingkup dan Sasaran *Review*

Ruang lingkup *review* adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Hal ini dilakukan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap catatan, buku laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Sasaran *review* adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

C. Jadwal Pelaksanaan *Review*

Review LK dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Setelah melakukan *review*, aparat pengawasan intern membuat pernyataan telah *direview* atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang disampaikan ke Menteri Keuangan. Pernyataan telah *direview* diterbitkan setidaknya-tidaknya sekali dalam setahun terhadap laporan keuangan tahunan kementerian negara/lembaga.

D. Pelaksanaan *Review*

Pelaksanaan *review* atas laporan keuangan dilaksanakan dengan teknik *review* sebagai berikut:

- (1) Penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, dilakukan dengan:
 - Membandingkan angka pos laporan keuangan terhadap saldo buku besar.
 - Membandingkan saldo buku besar terhadap buku pembantu.
 - Membandingkan angka-angka pos laporan keuangan terhadap laporan pendukung, misalnya aset tetap terhadap laporan mutasi aset tetap dan laporan posisi aset tetap.
- (2) Permintaan keterangan dengan mempertimbangkan, antara lain: kemungkinan salah uji, ketidakcukupan data keuangan entitas yang mendasarinya dan ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- (3) Prosedur analitik, dilakukan dengan:
 - Mempelajari laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,
 - Membandingkan laporan keuangan dalam beberapa periode yang setara,
 - Membandingkan realisasi terhadap anggaran,
 - Mempelajari hubungan unsur-unsur dalam laporan keuangan yang diharapkan akan sesuai dengan pola yang dapat diperkirakan atas dasar pengalaman entitas.

E. Pelaporan

Hasil pelaksanaan *review* dituangkan dalam pernyataan telah direview, yang menyatakan bahwa antara lain: lingkup *review* jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit (tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan).

F. Tindak Lanjut

Jika ada kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari standar akuntansi pemerintah dan peraturan lainnya, maka aparat pengawasan *intern* memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direview. Entitas wajib menindaklanjuti hasil *review* dengan segera melakukan koreksi terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil koreksi kepada aparat pengawasan *intern*. Dengan demikian, laporan keuangan yang disampaikan ke Menteri Keuangan adalah laporan keuangan yang telah dikoreksi berdasarkan hasil *review*.

Keluaran dari kegiatan ini berupa: 1) Penetapan Angka Kredit, 2) Keputusan tentang pengangkatan pertama/pengangkatan kembali dalam jabatan auditor ahli/auditor trampil, 3) Keputusan tentang pembebasan sementara dari jabatan auditor karena belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal, 4) Keputusan pembebasan sementara dari jabatan auditor karena sebab-sebab lain, 5) Nota peringatan, 6) Nota pemberitahuan dan 7) Surat Keputusan tentang penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit auditor trampil dan auditor ahli.

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Mulai tahun 2008, Inspektorat Utama diberi tugas untuk mengkoordinasikan pelaporan LHKPN dari pegawai BPS yang termasuk dalam Penyelenggara Negara Wajib Lapori (PNWL) dari seluruh BPS dan BPS daerah. PNWL-LHKPN terdiri dari:

- Pejabat eselon I dan eselon II (pusat dan daerah),
- Kuasa pengguna anggaran (pusat dan daerah),
- Pejabat pembuat komitmen (pusat dan daerah),
- Para bendahara,
- Para anggota panitia pengadaan barang dan jasa, dan
- Para auditor.

**RENCANA
KEBIJAKAN DAN
LANGKAH-
LANGKAH**



<http://www.bps.go.id>

A. RENCANA KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH

Rencana kebijakan BPS sesuai dengan kerangka regulasi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. UU Statistik mengamankan BPS sebagai instansi yang bertanggung jawab menyediakan statistik dasar dengan menyelenggarakan kegiatan Sensus Penduduk (SP), Sensus Pertanian (ST), dan Sensus Ekonomi (SE) yang masing-masing dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk di Indonesia sudah dilakukan sebanyak lima kali sejak tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan pada tahun 2010 akan dilaksanakan Sensus Penduduk yang keenam kalinya. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi BPS dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan kegiatan statistik, khususnya dalam mengumpulkan data statistik dasar, secara seimbang bersama-sama dengan responden, dan pengguna data statistik pada umumnya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, BPS berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada pasal 2 disebutkan BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 dalam melaksanakan tugas, BPS menyelenggarakan fungsi: (1) pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik; (2) pengkoordinasian kegiatan statistik; (3) penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; (4) penetapan sistem statistik nasional; (5) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penyelenggaraan statistik; dan (6) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Rencana Kebijakan dan Langkah-Langkah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007, selanjutnya BPS menjabarkan tugas pokok dan fungsinya melalui suatu Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik. Secara umum arah kebijakan BPS adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya;
- 2) Mengembangkan sistem statistik wilayah kecil dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah;
- 3) Meningkatkan kerja sama dengan sumber, produsen, dan pengguna data, dengan memberi apresiasi serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik;
- 4) Meningkatkan jumlah, ragam keterampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai;
- 5) Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir, dengan menciptakan pelayanan prima.
- 6) Mengefektifkan fungsi forum masyarakat statistik (FMS) dengan memperbanyak pertemuan, diskusi dan kunjungan lapangan.

Adapun langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh BPS dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada seluruh pengguna data antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan statistik dasar;

Rencana Kebijakan dan Langkah-langkah

- 3) Melakukan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;
- 4) Memfasilitasi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik;
- 5) Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketata usahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

<http://www.bps.go.id>

PROGRAM DAN KEGIATAN



B

<http://www.bps.go.id>

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berbagai kegiatan BPS pada Tahun Anggaran 2010 dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) program utama yaitu:

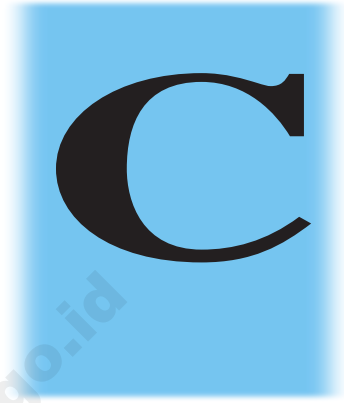
- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN),
- 2) Program Kepemerintahan yang Baik (PKyB),
- 3) Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik (P2S), dan
- 4) Program Pendidikan Kedinasan (PK).

Kegiatan BPS Tahun Anggaran 2010 dikategorikan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu kegiatan yang termasuk dalam skala prioritas nasional dan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan dasar dan penunjang. Secara rinci kegiatan yang termasuk kegiatan prioritas dan kegiatan dasar dan penunjang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8. Kegiatan Prioritas Nasional dan Kegiatan Dasar dan Penunjang di BPS Tahun Anggaran 2010

Program	Kegiatan Prioritas Nasional	Kegiatan Dasar dan Penunjang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN)	1. Pembangunan Gedung 2. Pengadaan Tanah 3. Sewa Bangunan Satker Baru	1. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran 2. Pembangunan/ Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 3. Pengadaan Kendaraan 4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 5. Rehabilitasi Gedung Kantor/Sekolah/Rumah Negara
Program	Kegiatan Prioritas Nasional	Kegiatan Dasar dan Penunjang
Program Kepemerintahan yang Baik (PKyB)	-	1. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3. Pelayanan Publik Atau Birokrasi 4. Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM
Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik (P2S)	Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik, Dan Informasi	1. Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 3. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/Lembaga 4. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Program Pendidikan Kedinasan (PK)	-	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)

SASARAN



<http://www.bps.go.id>

C. SASARAN

Secara umum sasaran pembangunan statistik tahun 2010 adalah:

- 1) Meningkatnya daya guna statistik melalui penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu di bidang kependudukan;
- 2) Meningkatnya daya guna statistik melalui penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan, serta semakin terpenuhinya kebutuhan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah;
- 3) Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional di bidang teknis dan manajemen statistik serta komputasi data dan keadministrasian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- 4) Meningkatnya fungsi Sistem Statistik Nasional melalui peningkatan kemampuan sistem informasi, pengolahan, dan diseminasi;
- 5) Meningkatnya koordinasi antar instansi pemerintah di bidang statistik untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik yang serupa;
- 6) Meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan statistik; dan
- 7) Terwujudnya good governance.

Indikator keluaran (out put) yang ingin dicapai dalam tahun 2010 antara lain berupa:

- 1) Raw data berbagai pengumpulan data statistik sosial, ekonomi dan statistik lintas bidang;
- 2) Berbagai sosialisasi kegiatan BPS;
- 3) SDM di bidang statistisi yang terdidik;
- 4) Berbagai koordinasi statistik lintas sektor baik di pusat maupun di daerah; dan

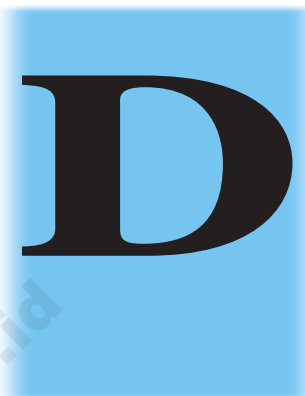
Sasaran

- 5) Pelayanan kegiatan statistik kepada seluruh pengguna data.

Indikator hasil (out come) yang ingin dicapai dalam tahun 2010 antara lain berupa:

- 1) Berbagai publikasi statistik sosial, ekonomi dan statistik lintas bidang;
- 2) Dipahaminya berbagai kegiatan BPS;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan SDM di BPS;
- 4) Terselenggaranya koordinasi kegiatan statistik; dan
- 5) Terpenuhinya kebutuhan data statistik seluruh pengguna data.

**RENCANA
ANGGARAN
BELANJA TAHUN
2010**



<http://www.bps.go.id>

D. RENCANA ANGGARAN BELANJA TAHUN 2010

Rencana seluruh kebutuhan anggaran BPS tahun 2010 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni dan Bantuan Luar Negeri dengan perkiraan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 5.049.048.200.000,-. Secara rinci besarnya biaya menurut jenis adalah sebagai berikut:

<http://www.bps.go.id>

**Tabel 9. Rencana Kebutuhan Anggaran (54) Badan Pusat Statistik
Tahun Anggaran 2010**

Kode Program	Nama Program	Belanja			Total Belanja	Sumber Pendanaan
		Pegawai	Barang	Modal		
01.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	0	1.875.000,00	297.498.700,00	299.373.700,00	APBN
01.01.09	Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (PKyB)	618.746.164,00	185.126.636,00	0	803.872.800,00	APBN
01.01.27	Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik (P2S) ^{1) 2)}	0	3.864.998.000,00	67.625.000,00	3.932.623.000,00	APBN dan BLN
10.05.01	Program Pendidikan Kedinasan (PK)	0	13.178.700,00	0	13.178.700,00	APBN
Total		618.746.164,00	4.065.178.336,00	365.123.700,00	5.049.048.200,00	

- Catatan:
1. Termasuk RAPBN Sensus Penduduk (SP) 2010 sebesar Rp. 3.300.000.000,- (ribu):
 - Belanja Barang = Rp. 3.257.375.000,0 (ribu) dan
 - Belanja Modal = Rp. 42.625.000,0 (ribu)
 2. Termasuk RAPBN Stat Cap
 - Bantuan Luar Negeri (BLN) = Rp. 15.786.740,0 (ribu) dan
 - Pendamping (Rupiah Murni) = Rp. 2.967.368,0 (ribu)

KESIMPULAN

<http://www.bps.go.id>

KESIMPULAN

Secara umum, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penyusunan Laporan Bahan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2010 ini, yaitu:

1. Adanya Tantangan-tantangan yang dihadapi yaitu:

a. Ketersediaan Data yang Akurat, Mutakhir dan Tepat Waktu

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh data statistik yang akurat, mutakhir dan tepat waktu. Data yang demikian ini tidak saja bermanfaat untuk perencanaan, namun juga untuk memantau dan mengevaluasi hasilnya.

b. Sajian Data yang Sederhana dan Mudah Dipahami

Data statistik tidak hanya diperlukan oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat luas dengan tingkat kepentingan dan latar belakang yang berbeda. Sehubungan dengan itu, sajian data yang sederhana dan mudah dipahami para pengguna merupakan tantangan dalam pembangunan statistik.

c. Data yang Beragam dan Rinci

Pesatnya laju pertumbuhan di segala bidang membutuhkan data statistik yang lengkap untuk setiap sektor pembangunan. Oleh karena itu kebutuhan data statistik yang beragam dan rinci yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai sektor pembangunan dan lintas sektor akan semakin meningkat.

d. Data Berskala Regional, Mikro dan Spesifik

Peran serta swasta dalam pembangunan semakin meningkat di samping kebijakan otonomi daerah. Kedua kondisi ini memerlukan data berskala mikro pada tingkat wilayah kecil dan bersifat spesifik. Ketersediaan data yang demikian merupakan tantangan yang berikutnya.

e. Pembenahan Catatan Administrasi

Pada masa kini pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari catatan administrasi belum sepenuhnya dilakukan, mengingat masih ditemui adanya berbagai kelemahan. Oleh karena itu, pembenahan catatan administrasi baik pada pemerintah maupun lembaga swasta dan dunia

usaha merupakan tantangan untuk mewujudkannya, supaya hasilnya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

f. Percepatan Tenggang Waktu Penyajian

Besaran sampel dan banyaknya dokumen yang diolah merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam setiap kegiatan statistik. Dalam kaitan ini, maka percepatan tenggang waktu penyajian juga merupakan tantangan yang harus dipecahkan pada masa mendatang.

g. Sistem Informasi Statistik yang Andal

Kesenjangan informasi statistik antara pusat dan daerah pada saat ini sangat terasa. Sehubungan dengan itu perlu disusun sistem informasi statistik yang andal dengan penataan jaringan informasi statistik yang menjangkau ke seluruh daerah dalam rangka penyebarluasan informasi statistik.

h. Peningkatan Koordinasi

Kepentingan dan peningkatan yang berbeda, meta data yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan, karena konsep dan definisi yang digunakan berbeda pula. Untuk itu koordinasi yang selama ini belum padu perlu ditingkatkan, dengan demikian tidak terjadi duplikasi kegiatan.

i. Sumber Daya Manusia yang Profesional

Pada simpul-simpul tertentu kegiatan statistik masih banyak ditemui pelaku yang jauh dari sikap profesional. Simpul-simpul kegiatan statistik seperti perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian, serta analisis dan diseminasi perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta sikap profesional.

2. Adanya Beberapa Kendala yang Ditemui seperti:

a. Cakupan Survei yang Luas

Kebutuhan data yang lengkap dan rinci dapat dipenuhi melalui kegiatan statistik, terutama survei yang mempunyai cakupan luas, namun hal ini dapat berakibat pada banyaknya pertanyaan yang akan diajukan, sehingga daftar pertanyaan menjadi tebal. Ditinjau dari sisi pembiayaan hal ini menguntungkan, tetapi dari sisi operasional lapangan dapat mengganggu, karena wawancara memerlukan waktu yang lama sehingga dapat terjadi responden yang diwawancarai kelelahan sehingga jawaban

yang diberikan menjadi tidak akurat. Di sisi lain pewawancara akan mengalami kejenuhan pada wawancara berikut, sehingga pewawancara berusaha menyingkat waktu dengan melakukan penyesuaian yang pada gilirannya mengurangi akurasi data.

b. Kejenuhan Responden

Meningkatnya pembangunan di segala bidang dan mulai diberlakukannya liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Tenggara, berakibat pada meningkatnya penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan sasaran rumah tangga maupun perusahaan/usaha. Penelitian yang bertubi-tubi yang dikenakan pada responden yang sama dapat menyebabkan kejenuhan responden dalam memberikan jawaban, sehingga responden akan melakukan penolakan ataupun menjawab namun jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ditinjau dari sisi teknis pengumpulan data, maka perlu dipikirkan metode yang tepat yang pada hakekatnya dapat mengurangi kejenuhan dan kebosanan responden.

c. Perubahan Wilayah Administrasi yang Cepat

Dalam kegiatan penelitian yang menggunakan metode sensus maupun survei membutuhkan kerangka sampel yang lengkap dan mutakhir. Perkembangan pembangunan yang pesat memerlukan penyesuaian-penyesuaian, begitu pula dengan wilayah administrasi yang selalu berubah dengan cepat. Perubahan wilayah administrasi yang cepat ini terutama wilayah kecil berpengaruh terhadap kerangka sampel yang telah disusun, yang harus selalau disesuaikan dengan kondisi terakhir, sehingga berbagai data yang akan disajikan dapat mengikuti dan sesuai dengan wilayah administrasi terbaru.

d. Konsep, Definisi, Metodologi dan Ukuran Statistik yang Belum Baku

Keragaman penelitian untuk berbagai kepentingan yang berbeda pada umumnya menggunakan konsep, definisi, metodologi dan ukuran-ukuran yang berbeda, sehingga untuk jenis data yang sama memberikan angka yang berbeda. Hal ini dapat menyesatkan para pengguna data bila tidak hati-hati dalam memanfaatkannya, karena tidak semua jenis data yang sama dapat dibandingkan bila menggunakan konsep, definisi maupun ukuran dan metode yang berbeda.

e. Kondisi Geografis dan Keterbatasan Sarana Transportasi dan Komunikasi

Sampel yang representatif dalam suatu penelitian dapat menyebar ke berbagai pelosok wilayah Indonesia. Kondisi geografis yang merupakan kepulauan dan belum adanya sarana transportasi ke berbagai wilayah yang terpencil dapat menghambat kecepatan waktu penyajian data statistik. Sarana komunikasi yang masih terbatas tidak dapat menanggulangi masalah keterlambatan pemasukan data dari wilayah terpencil, karena sarana komunikasi yang diperlukan belum menjangkau daerah tersebut, sehingga secara keseluruhan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan statistik.

f. Keterbatasan Sumber Daya yang Berkualitas

Salah satu unsur dalam kegiatan statistik adalah sumber daya manusia sebagai pelaku kegiatan. Mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan data statistik dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga data yang dihasilkan bermutu, andal dan akurat. Pada hakekatnya tenaga lapangan yang berkualitas masih sulit diperoleh, di pihak lain tenaga lapangan yang memahami statistik sangat terbatas. Selain itu kegiatan statistik yang diselenggarakan instansi pemerintah yang umumnya berskala besar dan memerlukan petugas cukup banyak mempunyai keterbatasan dana sehingga upah pencacahan rendah. Hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan memperoleh tenaga lapangan, terutama untuk daerah kota. Berbagai hal tersebut berpengaruh pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan statistik, di samping keandalan dan akurasi data tidak terjamin mutunya.

PENUTUP

<http://www.bps.go.id>

PENUTUP

Laporan Bahan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2010 ini, hanya merupakan laporan singkat yang bersifat umum tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2008, baik yang bersifat kegiatan teknis statistik maupun kegiatan penunjang. Namun demikian, meskipun hanya berupa ulasan singkat diharapkan sudah dapat memberi gambaran tentang aktivitas yang dilakukan BPS.

Berkaitan dengan otonomi daerah dan banyaknya pemekaran wilayah, maka tugas dan tanggung jawab BPS pada masa mendatang akan semakin luas, yang memerlukan kesiapan aparat di tingkat pusat maupun daerah. Untuk mendukung keberhasilan tugas dan tanggung jawab yang diemban BPS, koordinasi dan kerjasama dari berbagai pihak perlu terus ditingkatkan.

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2008

No.	Rincian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
I. PROGRAM PSPAN		
1.	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat)	80 Unit
2.	Pengadaan Pemasangan Pompa serta Rumah Pompa	1 Unit
3.	Pengadaan Meja Kursi Kerja	111 Unit
4.	Pengadaan Sice dan Kursi Pimpinan	1 Unit
5.	Pengadaan Kursi Rapat	1 Unit
6.	Pengadaan Meja Kerja dan Kelengkapan Ruang Pimpinan	5 Paket
7.	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	1 Paket
8.	Pengadaan Mesin Foto Copy Kec. 28 lbr	1 Unit
9.	Pengadaan Mesin Foto Copy Kec. 18 lbr	2 Unit
10.	Pengadaan Water Heater dan Perlengkapannya	1 Paket
11.	Pengadaan Printer	354 Unit
12.	Pengadaan Printer Warna	325 Unit
13.	Pengadaan Komputer	1.376 Unit
14.	Pengadaan Laptop	202 Unit
15.	Pengadaan Scanner	2 Unit
16.	Pengadaan Hard Disk External	5 Unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2008

No.	Rincian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
II. PROGRAM PKyB		
1. Pengadaan Bahan Pakaian untuk Pengemudi/Juru Taman		26 Stel
2. Pengadaan Bahan Pakaian untuk SATPAM		116 Stel
3. Penyediaan Bahan Pakaian Kerja Pegawai/Teknis		1.436 Stel
4. Perawatan Gedung Kantor, Peralatan dan Mesin antara lain :		
- Pemeliharaan Gedung BPS		29.224 M2
- Pemeliharaan halaman/lingkungan gd BPS		8.000 M2
- Pemeliharaan Gedung Pusdiklat		4.354 M2
- Pemeliharaan halaman/lingkungan gd Pusdiklat		3.000 M2
- Pemeliharaan Gedung STIS		4.499 M2
- Pemeliharaan halaman/lingkungan gd STIS		1.000 M2
- Pemeliharaan Kendaraan Operasional roda 4		120 Unit
- Pemeliharaan Kendaraan Operasional roda 6		3 Unit
- Pemeliharaan Kendaraan Operasional roda 2		8 Unit
- Pemeliharaan Mesin STP		4 Unit
- Pemeliharaan Instalasi Listrik		5 Unit
- Pemeliharaan Instalasi Air/PAM		3 Unit
- Pemeliharaan Instalasi Telepon		190 Unit
- Pemeliharaan BAS (Building Automation System)		1 Unit
- Pemeliharaan Lift		9 Unit
- Pemeliharaan Inventaris Kantor		1.436 O-T
- Pemeliharaan Genset (40 KVA, 350 KVA dan 500 KVA)		7 Unit
- Pemeliharaan Pompa Air		16 Unit
- Pemeliharaan Mesin Rissograp		5 Unit
- Pemeliharaan AC Sentral BPS		6 Unit
- Pemeliharaan AC Split		240 Unit
- Pemeliharaan Sound System		5 Unit
- Pemeliharaan Trafo 1250 KVA		3 Unit
- Pemeliharaan Mesin Cetak Offset dan alat penunjangnya		2 Unit
- Pemeliharaan Mesin Jahit Kawat/Benang dan Gestetner		3 Unit
- Pemeliharaan Peralatan Dokter Gigi		2 Unit
- Pemeliharaan Viewer/Overhead Projektor		31 Unit
- Pemeliharaan Mesin Foto Copy		12 Unit
- Pemeliharaan PABX Telepon dan Instalasi		3 Unit
- Pemeliharaan Fire Hydrant		6 Unit
- Pemeliharaan Fire Detector		3 Unit
- Pemeliharaan Mesin Handkey		10 Unit

Lampiran 2

Barang Inventaris Negara BPS menurut Kelompok Barang Tahun 2008

Jenis Barang	Satuan	Volume		Nilai	
		2007	2008 *)	2007	2008 *)
(1)	(2)	(3)			(4)
1. Tanah		665.154	1.342.929	41.337.848.662	338.200.937.912
Tanah persil	m ²	662.374	1.335.512	41.056.160.662	333.911.052.412
Tanah non persil	m ²	198	4.370	231.000	197.878.000
Lapangan	m ²	2.582	3.047	281.457.000	4.092.007.500
2. Peralatan & Mesin		132.591	154.990	312.472.706.234	351.509.065.637
Alat besar darat	unit		3		10.260.000
Alat bantu	unit	78	147	3.894.008.250	6.140.466.180
Alat angkut darat bermotor	unit	7.473	8.155	120.400.941.494	135.870.877.935
Alat angkut darat tak bermotor	unit	148	151	143.224.590	138.827.980
Alat angkut apung bermotor	unit	3	6	17.200.000	21.370.000
Alat angkut apung tak bermotor	unit	9	9	13.050.000	13.050.000
Alat bengkel tak bermesin	buah	343	397	64.978.171	88.340.328
Alat ukur	buah	4.572	6.057	1.684.927.631	4.759.963.657
Alat pengolahan	buah	1.598	2.093	1.137.600.109	2.119.063.454
Alat kantor	buah	34.482	36.567	18.194.805.101	18.440.923.951
Alat rumah tangga	buah	71.150	82.882	38.283.005.224	44.279.596.164
Alat studio	buah	708	908	1.394.196.142	3.811.776.317
Alat komunikasi	buah	1.293	1.428	3.838.353.440	2.968.710.278
Peralatan pemancar	buah	7	21	4.963.000	9.872.315
Peralatan komunikasi navigasi			5		21.647.900
Alat kedokteran	buah	155	201	131.073.500	134.435.752
Komputer unit	buah	6.103	8.946	79.369.423.602	88.128.781.281
Peralatan komputer	buah	4.139	6.697	43.850.215.980	44.521.905.145
Alat peraga pelatihan dan percontohan	buah		1		5.000.000
Unit peralatan proses/produksi	buah	330	316	50.740.000	24.197.000
3. Gedung & Bangunan		1.613	1.387	143.988.710.221	445.315.302.115
Bangunan gedung tempat kerja	buah	516	715	125.118.262.619	384.153.697.463
Bangunan gedung tempat tinggal	buah	1.095	598	18.528.901.130	55.065.826.692
Tugu/tanda batas	unit	2	74	341.546.472	6.095.777.960
4. Jalan, Irigasi & Jaringan		37	509.788	778.955.850	1.367.763.099
Jalan			509.720		162.551.749
Jembatan	m ²	1	4	22.000.000	22.000.000
Bangunan air irigasi	unit	1	2	24.625.000	39.625.000
Bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam	buah		1		31.710.000
Bangunan pengembangan sumber air & air tanah	buah	6	9	31.400.000	84.245.000
Bangunan air bersih/air baku	buah		1		7.786.000
Instalasi air bersih/air baku	unit	1	8	6.622.000	137.971.300
Instalasi pembangkit listrik	unit	2	3	25.490.000	16.399.000
Instalasi gardu listrik	unit	2	3	298.100.000	326.075.000
Instalasi lain			7		67.716.100
Instalasi pengaman	unit	5		5.961.800	
Jaringan air minum	unit	5	7	5.536.900	46.036.900
Jaringan listrik	unit	8	11	358.286.900	406.873.800
Jaringan telepon	unit	6	12	933.250	18.773.250
5. Aset tetap Lainnya		19.052	20.109	688.326.200	727.684.920
Buku buku	buah	18.900	19.954	681.294.700	720.815.420
Barang bercorak kebudayaan	buah	138	138	4.167.000	4.169.000
Peralatan olahraga	buah	14	17	2.864.500	2.700.500
6. Aset tak berwujud			677		2.499.570.028
Jumlah		818.447	2.029.880	499.266.547.167	1.139.620.323.711

Sumber : Biro Umum

**Jumlah Kendaraan Operasional Di Lingkungan BPS
Tahun 2007 dan 2008**

NO.	PROVINSI	RODA 4		RODA 2		Alat Angkutan Apung Bermotor / Tak Bermotor	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	32	29	233	196	-	-
2	Sumatera Utara	34	36	427	472	-	-
3	Sumatera Barat	29	30	227	233	-	-
4	Riau	9	22	79	127	-	-
5	Jambi	21	23	120	118	-	-
6	Sumatera Selatan	22	24	173	184	-	-
7	Bengkulu	13	20	64	111	-	-
8	Lampung	16	21	120	166	-	-
9	Bangka Belitung	13	17	55	58	-	-
10	DKI Jakarta	13	17	99	106	-	-
11	Jawa Barat	41	42	661	700	-	-
12	Jawa Tengah	66	60	970	998	-	-
13	DI Yogyakarta	15	17	136	145	-	-
14	Jawa timur	63	61	1.073	1.238	-	-
15	Banten	14	18	139	148	-	-
16	Bali	18	17	72	80	-	-
17	Nusa Tenggara Barat	16	18	106	99	-	-
18	Nusa Tenggara Timur	30	28	220	351	-	-
19	Kalimantan Barat	24	23	158	171	-	-
20	Kalimantan Tengah	18	24	121	127	-	-
21	Kalimantan Selatan	23	23	194	128	-	-
22	Kalimantan Timur	21	24	131	141	12	15
23	Sulawesi Utara	24	22	62	108	-	-
24	Sulawesi Tengah	17	20	77	119	-	-
25	Sulawesi Selatan	31	32	274	260	-	-
26	Sulawesi Tenggara	18	21	126	134	-	-
27	Gorontalo	15	15	41	32	-	-
28	Maluku	24	18	68	69	-	-
29	Maluku Utara	8	18	37	58	-	-
30	Papua	21	28	129	135	-	-
31	Kep. Riau	15	16	46	48	-	-
32	Papua Barat	9	16	64	69	-	-
33	Sulawesi Barat	14	14	58	48	-	-
34	BPS Pusat	158	148	8	16	-	-
Jumlah		905	962	6.568	7.193	12	15

Sumber : Biro Umum

Lampiran 4

DAYA SERAP ANGGARAN 054 BPS PUSAT DAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 REALISASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2008

(Dalam Ribuan Rupiah)

No. Urut	Kode/Satuan Kerja	Program PSPAN (01.01.017)			Program PKyB (01.01.019)		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PUSAT	119.498.110,75	118.042.239,77	98,78	99.449.523,90	76.405.453,92	76,83
2	Nanggroe Aceh Darussalam	8.292.000,00	10.791.806,30	130,15	17.324.641,00	16.586.198,80	95,74
3	Sumatera Utara	3.822.180,00	3.799.224,80	99,40	28.805.879,00	40.989.045,40	142,29
4	Sumatera Barat	6.062.800,00	6.811.997,80	112,36	19.240.770,00	16.834.931,50	87,50
5	Riau	5.582.000,00	5.220.681,60	93,53	12.678.779,00	12.707.536,70	100,23
6	Jambi	3.502.199,30	3.228.312,00	92,18	12.048.499,00	11.201.961,30	92,97
7	Sumatera Selatan	5.094.050,00	5.175.675,70	101,60	16.330.431,00	14.302.425,60	87,58
8	Bengkulu	3.801.000,00	3.835.726,20	100,91	10.626.876,00	7.935.369,40	74,67
9	Lampung	5.294.950,00	4.566.558,80	86,24	15.742.350,00	13.616.966,10	86,50
10	Kepulauan Bangka Belitung	6.667.000,00	6.677.512,60	100,16	6.900.570,00	5.627.870,10	81,56
11	Kepulauan Riau	3.771.000,00	2.964.172,00	78,60	6.015.983,00	4.750.749,00	78,97
12	DKI Jakarta	1.625.000,00	1.415.350,50	87,10	11.836.155,00	10.127.073,00	85,56
13	Jawa Barat	5.377.700,00	6.381.881,20	118,67	37.163.324,00	33.975.774,30	91,42
14	Jawa Tengah	7.421.200,00	7.332.586,70	98,81	48.190.240,00	45.520.048,60	94,46
15	DI Yogyakarta	3.550.500,00	3.551.646,60	100,03	11.043.344,00	9.782.169,20	88,58
16	Jawa Timur	6.843.200,00	11.569.935,40	169,07	55.899.173,00	48.899.148,30	87,48
17	Banten	2.662.000,00	2.619.166,10	98,39	9.929.903,00	9.338.305,10	94,04
18	Bali	1.607.940,00	1.637.089,90	101,81	11.458.441,00	10.899.520,90	95,12
19	Nusa Tenggara Barat	3.404.000,00	4.355.981,70	127,97	12.709.624,00	11.526.734,00	90,69
20	Nusa Tenggara Timur	2.795.500,00	2.581.629,90	92,35	18.957.516,00	17.644.652,60	93,07
21	Kalimantan Barat	3.570.400,00	3.948.938,00	110,60	14.754.524,00	13.922.679,70	94,36
22	Kalimantan Tengah	5.158.000,00	5.090.907,20	98,70	13.175.782,00	11.351.083,20	86,15
23	Kalimantan Selatan	3.774.300,00	3.651.107,60	96,74	15.439.325,00	14.678.354,90	95,07
24	Kalimantan Timur	3.551.551,00	3.312.203,10	93,26	16.960.339,00	13.188.796,00	77,76
25	Sulawesi Utara	3.487.000,00	3.542.191,00	101,58	12.199.391,00	11.230.857,50	92,06
26	Sulawesi Tengah	2.700.556,00	2.647.475,60	98,03	11.858.047,00	9.784.124,60	82,51
27	Sulawesi Selatan	5.183.800,00	5.082.644,30	98,05	24.209.136,80	22.364.806,40	92,38
28	Sulawesi Tenggara	2.908.000,00	2.883.622,00	99,16	10.755.439,00	9.937.792,30	92,40
29	Gorontalo	2.269.100,00	2.304.340,60	101,55	6.234.209,00	5.205.689,10	83,50
30	Sulawesi Barat	4.668.160,00	5.388.705,60	115,44	6.249.094,00	4.918.496,30	78,71
31	Maluku	4.826.000,00	4.787.443,20	99,20	8.201.293,00	7.227.845,10	88,13
32	Maluku Utara	7.466.000,00	7.127.476,90	95,47	8.818.691,00	5.620.682,70	63,74
33	Papua Barat	9.358.715,00	11.435.820,80	122,19	10.524.170,00	7.914.809,90	75,21
34	Papua	8.786.000,00	9.131.835,90	103,94	16.749.996,00	14.970.873,20	89,38
	PUSAT	119.498.110,75	118.042.239,77	98,78	99.449.523,90	76.405.453,92	76,83
	DAERAH	154.883.801,30	164.851.647,60	106,44	539.031.934,80	494.583.370,80	91,75
	PUSAT + DAERAH	274.381.912,05	282.893.887,37	103,10	638.481.458,70	570.988.824,72	89,43

Sumber: Bagian Akuntansi

Lampiran 4 (lanjutan)

**DAYA SERAP ANGGARAN 054 BPS PUSAT DAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008
REALISASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2008**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No. Urut	Kode/Satuan Kerja	Program P2S (01.01.027)			Program PK (01.05.01)		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	PUSAT	138.663.741,00	127.659.816,83	92,06	10.263.400,00	9.289.423,52	90,51
2	Nanggroe Aceh Darussalam	14.081.200,00	13.309.076,50	94,52	-	-	-
3	Sumatera Utara	18.546.164,00	21.373.124,40	115,24	-	-	-
4	Sumatera Barat	11.723.292,00	11.400.691,20	97,25	-	-	-
5	Riau	8.397.421,00	8.170.202,80	97,29	-	-	-
6	Jambi	6.921.084,00	6.843.784,30	98,88	-	-	-
7	Sumatera Selatan	10.203.970,00	10.111.584,00	99,09	-	-	-
8	Bengkulu	5.620.210,00	5.499.607,30	97,85	-	-	-
9	Lampung	8.077.647,00	7.779.725,70	96,31	-	-	-
10	Kepulauan Bangka Belitung	4.318.231,00	4.014.598,10	92,97	-	-	-
11	Kepulauan Riau	5.793.194,00	4.972.581,70	85,83	-	-	-
12	DKI Jakarta	9.545.907,00	9.228.567,90	96,68	-	-	-
13	Jawa Barat	25.152.343,00	25.188.865,00	100,15	-	-	-
14	Jawa Tengah	26.970.743,00	25.977.732,00	96,32	-	-	-
15	DI Yogyakarta	4.971.544,00	4.639.993,50	93,33	-	-	-
16	Jawa Timur	33.219.027,00	33.570.513,60	101,06	-	-	-
17	Banten	6.695.982,00	6.468.255,30	96,60	-	-	-
18	Bali	7.974.816,00	7.535.695,40	94,49	-	-	-
19	Nusa Tenggara Barat	6.936.696,00	6.909.223,00	99,60	-	-	-
20	Nusa Tenggara Timur	14.608.748,00	14.086.583,80	96,43	-	-	-
21	Kalimantan Barat	9.376.184,00	9.284.040,50	99,02	-	-	-
22	Kalimantan Tengah	9.520.758,00	8.884.424,70	93,32	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	8.722.371,00	8.432.477,20	96,68	-	-	-
24	Kalimantan Timur	10.561.039,00	9.774.147,10	92,55	-	-	-
25	Sulawesi Utara	7.619.587,00	8.582.882,90	112,64	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	7.272.389,00	7.244.198,60	99,61	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	15.759.242,00	15.684.316,70	99,52	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	8.259.886,00	7.997.670,00	96,83	-	-	-
29	Gorontalo	4.194.933,00	4.121.154,90	98,24	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.729.246,00	3.634.307,90	97,45	-	-	-
31	Maluku	6.644.459,00	6.287.229,00	94,62	-	-	-
32	Maluku Utara	4.834.508,00	6.209.166,30	128,43	-	-	-
33	Papua Barat	8.050.462,00	8.013.883,90	99,55	-	-	-
34	Papua	18.316.745,00	17.560.976,00	95,87	-	-	-
PUSAT		138.663.741,00	127.659.816,83	92,06	10.263.400	9.289.424	90,51
DAERAH		352.620.028,00	348.791.281,20	98,91	-	-	-
PUSAT + DAERAH		491.283.769,00	476.451.098,03	96,98	10.263.400	9.289.424	90,51

Sumber: Bagian Akuntansi

Lampiran 4 (lanjutan)

**DAYA SERAP ANGGARAN 054 BPS PUSAT DAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008
REALISASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2008**

(Dalam Ribuan Rupiah)				
No. Urut	Kode/Satuan Kerja	Jumlah (PSPAN+PKyB+P2S+PK)		%
		Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)
1	PUSAT	367.874.775,65	331.351.303,71	90,07
2	Nanggroe Aceh Darussalam	39.697.841,00	40.687.081,50	102,49
3	Sumatera Utara	51.174.223,00	66.161.394,70	129,29
4	Sumatera Barat	37.026.862,00	35.047.620,50	94,65
5	Riau	26.658.200,00	26.098.421,10	97,90
6	Jambi	22.471.782,30	21.274.057,60	94,67
7	Sumatera Selatan	31.628.451,00	29.589.685,40	93,55
8	Bengkulu	20.048.086,00	17.270.702,90	86,15
9	Lampung	29.114.947,00	25.963.250,60	89,17
10	Kepulauan Bangka Belitung	17.885.801,00	16.319.980,70	91,25
11	Kepulauan Riau	15.580.177,00	12.687.502,70	81,43
12	DKI Jakarta	23.007.062,00	20.770.991,40	90,28
13	Jawa Barat	67.693.367,00	65.546.520,50	96,83
14	Jawa Tengah	82.582.183,00	78.830.367,30	95,46
15	DI Yogyakarta	19.565.388,00	17.973.809,20	91,87
16	Jawa Timur	95.961.400,00	94.039.597,30	98,00
17	Banten	19.287.885,00	18.425.726,50	95,53
18	Bali	21.041.197,00	20.072.306,20	95,40
19	Nusa Tenggara Barat	23.050.320,00	22.791.938,70	98,88
20	Nusa Tenggara Timur	36.361.764,00	34.312.866,30	94,37
21	Kalimantan Barat	27.701.108,00	27.155.658,20	98,03
22	Kalimantan Tengah	27.854.540,00	25.326.415,10	90,92
23	Kalimantan Selatan	27.935.996,00	26.761.939,70	95,80
24	Kalimantan Timur	31.072.929,00	26.275.146,10	84,56
25	Sulawesi Utara	23.305.978,00	23.355.931,50	100,21
26	Sulawesi Tengah	21.830.992,00	19.675.798,80	90,13
27	Sulawesi Selatan	45.152.178,80	43.131.767,40	95,53
28	Sulawesi Tenggara	21.923.325,00	20.819.084,30	94,96
29	Gorontalo	12.698.242,00	11.631.184,60	91,60
30	Sulawesi Barat	14.646.500,00	13.941.509,80	95,19
31	Maluku	19.671.752,00	18.302.517,30	93,04
32	Maluku Utara	21.119.199,00	18.957.325,90	89,76
33	Papua Barat	27.933.347,00	27.364.514,50	97,96
34	Papua	43.852.741,00	41.663.685,00	95,01
PUSAT		367.874.775,65	331.351.303,71	90,07
DAERAH		1.046.535.764,10	1.008.226.299,30	96,34
PUSAT + DAERAH		1.414.410.539,75	1.339.577.603,01	94,71

Sumber: Bagian Akuntansi

Kerjasama dalam Negeri yang sudah Dilakukan oleh BPS Tahun 2008

Bidang Kerjasama	Lembaga	Nomor MoU	Tanggal
(1)	(2)	(3)	
1. Pendidikan, riset dan pengembangan di bidang statistik, Sosialisasi statistik dan Akses data statistik	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor : 01/KS/19-III/2008	19 Maret 2008
2. Kajian Profil Komoditas Unggulan Indonesia	Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB	Nomor : 02/KS/19-III/2008	19 Maret 2008
3. 1. Menyediakan dan Pertukaran Data Statistik anak baik data primer maupun data sekunder; 2. Melakukan sosialisasi data statistik anak; 3. Membangun data base data statistik anak dan Sistem Informasi Geografis untuk diseminasi data Statistik anak; dan 4. Melaksanakan survei-survei khusus untuk dasar kebijakan perlindungan anak	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Nomor : 03/KS/21-IV/2008	21 Maret 2008
4. 1. Penyediaan data Penginderaan jarak jauh satelit untuk mendukung pembuatan informasi statistik spasial; 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penginderaan jauh satelit; 3. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh satelit untuk pembuatan informasi statistik spasial sesuai dengan kebutuhan Badan Pusat Statistik dan 4. Pertukaran ilmu Pengetahuan dan tenaga ahli	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	Nomor : 04/KS/5-V/2008	05 Mei 2008
5. Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana (S2) mayor Ilmu Ekonomi	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor : 05/KS/13-VI/2008	13 Juni 2008
6. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXII Kelas F Tahun 2008 di LAN	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SPIMNAS Bidang Kepemimpinan LAN Jakarta	Nomor : 06/KS/16-VI/2008	19 Maret 2008
7. Berita Acara Tentang Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2008 di LAN	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SPIMNAS Bidang Kepemimpinan LAN Jakarta	Nomor : 07/KS/16-V1/2008	16 Juni 2008

Lampiran 5 (lanjutan)

Kerjasama dalam Negeri yang sudah Dilakukan oleh BPS Tahun 2008

Bidang Kerjasama	Lembaga	Nomor MoU	Tanggal
(1)	(2)	(3)	
8. Berita Acara Serah Terima 3 Orang Pejabat BPS Untuk Mengikuti Program Diklat Kepemimpinan XXII	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SPIMNAS Bidang Kepemimpinan LAN Jakarta	Nomor : 08/KS/16-VI/2008	16 Juni 2008
9. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXIII Kelas A Tahun 2008 di LAN	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SPIMNAS Bidang Kepemimpinan LAN Jakarta	Nomor : 09/KS/01-VII/2008	01 Juli 2008
10. Berita Acara Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2008	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SPIMNAS Bidang Kepemimpinan LAN Jakarta	Nomor : 10/KS/01-VII/2008	01 Juli 2008
11. Berita Acara Serah Terima 1 Orang Pejabat BPS Untuk Mengikuti Program Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIII Kelas A	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SPIMNAS Bidang Kepemimpinan LAN Jakarta	Nomor : 11/KS/01-VII/2008	01 Juli 2008
12. Penyelenggaraan Magister S2 Program Studi Statistika	Dir. Stat. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS dengan Dekan fakultas Matematika dan ilmu pengetahuan alam, ITS	Nomor : 12/KS/17-VII/2008	17 Juli 2008
13. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIII Kelas C Tahun 2008 di LAN Makasar	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II-LAN Makasar	Nomor : 13/KS/15-VII/2008	15 Juli 2008
14. Berita Acara Serah Terima 1 Orang Pejabat untuk Mengikuti Program Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIII Kelas C Tahun 2008	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II-LAN Makasar	Nomor : 14/KS/15-VII/2008	15 Juli 2008
15. Berita Acara Serah Terima 3 Orang Pejabat BPS Untuk Mengikuti Program Diklat Kepemimpinan XXII	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II-LAN Makasar	Nomor : 15/KS/15-VII/2008	15 Juli 2008

Kerjasama dalam Negeri yang sudah Dilakukan oleh BPS Tahun 2008

Bidang Kerjasama	Lembaga	Nomor MoU	Tanggal
(1)	(2)	(3)	
15. Berita Acara Serah Terima 3 Orang Pejabat BPS Untuk Mengikuti Program Diklat Kepemimpinan XXI	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II-LAN Makasar	Nomor : 15/KS/15-VII/2008	15 Juli 2008
16. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXII Kelas D Tahun 2008 di LAN Bandung	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I-LAN Bandung	Nomor : 16/KS/12-VIII /2008	12 Agustus 2008
17. Berita Acara Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIII Kelas D Tahun 2008	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I-LAN Bandung	Nomor : 17/KS/12-VIII/2008	12 Agustus 2008
18. Berita Acara Serah Terima 1 Orang Pejabat BPS Untuk Mengikuti Program Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIII Kelas D Tahun 2008	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SPIMNAS Bidang Kepemimpinan LAN Jakarta	Nomor : 18/KS/12-VIII/2008	12 Agustus 2008
19. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Kepala Bidang Diklatpim Badan Diklat Propinsi Jawa Timur	Nomor : 19/KS/28/VIII/2008	28 Agustus 2008
20. Berita Acara Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Kepala Bidang Diklatpim Badan Diklat Propinsi Jawa Timur	Nomor : 20/KS/28-VIII/2008	28 Agustus 2008
21. Berita Acara Serah Terima Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Kepala Bidang Diklatpim Badan Diklat Propinsi Jawa Timur	Nomor : 21/KS/28-VIII/2008	28 Agustus 2008
22. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Kepala Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan	Nomor : 22/KS/13-X/20	13 Oktober 2008
23. Berita Acara Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Kepala Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan	Nomor : 23/KS/13-X/2008	13 Oktober 2008

Lampiran 5 (lanjutan)

Kerjasama dalam Negeri yang sudah Dilakukan oleh BPS Tahun 2008

Bidang Kerjasama	Lembaga	Nomor MoU	Tanggal
(1)	(2)	(3)	
24. Berita Acara Serah Terima Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Kepala Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan	Nomor : 24/KS/13-X/2008	13 Oktober 2008
25. Perjanjian Kontrak Kerjasama BPS dengan Program Pascasarjana Universitas Indonesia	Universitas Indonesia	Nomor : 25/KS/25-VIII/2008	25 Agustus 2008
26. 1. Menyediakan Data yang Akurat Mengenai Jumlah Wisatawan Nusantara yang Melakukan Perjalanan Menurut Karakteristik Demografi Maupun Karakteristik Perjalanan 2. Menyediakan Data Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara Selama Melakukan Perjalanan	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	Nomor : 26/KS/1-VII/2008	01 Juli 2008
27. Berita Acara Serah Terima Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Kepala Bidang Diklatpim Badan Diklat Propinsi Jawa Timur	Nomor : 21/KS/28-VIII/2008	28 Agustus 2008
28. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Kepala Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan	Nomor : 22/KS/13-X/20	13 Oktober 2008
29. Berita Acara Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Kepala Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan	Nomor : 23/KS/13-X/2008	13 Oktober 2008
30. Berita Acara Serah Terima Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Kepala Biro Kepegawaian BPS dengan Kepala Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan	Nomor : 24/KS/13-X/2008	13 Oktober 2008
31. Perjanjian Kerjasama Dirjen Bea dan Cukai, BI dan BPS	Dirjen Bea dan Cukai dan BI	Nomor : 31/KS/20-XI/2008	20 Nopember 2008
32. Pedoman Pelaksanaan Pertukaran Data Kepabeanaan Dirjen Bea dan Cukai, Bank Indonesia dan BPS	Dirjen Bea dan Cukai dan BI	Nomor : 32/KS/20-XI/2008	20 Nopember 2008
33. Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Parkir	Dana Pensiun PUSRI	Nomor : 33/KS/18-XI/2008	18 Nopember 2008
34. Sewa Menyewa Ruangan Kantor dan Tanah BPS	BRI	Nomor : 34/KS/2-VI/2008	02 Juni 2008

Kunjungan Kemitraan (Tamu Asing) Tahun 2008

NO.	Instansi/Negara	Tujuan Kunjungan	Waktu	Jumlah
1.	Australian Bureau of Statistics (ABS)	Study banding mengenai <i>sampling phase of labour force</i>	21-25 April 2008	3 orang
2.	Kantor Statistik di Negara Asia dan Pasific	Menghadiri <i>4th Course Poverty Measurement</i>	6-16 Mei 2008	22 orang
3.	World Bank	Diskusi mengenai STATCAP	26 Mei-6 Juni 2008	6 orang
4.	Asian Institute of Technology, Thailand	<i>Comparative Study Poverty Mapping Project</i>	27-Mei-08	3 Orang
5.	Bangladesh (Tamu Universitas Negeri Jakarta)	Studi banding	4 Juli 2008	20 orang
6.	Marokko (Tamu Bappenas)	Studi banding mengenai program bantuan sosial di Indonesia (PKH)	7-11 Juli 2008	12 orang
7.	Etopia	Tamu BKKBN	31 Juli 2008	3 orang
8.	National Statistics Office of Laos PDR	Studi banding mengenai <i>information technology</i>	25-29 Sep 2008	6 orang
9.	NSO Cambodia	Study banding mengenai <i>industrial statistics</i>	14-21 Sep'08	4 orang termasuk Team Leader
10.	ABS Australia	Studi banding <i>information technology</i>	6-10 Okt'08	2 orang
11.	GSO Vietnam	<i>Management Local Office, National Account, and Data Warehouse</i>	8-12 Des 08	8 orang
12.	United Nations Statistics Division	Diskusi mengenai perkembangan statistik terkini	15-16 Des 2008	1 orang

Lampiran 7

Pegawai BPS yang Bertugas ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2008

No.	Nama/NIP	Kegiatan	Waktu	Negara	Sponsor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Abdul Azys / 340006632	Study Visit to Learn Contemporary Census Technology Use in South Africa	16-23 Agustus 2008	Afrika Selatan	UNFPA
2	Abdul Ghofar, S.Si / 340011698	Workshop on Census and Survey Microdata Dissemination : Benefits and Challenges	18-20 Juni 2008	Thailand	ESCAP
3	Abdul Rachman, Drs, SE / 340005344	Capacity Building Study	14 s.d 18 Juli 2008	India	APBN
4	Agoes Soebeno, Ir / 340010098	Workshop on Managing Disclosure Risk and Anonymization Tools for Microdata Dissemination	28-30 Mei 2008	Thailand	ESCAP
5	Agus Suherman, M.Sc / 340005391	2nd Second Meeting of the ASEAN Senior Economic Officials for the thirty Ninth	10 s.d 14 Maret 2008	Cambodia	APBN
6	Agus Suherman, M.Sc / 340005391	Fourth Session of the Governing Council of the Statistical Institute for Asia and the Pacific dilanjutkan 12th Meeting of Heads of National Statistics Offices of East Asian Countries	11 s.d 14 November 2008	Jepang	APBN/ Statistics Bureau of Japan
7	Ahmad Azhari / 340012550	CSPRO Training	31 Maret s.d 11 April 2008	Thailand	UNFPA
8	Ahmad Muhammad Saleh/ 340014756	Second Regional Course on Disability and Health Statistics	22 s/d 26 September 2008	Korea	SIAP
10	Ali Rosidi, Dr / 340004372	International Comparison Program for Asia and The Pacific Workshop on The Harmonization of ICP and CPI	16 s.d 18 Januari 2008	India	ADB
11	Ali Rosidi, Dr / 340004372	ASEAN-ROK Forum for Statistical Development	4-6 November 2008	Korea	KNSO
12	Ano Herwana, SE / 340010085	Conference on Climate Change and Official Statistics	10 s.d 13 Maret 2008	Korea	UNSD
13	Ardief Achmad, Drs, MM / 340004003	Evaluation of FAO's Work in Statistics-Regional	8-10 Mei 2008	Thailand	FAO
14	Arie Sukarya, M.Comm / 340008774	Capacity Building Study	17-21 Juni 2008	Thailand	APBN

Pegawai BPS yang Bertugas ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2008

No.	Nama/NIP	Kegiatan	Waktu	Negara	Sponsor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Arizal Ahnaf, MA / 340004376	<i>Discussion and Fact Finding Related to The ongoing Collaboration on Demographic Data for Development</i>	15 s.d 19 Juli 2008	Australia	ADSRI
16	Arizal Ahnaf, MA / 340005051	<i>RETA 6430- Measuring the Informal Sector Inception and Planning Workshop</i>	20-23 Mei 2008	Philipina	ADB
17	Bahtiar / 340013002	<i>CSPro Training</i>	31 Maret s.d 11 April 2008	Thailand	UNFPA
18	Bambang Heru Santosa, Dr / 340008762	<i>Twenty Second Session of The Asia and Pacific Commission on Agricultural Statistics Meeting</i>	9-13 Juni 2008	Malaysia	APBN
19	Bana Bodri, MA / 340008771	<i>Workshop on Managing Disclosure Risk and Anonymization Tools for Microdata Dissemination</i>	28-30 Mei 2008	Thailand	ESCAP
20	Bona Ventura Hardi Sihotang / 340016055	<i>Fourth Group Training Course in Modules on Fundamental Official Statistics</i>	23 September 2008 s/d 14 Maret 2009	JEPANG	SIAP
21	Bonivasius P. Ichtiarto / 340012666	<i>Capacity Building Study</i>	17-21 Juni 2008	Thailand	APBN
22	Bonivasius Praserya Ichtiarto, Dr / 340012666	<i>Seventh Research-based Regional Course</i>	30 Juni-8 Agustus 2008	Korea	SIAP
23	Dian Yulia Pradiani / 340015700	<i>Fourth Group Training Course in Application of Information and Communication Technology to Production and Dissemination of Official Statistics</i>	7 Mei-12 Juli 2008	Jepang	SIAP
24	Dr. Sasmito Hadi Wibowo / 340007677	<i>ASEAN Working Group on Foreign Direct Investment Statistics and Head of ASEAN National Statistica Offices</i>	28 sd. 29 April 2008	Brunei Darussalam	ASEAN Sec.
25	Eni Lestariningsih, MA / 340014346	<i>Capacity Building Study</i>	14 s.d 18 Juli 2008	India	APBN
26	Erisman / 340011694	<i>Joint Workshop on Improvement in Statistics and Forecasting for Rubber Industry</i>	29 s.d 30 Januari 2008	Malaysia	APBN
27	Hadi Susanto, MA / 340013332	<i>Capacity Building: Seminar Workshop on the Measurement of International Trade in Service</i>	1 s.d.3 Oktober 2008	Philipina	APEC

Lampiran 7 (lanjutan)

Pegawai BPS yang Bertugas ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2008

No.	Nama/NIP	Kegiatan	Waktu	Negara	Sponsor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	Hamonangan Ritongan, Dr / 340007731	RETA 6430- <i>Measuring the Informal Sector Inception and Planning Workshop</i>	20-23 Mei 2008	Philipina	ADB	
29	Hasyim Gautama, Dr / 340013615	<i>Workshop on Census and Survey Microdata Dissemination: Benefits and Challenges</i>	18-20 Juni 2008	Thailand	ESCAP	
30	Herhadana, S.Si / 340012661	<i>Training Course on Statistics Practice</i>	13-29 Mei 2008	Korea	KOICA	
31	Ichwan Ridwan Tandjung / 340006563	<i>UN Regional Workshop on Census Management and Data Processing Contemporary Technologies for Census Data Capture, Data Editing and Documentation</i>	15 s.d.19 September 2008	Thailand	UNDP	
32	Indra Surbakti / 340012022	<i>An Overview of Badan Pusat Statistik and its Statistical Data on Indonesia</i>	1 s.d 7 Mei 2008	USA	Cornell University	
33	Jeffry Raja Hamonangan S. / 340011836	<i>Capacity Building Study</i>	17-21 Juni 2008	Thailand	APBN	
34	Johanes Bambang Kristianto / 340005953	<i>Eighteenth International Conference of Labour Statisticians</i>	24 November s.d. 5 Desember 2008	Swiss	World Bank	
35	Johanes De Britto Priyono / 340010874	<i>Workshop on International Economic and Social Slassifications</i>	24 s.d 27 November 2008	Thailand	UNSD	
36	Katiti Wulansari, M.Comm / 340012496	<i>Capacity Building Study</i>	7 s.d 11 Juli 008	China	APBN	
37	Krismawati, MA / 340011812	<i>Asia Regional Training Course on Child Labour Data Collection through Baseline Surveys and Rapid Assessments</i>	22 s.d.26 September 2008	Jepang	ILO	
38	Krismawati, MA / 340011812	<i>RETA 6430- Small Workshop on Designing Indonesia's Questionnaire on the Informal Sector</i>	20 s.d 21 November 2008	Philipina	ADB	
39	Kusriyawanto, Ir / 340013838	<i>Training Course on Statistics Practice</i>	13-29 Mei 2008	Korea	KOICA	
40	Lukman Ismail, MA / 340004379	<i>7th Management Seminar for Heads of National Statistical Offices in Asia and the Pacific dan International Association for Official Statisticians (IAOS) Conference on Reshaping Official Statistics</i>	13 s.d 16 Oktober 2008	China	APBN	
41	M. Sairi, MA / 340008778	<i>Capacity Building Study Departemen of Statistis Malaysia</i>	9 s.d.10 Desember 2008	Malaysia	APBN	

Pegawai BPS yang Bertugas ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2008

No.	Nama/NIP	N a m a	Kegiatan	Waktu	Negara	Sponsor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42	Mimik Nurjanti, S.Si / 340014474		<i>Training Course on Capacity Building in Poverty Mapping Phase I</i>	20 Oktober s.d. 7 November 2008	Thailand	ASEAN Foundation
43	Mimin Karmiati, M.Si / 340012007		<i>Capacity Building Study</i>	14 s.d 18 Juli 2008	India	APBN
44	Mohammad Irkham, S.Si / 340012747		<i>Second Regional Course on Intergrated Economic Accounts</i>	26 Mei-13 Juni 2008	Philipina	ESCAP/SIAP
45	Mudjiandoko, Dr / 340004369		<i>Conference on Climate Change and Official Statistics</i>	14 s.d 16 April 2008	Norwegia	UNSD
46	Mudjiandoko, Dr / 340004369		<i>the East Asia Meeting of Manufacturing Statistics 2nd Year Pilot Study 1st Workshop</i>	1 s.d.3 Oktober 2008	VIETNAM	EAMS Secretariat
47	Mudjiandoko, Dr / 340004369		<i>International Workshop on Energy Statistics</i>	2 s.d 5 Desember 2008	Meksiko	UNSD
48	Muhardi Kahar / 340015150		<i>Thirteenth Course Workshop on Sample Design for Design for</i>	19 April s.d 7 Mei 2008	Iran	SIAP
49	Nurma Midayanti / 340012030		<i>Training Course on Impact Assessment of Anti-Poverty Programs : Focus on Technology and Capacity Development</i>	24 s.d 28 Maret 2008	Philipina	SEARCA
50	Pietojo, Dr / 34003653		<i>3rd Meeting of EAMS and the 7th Meeting of AMEICC Working Group on Statistics</i>	28-30 Mei 2008	China	EAMS
51	Pietojo, Dr / 340003653		<i>Statistics Seminar</i>	24 s.d 25 Maret 2008	Malaysia	EAMS
52	Purwanto Ruslam / 340008759		<i>Study Visit to Learn Contemporary Census Technology Use in South Africa</i>	16 s/d Agustus 2008	Afrika Selatan	UNFPA
53	Rina Dwi Sulastris, M.Sc / 131653136		<i>Capacity Building Study</i>	7 s.d 11 Juli 008	China	APBN
54	Rini Savitridina, MA / 340010880		<i>Demographic and Health Surveys Program</i>	1 s.d. 5 November 2008	USA	MACRO
55	Rusman Heriawan, Dr / 340003999		<i>7th Management Seminar for Heads of National Statistical Offices in Asia and the Pacific dan International Association for Official Statisticians (IAOS) Conference on Reshaping Official Statistics</i>	13 s.d 16 Oktober 2008	China	SIAP/APBN
56	Rusman Heriawan, Dr / 340003999		<i>Thirty Ninth Session of the United Nations Statistical Commission and Related Special Events</i>	22 s.d 29 Februari 2008	USA	UNSD

Lampiran 7 (lanjutan)

Pegawai BPS yang Bertugas ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2008

No.	Nama/NIP	Kegiatan	Waktu	Negara	Sponsor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57	Rusman Heriawan, Dr / 340003999	<i>Fourth Session of the Governing Council of the Statistical Institute for Asia and the Pacific dilanjutkan 12th Meeting of Heads of National Statistics Offices of East Asian Countries</i>	11 s.d 14 November 2008	Jepang	APBN
58	Rusman Heriawan, Dr / 340003999	<i>Workshop on Developing Tourism and the Tourism Satellite Accounts</i>	20 s.d.22 Oktober 2008	PHILIPINA	APBN/BUDPAR
59	Sagap Aliktipi, Msi / 340013748	<i>the East Asia Meeting of Manufacturing Statistics 2nd Year Pilot Study 1st Workshop</i>	1 s.d.3 Oktober 2008	VIETNAM	EAMS Secretariat
60	Said Mirza pahlevi, Dr / 340012019	<i>a guest researcher to the Service-ware research group of the information technology research institute</i>	21 September 2008 s/d 2 Oktober 2008	Jepang	AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
61	Sairi Hasbullah, MA / 340008778	<i>Capacity Building Study</i>	14 s.d 18 Juli 2008	India	APBN
62	Sasmito Hadi Wibowo, Dr / 340007677	<i>Workshop on Developing Tourism and the Tourism Satellite Accounts</i>	19 s.d.23 Oktober 2008	PHILIPINA	APBN
63	Satwiko Darmesto, Dr / 340004370	<i>Fourth Session of the Governing Council of the Statistical Institute for Asia and the Pacific dilanjutkan 12th Meeting of Heads of National Statistics Offices of East Asian Countries</i>	11 s.d 14 November 2008	Jepang	APBN
64	Sihar Lumbantobing, Dr / 340004376	<i>Discussion and Fact Finding Related to The onging Collaboration on Demographic Data for Development</i>	15 s.d 19 Juli 2008	Australia	ADSRI
65	Sihar Lumbantobing, Dr / 340004376	<i>UNCTAD Expert Group Meeting on the Manual for the Production of Statistics on the Information Economy and Global Event Measuring the Information Society</i>	26-29 Mei 2008	Swiss	UNCTAD
66	Slamet Sutomo, Dr / 340004005	<i>ASEAN Workshop on the System of National Accounts</i>	16 s.d.17 Oktober 2008	Philipina	APBN
67	Sri Soelistiyowati / 340010722	<i>Course on national Accounts Statistics</i>	5 Mei s.d 6 Juni 2008	USA	IMF

Pegawai BPS yang Bertugas ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2008

No.	Nama/NIP	Kegiatan	Waktu	Negara	Sponsor
(1)	(2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68	Sri Soelistyowati, MA / 340010722	<i>Capacity Building Seminar Workshop on the Measurement of International Trade in Service</i>	1 s.d.3 Oktober 2008	Philipina	APEC
69	Subagio Dw., Dr / 340004387	<i>Capacity Building Study</i>	7 s.d 11 Juli 008	China	APBN
70	Subagio Dw., Dr / 340004387	<i>ASEAN-ROK Forum for Statistical Development</i>	4 s.d 6 November 2008	Korea	KNSO
71	Suhariyanto, Dr / 340010723	<i>Regional Workshop under the Regional Study Project on Poverty Reduction and Social Development in ASEAN</i>	28 s.d. 29 April 2008	Thailand	ASEAN-REPSF
72	Supriyanto, MA / 340004366	<i>Spesial Session on SME & Entrepreneurship Statistics of the OECD Working Party on SMEs & Entrepreneurship</i>	27-29 Oktober 2008	Perancis	OECD
73	Supriyanto, MA / 340004366	<i>RETA 6430- Measuring the Informal Sector Inception and Planning Workshop</i>	20-23 Mei 2008	Philipina	ADB
74	Suradi /340012549	<i>Capacity Building Study</i>	17-21 Juni 2008	Thailand	APBN
75	Suryadiningrat, SE, MM / 340013752	<i>Compilation and use of the 2005 International Input- Output Tables</i>	14 s.d 19 Desember 2008	Jepang	IDE
76	Suryamin, Dr / 340006565	<i>Statistics Seminar</i>	6 s.d 7 Maret 2008	Malaysia	EAMS
77	Suti Wardani / 340016830	<i>Fourth Group Training Course in Application of Information and Communication Technology to Production and Dissemination of Official Statistics</i>	7 Mei-12 Juli 2008	Jepang	SIAP
78	Syafi'l Nur, D / 340011302	<i>Training Course on Capacity Building in Poverty Mapping Phase I</i>	20 Oktober s.d. 7 November 2008	Thailand	ASEAN Foundation
79	Teguh Pramono, MA / 340010073	<i>The Seventh East Asia Poverty Analysis and Data Initiative (PADI)</i>	9-12 Juni 2008	Malaysia	Pemerintah Malaysia
80	Tiodora Hadumaon Siagian / 340013015	<i>Short term Visit Research visit on Developing Vulnerability</i>	1 Feb s.d 15 Maret 2008	Jerman	UNU-EHS
81	Tiodora Hadumaon Siagian / 340013015	<i>Fifth Meeting of the Expert Working Group on Measuring Vulnerability (EWG V)</i>	14 s/d 16 September 2008	Vietnam	UNU-EHS
82	Togi Siahaan / 340010721	<i>Orientation Worksop on Global Adult Tobacco Survey Implementating Agencies in South East Asia Region</i>	13 s.d 17 April 2008	Bangladesh	WHO

Lampiran 7 (lanjutan)

Pegawai BPS yang Bertugas ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2008

No.	Nama/NIP	Kegiatan	Waktu	Negara	Sponsor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83	Togi Siahaan / 340010721	Orientation Worksop on Global Adult Tobacco Survey Implementating Agencies in South East Asia Region	13-17 Mei 2008	Bangladesh	WHO	
84	Tri Supriati, Mstat / 340010069	the East Asia Meeting of Manufacturing Statistics 2nd Year Pilot Study 1st Workshop	7 s.d 8 Januari 2009	Philipina	EAMS	
85	Uzair Suhaimi / 34008760	Asia tripartite Regional Meeting to Discuss the Draft Resolution on the Statistics of Child Labour	31 Januari s. d 1 Februari 2008	Philipina	ILO	
86	Uzair Suhaimi / 34008760	Pemantau pada pelaksanaan SP Sudan ke- 5 tahun 2008	22 s.d 30 April 2008	Sudan	APBN	
87	Uzair Suhaimi, MA / 34008760	Study Visit to Learn Contemporary Census Technology Use in South Africa	16 s.d 23 Agustus 2008	Afrika Selatan	UNFPA	
88	Uzair Suhaimi, MA / 34008760	Workshop on the 2010 Census Round in Asia : National Challenges and Regional Collaboration	2-4 Juni 2008	Thailand	ANU	
89	Vera Lisna / 340014726	Training Course on Impact Assessment of Anti-Poverty Programs : Focus on Technology and Capacity Development	24 s.d 28 Maret 2008	Philipina	SEARCA	
90	Vivi Frizalda / 340015950	Fourth Group Training Course in Modules on Fundamental Official Statistics	23 September 2008 s/d 14 Maret 2009	Jepang	SIAP	
91	Wachyu Winarsih, M.Si / 340011684	The Labour Productivity Databook Coordination Meeting	20-23 Mei 2008	Bangladesh	APO	
92	Wahyu Indarto, S.Si / 340013333	Capacity Building Study	7 s.d 11 Juli 008	China	APBN	
93	Waris Marsisno, Dr / 340010901	Program Doktor (perpanjangan) in Economics	1 April 2008 s.d. 14 Januari 2009	Australia,Univ ersity of New South Wales, Sydney	AusAid (ADS Programme)	
94	Wendy Hartanto, Dr / 340007755	Seminar on Population Census: Experience Sharing and Lessons Learn	5-6 Mei 2008	China	UNFPA	

Lampiran 7 (lanjutan)

Pegawai BPS yang Bertugas ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2008

No.	Nama/NIP	N a m a	Kegiatan	Waktu	Negara	Sponsor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
95	Wendy Hartanto, Dr / 340007755		<i>Workshop on the 2010 Census Round in Asia : National Challenges and Regional Collaboration</i>	2-4 Juni 2008	Thailand	ANU
96	Wendy Hartanto, Dr / 340007755		<i>Regional Workshop on Promoting Disability Data Collection through the 2010 Population and Housing Census</i>	8 s.d 10 April 2008	Thailand	ESCAP
97	Wendy Hartanto, Dr / 340007755		<i>Training Workshop Improving National Capacity to Track Maternal and Child Mortality the Attainment of MDGs</i>	22 s.d. 26 September 2008	Thailand	World Bank
98	Wendy Hartanto, Dr / 340007755		<i>Demographic and Health Surveys Program</i>	1 s.d. 5 November 2008	USA	MACRO
99	Wiwiek Arumwaty / 340005384		<i>Sidang Komisi ke-64 ESCAP</i>	24 s.d 30 April 2008	Thailand	APBN
100	Wiwiek Arumwaty / 340005384		<i>Workshop on National Accounts for Asian Member Countries of the Organisation of the Islamic Conference</i>	1 s.d 2 Desember 2008	Turki	SESRTCIC
101	Wynandin Imawan / 340005374		<i>Thirty Ninth Session of the United Nations Statistical Commission</i>	22 s.d 29 Februari 2008	USA	UNFPA
102	Wynandin Imawan / 340005374		<i>Third Social Experts Meeting</i>	19 s.d. 20 November 2008	Korea	OECD
103	Yunita Rusanti, M.Stat / 340010095		<i>The Course on Price Statistics (ST08.14)</i>	6 s.d.17 Agustus 2008	Singapura	Singapore Training Institute

Lampiran 8

Pegawai BPS yang Tugas Belajar ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2008

No.	Nama/NIP	Kegiatan	Waktu	Negara, Universitas	Sponsor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Akhmad Tantowi / 340015304	Master (Double Degree) in Development Economic	Oktober 2008 s/d September 2009	Jepang, Yokohama National University	APBN melalui dana JBIC	
2	Aufarul Faroh / 340015962	Master Degree (Double Degree) in Economic	15Agustus 2008 s.d. 3 September 2009	Belanda, Vrije University, Amsterdam	Stuned Scholarships	
3	Budi Ayu Kusuma Dewi / 340016091	Master (Double Degree) in Development Economic	Oktober 2008 s/d September 2009	Jepang,Hiroshima University	APBN melalui dana JBIC	
4	Fahmi Ali Hasymi Juliansyah / 340016086	Master Degree (Double Degree) in Environmental and Infrastructure Planning	24 Agustus 2008 s.d. 28 Agustus 2009	Belanda, University of Groningen	Stuned Scholarships	
5	Henri Wagiyanto / 340014356	Master (Double Degree) in Development Economic	Oktober 2008 s/d September 2009	Jepang,Ritsumeikan University, Kyoto	APBN melalui dana JBIC	
6	Idyah firtindari / 340016110	Master Degree (Double Degree) in Economic, Planning, and Public Policy	1 Oktober 2008 s.d 30 September 2009	Jepang, National Graduate Institute of Policy Studies	APBN melalui dana JBIC	
7	Imam Machdi / 340012749	Program Doktor in System and Information Engineering	April 2008 s.d Maret 2010	Jepang	Monbukagakusho	
8	Marisa Intan / 340015821	Master Degree (Double Degree) in Economic, Planning, and Public Plicy	1 Oktober 2008 s.d 30 September 2009	Jepang, National Graduate Institute of Policy Studies	APBN melalui dana JBIC	
9	Moh. Hasan Afandi / 340015152	Master Degree (Double Degree) in Economic	1 Oktober 2008 s.d 30 September 2009	Jepang, Hiroshima University	APBN melalui dana JBIC	
10	Peri Gandara / 340015372	Master (Double Degree) in Science and Engineering	1 Oktober 2008 s.d 1 Oktober 2009	Jepang,Yamaguchi University	APBN melalui dana JBIC	
11	Qurratul Aini / 340015140	Master Degree (Double Degree) in Economic	15 Agustus 2008 s.d. 3 September 2009	Belanda, Vrije University, Amsterdam	Stuned Scholarships	
12	Ratna Setyowati / 340015028	Master Degree (Double Degree) in Policy Science/Public Policy	1 Oktober 2008 s.d 30 September 2009	Jepang, Ritsumeikan Univeristy	APBN melalui dana JBIC	

Lampiran 8 (lanjutan)

Pegawai BPS yang Tugas Belajar ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2008

No.	Nama/NIP	Kegiatan	Waktu	Negara, Universitas	Sponsor
(1)	(2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Ratna Setyowati / 340015028	<i>Master Degree (Double Degree) in Policy Science/Public Policy</i>	1 Oktober 2008 s.d 30 September 2009	Jepang, Ritsumeikan Univeristy	APBN melalui dana JBIC
14	Ririn Hidayati / 340015821	<i>Master Degree (Double Degree) in Economic, Planning, and Public Policy</i>	1 Oktober 2008 s.d 30 September 2009	Jepang, National Graduate Institute of Policy Studies	APBN melalui dana JBIC
15	Rocky Gunung Hasudungan / 340015331	<i>Master Degree (Double Degree) in Economic</i>	1 Oktober 2008 s.d 30 September 2009	Jepang, Hiroshima University	APBN melalui dana JBIC
16	Sukarman / 340015051	<i>Master (Double Degree) in Development Economic</i>	Oktober 2008 s/d September 2009	Jepang, Hiroshima University	APBN melalui dana JBIC
17	Suswandi / 340013749	<i>Master Degree (Double Degree) in Economic</i>	1 Oktober 2008 s.d 30 September 2009	Jepang, Hiroshima University	APBN melalui dana JBIC
18	Wahyudin / 340015344	<i>Master (Double Degree) in Economic, Planning and Public Policy</i>	Oktober 2008 s/d September 2009	Jepang, National Graduate for Policy Studies, Tokyo	APBN melalui dana JBIC
19	Widyo Pura Buana / 340015151	<i>Master Degree (Double Degree) in Media and Governance</i>	22 September 2008 s.d 21 September 2009	Jepang, Keio University	APBN melalui JBIC

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2008

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	195,8	763,9	959,7	16,67	26,30	23,53
2.	Sumatera Utara	761,7	852,1	1.613,8	12,85	12,29	12,55
3.	Sumatera Barat	127,3	349,9	477,2	8,30	11,91	10,67
4.	Riau	245,1	321,6	566,7	9,12	12,16	10,63
5.	Jambi	120,1	140,2	260,3	13,28	7,43	9,32
6.	Sumatera Selatan	514,7	734,9	1.249,6	18,87	17,01	17,73
7.	Bengkulu	131,8	220,2	352,0	21,95	19,93	20,64
8.	Lampung	365,6	1.226,0	1.591,6	17,85	22,14	20,98
9.	Bangka Belitung	36,5	50,2	86,7	7,57	9,52	8,58
10.	Kepulauan Riau	69,2	67,1	136,4	8,81	9,60	9,18
11.	DKI Jakarta	379,6	0,0	379,6	4,29		4,29
12.	Jawa Barat	2.617,4	2.705,0	5.322,4	10,88	16,05	13,01
13.	Jawa Tengah	2.556,5	3.633,1	6.189,6	16,34	21,96	19,23
14.	DI Yogyakarta	324,2	292,1	616,3	14,99	24,32	18,32
15.	Jawa Timur	2.310,6	4.340,6	6.651,3	13,15	23,64	18,51
16.	Banten	371,0	445,7	816,7	6,15	11,18	8,15
17.	Bali	115,1	100,7	215,7	5,70	6,81	6,17
18.	NTB	560,4	520,2	1.080,6	29,47	19,73	23,81
19.	NTT	119,3	979,1	1.098,3	15,50	27,88	25,65
20.	Kalimantan Barat	127,5	381,3	508,8	9,98	11,49	11,07
21.	Kalimantan Tengah	45,3	154,6	200,0	5,81	10,20	8,71
22.	Kalimantan Selatan	81,1	137,8	218,9	5,79	6,97	6,48
23.	Kalimantan Timur	110,4	176,1	286,4	5,89	15,47	9,51
24.	Sulawesi Utara	72,7	150,9	223,5	7,56	12,04	10,10
25.	Sulawesi Tengah	60,9	463,8	524,7	11,47	23,22	20,75
26.	Sulawesi Selatan	150,8	880,9	1.031,7	6,05	16,79	13,34
27.	Sulawesi Tenggara	27,2	408,7	435,9	5,29	23,78	19,53
28.	Gorontalo	27,5	194,1	221,6	9,87	31,72	24,88
29.	Sulawesi Barat	48,3	122,8	171,1	14,14	18,03	16,73
30.	Maluku	44,7	346,7	391,3	12,97	35,56	29,66
31.	Maluku Utara	9,0	96,0	105,1	3,27	14,67	11,28
32.	Papua Barat	9,5	237,0	246,5	5,93	43,74	35,12
33.	Papua	31,6	701,5	733,1	7,02	45,96	37,08
INDONESIA		12.768,40	22 194,8	34 963,3	11,65	18,93	15,42

Sumber: Susenas Panel Modul Konsumsi Maret 2008

**REALISASI KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH)
TAHUN 2008**

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
				- Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI JAWA BARAT</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Bogor*)	450 m2	2.000,0	900.000	504 m2	2.315,0	1.166.500
	2 BPS Kab. Purwakarta**)	300 m2	1.500,0	450.000	300 m2	1.500,0	450.000
	3 BPS Kota Cirebon**)	300 m2	2.000,0	600.000	300 m2	2.000,0	600.000
	- Perluasan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Subang	70 m2	2.250,0	157.500	70 m2	2.141,0	149.883
	2 BPS Kab. Karawang***)	42 m2	2.000,0	84.000	0 m2	-	-
	3 BPS Kab. Sukabumi	25 m2	3.000,0	75.000	25 m2	2.980,0	74.500,0
	4 BPS Kab. Bandung****)	200 m2	2.000,0	400.000	200 m2	2.586,0	517.196,0
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	<u>PENGADAAN TANAH</u>						
531111	- Pengadaan tanah perkantoran						
	1 BPS Kota. Cirebon	1000 m2	675,0	675.000	1086 m2	675,0	675.000,0
	2 BPS Kab. Purwakarta	700 m2	1.500,0	1.050.000	1500 m2	676,0	1.014.000,0
531111	- Pembangunan tanah perumahan						
	1 BPS Kab. Indramayu	200 m2	400,0	80.000	235 m2	338,0	79.500,0
	3 BPS Kab. Kuningan	200 m2	450,0	90.000	199 m2	452,0	90.000,0
	4 BPS Kab. Bekasi	200 m2	500,0	100.000	200 m2	500,0	100.000,0
	6 BPS Kab. Cirebon	200 m2	500,0	100.000	238 m2	420,0	99.960,0

Catatan :

*)dana dari DIPA 900jt dan SKPA 270jt

**)dana dari SKPA BPS, baru selesai 50%, lanjut TA 2009

***)dana tidak terserap karena dana tidak cukup untuk perluasan

****)dana dari DIPA 400jt dan SKPA 117,196 jt

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
				- Kegiatan - Sub Kegiatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN</u>								
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG							
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR							
533111	- Pembangunan gedung kantor							
	1 BPS Kab. Oku Timur	300 m2	2.200,0	660.000	300 m2	2.191,0	657.407	
	- Revitalisasi gedung kantor							
	1 Pengurugan tanah gedung kantor	1 paket	75.000,0	75.000	1 paket	74.700,0	74.700	
	2 BPS Kab. Lahat	300 m2	3.500,0	1.050.000	300 m2	3.495,0	1.048.460	
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA							
533111	- Pembangunan rumah dinas							
	1 BPS Propinsi (1 unit 120 m2, 2 unit	260 m2	2.000,0	520.000	260 m2	2.000,0	520.000	
	2 BPS Kab. Muara Enim	70 m2	2.000,0	140.000	70 m2	1.977,0	138.386	
	3 BPS Kab. Banyu Asin	70 m2	2.000,0	140.000	70 m2	1.946,0	136.244	
	4 BPS Kab. Oku Selatan	70 m2	2.000,0	140.000	74 m2	1.888,0	139.700	
	5 BPS Kab. Ogan Ilir	70 m2	2.000,0	140.000	70 m2	1.982,0	138.771	
	6 BPS Kota Lubuklinggau	70 m2	2.000,0	140.000	80 m2	1.750,0	140.000	
0080	PENGADAAN TANAH							
0297	PENGADAAN TANAH							
531111	- Pengadaan tanah perumahan							
	1 BPS Propinsi (1 kav 300 m2, 2 kav	800 m2	600,0	480.000	890 m2	506,0	450.000	
	2 BPS Kab. Muara Enim	250 m2	250,0	62.500	300 m2	207,0	62.100	
	3 BPS Kab. Musi Banyu Asin	250 m2	300,0	75.000	450 m2	167,0	75.000	
	4 BPS Kab. Banyu Asin	250 m2	300,0	75.000	350 m2	213,0	74.375	
	5 BPS Kab. Oku Selatan	250 m2	300,0	75.000	450 m2	164,0	73.950	
	6 BPS Kab. Oku Timur	250 m2	250,0	62.500	450 m2	137,0	61.500	
	7 BPS Kab. Ogan Ilir	250 m2	300,0	75.000	287 m2	257,0	73.838	
	8 BPS Kota Prabumulih	250 m2	300,0	75.000	667 m2	98,0	65.265	
	9 BPS Kota Pagar Alam	250 m2	250,0	62.500	286 m2	219,0	62.500	
	10 BPS Kota Lubuklinggau	250 m2	300,0	75.000	286 m2	254,0	72.750	
531111	- Pengadaan tanah perumahan							
	1 BPS Kab. Oku	1.135 m2	400,0	454.000	1.135 m2	400,0	454.000	

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
				- Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Morowali	300 m2	2.200,0	660.000	200 m2	3.300,0	660.000
	- Perluasan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Buol	25 m2	2.350,0	58.750	38,5 m2	1.526,0	58.750
	2 BPS Kab. Donggala	25 m2	2.200,0	55.000	27 m2	2.037,0	55.000
<u>BPS PROVINSI MALUKU</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0163	<u>PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA</u>						
533111	- Pembangunan rumah dinas						
	1 BPS Kab. Maluku Tenggara Barat*)	70 m2	2.700,0	189.000	70 m2	2.698,6	188.900,3
	2 BPS Kab. Buru**)	70 m2	2.700,0	189.000	70 m2	2.664,8	186.534,0
<u>BPS PROVINSI DISTA YOGYAKARTA</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	- BPS Kab. Sleman	300 m2	3.000,0	900.000	412 m2	2.180,37	898.313,0
	- Perluasan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Bantul	135 m2	2.860,0	386.100	201 m2	1.849,77	371.804,0
0163	<u>PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA</u>						
533111	- Pembangunan rumah dinas						
	1 BPS Propinsi (3 unit @ 70 m2)	210 m2	2.171,0	455.910	210 m2	2.148,99	451.287,0

Catatan :

*) Ada SKPA senilai 99.000.000 utk pemb. rumah dinas BPS Kab. MTB dg jumlah realisasi 98.987.930

**) Ada SKPA senilai 99.000.000 utk pemb. rumah dinas BPS Kab. MTB dg jumlah realisasi 96.460.000

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per : - Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI KEP. BABEL</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Bangka Barat	300 m2	2.550,0	765.000	300 m2	2.344,07	703.221
	2 BPS Kab. Bangka Tengah	300 m2	2.540,0	762.000	300 m2	2.468,34	740.502
	3 BPS Kab. Bangka Selatan	300 m2	2.600,0	780.000	300 m2	2.527,42	758.226
	- Perluasan gedung kantor						
	1 BPS Propinsi	460 m2	3.750,0	1.725.000	460 m2	3.714,30	1.708.578
	2 BPS Kab. Bangka	80 m2	2.600,0	208.000	80 m2	2.598,14	207.851
0163	<u>PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA</u>						
533111	- Pembangunan rumah dinas						
	1 BPS Propinsi (2 unit @ 70m2)	140 m2	3.500,0	490.000	140 m2	3.416,60	478.324
	3 BPS Kab. Bangka Tengah	70 m2	3.500,0	245.000	70 m2	3.487,43	244.120
	5 BPS Kab. Belitung Timur	70 m2	3.500,0	245.000	70 m2	3.497,76	244.843
0080	PENGADAAN TANAH						
531111	- Pengadaan tanah perumahan						
	1 BPS Kab. Bangka Barat	250 m2	150,0	37.500	600 m2	62,50	37.500
	2 BPS Kab. Bangka Tengah*)	250 m2	150,0	37.500	50 m2	750,00	37.500
	3 BPS Kab. Bangka Selatan**)	250 m2	150,0	37.500	380 m2	98,68	37.498

Catatan :

*)Pemasangan pondasi pagar dan pengurukan tanah rumah dinas

**)Pengurukan dan perataan tanah gedung kantor

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
				- Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI KALIMANTAN BARAT</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Melawi	300 m2	2.600,0	780.000	300 m2	2.589,4	776.829
	2 BPS Kab. Sekadau	300 m2	2.500,0	750.000	300 m2	2.498,3	749.480
	3 BPS Kota Pontianak	300 m2	2.500,0	750.000	300 m2	2.480,1	744.025
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	<u>PENGADAAN TANAH</u>						
531111	- Pengadaan tanah perkantoran						
	1 BPS Kab. Malawi	1.000 m2	175,0	175.000	1.400 m2	125,0	175.000
	- Pengadaan tanah perumahan						
	1 BPS Kab. Kapuas Hulu	720 m2	75,0	54.000	720 m2	75,0	54.000
	2 BPS Kab. Bengkayang	180 m2	175,0	31.500	200 m2	157,5	31.500
	3 BPS Kab. Landak	180 m2	175,0	31.500	361 m2	85,0	30.685
	4 BPS Kab. Sekadau	180 m2	210,0	37.800	750 m2	84,0	63.000
<u>BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Bombana	250 m2	2.600,0	650.000	250 m2	2.590,8	647.700
	2 BPS Kab. Wakatobi	250 m2	2.900,0	725.000	266 m2	2.669,647	710.126,0
	3 BPS Kab. Konawe Selatan	250 m2	2.600,0	650.000	250 m2	2.583,412	645.853
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	<u>PENGADAAN TANAH</u>						
531111	- Pengadaan tanah perkantoran						
	1 BPS Kab. Konawe Selatan	1.000 m2	150,0	150.000	5.000 m2	30,0	150.000
	2 BPS Kab. Bombana	1.000 m2	150,0	150.000	1.540 m2	97,4	149.996
	3 BPS Kab. Wakatobi	1.000 m2	150,0	150.000	2.257 m2	65,971	148.962,0

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
				- Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI LAMPUNG</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kota Metro	300 m2	2.960,0	888.000	300 m2	1.413,28	423.984,50
	2 BPS Kab. Lampung Utara	300 m2	3.190,0	957.000	300 m2	2.313,61	694.082,00
	- Perluasan gedung kantor						
	1 BPS Propinsi	100 m2	2.346,0	234.600	200 m2	1.165,14	233.027,45
	2 BPS Kab. Lampung Tengah	50 m2	2.536,0	126.800	60 m2	1.930,00	115.800,00
	4 BPS Kab. Tanggamus	50 m2	2.420,0	121.000	60 m2	1.975,17	118.510,00
	6 BPS Kab. Tulang Bawang	50 m2	2.314,0	115.700	60 m2	1.886,67	113.200,00
	7 BPS Kab. Lampung Selatan	50 m2	2.411,0	120.550	60 m2	1.952,00	117.120,00
	8 BPS Kab. Lampung Barat	50 m2	2.237,0	111.850	60 m2	1.848,33	110.900,00
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA						
533111	- Pembangunan rumah dinas						
	1 BPS Propinsi	120 m2	2.150,0	258.000	190 m2	2.149,85	408.471,40
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	PENGADAAN TANAH						
531111	- Pengadaan tanah perkantoran						
	1 BPS Kota Metro	1.600 m2	400,0	640.000	1600 m2	383,45	613.515,00
	2 BPS Kab. Lampung Utara*)	1.200 m2	350,0	420.000	1000 m2	420,00	420.000,00
	3 BPS Kab. Lampung Timur**)	- m2	-	-	2600 m2	76,92	199.980,00

Catatan :

*) pemagaran kantor

**) berdasarkan revisi DIPA-2 perluasan gedung kantor BPS Kab. Lampung Timur dihapus

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
				- Kegiatan	- Sub Kegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>BPS PROVINSI MALUKU UTARA</u>								
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG							
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR							
533111	- Pembangunan gedung kantor							
	1 BPS Kab. Halmahera Utara	300 m2	3.000,0	900.000	323	m2	2.787,58	899.831
	2 BPS Kab. Halmahera Timur	300 m2	3.250,0	975.000	300	m2	3.115,33	934.600
	3 BPS Kab. Halmahera Tengah	300 m2	3.000,0	900.000	300	m2	2.987,68	896.305
	4 BPS Kab. Halmahera Selatan	300 m2	3.250,0	975.000	300	m2	3.240,97	972.290
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA							
533111	- Pembangunan rumah dinas							
	1 BPS Kab. Halmahera Selatan							
	- Rumah dinas kepala	70 m2	3.000,0	210.000	73	m2	2.756,30	201.210
	2 BPS Kab. Halmahera Tengah							
	- Rumah dinas kepala	70 m2	3.000,0	210.000	70	m2	2.991,27	209.389
	- Kasie/Kasubbag (2 unit	100 m2	3.000,0	300.000	100	m2	2.991,27	299.127
	3 BPS Kab. Halmahera Timur							
	- Rumah dinas kepala	70 m2	3.000,0	210.000	70	m2	2.937,43	205.620
	4 BPS Kota Tidore							
	- Rumah dinas kepala	70 m2	3.000,0	210.000	70	m2	2.940,71	205.850
0080	PENGADAAN TANAH							
0297	PENGADAAN TANAH							
531111	- Pengadaan tanah perkantoran							
	1 BPS Propinsi Maluku Utara*)	5.000 m2	69,0	345.000	5.000	m2	69,0	345.000
	2 BPS Kab. Halmahera Selatan*)	1.000 m2	70,0	70.000	1.200	m2	58,3	69.996
	3 BPS Kab. Halmahera Timur*)	1.000 m2	70,0	70.000	1.050	m2	63,3	66.497
	4 BPS Kab. Halmahera Tengah**)	1.000 m2	-	-	2.000	m2		
531111	- Pengadaan tanah perumahan							
	1 BPS Propinsi Maluku Utara*)	5.000 m2	69,0	345.000	6.000	m2	57,5	345.000
	2 BPS Kab. Halmahera Barat*)	1.500 m2	70,0	105.000	1.600	m2	65,5	104.800
	3 BPS Kab. Halmahera Selatan*)	1.500 m2	70,0	105.000	1.500	m2	701,0	1.051.500
	4 BPS Kab. Halmahera Timur*)	1.500 m2	70,0	105.000	1.560	m2	63,9	99.750
	5 BPS Kab. Halmahera Tengah*)	1.500 m2	70,0	105.000	4.000	m2	26,3	105.000
	6 BPS Kota Ternate*)	1.500 m2	120,0	180.000	1.200	m2	150,0	180.000
0301	PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH							
531114	- Pembuatan surat tanah							
	1 BPS Kab. Halmahera Barat	1 ket	9.900,0	9.900	1 paket		9.890,0	9.890
	2 BPS Kab. Halmahera Tengah	1 ket	10.000,0	10.000	1 paket		10.000,0	10.000

Catatan :

*)termasuk sertifikat

**)hibah dari pemda

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per : - Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI PAPUA BARAT</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Provinsi Papua Barat	600 m2	5.260,0	3.156.000	600 m2	5.219,9	3.131.959,8
	2 BPS Kota Sorong	150 m2	3.000,0	450.000	150 m2	2.973,3	446.000,0
	3 BPS Kab. Sorong Selatan	150 m2	3.200,0	480.000	150 m2	4.795,3	719.300,0
	4 BPS Kab. Teluk Bintuni	150 m2	3.600,0	540.000	150 m2	5.481,0	822.152,0
	5 BPS Kab. Teluk Wondama	150 m2	3.600,0	540.000	150 m2	4.783,1	717.472,1
	6 BPS Kab. Kaimana	150 m2	3.500,0	525.000	150 m2	3.500,0	524.997,0
	7 BPS Kab. Raja Ampat	150 m2	3.600,0	540.000	150 m2	3.534,9	530.240,0
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA						
533111	- Pembangunan rumah dinas						
	4 BPS Kab. Teluk Wondama	70 m2	3.600,0	252.000	70 m2	3.599,3	251.948,0
	6 BPS Kab. Raja Ampat	70 m2	3.600,0	252.000	70 m2	3.597,3	251.810,0
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	PENGADAAN TANAH						
531111	- Pengadaan tanah perkantoran						
	1 BPS Kota Sorong	1.000 m2	1.500,0	1.500.000	722 m2	2.075,0	1.498.150,0
	2 BPS Kab. Sorong Selatan	1.000 m2	200,0	200.000	1.000 m2	199,7	199.700,0
	3 BPS Kab. Teluk Bintuni	1.000 m2	250,0	250.000	1.000 m2	250,0	250.000,0
	4 BPS Kab. Teluk Wondama	1.000 m2	200,0	200.000	1.000 m2	200,0	200.000,0
	5 BPS Kab. Kaimana	1.000 m2	250,0	250.000	1.000 m2	249,8	249.812,0
	6 BPS Kab. Raja Ampat	1.000 m2	200,0	200.000	1.000 m2	199,7	199.650,0

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
				- Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Kupang	200 m2	2.500,0	500.000	200 m2	2.500,0	500.000
	- Perluasan gedung kantor						
	1 BPS Propinsi	100 m2	2.261,2	226.120	124 m2	1.725,8	213.999
0163	<u>PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA</u>						
533111	- Pembangunan rumah dinas						
	1 BPS Kab. Belu	70 m2	2.150,0	150.500	70 m2	2.095,8	146.706
	2 BPS Kab. Flores Timur	70 m2	2.150,0	150.500	70 m2	2.150,0	150.500
	3 BPS Kab. Kupang	70 m2	2.150,0	150.500	70 m2	2.150,0	150.500
	4 BPS Kab. Ngada *)	70 m2	2.150,0	150.500	80 m2	1.881,25	150.500
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	<u>PENGADAAN TANAH</u>						
531111	- Pengadaan tanah perumahan						
	1 BPS Kab. Belu	250 m2	200,0	50.000	400 m2	125,0	50.000
	2 BPS Kab. Ende**)	250 m2	200,0	50.000	0 m2	-	-
	3 BPS Kab. Sikka	250 m2	200,0	50.000	303 m2	165,0	49.995
	4 BPS Kab. Flores Timur	250 m2	200,0	50.000	400 m2	125,0	50.000
	5 BPS Kab. Kupang	250 m2	200,0	50.000	250 m2	200,0	50.000
	6 BPS Kab. Ngada ***)	250 m2	200,0	50.000	250 m2	200,0	50.000

Catatan :

*) dari anggaran yang tersedia masih ada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan

**) tidak jadi sehingga uang dikembalikan ke negara

***) sertifikat tanah belum ada karena masih tergabung dengan pemilik

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per : - Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI SULAWESI BARAT</u>							
0079	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG</u>						
0162	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Mamasa	300 m2	3.000,0	900.000	300 m2	2.998,97	899.692,0
	2 BPS Kab. Mamuju Utara	300 m2	2.750,0	825.000	300 m2	2.729,44	818.831,0
	3 BPS Propinsi	600 m2	3.600,0	2.160.000	600 m2	3.341,87	2.005.124,5
0080	<u>PENGADAAN TANAH</u>						
0297	<u>PENGADAAN TANAH</u>						
531111	- Pengadaan tanah perkantoran						
	1 BPS Kab. Mamasa*)	1.000 m2	250	250.000	- m2	-	-
	2 BPS Kab. Mamuju Utara	2.000 m2	125	250.000	2.000 m2	125,0	250.000,0
SKPA	<u>Tanah Rumah Dinas **)</u>						
	1. BPS Kab. Mamuju	300 m2	300	90.000	325 m2	275,0	89.375,0
	2. BPS Kab. Mamuju Utara	300 m2	300	90.000	493 m2	182,56	90.000,0
<u>BPS PROVINSI BANTEN</u>							
0079	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG</u>						
0162	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Pandeglang	300 m2	1.861,4	558.429	300 m2	1.861,43	558.428,5
	- Perluasan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Serang	50 m2	2.200,0	110.000	50 m2	2.179,50	108.975,0
	2 BPS Kota Tangerang	50 m2	2.200,0	110.000	50 m2	2.199,01	109.950,7
0080	<u>PENGADAAN TANAH</u>						
0297	<u>PENGADAAN TANAH</u>						
531111	- Pengadaan tanah perkantoran						
	1 BPS Kab. Pandeglang	1.720 m2	395,0	679.400	1.720 m2	395,0	679.400,0
531115	- Pengurukan dan Pematangan Lahan						
	1 BPS Kab. Pandeglang	1 paket	49.300,0	49.300	1 paket	49.300,0	49.300,0

Catatan:

*) Tanah kantor Kab. Mamasa sudah direalisasikan pada Tahun 2007 dari kelebihan anggaran tanah Provinsi

**) SKPA :

1. BPS Kab. Mamuju : 1030/WPB/II/KP.02/2008 Korongana
2. BPS Kab. Mamuju Utara : 1030/WPB/II/KP.02/2008 Jl. Andi Depu-Pasangkayu

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per : - Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI JAWA TENGAH</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Temanggung	300 m2	2.000,0	600.000	312 m2	1.892,6	590.487,0
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	PENGADAAN TANAH						
531111	- Pengadaan tanah perkantoran						
	1 BPS Kab. Pati	1.000 m2	450,0	450.000	920 m2	489,1	450.000,0
	2 BPS Kab. Sragen	800 m2	600,0	480.000	800 m2	600,0	480.000,0
	3 BPS Kab. Temanggung	1.085 m2	750,0	813.750	1.087 m2	700,0	760.900,0
	4 BPS Kota. Cilacap	1.000 m2	450,0	450.000	1.050 m2	427,9	449.302,5
	5 BPS Kab. Purbalingga	1.000 m2	480,0	480.000	1.018 m2	471,4	479.900,0
	6 BPS Kab. Sukoharjo	800 m2	500,0	400.000	1.026 m2	389,8	399.975,0
	7 BPS Kab. Boyolali	1.000 m2	500,0	500.000	1.000 m2	500,0	500.000,0
531111	- Pembangunan tanah perumahan						
	1 BPS Kota Surakarta	250 m2	500,0	125.000	250 m2	500,0	125.000,0
<u>BPS PROPINSI JAMBI</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Bungo	90 m2	1.888,0	169.920	90 m2	1.888,0	169.920
	2 BPS Kab. Merangin	80 m2	1.885,0	150.800	80 m2	1.885,0	150.800
	3 BPS Kab. Muaro Jambi	70 m2	1.810,0	126.700	70 m2	1.810,0	126.700
	4 BPS Kab. Tanjung Jabung Timur	90 m2	2.000,0	180.000	90 m2	2.000,0	180.000
	5 BPS Kab. Sarolangun	60 m2	1.780,0	106.800	60 m2	1.780,0	106.800
	6 BPS Kab. Tebo	60 m2	1.965,8	117.948	60 m2	1.965,8	117.948

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per : - Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI JAWA TIMUR</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Propinsi	2.300 m2	1.622,097	3.730.822	2.300 m2	1.622,097	3.730.822
	2 BPS Kota Batu	300 m2	2.150,0	645.000	300 m2	2.084,3	625.287,9
	3 BPS Kab. Trenggalek	300 m2	1.800,0	540.000	300 m2	1.794,7	538.399,0
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	<u>PENGADAAN TANAH</u>						
531111	- Pengadaan tanah perkantoran						
	1 BPS Kota Batu	1.000 m2	700,0	700.000	1.000 m2	691,6	691.560,0
	2 BPS Kota Surabaya*)	1.000 m2	2.700,0	2.700.000	1.223 m2	2.163,5	2.645.947,5
	3 BPS Kab. Gresik	1.000 m2	1.100,0	1.100.000	1.500 m2	715,0	1.072.500,0
<u>BPS PROVINSI BALI</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0163	<u>PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA</u>						
533111	- Pembangunan rumah dinas						
	1 BPS Kota Denpasar	70 m2	2.800,0	196.000	70 m2	2.784,0	194.911,0
	2 BPS Propinsi (2 unit @ 70 m2)	140 m2	2.800,0	392.000	140 m2	2.699,0	377.859,0
	3 Revitalisasi BPS Kab. Karangasem	70 m2	1.999,0	139.930	75 m2	1.190,0	149.250,0
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	<u>PENGADAAN TANAH</u>						
531111	- Pengadaan tanah perumahan						
	1 BPS Kota Denpasar	200 m2	1.000,0	200.000	200 m2	998,0	199.600,0
	2 BPS Propinsi (2 Kavling)	400 m2	1.000,0	400.000	400 m2	998,0	399.200,0

Catatan :

*) berdasar SKPA

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
				- Kegiatan	- Sub Kegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN</u>								
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG							
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA							
533111	- Pembangunan rumah negara							
1	BPS Kab. Bulukumba	70 m2	2.800,0	196.000	70 m2	2.800,0	196.000,0	
2	BPS Kab. Bantaeng	70 m2	2.840,0	198.800	70 m2	2.840,0	198.800,0	
3	BPS Kab. Jeneponto	70 m2	2.800,0	196.000	70 m2	2.800,0	196.000,0	
4	BPS Kab. Takalar	70 m2	2.810,0	196.700	70 m2	2.800,0	196.000,0	
5	BPS Kab. Pangkep	70 m2	2.880,0	201.600	70 m2	2.880,0	201.600,0	
6	BPS Kab. Barru	70 m2	2.890,0	202.300	70 m2	2.890,0	202.300,0	
7	BPS Kab. Wajo	70 m2	3.040,0	212.800	70 m2	3.040,0	212.800,0	
8	BPS Kab. Luwu	70 m2	2.980,0	208.600	70 m2	2.933,4	205.335,4	
9	BPS Kab. Luwu Timur	70 m2	2.810,0	196.700	70 m2	2.794,2	195.591,0	
10	BPS Kab. Luwu Utara	70 m2	3.450,0	241.500	70 m2	2.801,1	196.080,0	
11	BPS Kota Makassar	70 m2	3.090,0	216.300	70 m2	3.090,0	216.300,0	
12	BPS Kota Palopo	70 m2	2.810,0	196.700	70 m2	2.810,0	196.700,0	
0080	PENGADAAN TANAH							
0297	PENGADAAN TANAH							
531111	- Pengadaan tanah perumahan							
1	BPS Kab. Bulukumba	300 m2	250,0	75.000	300 m2	250,0	75.000,0	
2	BPS Kab. Bantaeng	300 m2	300,0	90.000	320 m2	281,3	90.000,0	
3	BPS Kab. Jeneponto	300 m2	300,0	90.000	350 m2	257,1	90.000,0	
4	BPS Kab. Takalar	300 m2	275,0	82.500	360 m2	227,0	81.720,0	
6	BPS Kab. Pangkep	300 m2	300,0	90.000	339 m2	265,0	89.835,0	
7	BPS Kab. Barru	300 m2	250,0	75.000	300 m2	250,0	75.000,0	
8	BPS Kab. Wajo	300 m2	300,0	90.000	450 m2	200,0	90.000,0	
11	BPS Kab. Luwu	300 m2	250,0	75.000	300 m2	249,8	74.925,0	
12	BPS Kab. Luwu Timur	300 m2	275,0	82.500	660 m2	125,0	82.500,0	
13	BPS Kab. Luwu Utara	300 m2	275,0	82.500	720 m2	111,1	80.000,0	
14	BPS Kota Makassar	300 m2	500,0	150.000	300 m2	500,0	150.000,0	
15	BPS Kota Palopo	300 m2	400,0	120.000	480 m2	245,0	117.600,0	

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per : - Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI SUMATERA BARAT</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Pasaman Barat	300 m2	2.500,0	750.000	300 m2	2.496,0	748.800,0
	2 BPS Kab. Dairi	300 m2	2.500,0	750.000	300 m2	2.428,0	728.430,0
	3 BPS Kota Pariaman	300 m2	2.500,0	750.000	300 m2	2.300,0	689.850,0
	4 BPS Kab. Solok Selatan	300 m2	2.500,0	750.000	300 m2	2.500,0	749.860,0
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	<u>PENGADAAN TANAH</u>						
531111	- Pengadaan tanah perkantrab						
	1 BPS Kab. Solok Selatan	1.000 m2	350,0	350.000	2.000 m2	175,0	350.000,0
	2 BPS Kota Pariaman	800 m2	450,0	360.000	800 m2	450,0	360.000,0
<u>BPS PROPINSI KALIMANTAN SELATAN</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	<u>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Tapin	300 m2	2.799,0	839.700	300 m2	2.771,2	831.360,0
	2 BPS Kab. Kota Baru	300 m2	2.632,0	789.600	300 m2	2.312,9	693.870,0
	3 Pembangunan gedung Hulu Sungai Utara	150 m2	3.600,0	540.000	150 m2	3.203,3	480.500,0
	4 Pemasangan Listrik Kab. Balangan	1 ket	70.000,0	70.000	1 paket	70.000,0	70.000,0
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	<u>PENGADAAN TANAH</u>						
531111	- Pengadaan tanah perkantrab						
	1 BPS Kab. Hulu Sungai Utara	800 m2	500,0	400.000	814 m2	490,0	398.860,0

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6+7)
				- Kegiatan - Sub Kegiatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</u>								
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG							
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR							
533111	- Pembangunan gedung kantor							
	1 BPS Kab. Kutai Timur	200 m2	4.000,0	800.000	200 m2	4.000,0	800.000	
	2 BPS Kab. Penajam Pasir Utara	200 m2	3.000,0	600.000	200 m2	3.000,0	600.000	
	- Perluasan gedung kantor							
	3 BPS Kab. Kutai Kartanegara	35 m2	2.200,0	77.000	35 m2	2.200,0	77.000	
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA							
533111	- Pembangunan rumah dinas							
	1 BPS Kab. Kutai Barat	70 m2	3.000,0	210.000	70 m2	3.000,0	210.000	
	2 BPS Kab. Kutai Timur*)	70 m2	4.000,0	280.000	- m2	-	-	
	3 BPS Kab. Malinau	70 m2	3.000,0	210.000	70 m2	3.000,0	210.000	
	4 BPS Kab. Penajam Pasir Utara*)	70 m2	3.000,0	210.000	- m2	-	-	
	5 BPS Kota Bontang (Tahap II)	33 m2	2.939,4	97.000	33 m2	2.939,4	97.000	
	6 BPS Kota Tarakan (Tahap II)	33 m2	2.984,7	98.495	33 m2	2.984,7	98.495	
0080	PENGADAAN TANAH							
0297	PENGADAAN TANAH							
531111	- Pengadaan tanah perumahan							
	1 BPS Kab. Kutai Barat	250 m2	250,0	62.500	250 m2	250,0	62.500	

Catatan :

*) uang dikembalikan ke kas negara

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per : - Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROVINSI PAPUA</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	1 BPS Kab. Paniai	250 m2	4.100,0	1.025.000	250 m2	4.085,8	1.021.450,0
	2 BPS Sarmi	250 m2	4.000,0	1.000.000	250 m2	3.961,5	990.370,0
	3 BPS Boven Digoel	250 m2	5.000,0	1.250.000	250 m2	4.982,4	1.245.592,0
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA						
533111	- Pembangunan rumah dinas						
	1 BPS Kab. Puncak Jaya	70 m2	4.600,0	322.000	70 m2	4.575,1	320.260,0
	2 BPS Propinsi (2 unit @ 70 m2) *)	70 m2	4.285,7	299.999	140 m2	5.086,4	712.096,0
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	PENGADAAN TANAH						
531111	- Pengadaan tanah perkantoran						
	1 BPS Kab. Boven Digoel	1000 m2	250,0	250.000	1000 m2	250,0	250.000,0
	2 BPS Kab. Asmat **)	1000 m2	250,0	250.000	0 m2	-	-
	3 BPS Propinsi ***)	600 m2	833,3	499.980	1350 m2	814,8	1.100.000,0

Catatan:

*) Dana setelah direvisi tersedia untuk 2 unit rumah negara

**) Tanah tidak layak karena perkantoran di daerah Asmat di atas rawa

***) Tambahan dana SKPA sebesar Rp. 600.000.000

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
				- Kegiatan	- Sub Kegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROPINSI SUMATERA UTARA</u>								
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG							
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR							
533111	- Pembangunan gedung kantor							
	1 BPS Kab. Pakpak Bharat	250 m2	2.438,0	609.500		250 m2	2.432,8	608.205,0
	2 BPS Kab. Samosir	250 m2	2.718,0	679.500		250 m2	2.449,8	612.444,0
	3 BPS Kab. Serdang Begadai	250 m2	2.371,0	592.750		250 m2	2.334,0	583.500,0
	4 BPS Kab. Humbang Hasundutan	250 m2	2.677,0	669.250		250 m2	2.578,0	644.500,0
	5 BPS Kab. Nias Selatan	150 m2	3.014,0	452.100		250 m2	1.676,6	419.138,0
0080	PENGADAAN TANAH							
0297	PENGADAAN TANAH							
531111	- Pengadaan tanah perkantoran							
	1 BPS Kab. Nias Selatan	700 m2	500,0	350.000		1.232 m2	280,0	344.960,0

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per : - Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

BPS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

0079 PEMBANGUNAN GEDUNG

0162 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

533111 - Pembangunan gedung kantor

1 BPS Kab. Pulang Pisau	300 m2	2.000,0	600.000	300 m2	2.000,0	600.000
2 BPS Kab. Katingan	300 m2	2.000,0	600.000	300 m2	2.000,0	600.000
3 BPS Kab. Lamandau	300 m2	2.000,0	600.000	300 m2	2.000,0	600.000
4 BPS Kab. Seruyan	300 m2	2.000,0	600.000	300 m2	2.000,0	600.000
5 BPS Kab. Barito Timur	300 m2	2.000,0	600.000	300 m2	2.000,0	600.000
6 BPS Kab. Murung Raya	300 m2	2.000,0	600.000	300 m2	2.000,0	600.000

0163 PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA

533111 - Pembangunan rumah dinas

1 BPS Kab. Gunungmas	70 m2	2.000,0	140.000	70 m2	2.000,0	140.000
2 BPS Kab. Barito Timur	70 m2	2.000,0	140.000	70 m2	2.000,0	140.000
3 BPS Kab. Pulang Pisau	70 m2	2.000,0	140.000	70 m2	2.000,0	140.000
4 BPS Kota Palangkaraya	70 m2	2.142,9	150.003	70 m2	2.142,9	150.000
5 BPS Propinsi *)	70 m2	2.500,0	175.000	- m2	-	-

0080 PENGADAAN TANAH

0297 PENGADAAN TANAH

531111 - Pengadaan tanah perkantoran

1 BPS Kab. Pulang Pisau	1.250 m2	50,0	62.500	1.250 m2	50,0	62.500,0
2 BPS Kab. Seruyan **)	1.250 m2	50,0	62.500	- m2	-	-

- Pengadaan tanah perumahan

1 BPS Propinsi *)	780 m2	100,0	78.000	- m2	-	-
-------------------	--------	-------	--------	------	---	---

Catatan :

*) ditunda

**) direvisi menjadi tambahan biaya genset BPS Provinsi (0089.0273)

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per : - Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROPINSI DKI JAKARTA</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	- BPS Kota Administrasi Kepulauan Seribu	300 m2	3.000,0	900.000	- m2	*)	
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA						
533111	- Pembangunan rumah dinas						
	- BPS Kota Administrasi Kepulauan Seribu	210 m2	2.642,9	555.009	- m2	*)	
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	PENGADAAN TANAH						
531111	- Pengadaan tanah perkantoran						
	- BPS Kota Administrasi Kepulauan Seribu	750 m2	300,0	225.000	- m2	*)	
531111	- Pengadaan tanah rumah dinas						
	1 BPS Kota Administrasi Kepulauan Seribu **)	400 m2	300,0	120.000	2 kav	57.500,0	115.000,0
	2 BPS Kota Jakarta Timur **)	250 m2	1.800,0	450.000	2 kav	207.500,0	415.000,0

Catatan:

*) berdasarkan hasil revisi tgl. 3 Desember 2008 sesuai POK

**) Realisasi pengadaan sesuai ketersediaan tanah berupa kavling:

- 1 kavling di Kep. Seribu=180m²

- 1 kavling di Permata Timur=112m²

Total luas pengadaan tanah adalah 584m²

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)							
KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per : - Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROPINSI GORONTALO</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
1	BPS Kab. Bone Bolango *)	250 m2	3.171,6	792.900	250 m2	3.118,8	779.697,4
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA						
533111	- Revitalisasi rumah dinas						
1	BPS Kab. Gorontalo	70 m2	1.850,0	129.500	70 m2	1.772,3	124.061,5

Catatan:

*) Tambahan dana SKPA sebesar Rp. 311.650.000

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
				- Kegiatan	- Sub Kegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>BPS PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM</u>								
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG							
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR							
533111	- Pembangunan gedung kantor							
	1 BPS Kab. Aceh Utara	300 m2	3.200,0	960.000		m2	*)	
	2 BPS Kab. Gayo Lues	300 m2	3.000,0	900.000		m2	*)	
	3 BPS Kab. Aceh Barat Daya	300 m2	3.200,0	960.000		m2	*)	
	- Perluasan gedung kantor							
	1 BPS Propinsi	100 m2	4.800,0	480.000		m2	*)	
0080	PENGADAAN TANAH							
0297	PENGADAAN TANAH							
531111	- Pengadaan tanah perkantoran							
	1 BPS Propinsi	1000 m2	2.250,0	2.250.000		m2	*)	
	2 BPS Kab. Aceh Utara	1000 m2	500,0	500.000		m2	*)	
	3 BPS Kab. Gayo Lues	1000 m2	275,0	275.000		m2	*)	
	4 BPS Kab. Pidie	700 m2	700,0	490.000		m2	*)	
	5 BPS Kab. Nagan Raya	1000 m2	300,0	300.000		m2	*)	
	6 BPS Kab. Aceh Tamiang	1000 m2	300,0	300.000		m2	*)	
	7 BPS Kab. Bener Meriah	800 m2	300,0	240.000		m2	*)	
	8 BPS Kab. Aceh Jaya	800 m2	300,0	240.000		m2	*)	

Catatan:

*) tidak ada informasi dari daerah

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
				- Kegiatan - Sub Kegiatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>BPS PROPINSI SULAWESI UTARA</u>								
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG							
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR							
533111	- Pembangunan gedung kantor							
	1 BPS Kab. Minahasa Selatan	250 m2	3.250,0	812.500	m2		*)	
	2 BPS Kab. Minahasa Utara	250 m2	3.000,0	750.000	m2		*)	
	3 BPS Kota Tomohon	250 m2	3.000,0	750.000	m2		*)	
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA							
533111	- Pembangunan rumah dinas							
	1 BPS Kab. Kepulauan Talaud	70 m2	2.500,0	175.000	m2		*)	
	2 BPS Kota Tomohon	70 m2	2.250,0	157.500	m2		*)	
	3 BPS Kab. Minahasa Utara	70 m2	2.250,0	157.500	m2		*)	
	4 BPS Kab. Minahasa Selatan	70 m2	2.750,0	192.500	m2		*)	
	5 BPS Kota Manado	70 m2	2.250,0	157.500	m2		*)	
0080	PENGADAAN TANAH							
0297	PENGADAAN TANAH							
531111	- Pengadaan tanah perkantoran							
	1 BPS Kota Tomohon	1000 m2	200,0	200.000	m2		*)	
	- Pengadaan tanah perumahan							
	1 BPS Kota Manado	300 m2	525,0	157.500	m2		*)	
	2 BPS Kab. Minahasa Utara	300 m2	150,0	45.000	m2		*)	
	3 BPS Kota Tomohon	300 m2	200,0	60.000	m2		*)	

Catatan :

*) tidak ada informasi dari daerah

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
				- Kegiatan	- Sub Kegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>BPS PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT</u>								
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG							
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR							
533111	- Pembangunan gedung kantor							
	1 BPS Kab. Bima	250 m2	2.760,0	690.000		m2	*)	
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA							
533111	- Pembangunan rumah dinas							
	1 BPS Kab. Sumbawa Barat	70 m2	2.500,0	175.000		m2	*)	
	2 BPS Kab. Bima	70 m2	2.500,0	175.000		m2	*)	
0080	PENGADAAN TANAH							
0297	PENGADAAN TANAH							
531111	- Pengadaan tanah perkantoran							
	1 BPS Kab. Bima	1000 m2	300,0	300.000		m2	*)	
	- Pengadaan tanah perumahan							
	1 BPS Kab. Bima	400 m2	300,0	120.000		m2	*)	

Catatan:

*) tidak ada informasi dari daerah

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per : - Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROPINSI BENGKULU</u>							
0079 PEMBANGUNAN GEDUNG							
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR						
533111	- Pembangunan gedung kantor						
	BPS Kab. Muko-muko	250	m2	2.400,0	600.000	m2	*)
	BPS Kab. Lebong	250	m2	2.400,0	600.000	m2	*)
	BPS Kab. Kepahyang	250	m2	2.300,0	575.000	m2	*)
	BPS Kab. Seluma	250	m2	2.300,0	575.000	m2	*)
	- Pembangunan rumah jaga/gudang						
	BPS Propinsi	50	m2	1.880,0	94.000	m2	*)
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA						
533111	- Pembangunan rumah dinas						
	BPS Kab. Muko-muko	70	m2	2.000,0	140.000	m2	*)
	BPS Kab. Lebong	70	m2	2.000,0	140.000	m2	*)
	BPS Kab. Kepahyang	70	m2	2.000,0	140.000	m2	*)
	BPS Kab. Kaur	70	m2	2.000,0	140.000	m2	*)
	BPS Kab. Seluma	70	m2	2.000,0	140.000	m2	*)
	- Revitalisasi rumah dinas (pasca gempa)						
	BPS Kab. Bengkulu Utara (2 unit type 70 & 50)	120	m2	1.500,0	180.000	m2	*)
0080 PENGADAAN TANAH							
0301	PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH	3	paket			paket	*)
535111	- Pembuatan surat tanah rumah dinas BPS Propinsi						
	Jl. Melur (Rumah KBPS)	1	paket	5.000,0	5.000	paket	*)
	Jl. Soekarno Hatta	1	paket	5.000,0	5.000	paket	*)
	Jl. Mahoni	1	paket	5.000,0	5.000	paket	*)

Catatan :

*) tidak ada informasi dari daerah

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah per :		Realisasi Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6+7)
				- Kegiatan - Sub Kegiatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROPINSI RIAU</u>								
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG							
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR							
533111	- Pembangunan gedung kantor							
	1 BPS Kab. Siak	300 m2	3.000,0	900.000			*)	
	2 BPS Kab. Rokan Hulu	300 m2	3.000,0	900.000			*)	
	3 BPS Kota Dumai	300 m2	3.500,0	1.050.000			*)	
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA							
533111	- Pembangunan rumah dinas						*)	
	1 BPS Kab. Palalawan	70 m2	3.000,0	210.000			*)	
	2 BPS Kab. Siak	70 m2	3.000,0	210.000			*)	
	3 BPS Kab. Indragiri Hilir	70 m2	3.000,0	210.000			*)	
	4 BPS Kab. Kuantan Singingi	70 m2	3.000,0	210.000			*)	
	- Revitalisasi rumah dinas							
	1 BPS Kota Dumai	70 m2	3.900,0	273.000			*)	
	2 BPS Propinsi	70 m2	3.500,0	245.000			*)	
0080	PENGADAAN TANAH							
0297	PENGADAAN TANAH							
531111	- Pengadaan tanah perkantoran							
	1 BPS Kota Pekanbaru	1000 m2	1.000,0	1.000.000			*)	
	2 BPS Kab. Siak							
	- Pengadaan tanah perumahan							
	1 BPS Kab. Palalawan	300 m2	200,0	60.000			*)	
	2 BPS Kab. Siak	300 m2	300,0	90.000			*)	
	3 BPS Propinsi	1500 m2	450,0	675.000			*)	
	4 BPS Kab. Kuantan Singingi	300 m2	200,0	60.000			*)	

Catatan :

*) tidak ada informasi dari daerah

**RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PSPAN-BPS
(PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENGADAAN TANAH) TAHUN 2008**

(ribuan rupiah)

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Volume	Biaya Satuan	Jumlah - Kegiatan - Sub Kegiatan	Realisa si Volume	Realisasi Biaya Satuan	Jumlah (6*7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>BPS PROPINSI KEP. RIAU</u>							
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG						
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR						
533111	Pembangunan gedung kantor						
	BPS Kota Tanjungpinang	300	m2	2.500,0	750.000	m2	*)
	BPS Kab. Natuna	300	m2	2.500,0	750.000	m2	*)
	BPS Kab. Lingga	300	m2	2.500,0	750.000	m2	*)
0163	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA						
533111	Pembangunan rumah dinas						
	BPS Kab. Karimun	70	m2	2.500,0	175.000	m2	*)
0080	PENGADAAN TANAH						
0297	PENGADAAN TANAH						
531111	Pengadaan tanah perkantoran						
	BPS Kota Tanjungpinang	1000	m2	250,0	250.000	m2	*)
	BPS Kab. Natuna (pematangan tanah dan pengurusan surat-suratnya)	1	paket	65.000,0	65.000	paket	*)
	- Pengadaan tanah perumahan						
	BPS Kab. Karimun	250	m2	250	62.500	m2	*)
	BPS Kab. Bintan	250	m2	250	62.500	m2	*)

Catatan :

*) tidak ada informasi dari daerah

**Pelaksanaan Program,
Kebijakan dan Realisasi
APBN 2004 - 2005**

<http://www.bps.go.id>

**Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) Tahun
Anggaran 2010**

<http://www.bps.go.id>